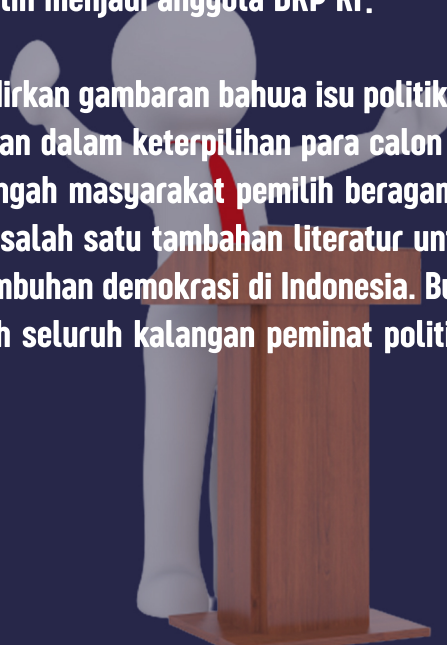


# MEMAHAMI SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI INDONESIA: BELAJAR DEMOKRASI DARI JAWA BARAT

Buku ini mengungkap Anggota Legislatif yang beragama Kristen yang terpilih di daerah pemilihan di Jawa Barat. Di mana penduduk Jawa Barat memiliki karakteristik menganut Islam yang kuat. Dengan menjadikan anggota legislatif dari PDI Perjuangan, dan Golkar sebagai objek penelitian, pembahasan dalam buku ini memperlihatkan pentingnya strategi dan persuasi untuk mengambil hati masyarakat sehingga mereka bisa terpilih menjadi anggota DPRD RI.

Buku ini menghadirkan gambaran bahwa isu politik identitas tidak berpengaruh signifikan dalam keterpilihan para calon legislatif beragama minoritas dari tengah masyarakat pemilih beragama mayoritas Islam. Buku ini menjadi salah satu tambahan literatur untuk melihat praktek politik dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh seluruh kalangan peminat politik dan demokrasi di Indonesia.



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Cawang  
Jakarta Timur 13630



Dr. Osbin Samosir, M.Si.



# SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI INDONESIA

## BELAJAR DEMOKRASI DARI JAWA BARAT

Pengantar:

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.  
(Rektor Universitas Kristen Indonesia)

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr., Osbin Samosir, M.Si.

**SISTEM PERWAKILAN POLITIK  
DI INDONESIA: Belajar Demokrasi dari Jawa Barat**

**PENGANTAR:**

Oleh: Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.  
(Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

Jakarta, September 2022

**SISTEM PERWAKILAN POLITIK  
DI INDONESIA: Belajar Demokrasi dari Jawa Barat**

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

Desain Cover :  
**Teten Jamaludin**

Credit Foto:  
Credit foto sampul depan: [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

Tata Letak :  
**Teten Jamaludin**

Proofreader :  
**Teten Jamaludin**

Ukuran :  
**iii, 271, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-238-012008**

Cetakan Pertama :  
**September 2022**  
Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi di luar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by UKI Press**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit: UKI Press Anggota APPTI  
Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630 Telp. (021) 8092425



## SALAM DARI PENULIS

Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini berjudul: “Sistem Perwakilan Politik di Indonesia: Belajar Demokrasi dari Jawa Barat”. Bagi kami buku ini penting karena menyoroti Indonesia yang sedang membangun demokrasi dengan susah payah dan jatuh bangun dengan musuh terbesarnya yakni hadirnya isu-isu politik identitas dalam Pemilu. Kentalnya isu identitas itu sangat nyata dalam dua kali Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019. Kedua masa Pilpres tersebut seakan menggoreskan luka batin yang sangat mendalam di kalangan masyarakat Indonesia yang terbelah tajam oleh isu-isu politik identitas hingga saat ini.

Buku ini setidaknya membantu memberi alternatif bahwa ternyata isu-isu identitas tidak selalu menjadi faktor-faktor yang semata-mata paling dominan dalam upaya meraih kekuasaan di pentas peta politik Indonesia. Salah satu buktinya adalah keterpilihan para caleg-caleg Kristen dari daerah pemilihan di basis-basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Riau, DKI, Jawa Timur, dan lain-lain. Maka setidaknya buku ini membantu untuk melihat bahwa isu-isu politik identitas yang sangat menakutkan dan sangat meremukkan arus perasaan para pemilih dalam dua Pilpres terakhir ternyata tidak selalu berjalan linear jika dikaitkan dengan Pemilihan Legislatif. Itu juga berarti bahwa politik identitas tidak selalu tepat dipakai sebagai satu-satunya sarana untuk kemenangan politik.

Buku ini semakin meyakinkan harapan para penggiat demokrasi dan para pembenci isu-isu politik identitas bahwa arah demokrasi yang sedang kita jalankan tepat berada di lorong yang benar. Kita bisa belajar demokrasi dari sejumlah daerah yang masih menghargai kualitas dan preferensi calon-calon legislatif tidak semata-mata didominasi oleh isu-isu politik identitas. Keterpilihan para anggota legislatif Kristen di basis-basis Islam yang kuat semakin memperlihatkan arah demokrasi Indonesia yang semakin matang.

Fakta demokrasi Indonesia itu bisa dilihat dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) bagi para caleg beragama Kristen dalam lima kali Pileg di Era Reformasi yakni: Pileg 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hasilnya cukup membanggakan yakni perolehan kursi anggota Legislatif (DPR RI) beragama Kristen selalu jauh lebih besar bahkan hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan persentase penduduk penduduk Indonesia secara nasional.

Sumber utama buku ini adalah Disertasi Doktoral kami di Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada Januari 2013 yang kami lakukan revisi atas isu-isu aktual sebagai hasil dua kali pemilihan umum terakhir yakni Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Serentak Nasional Pileg Pilpres Tahun 2019. Semoga buku ini membantu walaupun secuil di tengah upaya mencari sosok demokrasi yang paling tepat untuk Indonesia yang sedang bersusah payah merumuskan potur demokrasinya.

Terimakasih kepada **UKI Press** yang telah rela hati berkenan menerbitkan buku ini. Terimakasih juga kepada Dr., Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta atas kesediaannya

memberikan Pengantar terhadap buku ini. Terimakasih yang tak lupa saya ucapkan kepada sahabat saya **Teten Jamaluddin**. atas kerelaannya membaca dan membantu proses perbaikan sejumlah naskah buku ini. Tentu saja buku ini terwujud berkat dukungan keluargaku tercinta: istriku Goretti Manurung dan ketiga anakku: Hieronymus Halashon Samosir, Eduardo Daomara Samosir, dan si cantikku Rose Ika Samosir. Semoga mereka semakin mencintai Indonesia dan bangga sebagai Indonesia.

Salam dan hormatku,

**OSBIN SAMOSIR**

Jakarta, September 2022

## PENGANTAR

Oleh: Dr., Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.  
(Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

Buku Saudara Osbin Samosir ini berjudul: “Sistem Perwakilan Politik di Indonesia: belajar demokrasi dari Jawa Barat” adalah disertasi penulis beberapa tahun lalu. Temuan disertasi tersebut memang menarik karena terbukti bahwa pilihan calon dalam pemilu legislatif tidak ditentukan oleh agama si calon. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Jawa Barat dan sejumlah provinsi lain seperti: Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan sejumlah provinsi lain, tidak menjadi penghalang calon legislatif dari agama minoritas untuk terpilih.

Maksud dari “perwakilan politik” bisa dipahami dalam dua pengertian. *Pertama*, keterwakilan politik menyangkut regulasi yang dihasilkan di tingkat legislatif terkait kepentingan politik minoritas. Keterwakilan di sini adalah sejauh mana kepentingan politik kalangan minoritas terwakili dalam kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan di parlemen untuk membela kepentingan kelompok-kelompok yang dianggap minoritas secara politik. Contoh keterwakilan politik dalam hal ini misalnya: keterwakilan politik bagi kelompok suku yang tertinggal, misalnya suku Aborigin di Australia, keterwakilan politik kalangan perempuan, keterwakilan politik kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok buruh, dan lain-lain. Untuk memberi perlindungan politik kepada kalangan masyarakat yang dianggap lemah dalam segi kekuatan politik, maka parlemen merumuskannya regulasi untuk melindungi kepentingan politik kalangan

minoritas. Regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk memberdayakan kalangan minoritas secara politik.

*Kedua*, keterwakilan politik kelompok masyarakat minoritas untuk mendapatkan kursi di DPR RI, yakni bagaimana proses seseorang calon legislatif dari kelompok minoritas bisa menjadi anggota legislatif. Di sini disoroti upaya yang dilakukan caleg tersebut untuk memenangkan dirinya, mulai dari proses penentuan caleg di internal partai hingga kemudian terpilih sebagai anggota legislatif. Kehadiran calon legislatif dari kelompok agama minoritas untuk bersaing dengan seluruh calon legislatif lain di sebuah daerah pemilihan membutuhkan perjuangan yang lebih besar dibandingkan para calon legislatif dari kelompok agama mayoritas yang sama dengan mayoritas pemilih. Upaya-upaya yang dilakukan oleh calon legislatif minoritas ternyata mampu membuat para pemilih dari agama mayoritas untuk memilihnya dan memenangkan perebutan kursi legislatif.

Pengertian keterwakilan politik kedua itulah yang menjadi fokus kajian disertasi Saudara Osbin yang membuat penelitian tersebut menarik untuk dibukukan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa Jawa Barat, khususnya sejumlah daerah pemilihan sebagai wilayah masyarakat berbasis Islam yang kuat dan sangat mayoritas mampu menghasilkan sejumlah anggota legislatif yang beragama Kristiani dan bukan dari suku Sunda. Sejumlah calon legislatif tersebut antara lain: Enggartiasto Lukito, Maruarar Siahaan, Ribka Tjiptaning, Yoseph Umarhadi, Sukur Nababan, Adian Napitupulu, dan lain-lain.

Menarik juga melihat secara nasional persentase penduduk beragama Kristen dengan persentase perolehan yang cukup tinggi kursi legislatif secara nasional. Persentase penduduk beragama Kristen sejumlah 8,7 persen menurut Data Kementerian Agama 2010 saat penelitian dilakukan. Hasil yang diraih, persentase anggota legislatif beragama Kristen di DPR RI ternyata hampir dua kali lipat dari persentase jumlah penduduk, yakni pada Pemilu 1999 terdapat 16,48% anggota DPR RI beragama Kristen artinya ada selisih 7,77%. Di Pemilu 2004 terdapat 14,90% anggota DPR RI beragama Kristen dengan selisih: 6,19 %. Dalam Pemilu serentak Pileg Pilpres 2019 dengan jumlah anggota DPR RI 575 orang, persentase anggota DPR RI beragama Kristen tetap sangat tinggi yakni sejumlah 83 orang setara dengan 14,43% dengan selisih 5,73 %.

Buku ini melihat keterwakilan politik Kristen dan strategi caleg Kristen di PDI Perjuangan dan Partai Golkar di Pileg 2004 dan Pileg 2009. Penentuan DCT dimulai dari proses pencalonan secara internal, penentuan daerah pemilihan di partai, masuk ke Daftar Calon Sementara (DCS), hingga masuk Daftar Calon Tetap (DCT). Penting mengetahui alasan partai mencalonkan orang-orang Kristen di basis Muslim yang kuat dan kemungkinan partai tidak mempertimbangkan aspek agama dalam penentuan DCT. Dalam strategi akan dilihat upaya politisi Kristen mendapatkan dukungan para pemilih non Kristen di basis-basis Islam kuat yang kelak menentukan keterpilihan caleg Kristen tersebut. Upaya itu dimulai dari tahapan kampanye dan pemungutan suara, kedekatan si wakil dengan konstituen, pengaruh sistem Pileg 2004 dan Pileg 2009, sampai akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI. Maka penting melihat

mengapa para pemilih Muslim di basis-basis Islam yang kuat justru memilih caleg Kristen.

Data Pileg 1999, 2004, dan 2009 menunjukkan bahwa keterpilihan anggota legislatif beragama Kristen tampaknya menurun dari setiap Pileg. Pada Pileg 1999, selisih presentasi anggota legislatif Kristen dengan penduduk beragama Kristen sangat tinggi yakni 7,77%, sementara pada Pileg 2004 selisihnya menjadi 6,19 %, dan Pileg 2009 selisihnya menurun lagi menjadi 4,15 %. Bisa diduga bahwa suara pemilih Kristen semakin tersebar ke partai-partai lain dan ke caleg-caleg yang bukan Kristen.

Sejumlah besar anggota DPR RI beragama Kristen justru menang di provinsi berbasis Islam yang kuat, seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Sulawesi Selatan. Misalnya Ribka Tjiptaning anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dalam Pileg 2004 dan Pileg 2009 menjadi caleg di Jawa Barat. Dalam Pileg 2004, Ribka terpilih dari Dapil Jawa Barat III (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur). Sebagai caleg nomor urut ke-2 pada Pileg 2004 dimana PDI Perjuangan mendapat 2 kursi di dapil ini, maka Ribka menjadi anggota DPR RI. Dalam Pileg 2009, Ribka caleg dari Dapil Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) di nomor urut ke-1. Ribka mendapatkan suara terbesar di dapil tersebut dari PDI Perjuangan yakni 33.442 suara (20,29%), karena PDI Perjuangan hanya mendapat satu kursi di dapil tersebut, maka Ribka terpilih menjadi anggota DPR RI.

Kemenangan Ribka cukup mengherankan mengingat biodata Ribka justru tidak terkait langsung dengan dapilnya. Ribka lahir di Solo, seorang beragama Kristen, masa remaja



di daerah Cililitan di Jakarta, pendidikan Sarjana kedokteran (S1) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Pekerjaan Ribka pun ada di sekitar Jakarta, yakni di RS Tugu Ibu Cimanggis, Karyabhakti Kalibata, dan Ciledug Jakarta. Dalam kampanyenya di Pileg 2004, Ribka sambil memeriksa kesehatan warga memasang foto dirinya sebagai seorang dokter. Masyarakat pun mengenalnya sebagai dokter yang memperhatikan kesehatan mereka yang memunculkan antusiasme masyarakat kepada dirinya.

Terdapat sejumlah faktor pendukung sehingga caleg-caleg Kristen tersebut terpilih, misalnya: nama besar partai, kedekatan dengan pemilih, pengaruh tokoh-tokoh local, sistem Pemilu, jabatan dan aksi (*action*) sebagai pengurus DPP, penentuan daerah pemilihan, dan beberapa pengaruh lain. Misalnya sistem Pemilu pada Pileg 2004 menggunakan sistem Pemilu proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Sistem itu memberikan peluang keterpilihan lebih besar sebagai anggota DPR RI bagi politisi Kristen yang mendapat nomor urut paling kecil di urutan DCT apabila tidak berhasil memperoleh suara melebihi ambang batas Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) seperti dialami Ribka. Aspek lain nama besar partai, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keterpilihan caleg-caleg Kristen di Pileg 2009 yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka khususnya di basis-basis non Kristen tentu bukan karena mereka beragama Kristen, yang justru bertolak belakang dengan agama dari basis pemilih mereka, tetapi sangat mungkin karena mereka masuk ke partai nasionalis besar.

Gambaran fakta-fakta di atas akan dikaitkan dengan teori politik, apakah fakta tersebut mendukung, sama, atau tidak sama dengan teori ilmu politik? Dalam pandangan Anne

Philips, politik keterwakilan mendapat wujudnya dalam politik kehadiran (*politics of presence*) dimana keterwakilan politik itu hadir secara langsung di lembaga legislatif dan tidak hanya sekedar diwakilkan ke pihak lain. Dua fungsi, kontrol dan kesetaraan, hanya mungkin dengan kehadiran konkrit kelompok minoritas di lembaga negara, termasuk di legislatif. Menurut Philips, tidak mungkin kalangan mayoritas berbicara tentang kepentingan minoritas ketika yang dibicarakan itu adalah *in se* tentang diri kalangan minoritas itu sendiri. Perlu ada perwakilan konkrit dan langsung dari kalangan minoritas di parlemen untuk mengontrol pengambilan kebijakan politik di parlemen. Dalam Pileg 2004, PDS memegang prinsip menghadirkan keterwakilan politik Kristen di DPR RI sebagai isu kampanye. Hasilnya PDS mendapatkan 13 kursi di Pileg 2004 tetapi gagal pada Pileg 2009. Sebaliknya PDI Perjuangan tidak menempatkan isu keterwakilan minoritas sebagai isu kampanye untuk meraih kursi di DPR RI baik Pileg 2004 dan Pileg 2009. Di PDI Perjuangan, semua kader diperlakukan setara sejak awal dan bahkan dianggap tabu membicarakan perihal seorang caleg dari kelompok minoritas atau tidak. PDI Perjuangan lebih mengutamakan kinerja kepartaian untuk merebut simpati rakyat.

Pandangan Clifford Geertz tentang ikatan primordialisme dalam politik mengatakan bahwa konflik politik di negara-negara berkembang disebabkan oleh adanya pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial. Kami sendiri mengkategorikan ikatan primordial dalam konteks Indonesia dalam dua bagian yakni ras/suku dan agama. Bagi caleg-caleg Kristen di PDI Perjuangan dan Partai Golkar, teori ini tidak terlalu tepat karena isu primordial tidak

menjadi satu-satunya digunakan dalam penentuan DCT dan tidak menjadi strategi yang dipakai terhadap pemilih karena mereka malah menang di basis Muslim.

Teori partai politik dari Alan Ware menegaskan bahwa penguatan pada kandidat-kandidat yang akan diusung oleh partai politik sekarang ini lebih penting daripada sekedar menjual ideologi partai kepada pemilih. Ideologi menjadi penting ketika program-program partai yang terkait dengan ideologi tersebut benar-benar dilakukan secara maksimal dan menemukan bentuknya ketika program-program itu konkrit dilihat oleh masyarakat. Dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan kualitas kader yang dikenal oleh publik dan layak dijual ke publik yang hendak diusung oleh partai politik. Hal sama dengan Partai Golkar yang konsisten menempatkan minimal 10 orang anggota DPR RI beragama Kristen dalam Pileg 1999, 2004, dan 2009.

Sementara Affan Gaffar melihat kuatnya pengaruh aliran agama dan ketaatan pada tokoh atau figur tertentu dalam menentukan pilihan dalam Pemilu di Indonesia. Selain itu Affan Gaffar menawarkan pentingnya mengubah sistem pencalonan dengan menggunakan nomor urut dalam penentuan pencalonan yakni dengan menempatkan figur-figur yang paling layak untuk dipilih oleh rakyat. Figur terbaik dan yang mendapat dukungan rakyatlah yang paling tepat untuk menjadi wakil rakyat. Dalam konteks ini, keterwakilan orang-orang Kristen dalam Pileg 2004 adalah bagian dari kritik Affan Gaffar, dan keterpilihan caleg-caleg Kristen pada Pileg 2009 sejajar dengan harapan dari kritik Affan Gaffar tersebut.

Buku ini menghadirkan gambaran bahwa isu politik identitas tidak berpengaruh signifikan dalam keterpilihan para calon legislatif beragama minoritas dari tengah masyarakat pemilih beragama mayoritas Islam. Buku ini menjadi salah satu tambahan literatur untuk melihat praktek politik dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh seluruh kalangan peminat politik dan demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>SALAM DARI PENULIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>GLOSSARY.....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I BELAJAR DARI LIMA PEMILU ERA**

<b>REFORMASI .....</b>	<b>1</b>
1.1. Panggilan Kader Kristiani dalam Politik .....	4
1.2. Perolehan Caleg Kristen di Pemilu Era Reformasi .....	8
1.3. Sekilas Keterpilihan Perolehan Suara Kristen di Basis Islam .....	16
1.4. Perwakilan Politik dan Isu Politik Identitas.....	20

### **BAB II POLITIK IDENTITAS TIDAK TABU DALAM SISTEM PERWAKILAN POLITIK .....**

2.1. Figur, Program Partai, atau Ideologi Partai (?).....	24
a. Ideologi semakin ditinggalkan .....	26
b. Program Partai lebih memikat.....	28

c.	Kandidasi Figur Politik sangat menentukan .....	33
2.2.	Teori Kehadiran ( <i>Politics of Presence</i> ) .....	36
2.3.	Ikatan Primordial dalam Politik.....	42
2.4.	Islam dan Otoritas Tradisional.....	52
2.5.	Pentingnya Nasionalisme dan Rasa Kebangsaan ..	65

**BAB III SEJARAH POLITIK ORANG KRISTEN  
DI INDONESIA.....71**

3.1.	Keterlibatan Politik Kristen Sebelum Kemerdekaan .....	72
a.	Lahirnya Pergerakan Nasional Awal .....	73
b.	Beban Politik Pejuang Kristen .....	78

**BAB IV KEKRISTENAN DALAM POLITIK  
INDONESIA HINGGA MASA AWAL  
KEMERDEKAAN .....87**

4.1.	Perjuangan Politisi Kristen Menuju Kemerdekaan .....	87
4.2.	Keterwakilan Politik Kristen di Masa Orde Lama .....	102
a.	Partai Kristen menjadi Peserta Pemilu 1955... ..	104
b.	Keterwakilan Politik dalam Pemilu 1955 .....	108
4.3.	Keterwakilan Politik Kristen di Masa Orde Baru.....	113

**BAB V STRATEGI CALON LEGISLATIF KRISTEN  
DI BASIS ISLAM: .....125**

- 5.1 Pendekatan Kultur Agama dan Budaya Lokal..... 125
  - 1. Pendekatan Tatakrama Agama dan Budaya... 126
  - 2. Pendekatan Caleg Kristen dari PDI Perjuangan ..... 129
  - 3. Pendekatan Caleg Kristen dari Partai Golkar . 164
- 5.2 Pendekatan Tokoh Lokal Dan Sarana Kebutuhan Umum ..... 172
  - 1. Strategi Pendekatan Tokoh Lokal ..... 172
  - 2. Konsistensi Bakti Sosial Pengobatan Gratis ... 187
  - 3. Pembangunan Fisik Sarana Umum ..... 202

**BAB VI ALASAN PEMILIH MUSLIM BAGI  
KETERPILIHAN CALEG KRISTEN .....215**

- 6.1. Sikap Santun Dalam Tata Krama Agama Dan Budaya Lokal ..... 216
- 6.2. Sikap Santun dalam Tata Krama Agama dan Budaya Lokal ..... 221
- 6.3. Sesama Korban Orde Baru Dan Konsistensi Bantuan Sosial ..... 250
- 6.4. Konsistensi Pengobatan Gratis untuk semua Warga ..... 267
- 6.5. Bantuan Sosial Sepanjang Waktu ..... 272
- 6.6. Dukungan Birokrasi dan Partai ..... 277



**BAB VII KESIMPULAN: BANGGA MENJADI  
INDONESIA .....295**

1. Belajar Demokrasi dari Basis Islam .....295
2. Menuju Demokrasi Indonesia Semakin Matang..303
3. Budaya Kekeluargaan: Hormati Kultur Agama dan  
Budaya Lokal.....306

**Daftar Pustaka .....315**

**Index.....321**

**BIOGRAFI PENULIS .....326**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar 6 Terbesar Provinsi berbasis Islam Penyumbang Anggota DPR RI Beragama Kristen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 .....	1
Tabel 1. 2 Daftar 6 Terbesar Provinsi berbasis Islam Penyumbang Anggota DPR RI Beragama Kristen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 .....	2
Tabel 1. 3 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 1999.....	9
Tabel 1. 4 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2004.....	10
Tabel 1. 5 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu 2009 .....	11
Tabel 1. 6 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014.....	12
Tabel 1. 7 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019.....	13
Tabel 4. 1 Perolehan Suara Partai Kristen Pemilu 1955 .....	64
Tabel 4. 2 Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1971 .....	67
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Suara dan Kursi Pileg 2004 .....	133
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Suara dan Kursi Pileg 2009 .....	137
Tabel 5. 3 Caleg Terpilih Dapil Jabar VIII Pemilu 2004...	139
Tabel 5. 4 Caleg Terpilih Dapil Jatim VI Pemilu 2004 Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Tulungagung.....	149
Tabel 5. 5 Caleg Terpilih Dapil Jatim VI Pemilu 2009 Kab. Tulungagung, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar BPP: 177.374 suara .....	155

Tabel 5. 6 Caleg Terpilih Dapil Jabar VII Pemilu 2004 Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon BPP: 232.688 suara.....	166
Tabel 5. 7 Caleg Terpilih Dapil Jabar VIII Pemilu 2009 Kab Cirebon, Kota Cirebon, dan Kab Indramayu BPP: 170.232 suara.....	175
Tabel 5. 8 Caleg Terpilih Dapil Sulsel III Pemilu 2009 Kab. Sidenrang Rapang, Kab Enrekang, Kab Luwu, Kab Tana Toraja, Kab Luwu Utara, Kab Luwu Timur, Kab Pinrang, Kota Palopo BPP: 102.903 suara.....	184
Tabel 5. 9 Caleg Terpilih Dapil Jabar III Pemilu 2004 Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur BPP: 215.060 suara.....	190

## GLOSSARY

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Anggaran Dasar
AMKRI	: Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia
ART	: Anggaran Rumah Tangga
Babel	: Bangka Belitung
BAGUNA	: Badan Pembangunan Korban Bencana Alam
Bappilu	: Badan Pemenangan Pemilu
BP Pemilu	: Badan Pemenangan Pemilu
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
C.E.P.	: <i>Christelijk Ethische Partij</i>
Caleg	: Calon Legislatif
CSV	: <i>Christelijke Studenten Vereeniging</i> (Partai untuk Kalangan Kristen)
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dapil	: Daerah Pemilihan
DAU	: Dana Alokasi Umum
DCS	: Daftar Calon Sementara
DCT	: Daftar Calon Tetap
DKI	: Daerah Khusus Ibukota (Jakarta)
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota)
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah (Propinsi)
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat republic Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
G 30/S	: Gerakan 30 September (1965)
GAPI	: Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
I.K.P.	: <i>Indisch Katholieke Partij</i> (Partai untuk kalangan Katolik)
Jabar	: Jawa Barat
Jatim	: Jawa Timur

Ketum	: Ketua Umum
KTA	: Kartu Tanda Anggota
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Mgr	: Monsigneur (Uskup)
MI	: Muslimin Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
PAKORBA	: Paguyuban Korban Orde Baru
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parpol	: Partai politik
PD2LT	: Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDS	: Partai Damai Sejahtera
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilu Legislatif
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKRI	: Partai Katolik Republik Indonesia
PMKRI	: Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PPKD	: <i>Pakempalan Politik Katolik Djawi</i>
PPKI	: Panitia Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Rakerdasus	: Rapat Kerja Daerah Khusus
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
Sulsel	: Sulawesi Selatan
Sumut	: Sumatera Utara
Tapol	: Tahanan Politik
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang-Undang Dasar
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
Wasekjen	: Wakil Sekretaris Jenderal

# **BAB I**

## **BELAJAR DARI LIMA PEMILU ERA REFORMASI**

Pemilihan Umum Legislatif Era Reformasi sudah diadakan sebanyak 5 (lima) kali yakni Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sepanjang masa lima kali Pemilihan Legislatif tersebut, orang-orang beragama Kristiani baik yang beragama Protestan maupun Katolik selalu meraih hasil signifikan sebagai anggota Legislatif di DPR RI. Perolehan suara para caleg Kristen secara nasional selalu meraih hasil yang melebihi persentase umat Kristen itu sendiri secara nasional, baik para caleg Kristen tersebut berada di daerah pemilihan (dapil) di basis beragama mayoritas Kristen maupun di basis yang bukan Kristen, baik dari partai atas nama agama Kristen maupun partai nasionalis.

Perolehan suara terbesar itu salah satu diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Daftar 6 Terbesar Provinsi berbasis Islam Penyumbang Anggota DPR RI Beragama Kristen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014**

	<b>PDIP</b>	<b>Demokrat</b>	<b>Gerindra</b>	<b>Golkar</b>	<b>Nasdem</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JABAR</b>	6					6 kursi
<b>DKI</b>	5					5 kursi
<b>JATIM</b>	4		1			5 kursi

<b>SUMUT</b>	2	2	2	1	1	8 kursi
<b>RIAU</b>	2					2 kursi
<b>JATENG</b>	2		2			4 kursi
<b>JUMLAH</b>	21 kursi	2 kursi	5 kursi	1 kursi	1 kursi	<b>TOTAL: 30 KURSI</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014

**Tabel 1. 2 Daftar 6 Terbesar Provinsi berbasis Islam Penyumbang Anggota DPR RI Beragama Kristen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019**

	<b>PDIP</b>	<b>Demokrat</b>	<b>Gerindra</b>	<b>Golkar</b>	<b>Nasdem</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Sumatera Utara</b>	5	2		1	1	9 kursi
<b>DKI Jakarta</b>	7			1		8 kursi
<b>Jawa Tengah</b>	6		1			7 kursi
<b>Jawa Barat</b>	4					4 kursi
<b>Jawa Timur</b>	3		1			4 kursi
<b>Riau</b>	2					2 kursi
<b>JUMLAH</b>	27 kursi	2 kursi	2 kursi	2 kursi	1 kursi	<b>TOTAL: 34 KURSI</b>

Sumber: website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) 2019



Dua tabel di atas menjelaskan bahwa PDI Perjuangan selalu menjadi partai politik penyumbang kursi bagi anggota legislatif beragama Kristen setidaknya di 6 (enam) provinsi yang berbasis Islam atau setidaknya mayoritas dominan berpenduduk agama Islam. Jika melihat Pemilu Legislatif 2014, kursi terbesar PDI Perjuangan lebih banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yakni sejumlah 6 kursi, berturut-turut 5 kursi dari DKI dan 4 kursi dari Jawa Timur.

Sementara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019, PDI Perjuangan tetap menjadi penyumbang kursi terbesar yang jumlahnya lebih besar dari Pileg 2014 sejumlah 21 kursi menjadi 27 kursi dalam Pileg 2019. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang kursi terbesar sejumlah 9 kursi mengalahkan Provinsi Jawa Barat di Pileg 2014 sejumlah 6 kursi, menyusul Provinsi DKI dengan 8 kursi.

Jika melihat data-data terdahulu sejak Pemilu Legislatif 1999, 2004 dan 2009 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel-tabel di bawah nanti, partai politik yang paling banyak menyumbang anggota legislatif beragama Kristen berasal dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Artinya terdapat pergeseran di Partai Golkar di dua Pileg terakhir yakni 2014 dan 2019 yang masih didominasi oleh PDI Perjuangan tetapi semakin menggeser dominasi Partai Golkar.

Pertumbuhan para politisi Kristen dalam 5 kali pemilu legislatif era reformasi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab politik umat Kristen untuk berpartisipasi dalam politik. Kehadiran para politisi Kristen untuk aktif dalam politik nasionalis dan lokal semakin tumbuh seiring dengan dibukanya kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak

bangsa baik partai politik atas nama agama maupun partai politik yang berbasis nasionalis.

Partai politik berbasis agama termasuk partai berbasis agama Kristen muncul kembali dalam tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) setelah terjadi fusi tahun 1973. Keikut-sertaan partai Kristen terakhir sebelum Era Reformasi terjadi pada Pemilu 1955 dan Pemilu 1971. Sesudah itu, selama Pemilu Orde Baru (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), tidak pernah ada partai Kristen karena Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik telah berfusi ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kemunculan partai-partai Kristen tersebut di Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) tidak terlepas dari situasi sosial dan politik nasional ketika Era Reformasi 1998 bergulir dimana terjadi kerusuhan dan pergolakan nasional yang membuat kelompok minoritas agama dan suku tertentu menjadi korban. Atas situasi itu masyarakat beragama Kristen melihat bahwa keberadaan Negara lemah dalam melindungi kepentingan masyarakat Kristen. Para politisi Kristen menyadari perlu terlibat dalam partai politik baik berbasis agama Kristen maupun berbasis nasionalis. Bab ini akan membahas bagaimana perolehan suara para caleg beragama Kristen ketika mereka dicalonkan di basis Islam yang kuat, seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Riau, dan sejumlah daerah lainnya.

### **1.1. Panggilan Kader Kristiani dalam Politik**

Kepedulian umat Kristen untuk terlibat dalam urusan politik secara nasional menjadi perhatian sangat serius akan pentingnya kaderisasi politik Kristen, baik Protestan maupun

Katolik<sup>1</sup>. Perhatian dan kepedulian ini juga didorong oleh kenyataan makin berkurangnya minat dan pelibatan aktif orang-orang Kristen terutama kaum muda dalam kehidupan sosial dan politik di negeri yang tengah berusaha keras membangun keadaban politik dan demokrasi.

Memang perhatian dan kepedulian seperti ditunjukkan di atas sering berujung pada keprihatinan terutama jika dilakukan perbandingan antara peran dan pelibatan tokoh-tokoh Kristen masa lalu dan tokoh-tokoh Kristen masa kini dalam upaya bersama menegakkan kebangsaan Indonesia dalam banyak aspek sosial dan politik. Ada anggapan kuat bahwa peran dan pelibatan orang Kristen secara politik lebih nyata, cukup kuat, dan relatif berpengaruh di masa lalu dibandingkan masa kini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kajian ini menggunakan nama “Protestan” dan “Katolik”, dan untuk menggabungkan kedua penyebutan tersebut menjadi satu. Saya menggunakan kata “Kristen” karena kata “Kristen” tersebut merujuk baik terhadap kalangan penganut agama Protestan maupun terhadap kalangan penganut agama Katolik. Berbeda dengan penyebutan yang digunakan oleh Kementerian Agama RI yang membedakan agama Nasrani itu dengan agama “Kristen” dan agama “Katolik”. Penyebutan Protestan dan Katolik adalah hal yang tepat, karena kedua-duanya adalah kelompok Kristen. Jadi tidak tepat seperti penyebutan yang selama ini dikembangkan oleh Kementerian Agama RI, yakni membedakan antara Protestan dengan sebutan Kristen, sementara Katolik tetap dengan sebutan Katolik. Yang benar adalah bahwa keduanya sama-sama Kristen sebagaimana bisa ditemukan dalam sejarah Gereja Perdana. Perkembangan sejarah kemudian oleh lahirnya Protestanisme yang digagas oleh Marthin Luther di Abad Pertengahan melahirkan satu lagi agama baru dalam Kristen yakni Protestan, sehingga agama Katolik dan agama Protestan itu adalah sama-sama agama Kristen.

<sup>2</sup> Harry Tjan Silalahi, “Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan”, dalam *Panggilan Membangun Bangsa dan Negara. Dasar Pedoman dan Arah Keterlibatan Politik Kristen* (Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009), xvii.

Ada banyak faktor penyebab munculnya keprihatinan semacam itu yang melahirkan perdebatan tak henti mengenai faktor-faktor dominan penyebab menurunnya minat, peran, partisipasi, dan sumbangan orang-orang Kristen untuk kemajuan dan keadaban politik dan demokrasi Indonesia. Karena itu, politisi Kristen merasa penting membicarakan urgensi kader politik Kristen dalam konteks dan orientasi keadaban politik dan demokrasi Indonesia untuk masa kini khususnya.

Urgensi kehadiran politisi Kristen pertama-tama dan utama harus didudukkan pada perspektif dasar keberadaan orang-orang Kristen sebagai bagian integral masyarakat bangsa Indonesia pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan perspektif ini, siapapun warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek pengelolaan politik dan pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang boleh mengurangi hak dan kewajiban sesama warga negara lainnya atas alasan perbedaan suku, agama, ras, dan aspek primordial lainnya serta perbedaan tingkat kesejahteraannya. Penegasan ini didasarkan pada anggapan bahwa warga negara yang secara kebetulan (ataupun juga secara sengaja) berada dalam kelompok-kelompok minoritas masyarakat (dilihat dari sisi primordial) tidak seharusnya menjadi kelompok eksklusif yang merasa mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama dengan (lebih sedikit atau kecil dari) warga negara lainnya dalam kelompok mayoritas masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Silalahi, "Kader Kristen," xvii.

Atas dasar prinsip kesetaraan di atas, orang Kristen Indonesia berperan dalam segala aspek kemajuan yang telah dicapai bangsa hingga saat ini. Kegembiraan Indonesia adalah kegembiraan orang-orang Kristen. Sebagai konsekuensi logisnya, kaum Kristen harus bertanggungjawab atas semua kegagalan yang dialami dan diderita oleh masyarakat juga. Derita Indonesia adalah derita orang-orang Kristen Indonesia.

Dalam pemahaman itu, urgensi kaderisasi politisi Kristen merupakan penegasan atas kebutuhan Indonesia untuk menyiapkan dan menghadirkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berwawasan, cakap, tangguh, cekatan, dan cerdas dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan keadaban bersama. Kader-kader Kristen mesti memiliki karakter dasar konsisten, konsekuen, komit, terpercaya (*credible*), dan bertanggungjawab (*accountable*) atas semua tindakan dan akibatnya dengan mengacu pada tujuan prinsip berdirinya bangsa Indonesia.

Diterimanya orang Kristen dalam politik Indonesia, merupakan bukti pengakuan bahwa kelompok masyarakat berbeda agama walaupun minoritas dalam hal jumlah namun memiliki hak dan kewenangan setara dengan seluruh masyarakat Indonesia yang lain.<sup>4</sup> Secara politik, pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap pluralitas sebagai fakta riil yang sudah termaktub dalam filosofi Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan terhadap

---

<sup>4</sup>Pengakuan terhadap keberbedaan itu dalam filosofi Indonesia kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, dimana pengakuan terhadap perbedaan itu menyangkut banyak hal, misalnya perbedaan agama, suku, budaya, golongan, dan lain-lain.

pluralisme juga berarti pengakuan terhadap demokrasi, karena pluralisme adalah salah satu dimensi dari demokrasi.<sup>5</sup>

Prinsip ini menjadi dasar bagi masyarakat Kristen untuk selalu terlibat secara bebas termasuk dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 1999, 2004, dan 2009 dimana politisi Kristen dapat secara bebas menjadi anggota DPR RI termasuk melalui partai-partai non Kristen. Berikut ini ditunjukkan Persentase Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama:

- Islam	: 192.932.919 jiwa (88,8%)
- Protestan	: 12.395.753 jiwa (5,7%)
- Katolik	: 6.563.199 jiwa (3,0%)
- Hindu	: 3.698.282 jiwa (1,7%)
- Buddha	: 1.306.248 jiwa (0,6%)
- Khonghucu	: 205.808 jiwa (0,1%)
- Lain-lainnya	: 243.931 jiwa (0,1%)

=====

**Total 217.346.140 jiwa (100%)**

Sumber: Data Statistik Departemen Agama RI Tahun 2008

Total jumlah penduduk beragama Kristen (Katolik dan Protestan) adalah 18.958.952 jiwa atau (8,7%). Maka mestinya umat Kristen mendapatkan kursi sebesar 8,71% dari suara yang diperebutkan di setiap Pemilu. Bagaimana hasilnya di Pileg 1999, Pileg 2004, Pileg 2009, Pileg 2014, dan Pileg 2019?

## **1.2. Perolehan Caleg Kristen di Pemilu Era Reformasi**

Pileg 1999 diikuti tiga partai Kristen di antara 48 partai yakni: Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai

---

<sup>5</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53-69.

Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), dan Partai Katolik Demokrat (PKD). PDKB meraih 5 (lima) kursi, sementara PKD meraih 1 (satu) kursi.<sup>6</sup> Pileg 2004 diikuti satu partai Kristen yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) yang meraih 13 (tiga belas) kursi.<sup>7</sup> Pileg tahun 2009 diikuti dua partai Kristen yakni PDS dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) namun keduanya tidak mendapat kursi di DPR.<sup>8</sup>

**Tabel 1. 3 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 1999**

<b>Pemilu 1999</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Jlh Kursi</b>	<b>% Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
Partai Kristen	PDKB	5	1,08%	<b>Total 500 Kursi:</b> - 462 kursi Pemilu - 38 kursi TNI/Polri (tak dihitung dlm perolehan kursi)  <b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen : 8,71% - Kursi Kristen DPR:16,48%  - <b>Selisih</b> : <b>7,77%</b>
	PKD	1	0,22%	
	KRISNA	-	-	
Partai Non Kristen	PDI Perjuangan	46	9,96%	
	Partai Golkar	17	3,68%	
	PDI	2	0,43%	
	PKP	2	0,43%	
	PAN	1	0,22%	
	PNI	1	0,22%	
	PIB	1	0,22%	
<b>TOTAL</b>		<b>76 Kursi</b>	<b>16,48%</b>	

Sumber: Diolah Penulis dari Panduan Parlemen Indonesia ( 2001)

<sup>6</sup> “Pemilu 1999” (blog), 1 Februari, 2011 diakses dari

<http://www.kbriwina.at/Pemilu/sejarahPemilu/Pemilu1999/index.html>.

<sup>7</sup> “Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU,” Komisi Pemilihan Umum, diakses pada 5 Mei 2004, <http://partai.info/Pemilu2004/hasilPemilulegislatif.php>.

<sup>8</sup> Sistem penghitungan suara untuk kursi ini masih baru digunakan dan belum pernah digunakan dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya di Indonesia. Sistem penghitungan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 204-212, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Akibatnya hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di DPR RI.



**Tabel 1.3** di atas memperlihatkan bahwa politisi Kristen tersebar di sejumlah partai peserta Pileg 1999 dimana dua partai Kristen (PDKB dan PKD) seluruhnya mendapatkan 1,3% kursi. Hasilnya persentase anggota DPR RI beragama Kristen (16,48%) pada Pileg 1999 jauh lebih besar dibandingkan persentase penduduk Kristen di Indonesia (8,71%). Setidaknya terdapat dukungan masyarakat non Kristen terhadap kursi DPR RI beragama Kristen sebesar 7,77% kursi.

**Tabel 1. 4 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2004**

<b>Pemilu 2004</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Jlh Kursi</b>	<b>% Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
Partai Kristen	PDS	13	2,36%	Total: 550 kursi (100%)
Partai Non Kristen	PDIP	39	7,09%	Kursi Kristen dari partai Non Kristen: 14,90% - 2,36% = 12,54%
	Demokrat	13	2,36%	
	Golkar	10	1,81%	
	Pelopop	3	0,55%	
	PDI	1	0,18%	
	PKPI	1	0,18%	
	PAN	1	0,18%	
	PKB	1	0,18%	
<b>TOTAL</b>		<b>82 kursi</b>	<b>14,90 %</b>	- Perbandingan: - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 14,90% - Selisih : <b>6,19 %</b>

Sumber: Diolah Penulis dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009* (2005)

**Tabel 1.4** menunjukkan perolehan kursi anggota DPR RI beragama Kristen di sejumlah partai termasuk di partai Islam moderat seperti PAN dan PKB dalam Pileg 2004. Perolehan kursi tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor baik penentuan DCT maupun faktor strategi dari para caleg di daerah pemilihannya.

**Tabel 1. 5 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu 2009**

<b>Pemilu 2009</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Jlh Kursi</b>	<b>% Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
Partai Kristen	PDS	-	-	Perolehan: 1.541.592 suara (1,46%)
	PKDI	-	-	Perolehan: 325.771 suara (0,31%)
Partai Non Kristen	PDIP	32	5,36%	<b>Total DPR RI: 560 kursi (100%)</b>  <b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen : 8,71% - Kursi Kristen DPR :12,86% - Selisih : 4,15 %
	Demokrat	20	3,39%	
	Golkar	15	2,86%	
	Gerindra	3	0,54%	
	PAN	1	0,18%	
	Hanura	1	0,18%	
<b>TOTAL</b>		<b>72 kursi</b>	<b>12,86%</b>	

Sumber: Diolah Penulis dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2009-2014* (2010)

Dalam Pileg 2009 (lihat **Tabel 1.5**), PDS tidak mendapatkan kursi karena dampak sistem *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5%. Namun PDS meraih 214 kursi di seluruh DPRD provinsi/kabupaten/kota. Perolehan suara PDS

tinggi di sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Utara 6,5 persen, Sumut 4,6%, Sulawesi Tengah 4,3%, NTT 4,2 %, dan Jakarta 3,4%. Meskipun begitu, anggota DPR RI yang beragama Kristen hasil Pileg 2009 tetap melebihi persentase penduduk beragama Kristen 12,86%.

**Tabel 1. 6 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014**

<b>Pemilu 2014</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Jlh Kursi</b>	<b>% Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
Partai Kristen	-	-	-	Total: 560 kursi (100%)
Partai Non Kristen	PDIP	35	6,25%	<b>Kursi Kristen: 11,96%</b> <b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 12,50% - <b>Selisih: 3,79%</b>
	DEMOKRAT	11	1,96%	
	GERINDRA	11	1,96%	
	GOLKAR	7	1,25%	
	NASDEM	3	0,54	
	HANURA	3	0,54%	
<b>TOTAL</b>		<b>70 kursi</b>	<b>12,50 %</b>	

Sumber: Diolah Penulis dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2014-2019* (2015)

Data di atas menunjukkan bahwa perolehan kursi terbesar diraih oleh para caleg beragama Kristen melalui PDI Perjuangan yakni sejumlah 35 kursi. Menyusul dua partai lain dengan perolehan kursi yang sama yakni Partai Demokrat dan Partai Gerindra dengan perolehan masing-masing sejumlah 11 kursi, posisi di nomor dua yang selama periode sebelumnya diduduki oleh Partai Golkar. Partai Golkar sendiri turun ke urutan ke empat sebagai penghasil kursi bagi caleg-caleg

beragama Kristiani. Sementara Partai Nasdem dan Partai Hanura masing-masing menyumbangkan 3 kursi lain, sesuatu yang sangat bagus dibandingkan partai-partai lain yang sama sekali tidak menyumbangkan kursi apapun bagi para caleg Kristen sendiri, seperti PAN dan PKB yang selama periode sebelumnya selalu menyumbangkan kursi bagi para caleg Kristen di DPR RI.

Total ada 10 (sepuluh) partai yang menduduki kursi di DPR RI, dua yang belum disebut diantaranya adalah PPP dan PKS. Total peserta pemilu tingkat nasional ada 11 partai, yang mana dua diantaranya tidak berhasil meraih kursi di DPR RI oleh karena penggunaan sistem Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 3,5%. Kedua Partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

**Tabel 1. 7 Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019**

Pemilu 2004	Nama Partai	Jlh Kursi	% Kursi	Keterangan
Partai Kristen	-	-	-	Total: 575 kursi (100%)
Partai Non Kristen	PDIP	48	8,35%	<b>Perbandingan:</b> - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 14,43% - Selisih: 5,72 %
	NASDEM	12	2,09%	
	GOLKAR	8	1,39%	
	GERINDRA	6	1,04%	
	DEMOKRAT	5	2,36%	
	PAN	2	0,35%	
PKB	2	0,35%		

<b>TOTAL</b>		<b>83 kursi</b>	<b>14,43 %</b>	
--------------	--	-----------------	--------------------	--

Sumber: website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), 2019

Data di tabel di atas menunjukkan bahwa persentase perolehan kursi yang diraih oleh para anggota legislatif Kristen meningkat dari 12,5% tahun 2014 menjadi 14,43% di Pileg 2019. Pada Pileg 2019, PDI Perjuangan menjadi partai yang selalu mendominasi perolehan kursi anggota legislatif beragama Kristen yakni sebesar 48 kursi setara dengan 8,35%. Perolehan ini meningkat cukup tajam dibandingkan Pileg 2014 yang hanya sebesar 35 kursi (6,25%). Selain itu Partai Nasdem melonjak sangat tajam dengan perolehan 12 kursi (2,09%) menjadi peraih kursi sangat tinggi di peringkat urutan kedua di bawah PDI Perjuangan dibandingkan pada Pileg 2014 yang hanya memperoleh 3 kursi (0,54%).

Yang sungguh patut diperhatikan juga adalah dua partai berbasis Islam moderat yang pada Pileg 2014 lalu tidak memberikan satu kursi pun kepada para Anggota legislatif Kristen, namun pada Pileg 2019 memberikan 4 kursi sekaligus (0,70%) yang dihasilkan dari dua partai yakni PAN dan PKB yang masing-masing menyumbangkan 2 kursi. Itu artinya bahwa para anggota legislatif Kristen tidak hanya berasal dari partai-partai nasionalis tetapi juga dari partai-partai berbasis agama Islam. Sementara Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang pada Pileg 2014 yang lalu menyumbangkan kursi sangat besar bagi anggota legislatif beragama Kristen dengan 22 kursi, yang masing masing partai secara seimbang berhasil meraih 11 kursi, namun dalam Pileg 2019, kedua partai tersebut turun drastis dengan hanya meraih 11 kursi saja, yang

disumbangkan oleh Partai Gerindra dengan 6 kursi dan Partai Demokrat sejumlah 5 kursi.

Secara umum bisa dikatakan bahwa uraian di atas menggambarkan bahwa kursi Kristen terbesar selalu disumbangkan oleh dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar dimana keterlibatan politisi Kristen tidak pernah sepi dari politik Indonesia sehingga layak menjadi kajian politik. Akhir-akhir ini, komunitas ilmiah di Indonesia semakin meminati bidang kajian politik sebagai upaya mencari alternatif dari khazanah budaya sendiri untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan serta keberlakuan konsep-konsep politik yang berasal dari politik Barat.<sup>9</sup> Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, otoritas ilmu-ilmu sosial di Indonesia amat mendorong usaha oleh ilmuwan Indonesia mengembangkan konsep-konsep politik dari khazanah kebudayaan Indonesia sendiri.<sup>10</sup>

Konsep-konsep kekuasaan, Negara, dan kepemimpinan dalam berbagai tradisi dan kebudayaan daerah di Indonesia perlu digali, diwacanakan, dan didokumentasikan sehingga bisa memperkaya pemahaman tentang kekayaan kehidupan dan peradaban masyarakat Indonesia. Salah satu upaya mengembangkan konsep politik adalah melihat

---

<sup>9</sup> Sulaeman, "Pemikiran Demokrasi Moh Hatta," (Disertasi, Universitas Indonesia, 2009), 3-4. Istilah "pemikiran politik Indonesia lama" menunjuk pada pemikiran politik yang berkembang di nusantara sebelum kedatangan pengaruh Barat; A. R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2004), 45.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik", dalam *Jurnal Ilmu Politik* No.1, 1986, 15-16.

keterwakilan politik Kristen di DPR RI dalam Pileg 2004 dan Pileg 2009 dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Penelitian ini tidak membuat perbandingan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, tetapi hanya untuk melihat bagaimana proses keterwakilan caleg Kristen dari kedua partai tersebut.

### **1.3. Sekilas Keterpilihan Perolehan Suara Kristen di Basis Islam**

Keterwakilan politik Kristen di DPR RI selama tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) ternyata justru bukan karena dukungan dari para pemilih Kristen. Para politisi Kristen terpilih menjadi anggota legislatif karena dukungan pemilih beragama Islam dan terutama justru dari basis Islam yang kuat. Maksud basis-basis Islam yang kuat adalah bahwa mayoritas atau sebahagian besar dan bahkan hampir seluruh penduduk di daerah pemilihan tersebut memeluk agama Islam dan agama memberi pengaruh besar terhadap kehidupan warganya, misalnya: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Riau, DKI, Sumatera Utara, Bangka Belitung. Persentase keterwakilan politik Kristen di DPR RI (16,48%) pada Pileg 1999, misalnya, jauh melebihi persentase penduduk Kristen Indonesia (8,71%). Artinya pemilih beragama Muslim turut memilih para politisi Kristen. Sebaliknya persentase dukungan orang Kristen terhadap perolehan suara partai Kristen seperti PDS justru sangat rendah, Pileg 2004 hanya 2,36% dan di Pileg 2009 hanya 1,46%. Artinya persentase orang Kristen yang tidak memilih partai Kristen ternyata sangat tinggi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dalam pandangan Anne Philips, politik keterwakilan mendapat wujudnya dalam politik kehadiran secara langsung (*politics of presence*). Seluruh topic tentang keterwakilan politik ini bisa dilihat dalam Anne

Keterwakilan politik dapat dikategorikan dalam dua pengertian, *pertama*, keterwakilan menyangkut regulasi yang dihasilkan di tingkat legislatif terkait kepentingan politik minoritas. Keterwakilan di sini adalah sejauh mana kepentingan politik kalangan minoritas terwakili dalam kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan di DPR RI. Ukurannya kepentingan minoritas sebagai warga negara mendapat perhatian sangat serius dalam bentuk kebijakan politik di lembaga legislatif.

*Kedua*, keterwakilan politik kelompok masyarakat minoritas untuk mendapatkan kursi di DPR RI, yakni bagaimana proses seseorang caleg dari kelompok minoritas bisa menjadi anggota legislatif. Di sini disoroti upaya yang dilakukan caleg tersebut untuk memenangkan dirinya, mulai dari proses penentuan caleg di internal partai hingga kemudian terpilih sebagai anggota legislatif. Keterwakilan kedua inilah yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini.<sup>12</sup>

Data Pileg 1999, 2004, dan 2009 menunjukkan bahwa keterpilihan anggota legislatif beragama Kristen tampaknya menurun dari setiap Pileg. Pada Pileg 1999, selisih presentasi anggota legislatif Kristen dengan penduduk beragama Kristen sangat tinggi yakni 7,77%, sementara pada Pileg 2004

---

Philips, *The Politics of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995). Keterwakilan politik dapat dikategorikan dalam dua hal, yakni: keterwakilan politik kelompok masyarakat minoritas untuk mendapatkan kursi di legislatif dan keterwakilan politik dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan oleh legislatif menyangkut kepentingan masyarakat minoritas melalui regulasi-regulasi yang dihasilkan.

<sup>12</sup> Pandangan ini disampaikan oleh Maswadi Rauf di ruangan dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik UI Salemba, pada hari Senin, 8 Agustus 2011 sekitar pukul 11.20 WIB.



selisihnya menjadi 6,19 %, dan Pileg 2009 selisihnya menurun lagi menjadi 4,15 %. Bisa diduga bahwa suara pemilih Kristen semakin tersebar ke partai-partai lain dan ke caleg-caleg yang bukan Kristen.

Sejumlah besar anggota DPR RI beragama Kristen justru menang di provinsi berbasis Islam yang kuat, seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Sulawesi Selatan (*data terlampir*). Misalnya Ribka Tjiptaning anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dalam Pileg 2004 dan Pileg 2009 menjadi caleg di Jawa Barat.<sup>13</sup> Dalam Pileg 2004, Ribka terpilih dari Dapil Jawa Barat III (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur).<sup>14</sup> Sebagai caleg nomor urut ke-2 pada Pileg 2004 dimana PDI Perjuangan mendapat 2 kursi di dapil ini, maka Ribka menjadi anggota DPR RI. Dalam Pileg 2009, Ribka caleg dari Dapil Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) di nomor urut ke-1.<sup>15</sup> Ribka mendapatkan suara terbesar di dapil tersebut dari PDI Perjuangan yakni 33.442 suara (20,29%),

---

<sup>13</sup> Satu contoh lain dari Partai Golkar dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 adalah Enggar Tiasto Lukito. Sebagai seorang keturunan Tionghoa yang menjadi calon legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII pada Pemilu tahun 2004, Enggar Tiasto dicalonkan di daftar urut calon no 1, yang menyediakan 9 kursi dari dapil tersebut. Enggar mendapatkan 43.378 suara dari BPP 232.688 suara. Enggar lahir dan bersekolah di daerah Cirebon sejak SD sampai SMA dan kemudian melanjutkan perkuliahan di Bandung. Karena Partai Golkar mendapatkan 3 buah kursi dari dapil Jawa Barat VII tersebut, maka Enggar terpilih otomatis menjadi anggota DPR RI.

<sup>14</sup> Data diolah dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2005).

<sup>15</sup> Data diolah dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2009-2014* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2010).

karena PDI Perjuangan hanya mendapat satu kursi di dapil tersebut, maka Ribka terpilih menjadi anggota DPR RI.

Kemenangan Ribka cukup mengherankan mengingat biodata Ribka justru tidak terkait langsung dengan dapilnya. Ribka lahir di Solo, seorang beragama Kristen, masa remaja di daerah Cililitan di Jakarta, pendidikan Sarjana kedokteran (S1) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Pekerjaan Ribka pun ada di sekitar Jakarta, yakni di RS Tugu Ibu Cimanggis, Karyabhakti Kalibata, dan Ciledug Jakarta. Dalam kampanyenya di Pileg 2004, Ribka sambil memeriksa kesehatan warga memasang foto dirinya sebagai seorang dokter. Masyarakat pun mengenalnya sebagai dokter yang memperhatikan kesehatan mereka yang memunculkan antusiasme masyarakat kepada dirinya.

Terdapat sejumlah faktor pendukung sehingga caleg-caleg Kristen tersebut terpilih, misalnya: nama besar partai, kedekatan dengan pemilih, pengaruh tokoh-tokoh lokal, sistem Pemilu, jabatan dan aksi (*action*) sebagai pengurus DPP, penentuan daerah pemilihan, dan beberapa pengaruh lain. Misalnya sistem Pemilu pada Pileg 2004 menggunakan sistem Pemilu proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Sistem itu memberikan peluang keterpilihan lebih besar sebagai anggota DPR RI bagi politisi Kristen yang mendapat nomor urut paling kecil di urutan DCT apabila tidak berhasil memperoleh suara melebihi ambang batas Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) seperti dialami Ribka.<sup>16</sup> Aspek lain nama besar partai, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

---

<sup>16</sup> *Buku Panduan Partai Damai Sejahtera: dalam rangka mewujudkan tata Kelola Partai Politik yang baik (good Political Party governance 2010-2015* (Jakarta: Sekretariat DPP PDS, 2010), 11.

Keterpilihan caleg-caleg Kristen di Pileg 2009 yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka khususnya di basis-basis non Kristen tentu bukan karena mereka beragama Kristen, yang justru bertolak belakang dengan agama dari basis pemilih mereka, tetapi sangat mungkin karena mereka masuk ke partai nasionalis besar.<sup>17</sup>

#### **1.4. Perwakilan Politik dan Isu Politik Identitas**

Gambaran fakta-fakta di atas akan dikaitkan dengan teori politik, apakah fakta tersebut mendukung, sama, atau tidak sama dengan teori ilmu politik? Dalam pandangan Anne Philips, politik keterwakilan mendapat wujudnya dalam politik kehadiran (*politics of presence*) dimana keterwakilan politik itu hadir secara langsung di lembaga legislatif dan tidak hanya sekedar diwakilkan ke pihak lain. Dua fungsi, kontrol dan kesetaraan, hanya mungkin dengan kehadiran konkrit kelompok minoritas di lembaga negara, termasuk di legislatif. Menurut Philips, tidak mungkin kalangan mayoritas berbicara tentang kepentingan minoritas ketika yang dibicarakan itu adalah *in se* tentang diri kalangan minoritas itu sendiri. Perlu ada perwakilan konkrit dan langsung dari kalangan minoritas di parlemen untuk mengontrol pengambilan kebijakan politik di parlemen.<sup>18</sup>

Dalam Pileg 2004, PDS memegang prinsip menghadirkan keterwakilan politik Kristen di DPR RI sebagai isu kampanye. Hasilnya PDS mendapatkan 13 kursi di Pileg

---

<sup>17</sup> Upaya PDI Perjuangan terkait angket BBM tertuang dalam *Keputusan DPR RI Nomor 05/DPRRI/IV/2008*.

<sup>18</sup> Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), 30-31.

2004 tetapi gagal pada Pileg 2009. Sebaliknya PDI Perjuangan tidak menempatkan isu keterwakilan minoritas sebagai isu kampanye untuk meraih kursi di DPR RI baik Pileg 2004 dan Pileg 2009. Di PDI Perjuangan, semua kader diperlakukan setara sejak awal dan bahkan dianggap tabu membicarakan perihal seorang caleg dari kelompok minoritas atau tidak.<sup>19</sup> PDI Perjuangan lebih mengutamakan kinerja kepartaian untuk merebut simpati rakyat.

Pandangan Clifford Geertz tentang ikatan primordialisme dalam politik mengatakan bahwa konflik politik di negara-negara berkembang disebabkan oleh adanya pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.<sup>20</sup> Maswadi Rauf mengkategorikan ikatan primordial dalam konteks Indonesia dalam dua bagian yakni ras/suku dan agama.<sup>21</sup> Bagi caleg-caleg Kristen di PDI Perjuangan dan Partai Golkar, teori ini tidak terlalu tepat karena isu primordial tidak menjadi satu-satunya digunakan dalam penentuan DCT dan tidak menjadi strategi yang dipakai terhadap pemilih karena mereka malah menang di basis Muslim.

Teori partai politik dari Alan Ware menegaskan bahwa penguatan pada kandidat-kandidat yang akan di usung oleh

---

<sup>19</sup> Diskusi Penulis tentang hal ini juga dilakukan dengan Nikolas simanjuntak, caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Pileg 2004 dan Pileg 2009.

<sup>20</sup> C. Geertz (ed), *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, (New York: The Free Press, 1963), 105-157-

<sup>21</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: sebuah penjajagan teoritis* (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2000), 62-64.

partai politik sekarang ini lebih penting daripada sekedar menjual ideologi partai kepada pemilih. Ideologi menjadi penting ketika program-program partai yang terkait dengan ideologi tersebut benar-benar dilakukan secara maksimal dan menemukan bentuknya ketika program-program itu konkrit dilihat oleh masyarakat. Dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan kualitas kader yang dikenal oleh publik dan layak dijual ke publik yang hendak diusung oleh partai politik. Hal sama dengan Partai Golkar yang konsisten menempatkan minimal 10 orang anggota DPR RI beragama Kristen dalam Pileg 1999, 2004, dan 2009.

Sementara Affan Gaffar melihat kuatnya pengaruh aliran agama dan ketaatan pada tokoh atau figur tertentu dalam menentukan pilihan dalam Pemilu di Indonesia. Selain itu Affan Gaffar menawarkan pentingnya mengubah sistem pencalonan dengan menggunakan nomor urut dalam penentuan pencalonan yakni dengan menempatkan figur-figur yang paling layak untuk dipilih oleh rakyat. Figur terbaik dan yang mendapat dukungan rakyatlah yang paling tepat untuk menjadi wakil rakyat. Dalam konteks ini, keterwakilan orang-orang Kristen dalam Pileg 2004 adalah bagian dari kritik Affan Gaffar, dan keterpilihan caleg-caleg Kristen pada Pileg 2009 sejajar dengan harapan dari kritik Affan Gaffar tersebut.

## **BAB II**

### **POLITIK IDENTITAS TIDAK TABU DALAM SISTEM PERWAKILAN POLITIK**

Praktek keterpilihan caleg-caleg Kristen di basis Islam sangat tepat jika dilihat dari kajian sejumlah teori. Kerangka teori berikut ini disesuaikan dengan gagasan demokrasi terkait keterwakilan politik Kristen di PDI Perjuangan dan Partai Golkar dalam Pileg 2004 dan Pileg 2009. Bagian ini secara spesifik akan menguraikan bagaimana memahami keterpilihan para caleg beragama Kristen jika dilihat dari aspek pandangan para ahli politik, yakni teori-teori politik identitas yang justru sangat bertentangan jika melihat keterpilihan para caleg beragama Kristen tersebut.

Dua teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, teori Alan Ware tentang partai politik dimana peranan partai dalam rekrutmen kandidat lebih dari sekedar menjual ideologi dari dimana dalam sistem pemerintahan modern, partai politik merupakan salah satu pilar utama untuk merealisasikan masyarakat yang berdemokrasi. Dalam konteks ini politik kehadiran (*politics of presence*) secara konkrit di lembaga negara sebagaimana dimaksudkan Anne Philips menjadi refleksi ketika politik kehadiran merupakan bentuk kontrol publik dan tuntutan kesetaraan politik yang merupakan fondasi politik kehadiran.

*Kedua*, pandangan Clifford Geertz tentang ikatan primordialisme dalam politik yang beberapa pandangannya mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa untuk konteks Indonesia dua ikatan primordialisme terpenting

adalah suku dan agama. Teori ini sejajar dengan penelitian yang dilakukan oleh Affan Gaffar terkait argumentasi keterpilihan caleg di Pulau Jawa yang melihat aspek aliran dalam agama dan ketaatan terhadap pemimpin menjadi sangat dominan dalam Pemilu selama Orde Baru. Dalam konteks keterpilihan masa sekarang, khususnya melihat keterpilihan caleg-caleg Kristen di basis Islam yang kuat maka menjadi tepat pandangan dari George McTurner Kahin tentang semangat dan jiwa nasionalisme yang tertanam sangat dalam di benak para *founding fathers* menjadi perekat yang kuat bagi negara bangsa seperti Indonesia yang multi suku dan multi agama hingga dewasa ini untuk melengkapi pandangan Geertz ini.

Keberadaan partai politik pun sebagaimana dimaksudkan oleh Burhan Djabir Magenda walaupun bernafaskan agama atau suku, tetapi tujuan utamanya adalah penguatan pada semangat nasionalisme dimaksud. Keseluruhan teori tersebut akan diuraikan satu persatu dimulai dari pemikiran terbaru dari Alan Ware.

### **2.1. Figur, Program Partai, atau Ideologi Partai (?)**

Menurut Alan Ware,<sup>22</sup> dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh public dan yang bisa diterima oleh public secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari

---

<sup>22</sup> Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996), 21-27, 150-162, 258-267.

pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur kesamaan terkait peranan elit partai. Kemungkinan terjadinya variasi dalam proses penempatan caleg tersebut biasanya tidak terlepas dari adanya faksi-faksi yang berkembang di organisasi partai. Terdapat kebutuhan bagi elit dalam mengendalikan jalannya organisasi partai dengan alasan kestabilan internal dan menghindarkan terjadinya perpecahan.<sup>23</sup>

Terkait dengan proses pencalonan kandidat-kandidat, Alan Ware menjelaskan bahwa ketika potensi individu yang layak jual ke tengah pemilih dan dianggap mampu menaikkan suara partai politik ditempatkan sebagai prioritas, maka peranan partai tidak lagi menjadi dominan.<sup>24</sup> Memang tetap perlu bagi partai untuk mensosialisasikan dirinya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana calon yang bersangkutan mampu memperkenalkan dirinya ke masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih. Ketika kandidat tersebut sudah mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat maka tugas partai bisa melihat sebesar apa tingkat penerimaan masyarakat itu terhadap diri seorang calon. Artinya, selama tidak ada riak-riak penolakan entah melalui media atau ada kelompok masyarakat yang berusaha menolak calon dimaksud, maka calon tersebut tetap dimajukan oleh partai dan orang bersangkutan tidak terlalu direpotkan oleh kendala-kendala. Alasan partai politik menempatkan calon-calon di daerah

---

<sup>23</sup>Ware, *Political Parties*, 109.

<sup>24</sup> Ware, *Political Parties*, 21.



pemilihan tertentu didasarkan oleh pertimbangan bahwa partai sudah sangat yakin kandidatnya dikenal dan mampu meraih dukungan pemilih secara maksimal. Persoalan partai untuk mensosialisasikan dirinya supaya pemilih memilih partai tersebut menjadi sangat minimal.

**a. Ideologi semakin ditinggalkan**

Alan Ware menjelaskan adanya riset yang menemukan bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi, tapi lebih penting adalah bagaimana partai itu bisa terpresentasikan untuk mampu mendapatkan orang-orang terpilih, lalu program-program yang diusung oleh orang-orang yang terpilih tersebut. Alan Ware melihat bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi sekarang, yang penting adalah bagaimana partai bisa mendapatkan orang-orang yang bisa menyumbangkan suara untuk partai, dan itu biasanya melalui program-program. Tentu saja dalam hal ini adalah orang-orang yang bisa menaikkan suara partai untuk mendapatkan kursi di legislatif.

Ada dua hal yang saling terkait mengenai masalah ideologi yang sudah mulai bergeser tersebut. Perbedaan pertama sebagaimana dikemukakan Alan Ware adalah bahwa partai-partai membuat perbedaan-perbedaan yang kontradiksi dimana partai-partai saling bertentangan yang tampak pada pemilih yang terkotak-kotak oleh ideologi menjadi sebuah pembeda yang sangat jelas. Alan Ware<sup>25</sup> menjelaskan bahwa masalah dalam mencoba mereduksi analisis ideologi partai-partai ini menjadi representasi spasial program mereka sangat

---

<sup>25</sup> Ware, *Political Parties*, 21.

mungkin partai-partai tersebut membuat seruan yang sangat berbeda, dan kontradiktif, kepada kelompok pendukung yang berbeda. Partai Peronis di Argentina, misalnya, memiliki sayap kiri dan kanan yang cukup berbeda; ideologinya tidak dapat direduksi menjadi satu posisi dalam spektrum. Penjelasan tersebut menunjukkan ada perbedaan dari kelompok masyarakat atas adanya perbedaan ideologi yang diusung oleh partai. Ideologi berperan menjadi sesuatu yang menciptakan perbedaan. Contoh di Argentina dimana Partai Peronist memiliki perbedaan yang cukup kuat antara sayap kiri dan sayap kanannya. Ideologinya tidak bisa diminimalisasi untuk menempati satu posisi tunggal.<sup>26</sup>

Tetapi walaupun perbedaan ideologi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat, namun Alan Ware tetap mengikuti pandangan Arend Lijhpart tentang politik partai di negara berkembang, dimana diulangi lagi bahwa memang ideologi itu dalam inter relasi antar partai tidak kuat. Hal kedua yang ditegaskan oleh Alan Ware terkait ideologi adalah bahwa berbeda dengan spectrum kiri dan kanan, dimensi lain adalah dimensi populisme dan dimensi nasionalis sebagai dimensi yang jauh berbeda dan bisa menjadi kabur dan tidak kelihatan. Alan Ware menjelaskannya<sup>27</sup> bahwa berbeda dengan spektrum kiri/kanan klasik, populisme dan nasionalisme adalah dimensi yang jauh lebih mungkin diungkapkan oleh reaksi partai terhadap peristiwa daripada dalam pernyataan niat formal apa pun. Analisis program partai tentu saja bias untuk mengungkap dimensi kiri/kanan daripada dimensi lain. Maksud dari uraian di atas adalah bahwa

---

<sup>26</sup>Ware, *Political Parties*, 21.

<sup>27</sup> Ware, *Political Parties*, 21.

ideologi ini bisa tidak tampak, tetapi populisme dan sifat nasionalisme partai jauh lebih penting yang diwujudkan dalam program partai. Bukan lagi penonjolan terhadap ideologi antara kiri dan kanan yang terutama, tetapi sejauh mana reaksi partai dalam program konkritnya tanggap terhadap praktek-praktek politik yang kena langsung dengan masyarakat yang terlihat dari program-programnya yang populis dan berciri nasionalis.

Sebaliknya program individu jauh lebih penting untuk meraih suara. Reaksi partai yang demikian ini sangat berbeda dengan spektrum kiri dan kanan yang disampaikan di penjelasan awal di atas. Karakter ini bisa menghapus dimensi sayap kiri dan sayap kanan, yang bahkan dalam konteks kajian ini dianalogikan adanya dimensi antar yang berbeda suku atau berbeda agama untuk sebuah keterpilihan. Dalam konteks ini program partai dan ideologi menjadi dua hal sangat penting ketika menggunakan partai yang menentukan keterpilihan dari kandidat-kandidat yang diusulkan. Memang dalam sistem pemilihan umum tertutup, posisi dan pengenalan terhadap partai politik menjadi sangat penting karena partai menempatkan orang-orangnya.

#### **b. Program Partai lebih memikat**

Teori kedua dari Alan Ware adalah terkait penetrasi dari partai-partai untuk masuk dan dikenal oleh masyarakat luas yang menjadi pemilihnya. Terkait dengan itu, Alan Ware menjelaskan bahwa penetrasi partai politik dalam masyarakat, yakni bagaimana partai memasuki masyarakat itu untuk turut mempengaruhi tingkat kompetisi partai politik di masyarakat. Ada dua jenis penetrasi yang dimiliki oleh partai terhadap

masyarakat, yakni penetrasi yang berciri lemah atau kurang kuat dan satu lagi penetrasi yang sangat mendalam masuk ke pengenalan luas dari masyarakat terhadap partai tersebut. Alan Ware menjelaskannya<sup>28</sup> bahwa secara umum, penetrasi partai atas warga mempengaruhi kompetisi di antara partai-partai dalam dua cara. Penetrasi yang lemah tentu saja lebih gampang berlaku bagi partai-partai baru untuk menampakkan diri dan bersaing dengan partai-partai mapan. Salah satu faktor yang membuat partai baru gampang bertumbuh di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada permulaan 1990 an adalah ketidakhadiran jaringan pemilih untuk mendukung partai-partai mapan dengan keberatan dari mantan partai-partai komunis. Setiap orang dapat membentuk partai baru dengan harapan akan bertukar kemenangan dengan gampang karena partai mapan sedang berjuang meregenerasikan loyalitas dari para pemilih mereka. Tentu saja ada banyak faktor institusional yang membatasi kesempatan bagi peserta-peserta baru yang potensial dalam membangun demokrasi liberal (sebagai aspek hukum Pemilu) tetapi dengan memastikan bahwa penetrasi partai atas masyarakat berkontribusi untuk membatasi kesempatan-kesempatan ini.]

Jalan pertama dari partai-partai untuk bersaing adalah jika penetrasi dari sebuah partai kurang (*the less penetration*) memasuki kehidupan masyarakat, maka hal ini dikaitkan bukan lagi hanya terhadap partai tetapi justru terhadap individu. Maka akan lebih mudah bagi partai yang baru untuk memasuki kehidupan masyarakat itu dan berkompetisi dengan partai lama. Untuk mencari perbandingan terkait konteks penelitian ini maka menjadi penting juga mengetahui apakah

---

<sup>28</sup> Ware, *Political Parties...*, 150.

ada partai-partai baru yang menang di basis pemilihan tersebut dan apakah mereka bisa bersaing dengan partai besar? Dari data dalam penelitian ini ternyata partai-partai kecil di daerah pemilihan ternyata justru tidak bisa bersaing secara signifikan. PDI Perjuangan menjadi sangat menonjol di Subang dan Sumedang, dan seterusnya. Berarti bisa dilihat bahwa penetrasi partai ini sudah begitu mendalam, sehingga bagi partai-partai baru kompetisi partai yang baru berdiri menjadi sangat kecil, sehingga kompetensi bagi partai baru menjadi sangat kecil. Perbandingan ini bisa sekilas dilihat dari perolehan kursi partai-partai di basis pemilihan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Jalan kedua terkait penetrasi partai menyangkut persaingan partai di tengah masyarakat yakni bahwa semakin besar penetrasi partai terhadap masyarakat maka partai itu semakin kuat untuk ingin berkonsentrasi dalam merebut dukungan suara dari pemilih setianya. Menurut Alan Ware,<sup>29</sup> penetrasi sosial yang lebih besar dari partai yang lebih banyak mereka usahakan adalah mencoba berkonsentrasi mempertahankan dukungan para loyalis mereka. Dan lebih banyak partai berada dalam sebuah sistem ‘penetrasi tinggi’, selebihnya semua bermaksud berfokus pada sisa-sisa dukungan para loyalist mereka. Dalam lingkaran ini, mereka memiliki sedikit insentif untuk bertindak sebagai partai yang terbuka untuk semua (*catch-all*) yang mencari pemilih dari rentang yang luas kelompok masyarakat. Dalam sistem konsosiasional di Belanda (1917 hingga akhir 1960an) merupakan contoh dari penetrasi partai yang luas oleh semua partai besar. Itu semua adalah sistem partai yang sangat stabil,

---

<sup>29</sup> Ware, *Political Parties.*, 150.

tidak ada perdebatan apapun apapun kecuali jika karena permohonan tertinggi dari pengikut setia yang dibuat oleh partai-partai terhadap pemilih.”]

Uraian di atas menunjukkan bahwa jalan persaingan kedua adalah adanya upaya dari partai-partai untuk melakukan penetrasi yang besar ke tengah masyarakat untuk meraih dukungan pemilih, entah berdasarkan agama, suku, atau program partai yang lain. Mereka menciptakan pemilih-pemilihnya yang sudah sangat loyalist terhadap partai bersangkutan. Penetrasi partai yang sudah sedemikian besar memungkinkan partai tersebut bahkan memenangkan seluruh kursi dari sebuah daerah yang berkemungkinan merupakan pemilih loyalist terhadap sebuah partai tertentu. Penciptaan dari penetrasi yang besar terhadap pemilih membuat partai memiliki pemilih loyalist di sejumlah daerah.

Situasi bahwa partai memiliki pemilih loyalist tersebut memungkinkan partai mendapatkan seluruh (*catch-all*) kursi dalam sebuah daerah. Dan sebaliknya, persaingan yang besar dari partai-partai terhadap para pemilih loyalistnya membuat partai-partai tidak bisa mendapatkan pemilih yang lain untuk menjadi pemilihnya sebagaimana partai itu maksudkan karena sejumlah pemilih yang lain juga merupakan pemilih loyalistnya. Masing-masing caleg diciptakan untuk bersaing yakni menyangkut kemampuan *capital/modal*, jaringan/*networking*, kemampuan kampanye (*campaign*), dan berbagai hal lain untuk memenangkan suara. Posisi partai politik menjadi nomor dua untuk upaya kemenangan tersebut. Jadi ini bisa dihubungkan, bahwa sistem penetrasi ini sudah dilakukan oleh partai masing-masing. Memang partai-partai

sudah melakukan upaya penetrasi ini baik yang berciri lemah maupun yang berciri kuat.

Lalu bagaimana dengan seleksi kandidat dipahami oleh Alan Ware? Terkait dengan seleksi kandidat dan kepemimpinan, Alan Ware menjelaskan bahwa kepemimpinan di internal partai tidak terlepas dalam proses menentukan salah satu seleksi untuk pencalonan. Namun seleksi tersebut, walaupun mengedepankan kepemimpinan seorang calon di tingkat kepengurusan partai, tetap harus mempertimbangkan sejauh mana calon dimaksud mendapat tingkat penerimaan ketika dijual di tengah pemilih untuk dipilih oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Alan Ware<sup>30</sup> menjelaskan akan orang-orang yang teraspirasi untuk pencapaian tertinggi kepemimpinan partai sekarang ini memiliki karier yang dicakup baik profil tinggi yang dipilih dari pegawai public maupun selalu terkait posisi dengan organisasi partai tetapi tanpa bervariasi. Dengan tanpa pengalaman di kantor-kantor public terpilih, pemimpin masa depan tidak dapat meyakinkan orang-orang yang dapat dipersalahkan untuk pemilihan sehingga setiap orang memiliki kepercayaan untuk menarik perhatian massa pemilih.”]

Terkait dengan seleksi terhadap kandidat dan kepemimpinan di atas, Alan Ware memberikan argumentasi bagaimana seleksi yang dilakukan untuk keterpilihan yakni untuk dipilih masyarakat terkait alasan mengapa partai memilih orang-orang tertentu untuk duduk pada kursi-kursi pemilihan itu.

---

<sup>30</sup> Ware, *Political Parties*, 258.

### c. **Kandidasi Figur Politik sangat menentukan**

Ketika bicara partai politik terkait kandidat untuk duduk di kursi legislatif, menurut Alan Ware, partai politik akan menempatkan orang-orangnya yang mempunyai tingkat tertinggi dalam kepemimpinan. Dan juga mempunyai tingkat tertinggi dalam hal elektabilitas dalam pemilihan. Ini juga terkait dengan posisinya dalam partai politik, jika tidak ada pengalaman dalam kepemilihan politik (*public office*), maka posisi *leader* ini tidak cukup diyakinkan pada proses pemilihan.

Jadi partai juga pada intinya menjadi rasional kalau seseorang tidak punya latar belakang (*back ground*) kepemimpinan atau kemungkinan besar untuk terpilih, partai juga tidak akan menempatkan dia pada posisi nomor urut yang sangat besar seperti nomor urut 1, 2, atau 3. Karena sebuah partai sama halnya bersikap bunuh diri bila dalam penentuan calon menempatkan sosok yang tidak layak jual di tengah masyarakat pemilih.

Terkait penentuan kandidat yang akan diusung, maka partai melakukan seleksi yang tersentral yakni mengikuti hukum umum sebagaimana diatur oleh partai secara detail. Selain itu ada juga seleksi yang tidak tersentral yang merupakan kebijakan dari partai yang tidak tersurat secara jelas. Kemungkinan ada peluang bagi calon-calon yang diunggulkan atau calon-calon yang maju tidak mengikuti hukum yang umum tetapi merupakan pertimbangan saja dari pengambil kebijakan untuk penentuan calon tersebut. Namun terkait perihal diatas Alan Ware<sup>31</sup> menjelaskan bahwa bahkan

---

<sup>31</sup> Ware, *Political Parties*. 263.



ketika partai-partai dimana peranan langsung dari pusat dalam menyeleksi kandidat menjadi tidak signifikan, maka pusat mungkin membangun hukum dan prosedur, yang secara tidak langsung, sangat penting dalam memutuskan jenis kandidat apa yang akan diseleksi sehingga ada kebijakan partai tentang kuota perempuan atau bagi kelompok sosial yang lain – menjadi penting dalam mengatur agenda bagi partai-partai lokal ketika hal itu membenarkan seleksi kandidat bahkan ketika pusat tidak dapat mengubah keputusan atas partai-partai ini.

Alan Ware menyebutkan bahwa meskipun dalam partai sendiri ada peran langsung dan terpusat dalam menyeleksi kandidat yang penting, pihak pengurus pusat (*centre*) bisa juga menetapkan peraturan atau prosedur secara tidak langsung tetapi sangat penting dalam memutuskan kandidat seperti apa yang harus dipilih. Alasannya tentu saja karena bagaimanapun partai akan sangat berkepentingan menempatkan orang yang satu etnik dengan pemilih, yang satu agama dengan pemilih. Namun mungkin ada peraturan di internal partai bahwa hal itu tidak menjadi pilihan baku sepanjang seseorang itu bisa diterima, bisa mewakili partai, dan tingkat penerimaan pemilih terhadap yang bersangkutan bisa menjadi cukup besar.

Maka menjadi penting bahwa partai memiliki peraturan sendiri yang menempatkan seseorang secara langsung walaupun tidak sesuai dengan hukum umum yang berlaku di partai tersebut. Mestinya partai menempatkan orang yang diharapkan memperoleh suara besar karena ternyata orang bersangkutan memang bisa diterima. Mungkin ada peraturan yang tidak langsung karena melihat

individunya, tidak mengikuti paham yang umum itu. Terkait dengan rekrutmen politik oleh partai sebagaimana diungkapkan oleh Alan Ware menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik.<sup>32</sup> Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

Maka dalam konteks keterpilihan caleg-caleg Kristen dalam penelitian ini akan terlihat jelas faktor apakah yang paling dominan yang menentukan keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut bila dikaitkan dengan teori Alan Ware di atas. Akan terlihat jelas apakah faktor sosok atau figur dari caleg yang bersangkutan yang paling dominan atas keterpilihannya, atau justru faktor partai yakni pelaksanaan program partai yang dilakukan terus menerus kepada warga atas nama partai yang bersangkutan, atau justru pemilih tersebut adalah pemilih tradisional yang lebih melihat ideologi partai. Ideologi dimaksud yakni warga menentukan pilihannya karena melihat partainya, yakni karena PDI Perjuangan atau karena Partai Golkar, warga tidak peduli apakah caleg yang diusung kedua partai dimaksud dikenal warga atau tidak, sudah berbuat banyak kepada warga atau tidak.

Ketiga level pengaruh tersebut sebagaimana dimaksudkan Alan Ware akan diuji dalam signifikansi penelitian ini, yang mana dari ketiganya memiliki pengaruh paling dominan. Bila merujuk bagaimana keterpilihan calon legislatif sebagaimana disampaikan Alan Ware di atas, maka

---

<sup>32</sup> Ware, *Political Parties*, 5-10. Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 89-90.

penting merefleksikan ulang pandangan Anne Philips tentang politik kehadiran (*politics of presence*).

## 2.2. Teori Kehadiran (Politics of Presence)

Anne Philips melihat bahwa fondasi dasar bagi politik kehadiran adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol public yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung kalangan minoritas dalam lembaga-lembaga negara. Philips mengatakan,<sup>33</sup> sekurang-kurangnya ada dua prinsip terpenting yakni kontrol public dan kesetaraan politik sebagai dasar bagi politik kehadiran. Kontrol dibutuhkan ketika aspirasi warga tidak diaktualisasikan, sementara kesetaraan sungguh dibutuhkan ketika ada sejumlah kelompok yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Dua prinsip ini merupakan bingkai bagi setiap politik kehadiran. Maka sekurang-kurangnya ada dua prinsip dalam politik kehadiran yakni kontrol masyarakat, dan persamaan politik untuk menyediakan fondasi yang baik bagi politik kehadiran (*politics of presence*). Bagi Philips,<sup>34</sup> terhadap hal itu, sekurang-kurangnya dua prinsip tentang kontrol public dan kesetaraan politik menyediakan sebuah basis yang baik bagi politik kehadiran. Kontrol hanya aspirasi pokok jika orang-orang yang mewakili tidak ada di sana secara actual; kesetaraan hanya sungguh dibutuhkan bila ada beberapa kelompok memiliki pengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok lain.

---

<sup>33</sup> Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), 30-31.

<sup>34</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 30.

Kontrol menjadi sangat penting ketika para wakil tidak mampu membawa aspirasi yang diwakili secara actual; sementara kesetaraan hanya akan sungguh dibutuhkan bila terdapat adanya beberapa kelompok yang berpengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ini memaknai bahwa semua warga negara harus memiliki kewenangan yang setara atas hasil yang diperoleh. Bagi Anne Philips,<sup>35</sup> kesetaraan itu tidak spesifik hanya merupakan suatu jenis penanganan. Itu dapat dimaksudkan bahwa semua warga Negara harus memiliki kesetaraan kekuasaan atas hasil (*outcomes*) sehingga semua preferensi politik harus dianggap memiliki beban yang setara sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama menentukan pilihan untuk kandidat yang menang. Keterwakilan politik yang dimaksudkan Anne Philips menggunakan kategori minoritas perempuan dalam politik, tetapi teori ini setidaknya membantu melihat keterwakilan kelompok minoritas secara umum. Salah satu kelompok minoritas politik adalah keterwakilan politik dalam bidang agama Kristen dalam keterpilihannya sebagai anggota DPR RI.

Sayangnya, kata Philips, kebanyakan pemilih hanya memiliki pemahaman sangat terbatas atau bahkan tidak peduli menyangkut kemampuan atau talenta-talenta para kandidat yang mestinya menjadi dasar bagi penentuan pilihan politik pemilih. Philips mengatakan,<sup>36</sup> kebanyakan pemilih memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang kandidat baik tentang talenta mereka maupun tentang kebijakan-kebijakan mereka untuk menjadi dasar bagi pilihan politik bagi pemilih. Karena

---

<sup>35</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 36.

<sup>36</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 1.

itu kebanyakan pemilih akan mempertanyakan bahwa hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian utama. Kita semua mungkin mengharapkan untuk diwakili oleh orang yang kita anggap lebih bijaksana atau lebih mampu daripada diri kita sendiri tetapi berhadapan dengan pilihan diantara sejumlah atau yang lebih berkompeten dengan sejumlah orang yang memiliki pandangan yang dapat kita bagikan, kita biasanya merasa lebih tenang dalam memberikan dukungan kita kepada yang terakhir. Partai politik menyediakan kepada kita kepentingan-kepentingan jangka pendek bagi pilihan-pilihan politik kita: kita cenderung lebih memperhatikan label daripada sosok, dan berharap kita tidak dikecewakan.

Anne Philips berpatokan pada pencerminan atau keterwakilan deskriptif dimana penting mempertanyakan apa yang perwakilan sudah lakukan untuk pemilihnya lebih dari sekedar mengetahui siapa yang terpilih menjadi anggota legislatif.<sup>37</sup> Maka menjadi sangat penting politik gagasan (*politics of ideas*) dimana ketidak-setaraan menjadi alasan bagi pengucilan secara politik.<sup>38</sup> Anne Philips menegaskan bahwa perbedaan mestinya diterima dalam kaitan berbagai pengalaman dan identitas orang-orang yang dapat mendasari (*constitute*) berbagai jenis kelompok yang berbeda.

---

<sup>37</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 4. Pandangan ini pada awalnya disampaikan oleh Hanna Pitkins, yang kemudian diikuti oleh Anne Philips untuk menegaskan argumentasinya tentang pencerminan keterwakilan. H. Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley, 1967) dalam *Ibid.*, hal. 4.

<sup>38</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 6.

Di era kontemporer, kehadiran politik sering muncul dari gerakan sosial baru sebagai refleksi ketidaksetaraan kelas sosial antara satu dengan yang lain, yakni sepanjang kelas sosial terdapat ketidaksetaraan (*the pre-eminent group of inequality*). Perjuangan atas ketidaksetaraan melahirkan kalangan liberalis yang menegaskan tidak adanya perbedaan dan posisi sosialis yang menekankan pada pengeliminasian. Menurut Philips,<sup>39</sup> permintaan kontemporer bagi kehadiran politik sering muncul dari gerakan sosial baru, dan mereka merefleksikan ketidak-setaraan kelas social antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Inilah poin penting tentang perbedaan sepanjang kelas sosial dianggap sebagai ketidaksetaraan kelompok yang paling unggul, argument dapat terbagi secara relative rapi diantara posisi liberal yang tampaknya memotong perbedaan (kita seharusnya setara tanpa ada perbedaan), dan posisi kalangan sosialis yang bertujuan mengeliminasi (kita tidak mungkin setara selama perbedaan kelas masih ada).

Philips mengutip literatur ilmu politik Arendt Lijphart terkait penekanan kehadiran politik (*political presence*). Teori Lijphart tentang keterwakilan politik tanpa perbedaan kelas sangat berpengaruh dengan teori demokrasi persekutuan atau consensus (*theory of consociational or consensual democracy*) yang berfokus pada pembagian masyarakat menyangkut agama atau budaya, atau kedua-duanya sekaligus. Lijphart berargumen: “*majority rule is not only undemocratic but also dangerous, because minorities that are continually denied access to power will feel excluded and discriminated against and will lose their allegiance to the*

---

<sup>39</sup> Philips, *The Politics Of Presence*, 8.

*regime*".<sup>40</sup> Pemerintahan mayoritas tidak hanya bermakna tidak demokratis, tetapi juga berbahaya, karena minoritas yang terus ditolak mendapatkan akses terhadap kekuasaan akan selalu merasa tersingkirkan dan menjadi lawan yang terdiskriminasikan dan mereka kehilangan peluang terhadap kekuasaan.

Philips mengutip definisi demokrasi yang disumbangkan *Democratic Audit of the UK* yang mengidentifikasi kontrol public dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsip demokrasi. Philips katakan,<sup>41</sup> bahwa definisi yang lebih bermanfaat ditawarkan oleh *Democratic Audit* dari Inggris, yang mengidentifikasi kontrol public dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsip demokrasi, dan mengambil keduanya sebagai patokan perlawanan untuk mengevaluasi demokrasi kontemporer. Tidak ada sistem yang dapat mengklaim untuk menjadi demokratik jika tidak mengenal legitimasi dari dua tujuan ini; dan demokrasi dapat ditempatkan sepanjang ketergantungan terus menerus tentang bagaimana prinsip ini direalisasikan dalam prakteknya. Dalam kerangka kerja demokrasi langsung, kontrol adalah sebuah fungsi kehadiran; karena kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik secara sederhana tergantung pada kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang relevan, dan orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan kehilangan kesempatan mereka memberikan kontrol.

---

<sup>40</sup> Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries* (New Haven, 1984), 22-23.

<sup>41</sup> Lijphart, *Democracies*, 27.

Bersandar pada pertanyaan Charles Beitz apakah kesetaraan individual berdampak pada perluasan kesetaraan diantara kelompok sosial termasuk kemungkinan pemilih memiliki pengaruh yang sejajar dalam komposisi pemerintahan yang dipilih,<sup>42</sup> Philips berargumen bahwa alasan bagi kehadiran politik tidak dapat dipandang sekedar pengambilan kesimpulan transparan (*transparent deduction*) baik dari kontrol public maupun kesetaraan politik. Kesetaraan kehadiran (*equality of presence*) sudah implisit dalam partisipasi politik, namun hal itu tidak serta merta implisit dalam keterwakilan politik. Philips mengatakan,<sup>43</sup> isu pertama sangat baik didekati dengan menganggap perbedaan antara partisipasi politik dengan keterwakilan politik, karena, sementara kesetaraan kehadiran sudah implisit dalam yang terdahulu (partisipasi politik), namun hal itu tidak serta merta implisit dalam yang terakhir (keterwakilan politik). Literatur demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial yang khusus sebagai sebuah kegagalan dalam dirinya sendiri secara terang benderang dari demokrasi.

Literatur demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial

---

<sup>42</sup> C.R. Beitz, *Political Equality: An Essay in Democratic Theory* (Princeton, 1989), 127-128. Pandangan ini juga ditemukan dalam Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), 30-31.

<sup>43</sup> Philips, *The Politics*, 30-31.



yang khusus sebagai sebuah kegagalan dalam dirinya sendiri secara terang benderang dari demokrasi.<sup>44</sup>

### **2.3. Ikatan Primordial dalam Politik**

Adakah unsur primordial dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen di basis Islam yang kuat? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Menurut Clifford Geertz, dominasi kelompok kepentingan politik tertentu terhadap kepentingan yang lebih lemah cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bersifat primordial. Konflik politik di negara-negara berkembang disebabkan oleh adanya perbedaan dan pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial. Menurut Geertz, ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang karena disebabkan oleh keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu, sehingga ikatan primordial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan orang lain.

Menurut Maswadi, analisis Geertz mengenai konflik politik dan stabilitas politik di negara-negara yang baru terbentuk ditinjau dari kesetiaan primordial dan kelompok primordial memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Terkait dengan studi Clifford Geertz mengenai sentimen

---

<sup>44</sup> Philips, *The Politics*, 31-32.

primordial di negara-negara berkembang yang mempunyai pengaruh luas, Maswadi mengatakan,<sup>45</sup> bahwa Geertz mempelajarinya dari sudut keterikatan anggota-anggota masyarakat terhadap kelompok primordial mereka masing-masing. Dengan mempelajari kelompok-kelompok primordial dan kesetiaan warga masyarakat terhadap kelompok-kelompok primordial, terbukalah sebuah cakrawala baru dalam konflik politik di Negara-negara berkembang, yang untuk konteks Indonesia pada dasawarsa 1950an dan 1960an.

Maswadi menjelaskan bahwa kelompok primordial memainkan peranan penting dalam teori konflik Geertz karena teori tersebut dibangun atas konsep primordial. Istilah itu menghasilkan beberapa istilah lain yang berhubungan erat, seperti ikatan primordial, sentimen primordial, dan kesetiaan primordial. Kelompok primordial adalah kelompok yang lebih besar dari keluarga dan lebih kecil dari bangsa yang didasarkan atas ikatan primordial. Terkait dengan itu, Maswadi menjelaskan<sup>46</sup> bahwa yang dimaksud dengan ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang disebabkan

---

<sup>45</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Politik. Sebuah penjajagan teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, 2000), hal. 58. Tulisan Maswadi Rauf ini disadur dari buku Clifford Geertz (penyunting), *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika* (New York: The Free Press, 1963), 105-157.

<sup>46</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 62.

keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu. Jadi ikatan primordial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan orang lain. Kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Sebuah kelompok yang keanggotaannya didasarkan atas persamaan ras/suku dan/atau agama dapat dikategorikan sebagai kelompok primordial.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Maswadi menjelaskan juga bahwa orang yang berasal dari suku tertentu umpamanya akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama, meskipun tidak selalu sama, ada kemungkinan mereka juga berasal dari daerah yang sama. Kelahiran seseorang dalam kelompok ras atau suku tertentu sudah jelas bukanlah pilihan orang bersangkutan karena ia menerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Ia dilahirkan oleh orang tua yang tidak bisa dipilih oleh orang yang bersangkutan sehingga ia tidak berperan dalam menentukan dimana ia dilahirkan. Kita tidak bisa memilih dalam suku apa kita dilahirkan. Sebagaimana dikatakan oleh Maswadi,<sup>47</sup> inilah yang dimaksudkan oleh Geertz sebagai sifat alamiah dari kelompok primordial.

Berbeda dengan primordialisme suku atau ras, primordialisme agama justru tidak sesuatu yang harus tetap tapi bisa berubah. Primordialisme agama tergantung dari pilihan yang bersangkutan kelak terhadap agama yang menurutnya patut untuk dipegangnya. Lebih jauh tentang primordialisme agama, Maswadi menjelaskan,<sup>48</sup> nilai

---

<sup>47</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 62

<sup>48</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 62-63.

primordial yang terkandung dalam agama sebenarnya sedikit berbeda dari ras/suku. Memang benar seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga dimana ia dilahirkan. Tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetapi melekat pada dirinya meskipun ia tidak mau mengakuinya. Pandangan Maswadi di atas menunjukkan bahwa kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan rasa atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat, dan kedaerahan. Sehingga orang-orang yang berasal dari suku tertentu mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama.<sup>49</sup>

Primordialisme agama dan suku adalah dua hal terpokok yang pertama sekali menyentuh kehidupan manusia. Bagi Clifford Geertz, unsur primordialisme, entah suku, agama atau antar golongan “tidak hanya memainkan peranan yang integratif dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peranan memecah dan dengan begitu mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintergratif.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 62-64.

<sup>50</sup> Geertz (ed), *Old Societies and New States*, 475.

Namun demikian, terkait dengan loyalitas diantara dua primordialisme tersebut terdapat perbedaan, yang oleh Maswadi menjelaskan<sup>51</sup> bahwa meskipun Geertz tidak membedakan sifat-sifat alamiah dari ikatan ras/suku dari sifat-sifat alamiah dari ikatan agama, sebenarnya ada perbedaan antara keduanya dalam hal sumber kesetiaan/loyalitas. Yang tercermin dari tulisan Geertz adalah bahwa kedua ikatan primordial tersebut membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama. Semua persamaan ini menghasilkan solidaritas yang amat kuat diantara anggota-anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apapun.

Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan kebenaran ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun. Di samping itu, persamaan kepentingan dan kegiatan sehari-hari karena persamaan agama menambah kuat solidaritas antara anggota-anggota kelompok primordial agama. Sebagai contoh, keinginan beribadah atau memperingati hari besar agama merupakan

---

<sup>51</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 63.

unsur penting dalam memperkuat solidaritas diantara pemeluk agama yang sama. Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dari ras/suku. Seseorang tidak bisa bebas memilih suku dari keluarga dimana ia dilahirkan. Kelahiran karena darah tetap melekat dalam dirinya sebagai keturunan dari suku tertentu dan tak bisa diubah atau diganti-ganti.

Tetapi seorang pemeluk agama tertentu masih bisa berpindah agama atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial agama tertentu ke kelompok primordial agama yang lain. Sementara dalam hal suku atau ras, seseorang tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetap melekat meskipun ia tidak mau mengakuinya.<sup>52</sup>

Kedua ikatan primordial tersebut akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat diantara sesama anggota kelompok. Solidaritas primordial dalam kelompok ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama. Persamaan-persamaan ini membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang

---

<sup>52</sup>Rauf, *Konsensus Politik*, 63.

menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun.<sup>53</sup>

Untuk mempertajam pemahaman terkait kedua primordialisme tersebut, Maswadi memberikan catatan bahwa primordialisme agama sangat berbeda dengan primordialisme budaya atau suku. Perbedaan mendasar antara kedua primordialisme tersebut disampaikan Maswadi<sup>54</sup> bahwa juga perlu diberikan catatan di sini bahwa nilai-nilai agama tidaklah sepenuhnya sama dengan nilai-nilai budaya meskipun dalam agama ada unsur-unsur budaya. Karena dalam nilai-nilai agama terkandung unsur-unsur ilahiah yakni nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang tidak dihasilkan oleh interaksi sosial. Padahal nilai-nilai budaya adalah produk manusia dalam berinteraksi dengan sejumlah manusia lainnya dalam masyarakat.

Peranan ikatan primordial sangat kuat sehingga Geertz menyatakan bahwa kesetiaan primordial lebih kuat daripada kesetiaan politik. Maswadi Rauf menguraikannya secara rinci bahwa kesetiaan politik adalah kesetiaan yang relative tidak kekal. Kesetiaan terhadap partai politik atau pemimpin politik seharusnya didasarkan atas kinerja (*performance*) yang ditunjukkan oleh mereka. Seseorang bisa saja mendukung partai politik atau pemimpin politik mana saja. Bila orang menganggap bahwa partai dan pemimpin politik tidak mampu membela dan memperjuangkan kepentingannya, dia berhak menarik dukung terhadap partai politik atau pemimpin politik tadi lalu mengalihkannya kepada partai politik dan pemimpin

---

<sup>53</sup>Rauf, *Konsensus Politik*, 62-64.

<sup>54</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 62-64-

politik lainnya. Jadi kesetiaan politik bersifat pragmatis yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi yakni apa yang dilakukan oleh partai politik atau pemimpin politik.<sup>55</sup>

Hakekat kesetiaan primordial berbeda dari kesetiaan politik. Kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Dalam kesetiaan ini, dukungan kepada anggota-anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan atas pertimbangan rasional (seperti penilaian terhadap kinerja) tetapi pada pertimbangan emosional dan perasaan. Lalu bagaimana kalau primordialisme memasuki ranah politik? Bukankah fanatisme politik akan terjadi karena ia dipengaruhi oleh kesetiaan primordial? Menurut Geertz,<sup>56</sup> penggunaan nilai-nilai primordial dalam politik harus dihindari. Geertz menginginkan agar kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial tidak dicampurkan karena merupakan dua hal yang berbeda. Terkait dengan bahaya primordialisme dalam politik, Maswadi menjelaskan<sup>57</sup> bahwa solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun, sebaliknya mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain di luar kelompok primordial. Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan

---

<sup>55</sup>Rauf, *Konsensus Politik*, 68.

<sup>56</sup>Geertz dalam Juwono Sudarsono "Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-negara Baru" dalam Juwono (editor) *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981),110.

<sup>57</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 64.



membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda maupun nyawa dapat saja terjadi. Itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

Maswadi Rauf melihat ada tiga dampak penting dari penggabungan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial.<sup>58</sup> *Pertama*, penggabungan tersebut menghasilkan perubahan dalam kesetiaan politik karena kesetiaan politik menjadi fanatic dan tidak bisa berubah. Pemimpin politik yang didukung oleh kesetiaan politik fanatic seperti itu akan mempersulit pengawasan terhadap pemimpin, yang membuat sang pemimpin cenderung melakukan tindakan-tindakan politik menurut keinginan sendiri. Biasanya pemimpin yang mengandalkan dukungan politik fanatic merasa dirinya selalu benar karena pendukungnya selalu menganggap ia benar. Pemimpin seperti itu selalu menganggap dirinya benar karena para pendukungnya tidak mau memberikan kritik dan tidak berani menyampaikan masukan dan saran. Jelas bahwa pencampur-adukan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial menghasilkan suasana yang tidak kondusif bagi berkembangnya demokrasi.

*Kedua*, pencampur-adukan kesetiaan primordial dan kesetiaan politik menyebabkan pencampur-adukan isu politik dan isu primordial. Kritik terhadap pemerintah karena ketidak-mampuan pemerintah adalah semata-mata isu politik. Tapi di negara-negara baru, isu politik itu sudah diwarnai oleh isu primordial karena beberapa politisi oposisi menyebutkan

---

<sup>58</sup> Rauf, *Konsensus Politik*, 68-69.

adanya diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu oleh pemerintah, terjadinya ketidak-adilan terhadap daerah-daerah oleh pemerintah, atau pemanfaatan kekuasaan politik oleh suku tertentu untuk kepentingan suku bersangkutan yang menimbulkan penderitaan bagi semua rakyat. Tidak mengherankan bila isu politik dengan segera mendapat reaksi dan dukungan dari kelompok primordial yang merasa dirugikan dengan mengadakan gerakan-gerakan politik menentang pemerintah, bahkan menentang Negara-bangsa.

*Ketiga*, penggabungan tuntutan politik dan tuntutan primordial adalah mudahnya dilakukan manipulasi dukungan kelompok primordial oleh para pemimpin politik untuk kepentingan politik. Dukungan terhadap isu-isu primordial adalah alamiah karena solidaritas dan ikatan primordial itu sendiri bersifat alamiah. Isu politik berwarna oleh isu primordial akan menghasilkan dukungan fanatic dari kelompok primordial bersangkutan yang dapat digunakan oleh pemimpin politik memperkuat dukungan politik terhadap mereka. Salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana caranya memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari anggota kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha mewujudkan kepentingan politik. Namun dalam kenyataannya, kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh pemimpin politik.

Pandangan Clifford Geertz dan Maswadi Rauf tersebut akan diuji apakah relevan atau tidak untuk menggambarkan bagaimana caleg-caleg Kristen dalam Pileg 2004 dan Pileg

2009 bisa menang di basis Islam yang kuat. Sangat mungkin mengatakan bahwa isu primordialisme dalam penelitian ini tidak cukup kuat lagi, atau malah justru penelitian ini tepat mengatakan bahwa aspek primordialisme masih cukup kuat juga dengan bentuk dan pola yang lain yang justru dimanfaatkan oleh caleg-caleg beragama Kristen dengan sangat baik.

#### **2.4. Islam dan Otoritas Tradisional**

Bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affan Gaffar tentang keterpilihan caleg dalam pemilu di Pulau Jawa di masa Orde Baru, keterpilihan caleg dalam Pemilu di Indonesia ternyata cenderung dipengaruhi oleh dua aspek, yakni pengaruh kuat politik aliran dan ketaatan pada figur pemimpin.<sup>59</sup> Penelitian Affan Gaffar di Kecamatan Brobanti Yogyakarta, yang berfokus di tiga desa yakni: Sukaramai, Sukadamai, dan Sukamulya membuat hipotesis bahwa politik aliran masih sangat dominan dalam penentuan pilihan politik bagi masyarakat di desa-desa Pulau Jawa. Gaffar menjelaskan<sup>60</sup> prinsip bekerjanya hipotesis di sini adalah bahwa keyakinan sosio religio kultural merupakan prinsip determinan dalam menjelaskan perilaku pemilih. Keyakinan religio kultural sudah mendarah daging dan diwariskan turun temurun melalui proses sosialisasi politik yang kemudian memperkuat identifikasi individu dengan partai politik dan organisasi sosial tertentu. Orang-orang Santri akan mengidentifikasi diri dengan sebuah partai politik yang

---

<sup>59</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 27

<sup>60</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 24. *Ibid*, hal. 24.

mempromosikan nilai-nilai dan norma Islam, sementara Abangan akan mengidentifikasi diri dengan partai secular atau partai non Islam.

Gaffar menunjukkan pola hubungan bahwa perspektif aliran sangat berpengaruh dalam penggunaan pilihan politik di pedesaan Jawa. Gaffar mengutip pandangan Clifford Geertz bahwa desa di Jawa kebanyakan terbentuk dalam pola aliran. Aliran terdiri dari parpol yang dikelilingi oleh organisasi-organisasi yang secara formal atau informal terhubung dengannya dan memiliki arah dan pendirian ideologi yang sama. Temuan itu ditunjukkan oleh Gaffar lewat studinya yang melihat hubungan antara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih. Gaffar menjelaskan<sup>61</sup> “Melalui analisis itu, saya harus mencoba relasi yang tidak tertutupi diantara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih di Brobanti. Satu kontribusi penting dari temuan dalam bab ini, saya percaya, analisis empiris yang mendukung gagasan terbaru Geertz bahwa kepemimpinan memiliki konstituen social dan politiknya sendiri yang didasarkan pada orientasi sosial religius. Para pengikut akan cenderung untuk ikut dalam urusan politik didasarkan pada rekomendasi dari pertimbangan para pemimpinnya. Dataku dengan jelas mengindikasikan bahwa agama, sebagai ideologi, adalah jaringan yang paling kritis di antara pemimpin dan para pengikutnya. Studi ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang desa tidak dengan buta mengikuti instruksi, perintah, kebijakan atau pengandaian pemimpin mereka. Di desa Sukaramai, misalnya, mayoritas responden memiliki

---

<sup>61</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 156-157.

lampiran/pertimbangan yang kuat terhadap pilihan pemimpin agama bagi Golkar, partai pemerintah.”

Aliran lebih daripada parpol atau sekadar ideologi. Ia sudah menjadi suatu pola integrasi sosial. Konsep aliran mengacu pada cara berpikir orang Jawa khususnya yang didasarkan pada pola religius-kultural yang dinyatakan dalam aspek trikotomi Santri, Abangan, dan Priayi. Betapa kuatnya peranan politik aliran agama dalam penentuan pilihan dijelaskan oleh Gaffar<sup>62</sup> dari analisis itu, seseorang dapat melihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat diantara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Yang penting adalah bahwa agaknya sejumlah dari mereka juga memilih ke Golkar. Namun demikian variable lain juga diambil kegunaannya, seperti pola kepemimpinan dan pola kelas sosial untuk mengeksplorasi variable itu dalam kaitan dengan pemilih di desa-desa Jawa demikian seperti di Brobanti.

Pola hubungan kedua adalah pola hubungan pemimpin dan pengikut melalui otoritas tradisional dimana paternalisme merupakan fenomena umum dalam masyarakat Jawa.

---

<sup>62</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 130. Argumentasi yang sama bisa juga ditelusuri dalam East Vlesenthal - Abraham Bridgestahl, *Politic Behaviour* vol 7 no 4, tahun 1997 hal 321-324.

Menurut Gaffar konsep otoritas tradisional ialah: praktek kekuasaan personalistik yang terakumulasi melalui pengaruh masa lalu dan sekarang yang mengambil peran sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai, dan pemegang status yang tinggi dalam hubungan ketergantungan yang telah diciptakan. Variabel memilih di pedesaan Jawa menunjukkan bahwa keyakinan sosio-religius jauh lebih kuat dibandingkan pola hubungan kelas dalam penentuan pilihan politik warga. Gaffar menjelaskan, <sup>63</sup> “Melalui analisis itu saya sudah mencoba mendemonstrasikan entah afiliasi kelas sosial memiliki efek penting dalam perilaku pemilih di desa Brobanti. Sebagaimana diindikasikan oleh data tersaji dari studi itu, jelas bahwa kelas sosial kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku pemilih di desa-desa itu. Agaknya variable cultural memiliki peranan lebih signifikan. Alasan bahwa, pertama, dalam ekonomi agrokultural berskala kecil seperti di Jawa dimana tuan tanah yang kuat tidak ada, sedemikian baik seperti kebebasan relative warga dari ekonomi pasar, faktor-faktor non ekonomi seperti agama menjadi lebih kuat dari pada faktor kelas sosial. Kedua, ketidak-beradaan kelompok kepentingan yang mempromosikan kepentingan petani sepanjang kesatuan dengan organisasi petani untuk melindungi kepentingan dari korporasi pemerintah membuatnya menjadi tidak mungkin menciptakan “hati nurani yang berkelas” diantara para petani di desa-desa Jawa.”

Penelitian Gaffar di daerah Brobanti Yogyakarta menunjukkan peran lembaga agama seperti masjid dan langgar sangat kuat di antara kaum Santri dan sebaliknya

---

<sup>63</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 173.

berlaku di kalangan Abangan. Lembaga agama adalah unit paling dasar dalam pendidikan kaum Santri. Sementara kaum Abangan tidak memiliki lembaga semacam itu. Bahkan mereka enggan pergi ke pertemuan-pertemuan di langgar atau masjid karena mereka menganggap langgar sebagai milik komunitas Santri. Dalam lembaga ini terjadi ikatan yang erat antara pemimpin agama (kyai, haji) dengan ummat. Studi ini terutama menjelaskan bahwa di pedesaan Jawa, orang cenderung memilih berdasarkan keyakinan sosio-religius. Yakni kaum Santri lebih memilih partai Islam, dan Abangan lebih memilih partai yang tidak menganjurkan keyakinan Islam seperti PDI. Dari Pemilu 1971 dan 1977 dilaporkan kecenderungan yang sama perihal pilihan responden.<sup>64</sup>

Alasan memilih yang dikemukakan oleh Gaffar adalah bahwa diantara pemilih PDI, tampaknya tidak terdapat alasan ideologis yang jelas. Sekitar 32% responden memilih PDI dengan alasan karena tidak suka PPP dan Golkar. Maka ada kecenderungan di antara pemilih PDI yang anti keamanan pemerintah dan partai Islam. Alasan lainnya memilih PDI karena tekanan pertemanan, yaitu untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain. Alasan ketiga, karena warisan kejayaan Soekarno masih populer di kalangan pemilih PDI. Alasan utama responden memilih Golkar karena citranya sebagai partai pemerintah. Gaffar menyimpulkan, <sup>65</sup>“Apa

---

<sup>64</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 152. Lihat juga *Membina Hubungan*, *op.cit.*, hal 48-54. Lihat juga Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princenton University Press, 1980) hal. 7.

<sup>65</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 173-174. Argumentasi tentang hal ini dapat juga ditelusuri dalam *Membina Hubungan dengan Konstituen*, *Seri*

implikasi dari temuan ini? Pertama, studi ini tidak perhatian untuk mendukung studi-studi terbaru tentang perilaku pemilih dalam demokrasi politik Barat. Studi-studi ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum ada dalam ekspresi perlawanan kelas. Kedua, studi ini juga berkontribusi untuk melanjutkan debat di antara ilmuwan (khususnya Indonesia) entah kelas atau budaya memiliki kekuatan penjelasan yang lebih besar dalam memberikan sebuah kegunaan bagi politik Jawa dan Indonesia. Studi ini secara jelas mengindikasikan bahwa kelas tidak memiliki apapun terkait perilaku pemilih di desa-desa Jawa, sekurang-kurangnya ketika mereka menjatuhkan pilihan rahasia dalam Pemilu.”

Data di Brobanti, Yogyakarta menunjukkan hampir 40% responden memilih Golkar karena mengikuti jejak pemimpin mereka, yakni lurah, kepala dukuh, dan lain-lain. Mereka ingin mengidentifikasi diri dengan pemimpin mereka. Peran kepala dukuh sangat besar dalam memobilisasi massa, sebab 22% pemilih Golkar mengatakan mereka diminta untuk itu. Golkar juga diuntungkan karena diasosiasikan dengan Sultan Yogyakarta, yang adalah ketua Golkar Yogyakarta. Pengikut partai Islam (PPP) adalah responden yang terlihat paling ideologis. Hampir 33% responden memilih PPP karena merasa memilih partai Islam merupakan keharusan selaku Muslim. Sepertiga pemilih PPP juga mengatakan mereka memilih karena diminta pemimpin mereka. Pemimpin Islam mampu meyakinkan pengikutnya bahwa memilih partai Islam itu bagian dari ibadah.<sup>66</sup>

---

*Penguatan Legislatif* (USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program), 1-2.

<sup>66</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 153.



Faktor kepemimpinan dan perilaku memilih menunjukkan bahwa pemilih yang lebih terikat pada pejabat desa akan lebih memilih partai pemerintah (Golkar) daripada mereka yang terikat pada pemimpin agama yang akan mendukung partai Islam (PPP). Bila orientasi sosio-religius dijadikan faktor kontrol dalam analisis ini, sekitar 86% responden Abangan yang terikat pada pejabat desa memilih Golkar, dan hampir setengah jumlah Santri dari kategori yang sama memilih PPP. Partai pemerintah tidak pernah dapat menembus komunitas Santri di desa ini, karena itu Golkar tidak pernah menang. Di Sukaramai yang pemimpin formalnya kuat berpengaruh dan mendukung Golkar, partai-partai oposisi selalu kalah.<sup>67</sup> Mengapa demikian, karena mayoritas pejabat desa di tiga desa ini adalah Santri juga. Jadi ideologi memainkan peran penting dalam menghubungkan perilaku antara pemimpin politik dan konstituennya.

Temuan Gaffar di atas sangat terkait dengan teori politik yang digagas oleh James Scott tentang politik patron-klien. James Scott mengemukakan bahwa dalam politik terdapat pola hubungan patron-klien yakni sekelompok figur informal yang berkuasa (patron) dan memiliki posisi memberikan rasa aman, pengaruh, atau keduanya. Menurut Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.<sup>68</sup> Hubungan di mana seorang individu dengan status sosial-

---

<sup>67</sup> Gaffar, *Javanese Voters*, 154.

<sup>68</sup> James C Scott (2009) "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" dalam *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), 92.

ekonomi yang lebih tinggi (pelindung) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya sendiri untuk memberikan perlindungan atau manfaat atau keduanya, untuk seseorang dari status yang lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada orang tersebut.

Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron.<sup>69</sup> Hubungan patron-klien itu sendiri bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. James Scot menjelaskan<sup>70</sup> bahwa hubungan patron-klien – hubungan pertukaran antara peran – dapat didefinisikan sebagai kasus khusus ikatan diadik (dua orang) yang melibatkan persahabatan instrumental yang lebih besar di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya sendiri dan sumber daya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan, atau keduanya, bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada pelindung.

Sebagai imbalannya, para pengikut (klien) memberikan loyalitas dan bantuan pribadi kepada patronnya dalam kondisi apapun, baik patronnya dalam keadaan benar ataupun menyimpang/salah. Lebih lanjut James Scott mengemukakan<sup>71</sup> adanya ketidakseimbangan dalam pertukaran antara dua mitra yang mengungkapkan dan

---

<sup>69</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 96-97.

<sup>70</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 92.

<sup>71</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 93.

mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan dan status relatif mereka. Klien dalam pengertian ini adalah seseorang yang telah memasuki hubungan pertukaran yang tidak setara di mana ia tidak dapat membalas sepenuhnya. Hutang kewajiban mengikatnya pada pelindung.

Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.<sup>72</sup>

Scott menuturkan, sistem pemilu dan politik elektoral di Asia Tenggara dalam dekade terakhir ini berimplikasi pada perubahan struktur dan pengaruh relasi patron-klien di tubuh parpol. Peta politik patron-klien di Asia Tenggara tersebut kemudian diperjelas Scott<sup>73</sup> bahwa pola ini dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara dalam situasi pemilu tetapi paling mencolok di Filipina, di mana sebagian besar ikatan patron-klien berpusat di sekitar kepemilikan tanah dan pemilu. Politisi Filipina, seperti yang ditunjukkan Wurfel, lebih menyukai secara individu daripada secara kolektif karena dia ingin menciptakan kewajiban pribadi untuk menjadi klien.

Salah satu pengaruh yang tampak adalah munculnya piramida relasi patron-klien. Artinya, terjadi tingkatan-tingkatan patron dari pucuk pimpinan pemegang hak veto

---

<sup>72</sup> Scott "Patron-Client Politics," 132.

<sup>73</sup> Scott "Patron-Client Politics," 109.

keputusan partai sampai tingkatan patron di level lokal dalam satu alur hierarki. Terkait dengan sturuktur piramida tersebut, Scott menjelaskan,<sup>74</sup> pengenalan pemilu yang kompetitif di Asia Tenggara meningkatkan tekanan pada rezim untuk distribusi kebawah manfaat nyata. Sebagai imbalan atas suara yang mengalir ke atas rantai vertikal struktur patron-klien, setiap patron bergantung pada distribusi patronase ke bawah dalam bentuk bantuan administratif, hibah tanah, pekerjaan publik, dan sebagainya, untuk menjaga piramida pengikutnya sendiri tetap utuh. Relasi patron-klien atau yang biasa dikenal dengan ‘patronase’ (*patronage*) memaknai bahwa patron sebagai ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi.<sup>75</sup> Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Scott menjelaskan<sup>76</sup> bahwa pola dasarnya adalah klaster informal yang terdiri dari figur kekuasaan yang berada dalam posisi memberikan keamanan, bujukan, atau keduanya, dan pengikut pribadinya yang, sebagai imbalan atas manfaat tersebut, menyumbangkan kesetiaan dan bantuan pribadi mereka pada rancangan patron. Pola vertikal hubungan

---

<sup>74</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 112.

<sup>75</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 103.

<sup>76</sup> Scott “Patron-Client Politics,” 92.

patron-klien seperti itu mewakili prinsip struktural penting dari politik Asia Tenggara.

Hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang yang lebih kuat pengaruhnya dengan sejumlah pengikutnya. Hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Menurut James Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Dalam hubungan yang bernama patron-klien, pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memang tidak seimbang. Inilah yang menjadi ciri khas dari sebuah hubungan patron-klien. Jika terjadi sebaliknya, maka hubungan yang terjalin tersebut akan putus dengan sendirinya.

Lalu bagaimana partai harus bersikap dan bagaimana sistem Pemilu yang diharapkan oleh Affan Gaffar untuk konteks Indonesia? Menurut Gaffar, proses rekrutmen anggota DPR bersifat tertutup, hal itu dapat terjadi karena peranan dari kalangan elite partai yang sangat dominan di dalam menentukan siapa yang akan direkrut untuk menjadi anggota DPR. Gaffar menjelaskan<sup>77</sup> bahwa pimpinan partai

---

<sup>77</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 1999), 289. Analisa yang kurang lebih sama bisa ditemukan dalam penelitian Moh. Nafsar. Lih. Moh Nafsar, "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan: kasus Surabaya" dalam *Analisis CSIS* tahun ke 26 no II tahun 1997, 168-179.

khususnya Ketua Partai Politik sangat menentukan siapa calon jadi untuk setiap pemilihan anggota DPR. Hal itu dilakukan dengan menentukan rangking mereka yang dicalonkan. Tidak jarang calon yang sangat populer di suatu daerah dan dicalonkan oleh partainya pada tingkat lokal diubah oleh DPP Partai dan ditempatkan pada rangking yang kiranya tidak akan mungkin terpilih. Hal itu menimbulkan konflik antara tokoh partai di daerah dengan DPP Partainya. Implikasi lanjutan dari mekanisme rekrutmen seperti itu adalah munculnya kecenderungan Jakarta Sentris seperti terlihat dalam keanggotaan DPR sekarang ini. Akibatnya, mereka kurang sensitive terhadap permasalahan di daerahnya.

Menurut Gaffar, seorang anggota DPR yang sudah lama tinggal di Jakarta, tentu saja sudah tidak banyak mengikuti perkembangan yang terjadi di daerahnya karena kesibukannya sebagai legislatif yang banyak menyita waktu; dia juga telah terokupasi dengan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Bahkan, tidak mustahil dia mengalami proses “*up rooted*” karena di daerah sudah banyak sekali perubahan, sementara pola berpikir anggota DPR tersebut adalah pola berpikir Jakarta. Menurut Gaffar, implikasi yang jelas dari proses rekrutmen yang tertutup seperti itu<sup>78</sup> akan membentuk anggota DPR yang akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya dimana mereka akan mengorbankan kualitas dan mengutamakan *patronage* sebagai akibat negative bagi penampilan anggota DPR ketika mereka memasuki dunia politik Jakarta yang sangat rumit. Tidak jarang pula pimpinan partai politik merekrut orang-orang yang memang mempunyai basis kekuasaan yang kuat pada

---

<sup>78</sup> Gaffar, *Politik Indonesia*, 290.

tingkat lokal tetapi tidak memiliki latar belakang dan kecakapan yang cukup untuk menjadikannya seorang legislatif yang baik dan tangguh. Gaffar menjelaskan,<sup>79</sup> sebagai contoh, seorang Tuan Guru di Lombok memang memiliki basis kekuasaan yang sangat besar di Lombok. Tetapi, basis kekuasaan yang kuat pada tingkat lokal belum menjadikan ia seorang legislatif yang tangguh karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Tetapi seorang kyai yang sangat terkenal di Jombang Jawa Timur memang sangat dihormati dan disegani di Jawa Timur. Tetapi ia belum menjadi seorang legislatif yang tangguh karena dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR diperlukan dukungan ilmu pengetahuan yang bersifat sekular. Banyak persoalan yang bersifat teknis yang harus dihadapi seorang anggota DPR untuk didiskusikan dengan kalangan pejabat pemerintah eksekutif dengan pengalaman yang sangat luas karena mereka merupakan birokrat karir yang tahu benar persoalan di departemennya. Oleh karena itu tidak jarang kesetaraan antara pejabat eksekutif dengan sebagian besar anggota DPR itu menjadi sangat pincang, apalagi kalau anggota DPR yang terpilih ini betul-betul baru memasuki rimba raya politik Jakarta.

Gaffar menjelaskan untuk rekrutmen anggota DPR perlu diadakan perubahan sistem pemilihan umum dari sistem pemilihan yang bersifat *Proportional Representation* (PR) menjadi sistem pemilihan yang bersifat pluralitas yaitu dengan menggunakan *simple majority single ballot system* yang di Indonesia dikenal dengan sistem distrik. Dengan sistem ini, *the winner takes all*, artinya dengan perolehan suara mayoritas yang sederhana si pemenang akan

---

<sup>79</sup> Gaffar, *Politik Indonesia*, 291-298.

memenangkan semua perolehan kursi di wilayah itu. Dengan menggunakan sistem rekrutmen seperti itu, wajah DPR akan berubah karena akan terpilih anggota DPR yang lebih berkualitas, lebih berwibawa dan mempunyai kecenderungan untuk independen dari partai dan lebih berorientasi pada masyarakat pemilih atau *constituency* mereka.

## 2.5. Pentingnya Nasionalisme dan Rasa Kebangsaan

Mengandalkan isu primordial dan patron klien saja tentu tidak mencukupi ketika melihat keterpilihan caleg-caleg Kristen justru dari basis Islam yang kuat. Tentu saja tidak bisa ditolak begitu saja adanya unsur nasionalisme dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut. Karena tidak mungkin caleg Kristen terpilih dari basis Islam yang kuat kalau mereka tidak dipilih oleh warga yang sangat mayoritas berbeda suku dan agama dengan caleg Kristen yang berarti di sana ada semangat nasionalisme, baik yang diusung oleh partai maupun yang diusung oleh caleg bersangkutan. Keterpilihan caleg Kristen tidak bisa dilepaskan dari sikap nasionalisme dan visi misi partai pengusungnya sehingga mereka bisa diterima. George McTurner Kahin memaknai nasionalisme sebagai perekat kuat dan menjadi fondasi dasar bagi sebuah negara bangsa terutama negara bangsa yang terdiri dari multi kultural dan multi agama seperti Indonesia.<sup>80</sup> Dalam paham Burhan Djabir Magenda, nasionalisme tersebut

---

<sup>80</sup> George McTurner Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Indonesia*, (alih bahasa Nin Bakdi Soemanto), Jakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1955. Judul asli, George McTurner Kahin, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952),12 .



harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari misi yang diusung juga oleh partai-partai politik.<sup>81</sup>

Kahin menguraikan<sup>82</sup> bahwa nasionalisme di zaman pergerakan nasional bersifat menyeluruh di tanah air. Nasionalisme tersebut lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon atau kritik akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Muncul kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari ideologi kolonialisme Belanda. Peletakan paham dasar jiwa nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena semangat bersama sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif).

Menurut Kahin, Nasionalisme Indonesia berakar dari keadaan Indonesia mulai dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Fenomena Nasionalisme tidak lahir secara sendiri, tetapi sangat terkait dengan konsep bangsa atau negara dan kewarganegaraan/kebangsaan, termasuk produk dari imperialisme/kolonialisme.<sup>83</sup> Nasionalisme sebagai produk dari sejarah sebuah bangsa merupakan jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi dan sosial tertentu. Nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap

---

<sup>81</sup> Burhan Djabir Magenda, "The Integration in a Complex Indonesia" dalam *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001, 62. Pemahaman Kahin tentang nasionalisme untuk konteks Indonesia yang tuntas dan mendalam sebagaimana diutarakan oleh Burhan Djabir Magenda, patut menjadi rujukan. Lih. Burhan Magenda, "In Memoriam: Prof George McTurnan Kahin," dalam *Harian KOMPAS*, Rabu, 2 Februari 2000.

<sup>82</sup> Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, 43. Kahin, *op.cit.*, hal. 43.

<sup>83</sup> Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, 28.

kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus menerus. Pertentangan ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi, sosial dan kultural. Oleh sebab itu, suatu gerakan-gerakan yang bersifat nasional muncul menentang kolonialisme, dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut karena didorong oleh semangat nasionalisme.

Menurut Kahin kehadiran Belanda justru memunculkan rasa patriotisme setempat menjadi satu patriotisme yang merangkul semuanya<sup>84</sup> dengan cara menggalang orang-orang berbeda bahasa dan kebudayaan ke dalam satu kesatuan politis sehingga terbentuk kesadaran kelompok. Selain batas-batas politis, tradisi kejayaan masa lalu terutama keberhasilan Sriwijaya dan Majapahit dan agama Islam sebagai mayoritas di Indonesia dan penggunaan bahasa melayu pasar yang dijadikan sebagai bahasa persatuan membantu mempercepat terjadinya nasionalisme. Perkembangan nasionalisme Indonesia muncul dalam bentuk “Gerakan Emansipasi Wanita” oleh R.A. Kartini tahun 1912, Kongres Pemuda pertama dan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, Gerakan Jawa Muda (*Jong Java*) tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912, Gerakan Pribumi (*Inlandsche Beweging*) tahun 1914, Kongres Kebudayaan tahun 1916, dan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan di kemudian hari muncul organisasi lainnya yang lebih bersifat kesukuan, seperti Jong Sumatra, Jong Celebes dan lain-

---

<sup>84</sup> Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, 49.

lainnya dan puncaknya saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Di masa menjelang kemerdekaan yakni ketika penjajahan Jepang, puncak nasionalisme tersebut mendapat bentuknya disaat perumusan kehendak untuk merdeka dengan pembentukan BPUPKI. Di hadapan peserta sidang BPUPKI, Soekarno menunjukkan secara terang-terangan rasa anti-Jepang lewat pidatonya yang menggariskan lima prinsip dasar, *Pantja Sila* yang dianggap dapat membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia yang merdeka.<sup>85</sup> Menurut Burhan, George McTurner Kahin mampu menjelaskan akar-akar sosial, ekonomi dan politik dari revolusi kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan historis. Kahin melihat bahwa ideologi politik sosial demokrat juga terdapat di Indonesia.<sup>86</sup> Melanjutkan pandangan George Kahin di atas, Burhan Magenda melihat bahwa nasionalisme yang telah tertanam dengan sangat dalam sejak masa perang menuju untuk kehendak kemerdekaan itu menjadi perekat yang sangat kuat bagi berlangsungnya sebuah bangsa seperti Indonesia. Untuk konteks nasionalisme Indonesia, Burhan menjelaskan:<sup>87</sup> bahwa kekuatan nasionalisme menjadi penting bagi kelangsungan sebuah Negara bangsa khususnya bagi sebuah Negara bangsa yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, misalnya, ideology nasionalis sebagaimana dikatakan George Kahin mulai muncul di awal abad ke -20, yang diawali oleh kelahiran Sumpah Pemuda 1928 dan

---

<sup>85</sup> Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, 155-159-

<sup>86</sup> Burhan Magenda, "In Memoriam ..."

<sup>87</sup> Burhan Djabir Magenda, "The Integration in a Complex Indonesia" dalam *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001, 51.

revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1950. Beberapa Negara memiliki ideologi nasional yang khauvinistik sehingga mereka berperang satu sama lain, seperti ideologi fasis di bawah Hitler di Jerman, Mussolini di Italia dan Tojo di Jepang. Beberapa Negara lain yang menderita perang secara internal misalnya di Biafra Nigeria dan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan yang lain di Indonesia.

Menurut Burhan Magenda, di beberapa Negara Asia dan Afrika, proses pembangunan kebangsaan (*nation building*) terkait ideology nasionalis dipelopori oleh *founding fathers* seperti Soekarno-Hatta di Indonesia. Pada masa itu yang paling penting adalah *elite cooperation* dan *cohesiveness* yang pada masa pasca colonial seringkali pecah dan menimbulkan konflik. Mengutip pendapat Benedict Anderson, Burhan menegaskan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ideology membentuk suatu masyarakat imajiner (*imagines communities*).<sup>88</sup> Kehadiran partai-partai politik pun merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penguatan nasionalisme dimaksud. Semangat itulah yang terus menerus juga harus dipegang oleh partai-partai politik hingga sekarang. Burhan Magenda menjelaskan parpol dan ormas di Indonesia sudah berdiri sejak awal abad ke 20 seperti Boedi Otemo, ISDV, Serikat Islam, Muhammadiyah, PKI, Nahdlatul Ulama, dan PNI. Ini memperlihatkan kuatnya ideologi nasionalis yang dibawa parpol. Pada Pemilu 1955, partai ethnic boleh dikatakan kurang berhasil ataupun gagal total., yang agak berhasil hanyalah Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal merebut kursi DPR maupun DPRD. Pada pemilu 1999 Partai

---

<sup>88</sup> Magenda, "The Integration in a Complex", 50.

Tionghoa Indonesia yang *ethnic-oriented* gagal dibandingkan Partai Bhinneka Tunggal Ika yang majemuk yang berhasil memperoleh satu kursi DPR walaupun basis pemilihnya tetap keturunan Tionghoa. Menurut Burhan, pada masa pasca colonial, partai politik berhasil dalam pendidikan, sosialisasi, dan rekrutmen politik. Rakyat menjadi melek politik dan paham terkait dengan isu-isu politik nasional.<sup>89</sup>

Bagian selanjutnya akan melihat tentang sejarah politik kaum Kristen di Indonesia. Bab ini melihat sejarah perkembangan kekristenan di Indonesia hingga mereka terlibat dalam politik. Dimulai dari perjuangan merebut kemerdekaan 1945, pembentukan partai di masa Orde Lama dalam Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik dalam Pemilu 1955. Di masa Orde Baru, partai Kristen berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia sejak tahun 1973.

Keseluruhan teori di atas menggambarkan bagaimana kalangan minoritas mendapat kesempatan yang sama dengan kalangan mayoritas dalam urusan bernegara. Termasuk diantaranya kalangan minoritas beragama Kristen di Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti seluruh warga negara lainnya untuk berkiprah dalam politik. Masuknya kalangan Kristen dalam politik nasional tentu saja dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu Indonesia yang dengan sangat baik akhirnya menerima kalangan beragama Kristen. Bab berikutnya akan melihat bagaimana sejarah masuknya dan berkembangnya agama Kristen di Indonesia dengan segala tantangan dan kecuritaan awalnya.

---

<sup>89</sup> Magenda, "The Integration in a Complex, 62.

### **BAB III**

## **SEJARAH POLITIK ORANG KRISTEN DI INDONESIA**

Penerimaan orang Kristen dalam sejarah politik Indonesia tidak semudah seperti dibayangkan saat ini, sebab banyak aspek penolakan bahkan dianggap sebagai bagian dari kolonialisme. Bab berikut ini akan melihat bagaimana sejarah politik warga beragama Kristen hingga kemudian diterima sebagai warga negara yang sederajat dengan warga negara lainnya di Indonesia.

Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekristenan di Indonesia. Kekristenan, baik itu perkembangan jumlah penganutnya maupun keterlibatan umatnya dalam kehidupan berpolitik, menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Kekristenan telah masuk ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, dan kemudian berkembang hingga menjadi bagian dari bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Setidaknya mulai dari lahirnya Sumpah Pemuda 1928, perjuangan menuju kemerdekaan 1945, hingga Indonesia memasuki perpolitikan di era kemerdekaan, kaum Kristen telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia hingga saat ini.

Keterlibatan orang Kristen dalam politik Indonesia sejak masa awal tersebut hingga saat ini kemudian menunjukkan bagaimana keterwakilan politik orang-orang Kristen dalam politik Indonesia di segala bidang, yang salah satu diantaranya adalah keterwakilan politik di DPR RI.

Pokok-pokok dari kekristenan awal itu hingga keterlibatan kaum Kristen dalam politik Indonesia akan menjadi pokok kekristenan selanjutnya.

### **3.1. Keterlibatan Politik Kristen Sebelum Kemerdekaan**

Ada banyak tokoh Kristen yang terlibat dalam politik perjuangan kemerdekaan. Sejumlah diantara mereka bahkan menjadi pahlawan yang sentral dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Setidaknya oleh Gerry van Klinken, ada lima orang tokoh minoritas dari agama Kristen yang sangat menonjol terkait perjuangan kemerdekaan dari banyak tokoh Kristen yang lain. Mereka adalah Ignatius Joseph Kasimo (1900- 1986), seorang Katolik Jawa, ahli pertanian yang rendah hati, yang memperoleh kursi di lembaga perwakilan Volksraad. Todoeng Soetan Goenoeng Moelia (1896- 1966), seorang Protestan Batak yang terdidik dan juga duduk di Volksraad. Kasimo dan Moelia, keduanya aktif pada partai politik konvensional.<sup>90</sup> Selain itu ada sosok tokoh Kristen G. S. S. J. Sam Ratulangi (1890-1949), seorang Minahasa yang mendapat pendidikan di negeri Belanda berasal dari keluarga tuan tanah yang sekali lagi duduk di kursi Volksraad. Walaupun secara personal tidak menyukai agama Kristen yang terlembagakan, asal usulnya dari Minahasa yang telah ter-Kristen-kan menegaskan citra publiknya sebagai seorang politisi Kristen.

---

<sup>90</sup> Gerry van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, (Yogyakarta: LKiS, Januari 2010), 3.

Sosok tokoh Kristen yang lain adalah Amir Sjarifoeddin (1907-1948), Batak yang lain, merupakan sepupu muda Moelia, seorang muslim yang berpindah ke Protestan namun tak pernah bergabung dengan partai politik konvensional. Seorang pemimpin muda kharismatik dalam gerakan nasional tahun 1930-an, kemudian menjadi Perdana Menteri RI dua kali dalam rentang 1947-1948 dan dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam pemberontakan Madiun.<sup>91</sup> Albertus Soegijapranata (1896-1963), seorang pastor serikat Jesuit dari Jawa Tengah, menjadi seorang uskup pribumi pertama kali di Hindia Belanda pada 1940. Keterlibatan politiknya mencapai puncaknya selama periode akhir tahun 1940-an, namun pada masa hiruk-pikuk ini ia merintis peran-peran baru. Setidaknya kelima orang ini merupakan representasi penganut Kristen di Indonesia yang memainkan peran politik secara signifikan dan tangguh pada Hindia Belanda dan Indonesia metropolitan antara tahun 1914-1950. Kehadiran para tokoh politik Kristen dimaksud di atas tentu tidak terlepas dari situasi pergerakan nasional yang terjadi dimasa-masa awal perjuangan kemerdekaan.

#### **a. Lahirnya Pergerakan Nasional Awal**

Beberapa pandangan sering dikemukakan tentang bangkit, berdiri, dan bergeraknya partai-partai dan tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pandangan pertama mengemukakan adanya suatu gerakan *autochthonous*, bersumber dari alam, yang berasal dari kesadaran dan kebangkitan kesadaran nasional dalam suatu

---

<sup>91</sup>Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 3.



pertentangan langsung dengan kolonialisme Belanda.<sup>92</sup> Dalam pandangan Takashi Shiraishi, pergerakan merupakan proses translasi dan penyesuaian diri dengan situasi baru.<sup>93</sup> Pandangan kedua menempatkan konteks pergerakan nasional sebagai sesuatu yang bersifat *heterochthonous*, yang berasal dari luar yakni dirangsang oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Berbeda dengan kedua pandangan di atas, Herbert Feith berpendapat bahwa bangkitnya nasionalisme modern menjadi titik awal lahirnya pemikiran politik modern di Indonesia. Pemikiran ini dimulai tahun 1900-an dan 1910-an oleh sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakat. Nasionalisme itu bermula dari cara pandang mereka terhadap masyarakat yang terbelakang, tidak berdaya, serta diperas saat itu kemudian berkembang menjadi bahan perbincangan untuk diadakan pembaruan.<sup>94</sup> Sepanjang tahun 1920-an, jumlah mereka meningkat pesat dan berkembang alienasi mereka terhadap kekuasaan colonial. Mereka telah dipengaruhi oleh pelbagai ideologi seperti sosialisme, komunisme, reformisme Islam dan nasionalisme India, Cina dan Jepang.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Daniel Dhakidae, "Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah pergerakan dan organisasi dalam patahan-patahan Sejarah", dalam *Partai-partai Politik Indonesia: ideologi, strategi dan program*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999), 1.

<sup>93</sup> Daniel Dhakidae mengutip penjelasan ini dari Takashi Shiraishi, *An Age in Motion. Popular Radicalism in Java 1919-1926* (Cornel University Press, 1990, mengatakan bahwa buku ini mengubah banyak pandangan tentang pergerakan di Indonesia. Lihat dalam Dhakidae hal 1.

<sup>94</sup> Herbert Feith, "Pengantar (1970)", dalam Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), x.

<sup>95</sup> Feith, *Pemikiran Politik*, x.

Semangat itu menemukan bentuknya ketika pemerintah colonial mengeluarkan *Etische Politiek* yang telah menciptakan kesadaran diri dan kesadaran akan kesamaan nasib dan keberuntungan.<sup>96</sup> *Etische Politiek* merupakan politik pembangunan versi colonial guna membangun Hindia Belanda dari kemiskinan dan ketertinggalan, tampaknya telah membekas dalam pikiran penganut atau penentangannya karena beberapa kata kunci seperti: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Keterpisahan itu bisa ditemukan dalam bidang pendidikan sebagai yang paling utama. Furnivall, seorang pengamat ekonomi politik dari Inggris menyebutnya sebagai *plural society*. Furnivall menjelaskan *a society, that is, comprising two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling, in one political unit*<sup>97</sup>. Suatu masyarakat yang meliputi dua atau lebih elemen atau tatanan social yang hidup berdampingan satu sama lain, tetapi tidak pernah bertemu dalam satu unit politik. Masing-masing unit hidup sendiri-sendiri dalam satu bilik tertutup dan hidup yang satu tidak menyentuh hidup yang lain dari ras lain dan agama lain.

Pandangan Furnivall di atas bisa dilacak di dalam gerakan kebangkitan nasional sejak sangat awal. Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia ditandai dengan pembentukan organisasi Boedi Oetomo. Menurut Sartono,<sup>98</sup> penandaan ini bukan karena formatnya atau kegiatannya, tetapi karena kebutuhan akan identitas,

---

<sup>96</sup> Dhakidae, *Partai-partai Politik*, 2.

<sup>97</sup> JS Furnivall, *Netherlands India: Studi of Plural Economy* (Cambridge: at the Unversity Press, New York: The macmillan company, 1944), 446 dan 458.

<sup>98</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).

solidaritas, kemandirian, dan kesadaran kolektifnya. Semangat ini mendorong bertumbuhnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional Indonesia tumbuh pada awal abad ke-20 di kalangan terpelajar.” Studi-studi pergerakan senantiasa dimulai dengan Boedi Oetomo yang didirikan tahun 1908. Diskusi-diskusi berkembang menjadi pemikiran kritis yang sistematis tentang pemerintah jajahan.

Studi pergerakan awal pertama adalah Boedi Oetomo yang didirikan tahun 1908 yang memuat diskusi-diskusi tentang pemerintah jajahan. Kemudian muncul Sarekat Islam yang menjadi cikal bakal lahirnya partai-partai Indonesia modern. Menyusul partai Douwes Dekker dengan *Indische Partij*, 5 Desember 1912 yang membuka cakrawala pribumi untuk menganggap tanah Hindia sebagai tanah airnya, terlepas dari ras dan warna kulitnya.<sup>99</sup> Ikrar-ikrar nasionalisme pun dicetuskan termasuk penentuan bendera dan lagu kebangsaan, serta keputusan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia yang berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928.<sup>100</sup> Pada awalnya Boedi Oetomo tidak lebih dari suatu *Javanese nationalism* yakni gerakan yang pada awalnya sangat terbatas, etnosentris, dan menjadi semacam *ethno-nationalism*. Kemudian muncul Sarekat Islam yang kelak dianggap menjadi cikal bakal dari partai-partai Indonesia modern. Berikutnya muncul partai Douwes Dekker dengan *Indische Partij*, 5 Desember 1912 yang membuka cakrawala kepada

---

<sup>99</sup> Dhakidae, *Partai-partai Politik*, 4.

<sup>100</sup> Heroisme semangat nasionalisme untuk merdeka tersebut bisa dilihat juga dalam George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952). Di sini dimuat sejarah politik masa 1945-1950, juga merupakan sumber berharga mengenai gerakan nasional masa sebelum perang.

semua orang yang menganggap tanah Hindia sebagai tanah airnya, terlepas dari ras dan warna kulitnya.<sup>101</sup>

Pada akhir tahun 1920an, para pemimpin gerakan mulai berbicara tentang kemerdekaan Indonesia dan saling berdebat mengenai cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan itu, serta apa yang selanjutnya menjadi pengisinya setelah kemerdekaan tercapai. Ikrar-ikrar nasionalisme pun dicetuskan untuk pertama kalinya pada saat itu termasuk penentuan bendera dan lagu kebangsaan, serta keputusan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia dari negara yang baru dilahirkan tersebut.<sup>102</sup> Semangat heroik kaum terpelajar ini ditunjukkan oleh Herbert Feith<sup>103</sup> bahwa para pemimpin dari semua gerakan nasionalis telah mencurahkan sebahagian besar tenaga mereka ke dalam usaha untuk meyakinkan saudara-saudara sebangsanya bahwa gubernur-gubernur colonial tak mempunyai hak moral untuk memerintah, dan tidak ada orang yang mampu memimpin gerakan-gerakan ini jika tidak terlatih dalam perumusan serta penyebaran ide-ide. Pekerjaan semacam ini, termasuk agitasi dan pendidikan, memainkan peranan yang terlalu besar dalam gerakan bangsa Indonesia.

Pembentukan *Volksraad* mengantar partai-partai politik Indonesia ke tahap kedua yang membagi partai antara yang masuk ke dalam sistem kolonial dengan masuk ke dalam Dewan Rakyat, *Volksraad*, yang disebut sebagai kaum “ko”, dan menolak yang masuk ke dalam sistem Belanda yang

---

<sup>101</sup>Dhakidae, *Partai-partai Politik*, 4.

<sup>102</sup> Kahin, *Nationalism and Revolution*.

<sup>103</sup> Feith, *Pemikiran Politik Indonesia*, xl.

disebut “non-ko”.<sup>104</sup> Aliran “ko” melihat bahwa masuk dalam *Volksraad* sebagai upaya untuk mempersatukan gerakan nasional Indonesia. Dalam *Volksraad*, pemimpin-pemimpin Indonesia menginginkan kemerdekaan nasional melalui evolusi. Tokoh-tokoh *Volksraad* yang memimpin kelompok “ko” misalnya, Mohammad Hoesni Thamrin, Soetardjo Kartohadikusumo, Mr Soesanto Tirtoprodjo, Soekardjo Widjopranoto, Wurjaningrat, dan dr Sam Ratulangi.<sup>105</sup> Sementara aliran “non ko” melihat bahwa tujuan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Kelompok ini menolak untuk bekerjasama dengan pemerintah kolonial (nonkoperasi) dan menganggap dewan-dewan perwakilan seperti *Volksraad* sebagai yang tidak ada gunanya sama sekali. Dalam kelompok ini tergabung organisasi seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), PI (Perhimpunan Indonesia), Partindo (Partai Indonesia), dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Pemimpin-pemimpin dalam kelompok ini adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh, Hatta, Sutan Sjahrir, Mr Achmad Soebardjo, Mr Ali Sastroamidjojo, dan lain-lain. Kelompok ini menginginkan pencapaian kemerdekaan dengan aksi dan revolusi.<sup>106</sup> Lalu dimana posisi politik pejuang Kristen?

## **b. Beban Politik Pejuang Kristen**

Keterlibatan masyarakat Kristen di dunia politik bisa ditelusuri dalam situasi social politik ketika merebut kemerdekaan dari colonial. Upaya itu dimulai sejak menjelang

---

<sup>104</sup> Dhakidae, *Partai-partai Politik*, 7.

<sup>105</sup> Tim Wartawan Kompas dan Redaksi, *IJ Kasimo: Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta: Gramedia 1980), 34-35.

<sup>106</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 35.

tahun 1920an. Keberadaan dan sumbangan politik Kristen di masa ini tidak terlepas dari situasi politik yang berkembang saat itu juga. Tetapi berbeda dengan kelompok pejuang yang lain, pandangan terhadap kelompok pejuang beragama Kristen cenderung dianggap negative. Karena itu penerimaan terhadap kelompok Kristen pun tidak begitu saja mendapat respon yang baik. Mengapa pandangan terhadap pejuang politik Kristen cenderung negative? Karena orang-orang Kristen dipersamakan sebagai bahagian dari kolonialisme. Dalam konteks ini juga bila merujuk ke dalam sejarah masa lalu, pentingnya partai beraliran Kristen di Indonesia diawali oleh situasi social dan politik yang terjadi di masa awal perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Saat itu memang sangat dibutuhkan partai-partai beraliran Kristen karena agama Kristen beserta penganutnya sudah dicurigai sebagai bahagian dari kolonial.

Tetapi pejuang-pejuang Kristen mengatakan bahwa pandangan tersebut keliru terhadap orang-orang Kristen. Ini dibuktikan ketika walaupun pemerintah Hindia Belanda sudah mendirikan dua partai Kristen besar yang menjadi sarana para politisi berbasis Kristen, yakni: C.E.P. (*Christelijk Ethische Partij*) untuk politisi beragama Kristen Protestan dan I.K.P. (*Indisch Katholieke Partij*) untuk politisi beragama Kristen Katolik<sup>107</sup>, tetapi politisi Kristen justru tidak mau bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Padahal kedua organisasi tersebut di atas merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perwakilan bagi

---

<sup>107</sup> Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 47.

semua politisi baik pribumi maupun Hindia Belanda penganut agama Kristen untuk terlibat di bidang politik.

Oleh pemerintahan Hindia Belanda, organisasi tersebut dianggap sudah sangat memadai untuk menjadi perwakilan dari kalangan Kristen untuk aktif di politik, sehingga tidak dibutuhkan lagi organisasi Kristen yang lain di luar itu. Tetapi sejumlah politisi Kristen di masa awal itu justru tidak berkenan bergabung baik dengan C.E.P. (*Christelijk Ethische Partij*) sebagai partai yang dipersiapkan oleh colonial Belanda bagi kalangan politisi Protestan, dan I.K.P. (*Indisch Katholieke Partij*) yang dikhususkan oleh Belanda untuk para politisi Katolik. Kedua partai itu sengaja didirikan oleh Kolonial yang diperuntukkan baik untuk Kristen keturunan Belanda maupun keturunan pribumi. Alasannya sangat jelas, karena kedua partai Kristen tersebut dianggap sebagai bentukan pemerintah Hindia Belanda dan merupakan bagian dari upaya melanjutkan misi politik Hindia Belanda untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan colonial.

Memang sangat jelas perlakuan yang tidak adil ditunjukkan oleh pemerintah colonial terhadap masyarakat yang Kristen dibandingkan dengan yang bukan Kristen. Sebagaimana disampaikan oleh Alfian, seorang peneliti politik kebudayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 1970an, bahwa pemerintah colonial melakukan kebijakan-kebijakan politik yang sangat berbeda terhadap kepentingan Kristen. Misalnya, dalam hal pemilihan anggota Volksraad, besaran anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap kalangan Kristen sangat tidak adil dibandingkan kebijakan politik yang sama terhadap yang

bukan Kristen khususnya untuk yang beragama Islam. Alfian menjelaskan bahwa sejumlah kebijaksanaan politik Belanda jelas menunjukkan pemihakannya terhadap agama Kristen vis-à-vis agama-agama lain, terutama Islam,<sup>108</sup> dijelaskan bahwa sekolah-sekolah misi dan *zending* mendapat bantuan keuangan (subsidi) dari pemerintah colonial. Walaupun kemudian Belanda juga memberi subsidi kepada sekolah-sekolah swasta lainnya, seperti Muhammadiyah, jumlah dan proporsinya jauh lebih kecil dari pada yang diterima oleh sekolah-sekolah Katolik dan Protestan. Kebijakan politik lain yang juga memperlihatkan pemihakan Belanda terhadap golongan Kristen ialah dalam menentukan wakil-wakil di dalam Volksraad dan lembaga-lembaga perwakilan daerah, dimana tokoh-tokoh yang mewakili golongan Kristen pribumi secara proporsional juga jauh lebih daripada wajar.

Catatan Karel Steenbrink menunjukkan bagaimana persepsi tidak positif oleh kolonial terhadap kalangan muslim. Menurut Steenbrink, ada beberapa tahap pertemuan kolonial dan Islam Indonesia yang sebetulnya campuran dan tidak monolitik. Kontak awal cukup bersahabat karena motif dagang, kadang hati-hati, ingin tahu, atau ambil jarak. Pada fase ini kolonial menganggap orang Islam sebagai kaum tersesat tapi dihargai (*respected heretics*). Fase selanjutnya, muncul prasangka-prasangka jelek, sehingga Muslim dibenci (*detestable heretics*). Lalu, kebencian muncul terhadap Muslim yang dianggap tidak bisa dipercaya dan fanatik.<sup>109</sup> Pemihakan Belanda yang tampak jelas kepada golongan

---

<sup>108</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 165-166-

<sup>109</sup> Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, jilid 2, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 149.



Kristen tentu saja menimbulkan kecurigaan di kalangan kaum pergerakan nasional, terutama di kalangan Islam yang selalu merasa dimusuhi dan diperlakukan tidak adil. Walaupun sejumlah pemuka agama Kristen seperti Pastor van Lith yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap para politisi Kristen yang memperlihatkan sikap kritis mereka terhadap pemerintah colonial dan bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, hal itu rupanya tidak cukup mampu menetralkan kebijaksanaan-kebijaksanaan Belanda yang memihak.

Perlakuan yang sangat berpihak di atas tentu juga akan menjadi persoalan bagi kalangan pejuang kemerdekaan beragama Kristen yang saat itu sangat berkepentingan untuk memperjuangkan tempat yang wajar bagi mereka dalam percaturan politik nasional saat itu. Pemihakan berlebihan dari Hindia Belanda terhadap kalangan Kristen justru serta merta tidak merupakan jalan mulus bagi para politisi Kristen itu sendiri. Setidaknya ada dua hambatan yang harus dihadapi oleh para politisi Kristen. *Pertama*, ketika para politisi Kristen memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik guna memperjuangkan tempat yang wajar bagi umat Kristen dalam proses pertumbuhan bangsanya di permulaan tahun 1920-an, mereka tentu memahami betul berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Dalam satu hal perjuangan nasional bangsa Indonesia sudah berjalan semenjak beberapa tahun sebelumnya. Dalam pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan telah terdapat tiga aliran politik yang kuat – Nasionalisme, Islam dan Marxisme – yang boleh dikatakan mendominirnya. Paling kurang dari padanya Nasionalisme dan Islam merupakan dua kekuatan yang terus bertahan dan oleh karena itu selalu memainkan peranan

dominan dan menentukan. Maka munculnya politisi Kristen sebagai kekuatan politik baru dari golongan Kristen pribumi yang masih sangat kecil jumlahnya dalam pergerakan nasional Indonesia memang tampak sebagai suatu hal yang musykil pada waktu itu.<sup>110</sup>

*Kedua*, ada beberapa hambatan psikologis yang harus mereka terobos supaya mereka bisa diterima sebagai bahagian integral dari pergerakan nasional Indonesia walaupun minoritas. Hambatan psikologi yang paling berat ialah berkaitan agama mereka dengan sejarah kolonialisme Barat/Belanda yang ditentang oleh sebahagian besar kalangan pergerakan nasional saat itu. Senang ataukah tidak senang, sejarah kolonialisme Barat dalam intensitas yang berbeda memang memperkaitkan empat corak dominasi, yakni: politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Beberapa Negara colonial Barat seperti Spanyol dan Portugal memperlihatkan perkaitan itu secara erat dan intens sekali. Belanda dan Inggris termasuk yang bersikap lebih liberal dalam agama, dalam arti sejarah kolonialisme mereka tidak begitu disertai oleh fanatisme penyebaran agama Kristen (Katolik dan Protestan) mereka. Sungguh pun begitu sejarah kolonisme Belanda di Indonesia tetap mempunyai kaitan dengan penyebaran agama Kristen di negeri ini.<sup>111</sup>

Akibatnya, berkembang anggapan bahwa agama Kristen adalah agama orang Eropa, agama orang Belanda. Karena itu, orang Indonesia yang memeluk agama Kristen, jiwa dan hatinya dicap sama dengan orang Belanda. Mereka

---

<sup>110</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 165.

<sup>111</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 165-166.

bukan orang Indonesia sejati. Mereka termasuk “barisan kaum sana”, bukan ‘barisan kaum sini’”.<sup>112</sup> Disangkakan sebagai bahagian dari Hindia Belanda terkait Missidan Zending yang sangat kuat, membuat para politisi Kristen sendiri tidak nyaman oleh persangkaan untuk memperluas koloni. Orang pribumi yang memeluk agama Kristen tidak mengharapkan akan ada cap sebagai antek-antek Belanda, yang mustahil memiliki jiwa dan semangat kebangsaan Indonesia.<sup>113</sup> Pemihakan berlebihan pemerintahan Hindia Belanda terhadap kalangan Kristen sebagaimana disampaikan Alfian di atas tidak hanya menjadi kekusaran di pihak Kristen sendiri karena akan menjadi bagian dari program dan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Kekusaran yang lebih besar justru berasal dari kalangan pergerakan sendiri yang mencurigai bahwa para politisi Kristen tersebut tidak bisa dipercaya sebagai bagian dari pergerakan menuju kemerdekaan. Muncul *stereotip* di kalangan aktivis pergerakan saat itu bahwa para politisi Kristen tersebut tidak akan pernah tulus dalam memperjuangkan kemerdekaan karena mereka adalah bagian dari colonial.

Bahkan yang lebih parah adalah muncul kecurigaan bahwa para politisi Kristen tersebut adalah mata-mata dari kalangan colonial untuk memantau seluruh pergerakan para aktifis pejuang kemerdekaan. Ada contoh sangat menarik terkait kecurigaan dimaksud, dimana dua anggota Volksraad, yang seorang Kristen dan yang lain Muslim, saling menuduh dalam sebuah sidang Volksraad. Pertikaian itu terjadi antara

---

<sup>112</sup>Redaksi, *IJ Kasimo*, 36.

<sup>113</sup> Vincent Saka, *Pesan dan Kesan: untuk mereka yang mau mengikuti Pak Kasimo*, (Jakarta: [tanpa penerbit] 1987), 44.

IJ Kasimo dengan RP Soeroso dari kalangan Muslim dalam sebuah sidang di Volksraad. Dalam sidang Volksraad tanggal 3 Agustus 1933, R. Pandji Soeroso menuduh kalangan Kristen Katolik sebagai antek-antek kolonial sehingga mereka bukan orang-orang nasionalis sejati melainkan ditentukan oleh Vikaris Apostolik (Gereja Katolik) yang bukan orang Indonesia, tetapi penjajah.<sup>114</sup> Kasimo pun berbalik marah dengan menuduh R. Pandji Soeroso justru bukan nasionalis sejati oleh karena arah nasionalisme Pandji Soeroso tidak mengikuti naluri nasional yang wajar, melainkan ditentukan oleh para pemimpin sosialis dari NVV (*Nederland Verbond van Vakvereenigingen* – Gabungan Serikat-Serikat Negeri Belanda).

Diterimanya orang-orang beragama Kristen dalam sejarah politik Indonesia hingga seperti sekarang ini memiliki sejarah yang sangat panjang dengan awal kisah yang susah. Sejarah membuktikan bahwa kekristenan tidak mudah untuk diterima, sering dianggap sebagai bahagian dari kelompok kolonialisme hingga kemudian berhasil diyakinkan. Perjuangan itu pun semakin mendapatkan buahnya ketika persiapan menuju kemerdekaan dan dimasa-masa sesudah kemerdekaan. Bab berikut akan menjelaskan bagaimana para politisi beragama Kristen menjadi bagian tak terpisahkandari republic ini sejak masa awal sebelum kemerdekaan dan tentu saja sesudah kemerdekaan kemudian.

---

<sup>114</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 38-39.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

## **BAB IV**

### **KEKRISTENAN DALAM POLITIK INDONESIA HINGGA MASA AWAL KEMERDEKAAN**

Penerimaan para politisi Kristen yang sempat dicurigai sebagai bagian dari kolonialisme hingga kemudian diterima secara baik dalam upaya mewujudkan kemerdekaan adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Pembuktian itu kemudian dilakukan oleh para politisi Kristen yang dengan sangat serius mengupayakan kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan itu sesudah merdeka kemudian. Bab ini akan menjelaskan tentang peran-peran tersebut.

Para politisi beragama Kristen sudah sejak awal memasuki dunia politik dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) tokoh politik Kristen yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

#### **4.1. Perjuangan Politisi Kristen Menuju Kemerdekaan**

Salah satu diantaranya misalnya, IJ Kasimo seorang Jawa, dimana setelah lulus dari Muntilan, Kasimo pun masuk menjadi anggota Jong Java yang menurutnya: “menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputera pada sekolah menengah, kursus perguruan kejuruan dan sekolah yang menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya; membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia”. Kasimo kelak mengikuti jalur perjuangan kooperatif di Volksraad. Sementara Amir Sjarifuddin Harahap, seorang Batak, sejak sangat awal

mengikuti pergerakan dan pemikiran Soekarno. Amir lewat Partindo sama sekali tidak menerima perjuangan dalam bentuk kooperatif, tetapi melakukan perlawanan langsung kepada colonial. Sementara Sam Ratulangi lebih mengidolakan model Minahasa, dimana kemajuan ekonomi dan perjuangan yang dilakukan di Minahasa dengan “kebaikan” Belanda menjadi model yang patut diikuti dalam pembentukan Negara Indonesia menuju kemerdekaan.

Nilai perjuangan Amir Sjarifuddin menuju Indonesia merdeka misalnya dilukiskan oleh Jacques Leclerc dalam pengantar bukunya demikian:<sup>115</sup>

“Masa hidup Amir Sjarifuddin terentang sepanjang paruh pertama abad ke-20. Usia itu habis diserap oleh penemuan dan kegagalan harapan-harapan besar dari jamannya, seperti yang terungkap dalam kata-kata "kemerdekaan nasional", "kedaulatan rakyat", dan "sosialisme". Seperti juga di mana-mana, di Indonesia pun, bagi barang siapa yang ambil bagian di dalamnya, semua kata-kata itu dipadatkan dalam sepatah kata saja: "revolusi".

Sebuah dokumen *Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service* (NEFIS), menyebutkan, instansi rahasia yang dipimpin Van Mook, 9 Juni 1947 menulis tentang Amir; "ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang

---

<sup>115</sup> Jacques Leclerc: “Pengantar,” *Antara Negara dan Revolusi* (blog), 23 Juli 2011. Diakses dari <http://members.fortunecity.com/sejarah-indonesia/sjarifuddin.htm>.

yang tak mengenal kata takut".<sup>116</sup> Pada September 1927, sekembalinya dari Belanda, Amir masuk Sekolah Hukum di Batavia dan tinggal di asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat nomor 106. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia terlibat berbagai pergerakan bahwa tanah. Hotman Jonathan Lumban Gaol, seorang jurnalis menulis tentang Amir demikian,<sup>117</sup>

“Tahun 1931, Amir mendirikan Partai Indonesia (Partindo). Lalu, mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sembari menulis dan menjadi redaktur “Poedjangga Baroe”. Berjuang untuk pembebasan dari belenggu penjajah, benih-benih perjuangan itu pun makin mekar saat Amir bertemu para tokoh pejuang seperti Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Husni Thamrin. Dari sana Amir aktif diskusi Politik Indonesia bersama para tokoh kala itu. Pada bulan Januari 1943 dia tertangkap oleh fasis Jepang, karena dianggap pemberontak. Kejadian itu membongkar jaringan, organisasi anti fasisme Jepang yang dimotori Amir. Kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan, mengangkat para pembantunya yang terdekat, teman-teman satu pergerakan.”

Saat menjabat Menteri Pertahanan, Amir tidak sependapat terhadap kebijakan Hatta karena pengurangan jumlah tentara, dari 400 ribu menjadi 60 ribu tentara. Menurutnya, layaknya tentara, satu banding tiga, satu tentara

---

<sup>116</sup> Hotman Jonathan Lumbangaol, “Pejuang Pembebasan Amir Syarifuddin Harahap, Perdana Menteri RI yang Dilupakan”, (blog), 15 Desember 2008 diakses dari <http://www.kabarindonesia.com> .

<sup>117</sup> Lumbangaol, *Pejuang Pembebasan*.



untuk menjaga tiga orang penduduk. Lalu, di Kabinet Sjahrier pada tanggal 12 Maret 1946, Amir Sjarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan dari Partai Sosialis, dikemudian hari berafiliasi dengan Komunis.<sup>118</sup> Tan Malaka dan Kelompok Persatuan Perjuangan menculik Perdana Menteri Sjahrier. Dari Amir menjadi Perdana Menteri. Kala itu, perdana menteri bisa jatuh kapan saja jika tidak didukung parlemen dan partai. Sesudah Amir mangkat, tahun 1950-an, zaman demokrasi parlementer, tujuh kali pergantian perdana menteri terjadi.

Tokoh politik Kristen lain yang menonjol di luar yang disebutkan oleh Gerry van Klinken di atas adalah Johannes Leimena seorang Protestan salah satu pahlawan nasional yang lahir di Ambon Maluku 6 Maret 1905 – meninggal di Jakarta, 29 Maret 1977 pada umur 72 tahun. Selama bersekolah di STOVIA, Leimena menunjukkan nilai kekristenan sekaligus kebangsaannya, yakni dengan aktif di berbagai gerakan. Ia menjadi ketua CSV (*Christelijke Studenten Vereeniging*) yang pertama di Jawa, organisasi ekstra kemahasiswaan yang merupakan cikal bakal GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia).<sup>119</sup> Sejak menjadi mahasiswa, Leimena sudah aktif di kalangan nasional dan masuk organisasi politik “Sarekat Ambon”. Sejak tahun 1925 aktif dalam perkumpulan pemuda “Yong Ambon” sebagai Ketua Umum serta turut dalam persiapan “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928. Perhatiannya pada pergerakan nasional kebangsaan

---

<sup>118</sup> Lumbangaol, *Pejuang Pembebasan*.

<sup>119</sup> “Latar Belakang dan Otobiografi Johannes” (blog) 29 Juli 2011. Diakses dari <http://reinnamah.blogspot.com/2010/04/latar-belakang-dan-otobiogravi-johanes.html>.

berkembang sejak tahun 1920-an. Bermula di Bandung, yang kerap kali mendengar pidato presiden Soekarno. Tokoh lain yang di kaguminya saat itu adalah M. Husni Thamrin, Sam Ratulangi, dan Agus Salim. Leimena adalah salah satu anggota Kongres Pemuda Indonesia I yang menghasilkan sumpah pemuda, 28 oktober 1928 selaku aktivis Jong Ambon. Pada zaman Jepang dan revolusi kemerdekaan Leimena ikut berjuang dan mengabdikan penuh kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pun, sejumlah tokoh Kristen menjadi bagian yang merumuskan kemerdekaan Indonesia.<sup>120</sup> Dalam catatan Kepustakaan Presiden disebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mencatat bahwa umat Kristen Indonesia terlibat secara aktif, baik di medan perjuangan fisik maupun di medan perjuangan politik. Untuk mengetahui keterlibatan umat Kristen dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan penting tentang peranan umat Kristen dalam proses integrasi nasional. Catatan-catatan penting itu antara lain dalam BPUPKI yang beranggota 60 orang terdapat 3 (tiga) orang tokoh Kristen Protestan yaitu : Mr. Alexander A. Maramis, Johannes Latuharhary, dan Parada Harahap.

---

<sup>120</sup> “Partai Kristen Indonesia-PARKINDO” (blog) 29 Juli 2011. Diakses dari <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/Pemilu>,

Selain sebagai anggota BPUPKI, mereka juga terpilih sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno. Ketiga tokoh Kristen ini juga berada diantara 19 orang anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar. Agar semua unsur bisa terwakili dalam Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar, Soekarno selaku Ketua Panitia menambah wakil-wakil dari daerah. Terpilihlah 2 (dua) tokoh Kristen lagi yaitu Sam Ratulangi mewakili Celebes (sekarang Sulawesi) dan J.Leimena mewakili Maluku.

Tentang Maramis misalnya,<sup>121</sup> semasa remaja Maramis mengawali pendidikannya di ELS (*European Elementary School*) pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1918, ia melanjutkan pendidikannya ke HBS dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda. Maramis lulus dengan gelar "Meester in de Rechten" (Mr) pada tahun 1924. Di masa remajanya, Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Maramis termasuk salah seorang tokoh dalam "Panitia Lima" yang ditugaskan Pemerintah untuk merumuskan Pancasila. Pada saat Belanda melancarkan Agresi militer ke II, Maramis diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat RI (PDRI) yang berkedudukan di New Delhi, India. Semasa hidupnya Maramis pernah juga menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Filipina, Jerman Barat, dan Rusia.

---

<sup>121</sup> "Kepustakaan Indonesia," (blog), 20 November 2012. Diakses dari [http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet\\_personnel](http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel).

Misalnya pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Sam Ratulangi mempersoalkan dua hal penting yaitu: masalah Anggaran Belanja Negara yaitu bagaimana kalau Anggaran Belanja yang disampaikan Pemerintah ke DPR ditolak. Karena dalam Rancangan UUD belum ada pasal yang mengatur hal tersebut. Sam Ratulangi mengusulkan apabila DPR menolak Anggaran Belanja yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Usul tersebut diterima menjadi pasal 23 UUD yang berbunyi : “ [...] Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya”.<sup>122</sup>

Terkait masalah dekonsentrasi serta desentralisasi, Sam Ratulangi mengusulkan agar daerah-daerah diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Tentu dengan persetujuan bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia dari satu Negara. Biarpun demikian kebutuhan, keperluan daerah-daerah disana harus mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dengan mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri. Sementara ketika membicarakan pasal tentang agama, dalam rapat Panitia Penyusun UUD tanggal 15 Juli 1945, Latuharhary misalnya menanggapi pernyataan anggota Abdul Fatah Hasan tentang pasal 28 ayat 2 yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

---

<sup>122</sup> “Kepustakaan Indonesia,” (blog).

penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Menurut Latuharhary,<sup>123</sup>

“... kalau bunyinya:“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang beragama lain”, maka artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, menghormati agama bukan menghormati orang yang memeluk agama. Jadi, kalau diganti dengan “untuk yang memeluk”artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat itu bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh Panitia Kecil itu”.

Tokoh Kristen entah dengan bendera partai Kristen atau tanpa bendera partai Kristen bahkan yang tidak terlibat dalam partai memiliki tugas untuk meluruskan pandangan politik yang salah di kalangan pribumi sendiri bahwa kalangan Kristen dianggap sebagai mata-mata dari pihak kolonial. Bahkan di depan sidang Volksraad pada 19 Juli 1932, Kasimo dengan lantang menegaskan ulang bahwa kehendak politik orang Kristen adalah sama dengan kehendak politik kalangan pejuang kemerdekaan nasionalis yang lain yakni memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagi politisi Kristen, kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa.

---

<sup>123</sup> Sekretariat Negara, *Risalah sidang Badan Penyelidik–Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara, Republik Indonesia, 1992),336.

Ungkapan dan pidato-pidato terkait kemerdekaan itu sering muncul dalam sidang-sidang di Volksraad, misalnya,<sup>124</sup>

”Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negeri sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional, yaitu sesempurna mungkin. Ini berarti bahwa negeri Belanda sebagai negeri berbudaya yang terpanggil, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat, sehingga dengan demikian dapat dicapai kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah negara sendiri.”

Situasi politik dicurigai ini tentu memberi rasa tidak nyaman bagi kalangan pribumi yang beragama Kristen yang memiliki cita-cita yang sama seperti kalangan pergerakan yang lain menginginkan kemerdekaan Indonesia yang sesegera mungkin. Salah satu diantara kehendak kalangan Kristen untuk sesegera mungkin mendapatkan kemerdekaan.

---

<sup>124</sup> Mikhael Dua, “Narasi Sejarah: Politik Pergerakan Menuju Kemandirian Bangsa”, dalam Kasdin Sihoptang et al, *Politik Katolik Politik kebaikan bersama: sejarah dan refleksi Keterlibatan orang-orang Katolik dalam politik Indoensia*, (Jakarta: ISKA, PPE Atmajaya dan Penerbit Obor 2008), 40-41.

Dalam banyak literatur yang dituliskan oleh orang-orang Kristen, seruan-seruan dan hak kemerdekaan itu menjadi hal yang sering muncul, misalnya dari pidato Kasimo berikut ini:<sup>125</sup>

”[...] tiap-tiap putera atau puteri Indonesia, baikpun mereka beragama Islam, maupun Katholik ataupun Protestan dan lain sebagainya dewasa ini telah bekerdja, berdjuaug-menjutjurkan keringat dan darah untuk membela dan mempertahankan Republik kita, [...] guna mengokohkan pendirian dan tekad bagi [...] putera-puteri Indonesia pada umumnja, pula untuk penerangan dan pendjelasan bagi umum tentang pendirian dan tekad [...] didalam perdjuaugan Bangsa ini [...]”.

Pejuang Kristen dengan sangat tegas mengungkapkan bahwa hak kemerdekaan itu juga adalah hak dari bangsa Indonesia untuk merdeka dan sudah sepatutnya didapatkan oleh bangsa Indonesia untuk membentuk Republik Indonesia.<sup>126</sup>

“Sebab kami yakin, bahwa republik Indonesia itu mempunjai kuasa yang halal dan sah, baik menurut djadi dan adanja, maupun menurut sikap dan perbuatnja dalam menjelenggarakan kewadajibnja sebagai

---

<sup>125</sup> Kasimo, *Dasar Perdjuaugan P.K.R.I-A.M.K.R.I: Pengantar Kata* (Jogjakarta: Pertjetakan “Canisius”, Tahun 1948), 3.

<sup>126</sup> Kasimo, *Dasar Perdjuaugan*, 5.

pemerintah sehari-hari Inilah alasan-alasan yang memberi dasar kepada jakin kami, bahwa kuasa Republik Indonesia itu sah dan menurut hukum.”

Bagi para pejuang Kristen, kemerdekaan Indonesia tidak bisa lagi ditawar-tawar, sudah sah baik secara hukum maupun secara *de facto*. Pejuang Kristen menegaskan bahwa dengan tahu dan mau dengan jalan dan inisiatif, pihaknya turut membela dan memelihara Republik Indonesia sebagai Pemerintah Nasional yang berkuasa sah menurut hukum kodrat (*de jure naturali atau natuurrechtelijk*). Pembelaan itu bisa ditemukan dalam penegasan berikut ini,<sup>127</sup>

“Republik Indonesia bukanlah Pemerintah yang *de facto* sah belaka, tetapi Pemerintah yang “*De Jure Naturali*”, artinya menurut hukum kodratnja atau keadaanja sudah bereslah adanja. Perkara *De Jure Positivo*, alias beres menurut pengakuan dunia internasional, itulah tergantung dari kehendak beberapa Negara yang terkemuka.”

Apa yang diungkapkan oleh pejuang Kristen di atas hanyalah sedikit dari seluruh keinginan kalangan politisi Kristen untuk menyegerakan Indonesia merdeka. Pemikiran dan kehendak seperti ini di kalangan Kristen bisa ditelusuri dalam banyak literatur terkait kalangan Kristen dalam mewujudkan kemerdekaan. Pengungkapan untuk merdeka di atas juga merupakan salah satu bukti sekaligus menjadi alasan

---

<sup>127</sup> Kasimo, *Dasar Perjuangan*, 7.



mengapa para aktivis politik Kristen tidak mau bergabung dengan organisasi politik Kristen yang dibentuk oleh Hindia Belanda. Masing-masing mereka membentuk sendiri organisasinya.

Tokoh pergerakan di kalangan Protestan bisa kita sebut salah satu, misalnya GSSJ Sam Ratulangi yang menjadi symbol partai politik Dewan Minahasa. Bukan hanya tidak mau bergabung dengan CEP, malah Sam Ratulangi justru mengafiliasi partainya pada NIVB yang liberal. Kemudian pada 1927, Sam Ratulangi mendirikan organisasi politik bernama *Persatoean Minahasa* dan dia sendiri menjadi ketuanya.<sup>128</sup> Tujuan utamanya adalah berjuang untuk struktur Negara federal yang didasarkan pada unit-unit kelompok etnis Indonesia. Bagi Sam Ratulangi agama Kristen bukanlah kosmologi universal melainkan sebuah sub dari etnisitas lokal. Karena itu Sam Ratulangi membuat partai Kristen yang khas Minahasa. Ia menggambarkan agama Kristen sebagai gerakan emansipasi cultural yang asli Minahasa. Sam Ratulangi menentang partai-partai politik yang menjangkau berbagai kelompok-kelompok etnik, dan sebaliknya ia mendukung aksi kelompok-kelompok Kristen yang berakar dalam etnisitas Minahasa.

Van Klinken menegaskan bahwa “Pendirian teguh Sam Ratulangi dalam menjadikan kategori-kategori primordial etnisitas dan agama (yang dibawakan secara komunal) sebagai senjata politik utamanya, menempatkannya dalam kelompok konservatif.”<sup>129</sup> Hal yang kurang lebih sama

---

<sup>128</sup> Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 151.

<sup>129</sup> Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 147.

terjadi dengan para aktivis politik beragama Katolik. Tokoh pergerakannya, yakni Ignatius Josep Kasimo pada tahun 1923 membentuk *Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD)* yang dalam sejumlah masa kemudian berubah nama menjadi Partai Katolik. Di awalnya memang organisasi ini masih sebatas di lingkungan orang Djawa yang memang menjadi pusat perjuangan kemerdekaan saat itu langsung di ibukota.

Semangat yang diusung oleh Kasimo dan kawan-kawan adalah bahwa partai ini kemudian menjadi wadah dari masyarakat Katolik Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Kasimo dengan partai yang dibentuknya sebagai perwakilan politik Kristen Katolik melakukan konsolidasi dengan para tokoh pergerakan yang lain untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Mengulangi apa yang sudah dijelaskan di atas, maka kehadiran partai Kristen di masa awal pergerakan menuju kemerdekaan mendapat penolakan dari dua belah pihak sekaligus. *Pertama* penolakan datang dari kalangan Hindia Belanda yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi dibentuk partai lain di luar partai yang sudah dibentuk oleh Hindia Belanda, yakni C.E.P. (*Christelijk Ethische Partij*) untuk politisi beragama Protestan dan I.K.P. (*Indisch Katholieke Partij*) untuk politisi yang beragama Katolik. Semua partai yang menggunakan bendera Protestan dan Katolik harus ditolak dan tidak diperkenankan untuk didirikan.

*Kedua*, penolakan berasal dari kalangan pergerakan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di atas, usaha Kasimo dari kalangan Katolik dan usaha Sam Ratulangi dari kalangan Protestan dianggap hanya sebagai kamouflase saja, yakni memberi bayang-bayang seolah-olah kalangan pribumi yang

Kristen itu bahagian dari pergerakan, tetapi sesungguhnya kehadiran mereka adalah bahagian dari misi Hindia Belanda sebagaimana disebutkan di atas. Inilah alasan terpenting mengapa menjadi penting dirasakan untuk membentuk partai berlandaskan Kristen di masa awal pergerakan dan di masa awal kemerdekaan tersebut untuk menunjukkan bahwa kalangan politisi Kristen bukanlah bahagian dari colonial sebagaimana disangkakan. Kehadiran partai-partai Kristen adalah murni untuk kemerdekaan Indonesia.

Maka mau tidak mau kehadiran partai berbasis Kristen menjadi sesuatu yang dibutuhkan saat itu. Dan hasilnya sangat jelas. Para politisi Kristen secara berangsur –angsur dan tekun berjuang merealisasikan idealisme mereka, terutama untuk menciptakan citra baru tentang umat Kristen sebagai bahagian integral dari bangsa Indonesia. Menurut Alfian, seorang peneliti LIPI, setidaknya ada dua pokok perjuangan yang sekaligus dilakukan oleh para politisi Kristen di saat pergerakan kemerdekaan dan di masa awal kemerdekaan. Kedua perjuangan dimaksud adalah perihal nasionalisme dan perihal demokrasi dimana keduanya saling berkaitan.

*Segi pertama* adalah nasionalisme yakni keinginan untuk memperjuangkan tempat yang wajar bagi umat Kristen, yang minoritas, dalam masyarakat dan sistem politik Indonesia. Sebagai golongan minoritas, tempat yang wajar itu hanya mungkin diperoleh di dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dengan begitu, demokrasi bagi politisi Kristen mengandung makna tersendiri dalam perjuangannya mencari tempat yang wajar bagi golongan agamanya. *Segi kedua* adalah Demokrasi yang menjadi cita-cita politik kalangan politisi Kristen. Seorang Kristen yang baik hanya mungkin

menjadi seorang politikus yang baik bilamana politisi bersangkutan berhasil menjadikan dirinya seorang democrat yang baik pula.<sup>130</sup>

Sementara terkait dengan demokrasi, para politisi Krisitani sangat meyakini sekali bahwa tempat yang wajar bagi umat Kristen dalam masyarakat dan sistem politik Indonesia hanya mungkin terwujud dalam alam demokrasi, dimana segala bentuk tirani, apakah yang berpredikat minoritas ataukah mayoritas, dapat dihindarkan. Alfian mengungkapkan,<sup>131</sup>

“Tirani sebagaimana diketahui adalah bentuk kekuasaan yang amat tidak manusiawi, dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dipeluknya. Inilah yang menjadi landasan bagi melihat pandangan dasar tokoh ini terhadap politik. [...] seseorang hanya mungkin menjadi politikus yang baik dan berguna bagi masyarakatnya bilamana dia berhasil menjadikan dirinya seorang demokrat.”

Pentingnya partai berlandaskan agama Kristen masih sangat dirasakan sejak kemerdekaan sampai tahun 1960an. Pembentukan keindonesiaan yang majemuk dan plural saat itu masih terus dalam tahap konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional yang dimaksud adalah upaya untuk meleburkan masyarakat beragama Kristen untuk diterima sebagai

---

<sup>130</sup> Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 164-165.

<sup>131</sup> Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, 172.

bahagian dari bangsa yang satu cita-cita yakni mengisi kemerdekaan, menjadi bagian dari bangsa yang satu dan sama untuk merumuskan visi kemerdekaan walaupun berbeda agama. Perlunya konsolidasi itu dimaksudkan untuk menepis anggapan yang selama ini bahwa kalangan Kristen adalah bagian dari kelompok Hindia Belanda.

#### **4.2. Keterwakilan Politik Kristen di Masa Orde Lama**

Para tokoh politik Kristen yang terlibat dalam politik Indonesia di era Orde Lama hampir seluruhnya adalah mereka yang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan. Sebagaimana kelima orang yang disebutkan di atas sebagai tokoh Indonesia oleh Gerry van Klinken, kelimanya adalah figur politik Kristen yang terlibat aktif dalam politik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, mulai dari memperjuangkan kemerdekaan itu dan kemudian mengisi kemerdekaan itu sendiri selama kurun Orde Lama. Dari kelima yang disebutkan van Klinken tersebut, mungkin Soegijapranata yang bisa dikatakan sebagai tokoh yang muncul dimasa akhir pra kemerdekaan dan menjadi tampak menonjol terlebih di masa awal sesudah kemerdekaan. Sebahagian diantara mereka ada yang aktif di partai berbasis Kristen dan sebahagian lagi tidak memasuki partai.

Kita sebutkan misalnya Todung Sutan Gunung Mulia (1896 - 1966) seorang Kristen Protestan yang dimasa awal kemerdekaan (Orde Lama) menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1946 dalam Kabinet Sjahrir I dan Kabinet Sjahrir II. Todung adalah seorang Batak yang bermarga Harahap, yang juga adik sepupu dari Amir Sjarifoeddin.

Todung menjadi salah satu pemrakarsa Pembentukan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang di tahun 1955 menjadi salah satu peserta Pemilu dan menduduki kursi di urutan nomor 6 terbesar.<sup>132</sup> Parkindo adalah Partai Politik Indonesia pada 1950 – 1973 yang basis wilayahnya pada daerah Protestan Indonesia.<sup>133</sup> Sementara tokoh Partai Katolik adalah IJ Kasimo, yang berdiri sejak 1945 hingga 1973 yang memiliki basis pemilih beragama Katolik. Partai Katolik menjadi peserta dalam Pemilu 1955 dan mendapatkan kursi di urutan nomor 7 terbesar.

Pada tahun 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terbentuk dan pada tahun 1950, ia terpilih sebagai ketua umum dan memegang jabatan ini hingga tahun 1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga pada tahun 1950. Di lembaga ini Leimena terpilih sebagai wakil ketua yang membidangi komisi gereja dan negara.<sup>134</sup> Leimena merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri kabinet Indonesia dan satu-satunya Menteri Indonesia yang menjabat sebagai Menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966), baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri

---

<sup>132</sup>Kelak nama Todung diabadikan menjadi nama Badan Penerbitan Kristen PGI (Perhimpunan Gereja-gereja Indonesia) yakni Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia di Jakarta.

<sup>133</sup> “Partai Kristen Indonesia” (blog), 27 Juli 2011. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia/Partai\\_Kristen\\_Indonesia](http://id.gerejaindonesia/Partai_Kristen_Indonesia).

<sup>134</sup> “Hj. Meilani Leimena Suharli”, (blog), 15 November 2012. [www.mpr.go.id/blog/hj-meilani-leimena-suharli](http://www.mpr.go.id/blog/hj-meilani-leimena-suharli).

Sosial. Selain itu Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL.<sup>135</sup>

#### **a. Partai Kristen menjadi Peserta Pemilu 1955**

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.<sup>136</sup>

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.<sup>137</sup> Kelahiran dari

---

<sup>135</sup> “Partai Kristen Indonesia” (blog), 27 Juli 2011.

<sup>136</sup> “Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955” (blog), 29 Juli 2011. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan\\_Umum\\_Anggota\\_DPR\\_dan\\_Konstituante\\_Indonesia\\_1955](http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_Konstituante_Indonesia_1955).

<sup>137</sup> “Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955” (blog) 29 Juli 2011.

partai-partai di Indonesia diawali dari pandangan Moh. Hatta tentang demokrasi parlementer yang hendak dianut oleh Indonesia. Pandangan itu kemudian secara tegas dan jelas disebutkan dalam Maklumat pemerintah No.X/Th.1945 tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh Hatta tertanggal 3 November 1945.

Maklumat ini praktis memaksakan sistem parlementer di tengah sistem presidensial yang diharuskan Undang-Undang Dasar 1945. Demi kepentingan itu harus ada partai-partai.<sup>138</sup> Maklumat tersebut memuat perihal pembentukan partai-partai sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat Indonesia.<sup>139</sup> Dari catatan kepustakaan presiden, sejarah pembentukan partai politik di Indonesia didasarkan pada Maklumat ini dan merupakan tanggapan atas pendapat dunia internasional terutama negara-negara sekutu, bahwa tuntutan untuk merdeka hanyalah keinginan Soekarno dan Pemerintahnya. Maklumat tersebut membolehkan masyarakat membentuk partai politik sebanyak-banyaknya. Maklumat itu juga sekaligus menjawab anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa Soekarno dan Mohamad Hatta akan menjadikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal.

---

<sup>138</sup> Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia*, 8.

<sup>139</sup> Soekarno memandang bahwa revolusi belum selesai sehingga harus dilaksanakan termasuk berbagai cara walaupun dengan cara-cara yang radikal termasuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut.



Maklumat Pemerintah tersebut telah mendorong sekelompok orang Kristen Indonesia untuk menggumuli pembentukan sebuah Partai Kristen.<sup>140</sup> Serentetan pertemuan diadakan oleh para tokoh Kristen (Protestan dan Katolik) di Jakarta untuk menggumuli pembentukan sebuah partai bagi seluruh umat Kristen Indonesia. Tanggal 9 November 1945 bertempat di gedung Gereja Kristen Pasundan – Jl.Kramat Raya No.45, para tokoh Protestan dan Katolik kembali mengadakan pertemuan. Dari pihak Protestan hadir: Domine Probowinoto, Sutan Gunung Mulia, Fredrick Laoh, W.Z.Johanes, J.K.Panggabean, Soedarsono, Maryoto dan Martinus Abednego; dari pihak Katolik hadir Soeradi dan Hadi. Pertemuan dipimpin oleh Probowinoto. Ketika peserta pertemuan sepakat membentuk sebuah Partai Kristen, utusan Katolik mengundurkan diri dengan alasan akan membicarakannya dahulu dengan Pimpinan Gereja Katolik, yang akhirnya membentuk Partai Katolik.<sup>141</sup> Akhirnya pertemuan malam itu sepakat membentuk sebuah partai untuk umat Kristen Protestan dengan nama Partai Kristen Nasional. Nama itu diusulkan oleh Todung Sutan Gunung Mulia. Peserta pertemuan secara aklamasi memilih W.Z.Johanes sebagai Ketua dan Maryoto sebagai Sekretaris. Tanggal 10 November 1945, para tokoh Kristen Protestan itu mendeklarasikan berdirinya Partai Kristen Nasional (Parkindo).<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> “Partai Kristen Indonesia” (blog), 27 Juli 2011.

<sup>141</sup> “Partai Kristen Indonesia” (blog), 27 Juli 2011.

<sup>142</sup> “Partai Kristen Indonesia” (blog), 27 Juli 2011.

Sementara sejarah lahir Partai Katolik merupakan kelanjutan dari perkumpulan yang didirikan oleh Kasimo dan kawan-kawan pada 5 Agustus 1923 di Jogjakarta yakni P.P.K.D (singkatan dari : *Pakempalan Politik Katolik Djawi*)<sup>143</sup> yang pada saat itu berada di bawah IKP (*Indische Katholieke Partij*) yang adalah Partai Katolik milik Belanda. Lewat PPKD ini maka Kasimo mendapat kursi di Volksraad. Barulah pada 22 Februari 1925 *Perkumpulan Politik Katolik di Djawa* (PPKD) berdiri sendiri sebagai partai politik, tidak lagi berada di bawah IKP<sup>144</sup>. IKP berdiri sendiri sebagai partai politik dengan cabang-cabang. Hingga kemudian tahun 1930 PPKD berubah nama menjadi *Persatoean Politik Katolik Indonesia* (PPKI).<sup>145</sup> Setelah berjuang selama hampir 15 tahun, PPKI akhirnya diterima sebagai partai nasional seperti dan sederajat dengan partai-partai politik yang lain dengan tergabung dalam *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI) yang terdiri dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), PII (Partai Islam Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), Pasundan, Persatuan Minahasa, dan PPKI (Persatoean Politik Katolik Indonesia) yang dipimpin oleh Mohammad Hoesni Thamrin, Mr Amir Sjarifuddin, dan Abiskusno Tjokrosujoso.

Setelah kemerdekaan wadah politik bagi Katolik dibentuk pada 8 Desember 1945 dimana Kongres di Surakarta memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Dengan partai inilah IJ Kasimo diangkat sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet

---

<sup>143</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 21-23.

<sup>144</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 26.

<sup>145</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 166.

Mr. Amir Sjarifuddin. Untuk pertama kalinya golongan Katolik masuk dalam struktur cabinet. Pada masa pendudukan Jepang, kehadiran organisasi politik termasuk PPKI dilarang dan harus dibubarkan. Tetapi kelahiran Partai Katolik sesungguhnya baru terjadi pada Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) di Surakarta pada 7-12 Desember 1949. Keputusan penting KUKSI adalah peleburan semua Partai Katolik yang ada di Indonesia menjadi satu partai dengan nama Partai Katolik. Pembukaan KUKSI dihadiri Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, Vikaris Apostolik Mgr Soegijopranoto SJ. Tanggal 4 Agustus 1950 diadakan Kongres Pertama Partai Katolik di Semarang. Kasimo terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Katolik. Partai inilah yang kemudian menjadi salah satu peserta Pemilu 1955.

#### **b. Keterwakilan Politik dalam Pemilu 1955**

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).<sup>146</sup> Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis

---

<sup>146</sup> “Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955” (blog) 29 Juli 2011. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan\\_Umum\\_Anggota\\_DPR\\_dan\\_Konstituante\\_Indonesia\\_1955](http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_Konstituante_Indonesia_1955).

Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso). Bagaimana keterwakilan politik Kristen di masa Pemilu 1955 tersebut? Rupanya keberadaan partai berbasis Kristen tentu saja sangat berbeda di era sekarang ini dibandingkan dengan Era 1955. Pada masa Pemilu pertama ini partai-partai Kristen mengalami masa-masa keemasannya oleh dukungan pemilih pemilihnya di seluruh Indonesia.

**Tabel 4. 1 Perolehan Suara Partai Kristen Pemilu 1955**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
<b>DPR (Ada 28 partai yang mendapatkan Kursi)</b>				
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.3262	2,66 %	8 kursi
7.	Partai Katolik	770.7402	2,04%	6 kursi
<b>Total Yang Sah</b>		<b>37.785.299</b>	<b>100%</b>	<b>257 kursi</b>
<b>Konstituante (Ada 34 Partai yang mendapatkan kursi)</b>				
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61%	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99%	10
<b>Total Yang Sah</b>		<b>37.837.105</b>	<b>100%</b>	<b>514 kursi</b>

Sumber: <http://www.kpu.go.id>

Dari Tabel 4.1 terkait Perolehan Suara Partai Kristen pada Pemilu 1955 ditunjukkan bahwa partai Kristen mendapatkan perolehan suara dan kursi di urutan ke 6 dan ke 7 baik untuk kursi di DPR dari 28 partai yang mendapatkan kursi, dan di Konstituante dari 34 partai yang mendapatkan kursi. Walaupun gereja-gereja Protestan telah ikut mendukung Parkindo ternyata dalam Pemilu secara nasional yang berlangsung dua tahap ini, yakni 29 September 1955 untuk pemilihan anggota Parlemen dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante, suara yang diperoleh Parkindo tidak cukup besar.<sup>147</sup> Dari sekitar 37,8 juta suara yang sah (diantara sekitar 43 juta pemilih yang terdaftar), Parkindo hanya memperoleh 2,6% suara (sekitar satu juta) baik untuk Parlemen maupun Konstituante, sedikit lebih besar dari yang diperoleh Partai Katolik, yakni 2%. Suara itu terutama diperoleh di daerah-daerah yang persentase penduduk beragama Kristen cukup besar, misalnya Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT.<sup>148</sup>

Jumlah ini agak kecil dibanding jumlah orang Kristen Protestan di Indonesia pada waktu itu (sekitar 4-5 persen dari seluruh penduduk). Seperti telah disinggung di atas, banyak juga orang Kristen yang memilih partai-partai lain, termasuk PNI yang memperoleh suara 22,3% dan PKI (yang baru diizinkan aktif kembali setelah pemberontakannya di Madiun 1948) yang memperoleh 16,4%. Hasil ini sekaligus memperlihatkan bahwa banyak orang Kristen menyalurkan

---

<sup>147</sup> Jan S. Aritonang, "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955-2009: sebuah Kajian Historis-teologis" *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 9 No 2, Oktober 2009, 196.

<sup>148</sup> Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (terj.) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 8, 84-85, 99-103, 115.

aspirasi politiknya melalui partai-partai yang tidak berlabel keagamaan. Bagaimanapun juga jumlah 2,6% di atas merupakan perolehan terbesar yang pernah dicapai oleh sebuah partai Kristen di dalam Pemilu, pun hingga Pemilu 2009.<sup>149</sup> Patut dicatat betapa seriusnya perjuangan wakil-wakil mereka di Parlemen maupun Konstituante yang bahu membahu dengan kalangan nasionalis untuk mempertahankan Pancasila seraya membendung upaya kalangan Islam untuk memulihkan Piagam Jakarta dan mencantumkan Syariat Islam dalam Dasar Negara. Ucapan WJ Rumambi dari Parkindo pada salah satu sidang Konstituante di tahun 1957 dapat dikutip sebagai contoh argumen tentang mengapa dan bagaimana kalangan Kristen mempertahankan Pancasila.<sup>150</sup>

“Sudah barang tentu kami tinjau itu berdasar pada keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen. Kami buat itu karena kami merasa turut bertanggungjawab atas keselamatan dan kebahagiaan Negara Indonesia. [...] Tugas kami umat Kristen di Indonesia dalam lapangan kenegaraan ialah turut mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan ketertiban untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan saja untuk golongan umat Kristen di Indonesia, baik dengan kata maupun dengan perbuatan, berdasar pada rencana keselamatan Tuhan kami yang nyata dalam Kitab Suci kami; Yesus Kristus adalah

---

<sup>149</sup> Aritonang, “Minat dan Pilihan”, 197.

<sup>150</sup> Risalah Perundangan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957, 444-445.

Juruselamat dunia, demikian juga Juruselamat Indonesia. Ini keyakinan kami.

Jika umpamanya Kristen dijadikan dasar daripada suatu Negara, maka kedudukan daripada agama yang suci itu yang kekal dan abadi itu, direndahkan menjadi setara dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, sehingga terjadilah sekularisasi atau penduniawian. [...] Jika agama menjadi dasar Negara, maka besar sekali kemungkinan agama itu dijadikan alat pertarungan kuasa-kuasa politik dalam dunia ini, agama menjadi sama dengan ideologi-ideologi duniawi.

[...] Fraksi kami tidak dapat menerima Islam sebagai dasar Negara Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran yang tercantum di dalamnya. Karena selain daripada apa yang kami telah uraikan tadi, Islam sebagai dasar Negara itu pasti tidak diterima di beberapa daerah di Indonesia ini umpamanya di Minahasa, Sangir, Talaud, Poso, dan sebagian Toraja, sebagian besar dari daerah Tapanuli, Sumba Timor, sebagian dari Maluku, dan Irian Barat.”

Dari segi persentase peroleh suara untuk DPR, Parkindo mendapatkan 2,66 % sementara Partai Katolik mendapatkan 2,04% suara.<sup>151</sup> Persentase perolehan suara

---

<sup>151</sup> “Sejarah Indonesia (1966-1998),” (blog) 21 Januari 2021. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia.org/politik/Sejarah\\_Indonesia\\_](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Sejarah_Indonesia_).

Partai Katolik ini sudah cukup besar dibandingkan persentase jumlah umat Katolik di Indonesia. Misalnya perolehan Partai Katolik yang dipimpin oleh Kasimo justru memperoleh hasil diluar dugaan semua orang. Partai Katolik memenangkan 770.740 suara untuk DPR dan 749.591 suara untuk Kontituante. Dengan jumlah-jumlah tersebut, perolehan suara dan kursi ini agak mengherankan karena pada waktu itu jumlah orang Katolik hanya 1,5% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.<sup>152</sup>

### **4.3. Keterwakilan Politik Kristen di Masa Orde Baru**

Bagaimana keterwakilan politik Kristen di masa Orde Baru? Keterwakilan politik yang paling nyata bisa ditemukan dalam Pemilu 1971, karena dalam Pemilu berikutnya tidak ada lagi partai Kristen. Seluruh partai peserta Pemilu sebelumnya dilebur ke dalam dua partai politik yakni PPP dan PDI. Sementara Golongan Karya menjadi partai tersendiri sebagai partai pemerintah dimana para politisi Kristen juga bergabung ke dalamnya. Pemilu 1971 adalah Pemilu pertama yang dilakukan selama masa orde baru dan merupakan Pemilu kedua setelah Pemilu 1955. Ketika Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, Pemilu tidak diselenggarakan secepatnya untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, yang oleh pemerintah mengubah lagi dengan menetapkan

---

<sup>152</sup> Redaksi, *IJ Kasimo*, 75.



bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.<sup>153</sup> Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971 setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan.

Dalam Pemilu 1971, terdapat pemilih sebanyak 54.669.509 dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebesar 360 kursi. Golkar meraih suara dan kursi terbanyak yakni sebesar 34.348.673 (62,82%) suara pemilih dengan perolehan kursi sebesar 236 kursi. Dukungan pemilih terhadap partai Kristen pada Pemilu 1971 sangat sedikit. Terbukti bahwa perolehan Parkindo mendapatkan dukungan pemilih sebesar 733.359 (1,34%) suara dengan perolehan 7 (tujuh) kursi. Sementara Partai Katolik hanya berbeda tipis dengan Parkindo yakni mendapatkan dukungan pemilih sebesar 603.740 (1,10%) suara sehingga menghasilkan 3 (tiga) kursi. Perolehan kedua partai berbasis Kristen tersebut tentu sangat jauh dibanding perolehan dukungan pemilih pada Pemilu 1955.

**Tabel 4. 2 Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1971**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	<u>Golongan Karya</u> (Golkar)	34.348.673	62,82	236
2.	<u>Partai Nahdlatul Ulama</u>	10.213.650	18,68	58

<sup>153</sup> Komisi Pemilihan Umum, (blog), 30 Juli 2011. Diakses dari [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40).

3	<u>Partai Nasional Indonesia (PNI)</u>	3.793.266	6,93	20
4.	<u>Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)</u>	2.930.746	5,36	24
5.	<u>Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)</u>	1.308.237	2,39	10
6.	<u>Partai Kristen Indonesia (Parkindo)</u>	733.359	1,34	7
7.	<u>Partai Katolik</u>	603.740	1,10	3
8.	<u>Partai Islam (PERTI)</u>	381.309	0,69	2
9.	<u>Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)</u>	338.403	0,61	0
10.	<u>Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)</u>	48.126	0,08	0
<b>Jumlah</b>		54.669.509	100,00	360

Sumber: website <http://www.kpu.go.id>

Setelah Pemilu 1971, tidak ada lagi partai berbasis Kristen dalam Pemilu-Pemilu selanjutnya. Upaya pemerintah melakukan fusi terhadap partai-partai Kristen dengan memaksa partai Kristiani yakni Parkindo dan Partai Katolik bergabung dengan partai baru yakni Partai Demokrasi

Indonesia sejak tahun 1973. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak 5 Januari 1973 pemerintah menghapus seluruh sistem kepartaian lama. Sembilan partai sisa dibubarkan dan dilebur secara paksa dan dijadikan dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya (Golkar). Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik bersama tiga partai yang lain yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi PDI.

Maka sejak Pemilu tahun 1977 Parkindo dan Partai Katolik tidak lagi menjadi peserta Pemilu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi partai yang satu atap dengan tiga partai di atas dalam sebuah partai bernama PDI. Demikian selama 20 tahun hingga pada Pemilu 1997 sistem politik yang dipaksakan oleh Orde Baru tersebut berjalan dengan langgeng dimana diketahui Golkar selalu tampil sebagai pemenang mutlak mengalahkan dua partai politik: PDI dan PPP.<sup>154</sup> Keberadaan para politisi Kristen dalam PDI memaksa para politisi Kristen mau tidak mau harus bergabung dengan para politisi nasionalis dalam memperjuangkan visi dan misi partai yang berciri nasionalis partai bentukan pemerintah tersebut. Sabam Sirait dari Parkindo menjadi Sekjen pertama PDI pada tahun 1973. Frans Seda dan VB da Costa dari Partai Katolik menjadi ketua di DPP PDI.

Maka sejak bergabung dalam PDI yang berlangsung selama 20 tahun, seluruh politisi Kristen tidak lagi membawa

---

<sup>154</sup> "Partai Politik di Indonesia," (blog), 21 Januari 2011. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia.org/politik/Partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Partai_politik_di_Indonesia).

membawa isu primordialitas keagamaan sebagaimana sebelumnya mereka pegang dengan amat kukuh sejak sebelum kemerdekaan hingga Pemilu 1971, tetapi mereka berbaur bersama para politisi nasionalis dalam atap PDI tersebut. Selama 20an tahun sejak 1973 yang sudah berlaku sejak Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 di masa Orde Baru tersebut dalam lima kali Pemilu, pengaruh ikatan primordial yang sebelumnya menjadi basis politik Parkindo dan Partai Katolik terkubur dan dihilangkan lalu digantikan oleh isu-isu yang bersifat nasionalis. Penghilangan ikatan primordialisme agama bagi partai-partai termasuk dalam hal ini Parkindo dan Partai Katolik terjadi setelah dilakukan fusi tahun 1973 oleh pemerintah. Adanya kebijakan fusi tersebut tentu saja menguntungkan Golkar, sebagai partai pemerintah. Sebab Golkar tidak diikutsertakan untuk bergabung dengan partai-partai lainnya, tetapi ia berdiri sendiri.

Disamping itu dengan adanya fusi itu, maka saingan Golkar menjadi sederhana, hanya PPP dan PDI. Tentu saja ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan Golkar sebagai satu-satunya partai yang akan selalu menang menjadi lebih mudah.<sup>155</sup>Sementara bagi golongan Islam, adanya fusi tersebut sebenarnya dapat menguntungkan karena partai-partai Islam yang tadinya terpecah-pecah sekarang bersatu lagi. Akan tetapi dalam perkembangan, bersatunya partai-partai Islam dalam wadah PPP tersebut bukan makin mengokohkan dan memperkuat PPP namun terjadi perpecahan di dalamnya. PPP selalu dirundung konflik intern

---

<sup>155</sup> Lili Romli, "Potret Buram Partai Politik di Indonesia", Mahrus Irsyam-Lili Romli, *Menggugat Partai Politik: seri buku politik* (Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2003), 119.

di antara unsur-unsur pendukungnya, terutama konflik antara MI (Muslimin Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama). Di samping itu juga terjadi konflik dalam tubuh PPP karena memperebutkan jabatan pucuk pimpinan partai.<sup>156</sup> Dengan adanya konflik intern tersebut akibatnya yang menjadi agenda bukan lagi bagaimana memperjuangkan aspirasi politik umat Islam, tetapi bagaimana konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh PPP itu sendiri.<sup>157</sup>

Bila PPP dengan Islam sebagai perekat pun pada dasarnya tidak mampu menjaga kelanggengannya sebagai partai – perwakilan kepentingan dan lain-lain; PDI adalah suatu himpunan yang tidak mungkin karena di sana digabungkan semua yang tidak mungkin hidup dalam satu kandang seperti partai berdasarkan Marxisme dan partai-partai berdasarkan agama Kristen yang harus bergabung dengan partai berdasarkan nasionalisme radikal seperti PNI dan partai dengan suatu dasar lain lagi seperti IPKI. Partai politik dengan tradisi puluhan tahun kini benar-benar dikuburkan Orde Baru.<sup>158</sup> Selain dilakukan fusi tahun 1973 oleh pemerintah, penghilangan ikatan primordialisme agama bagi partai-partai termasuk dalam hal ini Parkindo dan Partai Katolik menjadi semakin kuat setelah pemerintah mengharuskan setiap partai menggunakan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Konsep Asas Tunggal Pancasila bermula dari pidato Presiden Soeharto di Pekanbaru, Riau dalam pembukaan rapim ABRI tanggal 27 Maret 1980 dan Ulang

---

<sup>156</sup> Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991),.

<sup>157</sup> Irsyam, *Menggugat Partai Politik*, 119.

<sup>158</sup> Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia*, 12-13.

Tahun Kopassus di Jakarta tanggal 16 April 1980. Presiden Soeharto mengistilahkan maksud itu dengan bahasa bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Presiden memberi alasan bahwa Pancasila jangan sampai disalahgunakan dan dirongrong oleh berbagai kekuatan, baik ekstrem kiri maupun ekstrim kanan. Pengulangan perlunya asas tunggal Pancasila bagi kekuatan social dan politik di Indonesia kembali dipertegas oleh Presiden Soeharto pada sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1980.<sup>159</sup> Kecemasan pemerintah akan perlunya Pancasila sebagai asas tunggal didasarkan pengalaman politik masa lalu. Misalnya pada Pemilu 1977 terjadi pertarungan antara “Pemerintah vs Islam”, karena Golkar dianggap sebagai partai pemerintah yang harus berhadapan dengan Islam. Sedangkan pada Pemilu 1982 terjadi peristiwa Lapangan Banteng, dimana kampanye massa Golkar dikejar-kejar oleh massa PPP. Dengan demikian pemerintah merasa perlu melakukan penataan ke arah kesatuan orientasi dengan menerapkan asas tunggal sehingga identitas yang bersifat primordial akan pudar dari partai politik dan ormas.<sup>160</sup> Pelaksanaan fusi partai dan penggunaan azas tunggal Pancasila merupakan dua agenda pemerintah untuk memperkuat posisi Golkar sebagai partai pemerintah yang selalu memenangkan Pemilu sejak tahun 1971 hingga 1997. Bagaimana posisi politik umat Kristen? Tak bisa dipungkiri bahwa di masa Orde Baru sangat banyak politisi Krisitiani

---

<sup>159</sup> Irsyam, *Menggugat Partai Politik*, 120.

<sup>160</sup> Irsyam, *Menggugat Partai Politik*, 120.

yang terlibat. Jabatan-jabatan strategis di birokrasi pun banyak dipegang oleh figur-figur beragama Kristen.

Terdapat sejumlah menteri di dalam setiap cabinet pembangunan. Sekurang-kurangnya dua atau tiga menteri atau setingkat menteri beragama Kristen selalu mendapat kursi di dalam setiap Kabinet Pembangunan, mulai dari Kabinet Pembangunan I hingga Kabinet Pembangunan VI yang terakhir sebelum Orde Baru tumbang tahun 1998. Bahkan sejumlah jenderal beragama Kristen memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di militer seperti Maraden Panggabean dan Leo Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI. Hingga saat ini terdapat sangat banyak jabatan public yang dipegang oleh masyarakat beragama Kristen, mulai dari jabatan di birokrasi, di partai politik, di legislatif, di eksekutif dan militer. Sangat berbeda dengan kepentingan di masa perjuangan kemerdekaan, atau masa awal kemerdekaan dimana masyarakat Kristiani merasa perlu untuk membentuk partai sendiri.

Sejak Orde Baru hingga saat ini, masyarakat Kristen tidak lagi mengalami tantangan signifikan terkait pluralisme dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bahwa masih terdapat kesulitan-kesulitan karena statusnya yang beragama Kristen, misalnya ijin pendirian Gereja, kebebasan beragama tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan yang sangat mendasar. Umat Kristen tidak lagi merasa sendirian berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai umat Kristen tersebut. Partai-partai khususnya PDI dan Golkar tampak menjadi kendaraan para politisi Kristen. Kedua partai tersebut membela kepentingan minoritas Kristen dari kesulitan-kesulitan yang dialami tersebut. Selama masa Orde Baru para politisi Kristen

juga masuk ke partai lain, seperti “partai” Golkar. Sejumlah tokoh partai Golkar di zaman Orde Baru misalnya bisa disebutkan beberapa: yakni Cosmas Batubara, JB Sumarlin. Bahkan di masa awal Orde Baru yakni di masa Kabinet Pembangunan I sampai dengan Kabinet Pembangunan III, tidak sedikit tokoh politik Kristen justru menduduki jabatan politik sebagai menteri kabinet atau yang setara dengannya. Misalnya Dr. AM Tambunan (Menteri Sosial), Frans Seda (Menteri Perhubungan), Radius Prawiro (Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan), Maraden Panggabean (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban dan Menteri Pertahanan), LB Moerdani (Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan), dan masih banyak yang lain.<sup>161</sup>

Keterwakilan politik Kristen di DPR RI mendapat porsi berbeda di masa Era Reformasi dibandingkan di masa Orde Baru. Dalam masa Orde Baru keterwakilan Kristen di DPR RI bisa ditemukan dalam dua partai saja yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar), dan dalam bentuk utusan-utusan golongan. Di masa Era Reformasi terutama dengan diadakannya tiga kali Pemilu di era Reformasi yakni Pemilu 1999, 2004, dan 2009 keterwakilan politik Kristen di DPR RI ditemukan lewat sejumlah partai baik partai berbasis agama Kristen (Protestan dan Katolik), maupun dalam partai nasionalis yang besar seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Bahkan terdapat beberapa orang anggota DPR RI

---

<sup>161</sup> “Susunan Kabinet Pembangunan I” (blog) 13 Februari 2011. Diakses dari [http://id.gerejaindonesia.org/politik/Kabinet\\_Pembangunan\\_I#Susunan\\_Kabinet](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Kabinet_Pembangunan_I#Susunan_Kabinet).



beragama Kristen justru berasal dari partai agama berbasis Islam yang moderat seperti PAN dan PKB.

Keterwakilan Kristen dalam konteks penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari konteks primordialisme politik karena melihat agama dari caleg terpilih yakni Kristen ketika diletakkan di basis Islam yang kuat walaupun menyangkut dua partai saja, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dalam penelitian LIPI pada 2009<sup>162</sup> tentang bangkitnya sentimen identitas keagamaan dalam beragam ekspresinya dikatakan sebagai fenomena kongkret dari munculnya kesadaran dan gerakan politik baru yang menunjukkan sebuah sikap kritis terhadap keindonesiaan. Kebangkitan gerakan keagamaan itu, baik dalam tataran pemikiran maupun aksi, di era demokratisasi saat ini dengan beragam motif dan kepentingannya merupakan fenomena kongkret yang hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Gesekan akan makna keindonesiaan yang mengisyaratkan sebuah toleransi, persamaan dan penghargaan terhadap pluralisme dan keberagaman.

Penelitian LIPI tersebut terkait dengan sejauh mana sentimen keagamaan berpeluang membesar dan menjadi ancaman bagi keindonesiaan merupakan sebuah persoalan yang dikaji terutama terkait tiga organisasi Islam yakni gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Membumikan doktrin atau "mengindonesiakan" falsafah dasar keislaman merupakan

---

<sup>162</sup> Syafuan Rozi (editor) dkk., *Problematik Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan. Kasus Gerakan Pendukung Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: LIPI Press, 2009). Lihat juga <http://www.politik.lipi.go.id.>, Selasa 13 November 2012, pukul 16.34wib.

sebuah pilihan bagi gerakan Tarbiyah. HTI menawarkan sistem ekonomi syariah untuk membendung dampak buruk kapitalisme dan neo-liberalisme di Indonesia. MMI menawarkan empat program unggulan untuk membenahi Indonesia. Gerakan tersebut memiliki pola berfikir global dan bertindak lokal. Penelitian ini menjelaskan bahwa nasionalisme dewasa ini tidak lagi hanya semata diarahkan kepada pembahasan mengenai hubungan antar negara dalam relasi dominasi dan subordinasi, melainkan telah diturunkan pada level negara-bangsa itu sendiri. Dalam kajian yang baru itu membahas nasionalisme berarti mengkaji semacam tantangan internal yang dialami oleh negara-bangsa dari kelompok-kelompok primordial yang ada di dalamnya. Setidaknya hasil penelitian LIPI di atas menunjukkan bahwa identitas primordial tetap kuat dalam konteks politik Indonesia. Keterpilihan caleg-caleg Kristen menjadi sangat menarik dilihat dalam politik identitas di internal partai terkait bagaimana partai nasionalis PDI Perjuangan dan Parta Golkar menempatkan caleg Kristen di basis Islam yang kuat.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

## **BAB V**

### **STRATEGI CALON LEGISLATIF KRISTEN DI BASIS ISLAM:**

Ada dua pendekatan yang kerap dilakukan oleh kalangan caleg kristiani ketika berada dalam daerah pemilihan berbasis Islam, yakni: pertama, upaya melakukan pendekatan kultur dan agama secara lokal, dan kedua melalui pendekatan Tokoh Lokal Dan Sarana Kebutuhan Umum

#### **5.1. Pendekatan Kultur Agama dan Budaya Lokal**

Sebagai kalangan minoritas bila dilihat dari persentase jumlah penduduk atas basis agama, para caleg beragama Kristen memperjuangkan dirinya untuk memenangkan pemilihan legislatif secara nasional. Strategi caleg-caleg beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik ketika mereka ditempatkan di daerah pemilihan berbasis Islam yang kuat sehingga mereka bisa terpilih menjadi anggota DPR RI sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Kemenangan caleg-caleg Kristen di basis Islam yang kuat seperti sudah disebutkan di awal tentu tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen tersebut ke tengah masyarakat pemilihnya. Sebagai kelanjutan dari bab-bab dari buku sebelumnya, maka bab ini mengupas sejauh mana strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen untuk memenangkan dirinya di tengah masyarakat berbasis Islam yang kuat.

Maka tepat apa yang dikatakan oleh Alan Ware bahwa dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh publik dan yang bisa diterima oleh public secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari pemilih. Sebagaimana disebutkan oleh Alan Ware, bahwa dari tiga modal pokok strategi caleg kepada pemilih, yang terpenting dan terbesar untuk saat ini adalah modal program dan perbuatan konkrit dari figur seorang caleg, lalu kemudian menyusul program dan perilaku partai, baru di level terendah adalah program, sosok dan ideologi partai. Dalam konteks pemikiran Alan Ware bahwa keterpilihan caleg-caleg Kristen bisa ditempatkan adalah karena penggunaan modal yang pertama yakni perilaku konkrit dari figur caleg yang bersangkutan kepada para pemilih.

### **1. Pendekatan Tatakrama Agama dan Budaya**

Setidaknya ada empat strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen kepada pemilih di basis Islam yang kuat, yakni: pendekatan dengan memasuki tatanan budaya dan agama masyarakat setempat, pendekatan ke sejumlah tokoh lokal baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh di pemerintahan, pendekatan lewat pengobatan gratis, dan pendekatan lewat pembangunan fisik sarana umum seperti mesjid, air minum, jalan raya. Strategi tersebut menjadi lebih kuat ketika politisi Kristen secara terus menerus rutin melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, entah sebelum terpilih maupun sesudah terpilih. Kunjungan tersebut

dilakukan justru tidak ketika sedang masa kampanye, tetapi justru ketika sedang masa biasa ketika tidak ada tahapan Pemilu apapun. Dampak yang ditimbulkannya adalah bahwa para politisi Kristen tersebut tidak perlu menghabiskan anggaran besar ketika masa kampanye Pemilu nasional tiba. Dampak lain bahwa tentu saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para politisi Kristen tersebut memberi keyakinan kepada para pemilih akan keseriusan dan perhatian yang sungguh dan tulus. Para pemilih yang hampir seluruhnya beragama Islam tersebut menjadi sangat yakin untuk memilih para caleg-caleg tersebut walaupun mereka beragama Islam.

Ini menjadi alasan bagi pemilih untuk secara pasti dan meyakinkan menentukan pilihannya kepada para caleg beragama Kristen tersebut. Yang jelas, strategi-strategi yang dilakukan oleh para politisi orang Kristen telah menghasilkan cukup banyak kursi DPR RI dari sejumlah daerah pemilihan berbasis Islam yang kuat. Karena itu pandangan dan argumentasi dari pemilih terhadap akan diketahui dengan mendengarkan alasan dan pandangan mereka secara langsung. Strategi caleg-caleg beragama Kristen telah terbukti mampu meyakinkan para pemilih yang berbeda agama untuk memilih diri caleg-caleg tersebut dimana hampir seluruhnya pemilih tersebut beragama Muslim. Dalam Pileg 2009, dengan sistem Pemilu proporsional daftar terbuka, ketokohan dan kedekatan dari caleg-caleg yang bersangkutan kepada pemilih menjadi sangat menonjol menjadi sangat penting. Karena selain bersaing dengan partai-partai yang lain untuk mendapatkan sejumlah kursi tertentu di DPR, para caleg juga bersaing di internal partainya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya suara untuk kemudian didaulat mendapatkan kursi dari

perolehan kursi di tingkat partai tersebut. Memang dalam Pileg 2004 sistem nomor urut juga menjadi penting dan kurang menonjolkan atau tidak terlalu menempatkan ketokohan dari seseorang caleg untuk menjadi terpilih.

Namun demikian, dalam Pileg 2004 tersebut, kedekatan dengan masyarakat pemilih juga sudah dituntut karena selain memungkinkan caleg-caleg bersangkutan meraih suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di dapil masing-masing untuk memastikan keterpilihannya menjadi anggota DPR RI, juga untuk mendorong sebesar-besarnya suara bagi partai pengusungnya, dan kemudian hasil suara tersebut akan dikonversi seberapa besar jumlah kursi DPR RI yang akan diperoleh partai pengusung tersebut. Seluruh sistem politik sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk seluruh caleg termasuk bagi caleg-caleg beragama Kristen. Berikut ini akan dijelaskan beberapa strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen sehingga mereka bisa menang menjadi anggota DPR RI, khususnya bagi caleg-caleg yang menang di Pileg 2004 dan/atau Pileg 2009. Fokus utamanya adalah bagaimana menggali alasan/argumentasi caleg yang bersangkutan tentang masyarakat pemilih dan strategi konkrit yang dilakukan oleh para caleg Kristen terhadap para pemilih yang hampir seluruhnya beragama Muslim.

Pendekatan agama dan pendekatan budaya adalah satu kesatuan pendekatan yang saling mendukung yang digunakan oleh caleg-caleg Kristen untuk meyakinkan pemilih beragama Muslim bahwa caleg-caleg Kristen tersebut layak untuk dipilih. Di daerah berbasis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur, pendekatan agama dan

pendekatan budaya menjadi dua hal yang saling mendukung untuk tujuan politik yang digunakan oleh caleg-caleg beragama Kristen. Dari wawancara yang digunakan kepada para anggota DPR RI beragama Kristen, terlihat bahwa pendekatan agama dan budaya merupakan pintu masuk mereka terhadap para pemilih yang berbeda agama dan sukunya dari caleg-caleg Kristen tersebut. Tepat seperti yang dikatakan oleh Alan Ware tentang peranan partai dalam meraih kursi di legislatif tidak lagi hanya sekedar menjual ideology partai ke tengah pemilih, tetapi dalam sistem pemerintahan modern dimana partai politik merupakan salah satu pilar utama untuk merealisasikan masyarakat yang berdemokrasi yang terpenting justru bagaimana program bisa terlaksana, bukan hanya partai tetapi justru yang utama adalah program individu yang bisa meraih simpati pemilih.

## **2. Pendekatan Caleg Kristen dari PDI Perjuangan**

Setidaknya dua orang anggota legislatif beragama Kristen dari PDI Perjuangan yang sukses meraih suara signifikan di basis Islam yang kuat layak untuk memberi petunjuk bagaimana strategi yang dilakukan mereka untuk memenangkan dirinya sebagai pokok kajian yang perlu dibahas. Sebab sesungguhnya tidak normal jika dilihat dari isu agama bahwa calon beragama minoritas justru meraih suara signifikan di basis agama mayoritas, apalagi di provinsi atau mayoritas daerahnya dihuni oleh kalangan penduduk yang tergolong tingkat primordial agamanya sangat kuat seperti di Jawa Barat oleh Maruarar Sirait dan di Jawa Timur Theodorus Yacob Koekerits.



### **a. Maruarar Sirait di Jawa Barat**

Maruarar Sirait adalah salah satu caleg Kristen Protestan di PDI Perjuangan yang menggunakan pendekatan cultural dan keagamaan ke basis pemilihannya untuk kemenangan dirinya. Maruarar Sirait menjadi anggota DPR RI hasil Pileg 2004 dan Pileg 2009 dari daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (2004) menjadi Dapil IX (2009) yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Bahkan dalam Pileg 2009, Maruarar menjadi caleg DPR RI yang mendapatkan suara sangat signifikan dari Jawa Barat, yang meloloskannya menjadi caleg yang meraih suara tertinggi dari seluruh caleg di Provinsi Jawa Barat. Lalu tentu ada yang dilakukan oleh Maruarar untuk meyakinkan para pemilihnya yang hampir seluruhnya beragama Muslim tersebut sehingga hasil itu tercapai.

Perolehan suara Maruarar ini tentu saja sangat tepat untuk menepis keraguan yang disampaikan oleh Anne Philips dan Affan Gaffar terkait dengan tidak adanya kesempatan yang cukup bagi pemilih untuk menentukan pilihannya pada caleg yang dianggap berkualitas. Anne Philips menyayangkan ketika kebanyakan pemilih hanya memiliki pemahaman sangat terbatas atau bahkan tidak peduli menyangkut kemampuan atau talenta-talenta para kandidat yang mestinya menjadi dasar bagi penentuan pilihan politik pemilih. Sementara itu partai politik pun cenderung menyediakan kepentingan-kepentingan jangka pendek dalam memberi pilihan politik bagi pemilih; bahkan pemilih cenderung lebih memperhatikan lambang partai lebih daripada sosok pribadi calon, namun tetap berharap bahwa sosok yang dipilih tidak mengecewakan. Sementara Affan Gaffar atas kecemasan yang

sama mengusulkan perubahan sistem Pemilu dari sistem tertutup yang hanya memberi kewenangan kepada partai menjadi sistem distrik untuk memberi kesempatan yang luas bagi tokoh dan sosok-sosok yang tepat untuk dipilih secara luas oleh masyarakat pemilih.

Keberhasilan Maruarar salah satu adalah karena ia memandang bahwa pendekatan agama dan budaya adalah pintu masuk untuk bergaul dengan para pemilihnya dengan memahami kehidupan konkrit dari pemilihnya tersebut. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain di daerah pemilihannya sehingga agama dan budaya harus dipahami sekaligus untuk bisa diterima oleh masyarakat pemilihnya. Upaya pertama yang dilakukan oleh Maruarar adalah bagaimana dirinya memahami keduanya dengan sangat baik dan kemudian membuat dirinya suka dengan sopan santun/tata krama sesuai budaya dan agama itu sendiri yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pemilihnya. Pergaulannya yang luas dengan para tokoh agama dan tokoh adat membuat Maruarar bisa diterima walaupun dirinya adalah seorang Kristen. Pergaulan Maruarar yang luas membuat dirinya bisa akrab dengan para kyai, santri, dan tokoh-tokoh agama di lingkungan daerah pemilihannya. Terkait dengan upaya ini, Maruarar menjelaskannya,<sup>163</sup>

“Dua kali saya menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan saya Jabar IX termasuk Subang. Saya merasa nyaman, dua periode di

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Maruarar Sirait, Anggota DPR RI PDI Perjuangan Pileg 2004 dan Pileg 2009 Rabu, 11 April 2012 Pukul 12.45wib di Pelataran Ruang Paripurna Lt. 3, Nusantara II Gedung DPR Senayan, Jakarta.

sana, kebetulan dari semua calon, suara saya yang terbesar, 128.850 suara memilih saya. Padahal daerah itu 99,99% lebih beragama Islam. Tidak ada masalah. Saya berteman baik dengan para kyai, santri, tokoh-tokoh agama yang ada di situ. Dan mereka bagus. Kita juga suka datang ke acara-acara kegiatan keagamaan ke pesantren, kita hadir. Menurut saya yang penting adalah pendekatan budaya. Kita harus memperhatikan budaya. Kalau masuk ke suatu daerah akan ada kultur yang perlu kita pelajari. Kita berusaha mempelajari bahasa sehari-hari mereka, tidak mahir tetapi mereka sudah dihargai. Salah satu falsafat Sunda *caik na herang lauk na beunang* (airnya jernih, ikannya dapat). Jadi bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi visi misi kita, tujuan kita, tapi dengan cara yang baik, tidak menghalalkan segala cara, tidak membuat kisruh dan sebagainya. Saya sangat mempelajari soal-soal budaya, juga soal kultur.”

Penuturan dari Maruarar tersebut memberi penjelasan bahwa aspek budaya menjadi salah satu aspek yang penting untuk bisa memasuki sebuah masyarakat. Bahkan kemampuan Maruarar untuk memahami filsafat Sunda *caik na herang lauk na beunang* (airnya jernih, ikannya dapat) mungkin menjadi salah satu bukti bahwa Maruarar memang benar-benar memiliki kehendak yang kuat untuk masuk sudah masuk ke dalam kedalaman budaya dan lingkungan

masyarakat daerah pemilihannya. Sekedar perbandingan, Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 di bawah ini menunjukkan bagaimana perolehan suara dan kursi dari partai-partai peserta Pemilu pada Pileg 2004 dan Pileg 2009 terkait dapil caleg Kristen yang diteliti.

**Tabel 5. 1 Rekapitulasi Suara dan Kursi Pileg 2004**

No	Partai	Jabar III		Jabar VII		Jabar VIII		Jatim VI		Sulsel II		Total
		Ku r s i	Sua ra Caleg	Ku r s i	Sua ra Caleg	Ku r s i	Sua ra Caleg	Ku r s i	Sua ra Caleg	Ku r s i	Sua ra Caleg	
1	P. Golkar	4	287.570	2	177.482	2	107.662	1	30.922	4	353.027	13 kursi
2	PDI Perj.	2	65.181	3	101.265	2	81.689	3	218.725	1	35.498	11 kursi
3	PKB	-	-	1	52.245	1	20.594	3	248.862	-	-	5 kursi
4	PPP	2	89.267	1	17.129	1	22.243	-	-	-	-	4 kursi
5	PKS	1	43.386	1	27.311	1	26.783	-	-	1	21.935	4 kursi
6	PAN	1	10.395	-	-	1	29.972	1	15.761	1	25.827	4 kursi
7	P. Demokrat	1	20.646	1	33.745	-	-	1	34.833	-	-	3 kursi
8	PBR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.450	1 kursi
9	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.878	1 kursi
10	PPDK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.797	1 kursi
	Total Kursi	11		9		8		9		10		

- a. Jabar III : Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur
  - b. Jabar VII : Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon
  - c. Jabar VIII : Subang, Sumedang, Majalengka
  - d. Jatim VI : Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Tulungagung
  - e. Sulsel II : Kab Barru, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Majene, Palopo, Pinrang, dll
- sumber: Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009

Pendekatan kebudayaan dengan bahasa Sunda menjadi salah satu keunggulan yang dilakukan oleh Maruarar dalam menyapa para pemilihnya. Maruarar walaupun tidak sangat fasih berbahasa lokal Sunda, namun dalam setiap pertemuan atau acara dengan warga, Maruarar menggunakan bahasa Sunda untuk memulai sambutan atau sapaannya. Termasuk dalam pertemuan sehari-hari dengan warga. Penjelasan Maruarar di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari yang dilakukan olehnya kepada warga menjadi salah satu alat bantu yang kuat yang mempertemukan dirinya dengan masyarakat setempat. Tentu menjadi sesuatu yang tidak lumrah ketika salah seorang caleg yang tidak ada kaitannya apapun terkait suku dan agama dan kelahiran dengan budaya sunda tetapi justru mampu menyapa warga dengan kebudayaan yang hidup di tengah-tengah warga sehari-hari.

Terkait dengan pendekatan agama dan budaya yang dilakukannya, Maruarar sangat yakin apa yang dilakukannya adalah sebagai bahagian dari cita-citanya untuk membuat Indonesia sebagai kampung sendiri. Cita-cita yang dipelajari oleh Maruarar dari pandangan Bung Karno tentang Taman sarnya Indonesia. Kampung halaman itu bagi Maruarar

bukan hanya di tempat kita lahir.<sup>164</sup> Dari penjelasan di atas tampak bahwa Maruarar sangat mengagumi pandangan Bung Karno terkait bagaimana memandang Indonesia sebagai satu kesatuan bernegara dan berbangsa yang indah. Permintaan ini menjadi bukti bahwa Maruarar sangat meyakini bahwa dirinya bisa diterima dimanapun di seluruh Indonesia, tidak hanya di kampung halaman dari mana nenek moyangnya berasal yakni di daerah tanah Batak di Sumatera Utara. Pandangan Maruarar ini menepis kekhawatiran akan semakin menguatnya identitas keagamaan dan kesukuan di berbagai belahan wilayah di tanah air seperti terjadi di Aceh, Riau, Bali dan Papua yang merupakan fenomena konkret dari munculnya kesadaran dan gerakan politik atas dasar etnis.

Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa bangkitnya sentimen etnis di beberapa daerah saat ini menunjukkan dalam batas-batas tertentu sebuah sikap *a priori* terhadap keindonesiaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kehadirannya jelas tidak monolitik. Munculnya keterwakilan politik semu, ketimpangan ekonomi, maupun pengakuan artifisial terhadap budaya lokal secara hipotetik telah menjadi faktor-faktor kunci bagi dikedepankannya kesamaan dan sentimen etnis di masyarakat Aceh, Riau, Bali, dan Papua. Sementara demokratisasi mungkin saja merupakan sebuah katalis atau bisa jadi juga merupakan solusi bagi kemunculannya.<sup>165</sup> Apa yang diungkapkan Maruarar di atas adalah bukti dari pemahaman akan semangat dan jiwa

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Sirait.

<sup>165</sup> LIPI, (blog) Selasa, 6 November. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id>. Tentang penelitian ini sudah dimuat dalam buku Firman Noor, dkk, *Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordial di Indonesia*, Jakarta: P2P – LIPI, 2008.

nasionalisme yang mendalam sebagaimana dimaksudkan oleh George McTurner Kahin dimana nasionalisme menjadi perekat yang sangat kuat bagi sebuah bangsa yang memiliki multi suku multi agama seperti Indonesia. Pandangan Kahin terkait nasionalisme tersebut yang mendapat penegasan dari Burhan Djabir Magenda menjadi sangat tepat dengan perilaku politik yang ditunjukkan oleh Maruarar, dimana pengaruh primordialisme suku dan primordialisme agama tidak lagi menjadi utama. Maruarar mempraktekkan nasionalisme tersebut dengan sangat tepat dengan melihat Indonesia sebagai sebuah taman sari sebagaimana Bung Karno maksudkan.

Burhan Magenda ketika mensitir bahwa menjadi sangat penting peranan partai untuk terus menerus merawat dan memelihara jiwa nasionalisme tersebut ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang tampak dari pembatinaan Maruarar sebagai kader dan anggota DPP PDI Perjuangan yang tuntas tentang jiwa nasionalisme dan kemudian ditampilkan dalam perilaku konkrit kepada warga pemilihnya. Dalam konteks inilah menjadi tepat pandangan Burhan Magenda bahwa partai-partai lewat ideology yang diusungnya memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memperkuat jiwa nasionalisme tersebut, contoh yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang konkrit tampak dalam perilaku Maruarar dalam memahami Indonesia sebagai kampong halaman yang bisa dinikmati oleh seluruh warga tanpa harus satu suku dan satu agama dengan mayoritas penduduk setempat.

**Tabel 5. 2 Rekapitulasi Suara dan Kursi Pileg 2009**

No	Partai	Jabar IV		Jabar VIII		Jawa Barat IX		Jatim VI		Sulsel III		Total Kursi
		Ku rsi	Suara Partai	Ku rsi	Suara Partai	Ku rsi	Suara Partai	Ku rsi	Suara Partai	Ku rsi	Suara Partai	
1	P.Demo krat	2	311.424	2	263.111	2	283.817	2	417.529	2	179.713	10 kursi
2	PDI Perj	1	136.730	2	358.492	2	408.657	3	469.160	-	33.274	8 kursi
3	P. Golkar	1	165.552	2	408.802	1	237.886	1	175.020	2	216.623	7 kursi
4	PKS	1	109.489	1	134.525	1	138.582	-	67.648	1	55.862	4 kursi
5	PAN	-	27.744	-	47.064	1	191.144	1	105.872	1	64.403	3 kursi
6	PPP	1	84.528	-	23.260	1	114.627	-	45.934	-	47.516	2 kursi
7	PKB	-	26.761	1	107.128	-	60.400	1	176.234	-	15.112	2 kursi
8	P. Hanura	-	47.150	1	93.697	-	60.112	-	62.508	1	60.079	2 kursi
9	P. Gerindr a	-	55.467	-	18.182	-	84.562	1	76.465	-	43.712	1 kursi
10	Partai Lain	-	149.366	-	141.626	-	252.350	-	236.812	-	261.462	
	Total Kursi	6		9		8		9		7		

- a. Jabar IV : Kab Sukabumi dan Kota Sukabumi
- b. Jabar VIII: Kab Cirebon, Kota Cirebon, dan Kab Indramayu
- c. Jabar IX : Kab Subang, Kab Sumedang, dan Kab Majalengka
- d. Jatim VI : Kab. Tulungagung, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar
- e. Sulsel III : Kab. Sidenrang Rapang, Kab Enrekang, Kab Luwu, Kab Tana Toraja, Kab Luwu



Utara, Kab Luwu Timur, Kab Pinrang,  
Kota Palopo

Sumber: Diolah Penulis dari Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009” dalam website [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id)

Lalu ketika kepada Maruarar ditanyakan terkait kemungkinan dirinya membawa nama PDI Perjuangan karena mendapat dapil yang menjadi basis dari pemikiran Bung Karno PDI Perjuangan. Maruarar menjawab bahwa nama partai tidak menjadi terlalu signifikan, yang paling utama adalah menjaga harmoni dan komunikasi yang intens dengan masyarakat pemilih. Maruarar juga menggaris-bawahi perlunya menjaga konsistensi terhadap janji dan sungguh-sungguh berusaha memperjuangkan aspirasi warga.<sup>166</sup> Penjelasan Maruarar menunjukkan bahwa pemilih sudah sangat mengenal dirinya sehingga tidak perlu lagu sekedar mengandalkan nama besar partai. Ini sangat terkait dengan pandangan Alan Ware bahwa ketika potensi individu yang layak jual ke tengah pemilih dan dianggap mampu menaikkan suara partai politik ditempatkan sebagai prioritas, maka peranan partai tidak lagi menjadi dominan. Memang tetap perlu bagi partai untuk mensosialisasikan dirinya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana calon yang bersangkutan mampu memperkenalkan dirinya ke masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih. Alasan partai politik menempatkan calon-calon di daerah pemilihan tertentu didasarkan oleh pertimbangan bahwa partai sudah sangat yakin kandidatnya dikenal dan mampu meraih dukungan pemilih secara maksimal.

---

<sup>166</sup>Wawancara dengan Sirait.

**Tabel 5. 3 Caleg Terpilih Dapil Jabar VIII Pemilu 2004**  
Kab Subang, Sumedang, dan Majalengka BPP: 234.951 suara

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara	Keterangan
Partai Golkar (2 orang)	1	Budi Harsono	1	56.668	Caleg No urut 3 mendapat 82.191 suara
	2	Eldie Suwandie	2	107.662	
PDI Perjuangan (2 orang)	3	Tjomad Tjiptowardjo	1	43.742	Caleg no urut 3 mendapat 37.947 suara
	4	Maruarar Sirait	2	34.552	
PAN	5	Ade Firdaus	1	29.972	
PKS	6	Wahyudin Munawir	1	26.783	
PPP	7	Anwar Sanusi	1	25.243	Caleg No urut 3 mendapat 82.191 suara
PKB	8	Helmi Faisal	1	20.594	

Sumber: Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009

Terkait dengan sikap konsistensi yang menjadi modal dirinya, menurut Maruarar adalah sebuah pilihan politik. Sikap konsistensi partai di tingkat nasional rupanya menjadi bahagian dari pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihannya kepada PDI Perjuangan, termasuk untuk dirinya. Maruarar sebagaimana diketahui cukup sering muncul di media cetak dan televisi untuk menjelaskan kepada public terkait sikap-sikap politik PDI Perjuangan, termasuk sikap menjadi oposisi terhadap pemerintahan SBY. Ketika kepada Maruarar ditanyakan terkait bagaimana pendekatan kepada pemilih dan jaringannya dengan pemilih, Maruarar sangat

yakin bahwa masyarakat pemilih melihat konsistensi dari PDI Perjuangan yang sering sekali disuarakan juga oleh Maruarar lewat media-media dengan yang menjadi corong dari PDI Perjuangan termasuk perihal persoalan di tingkat nasional.

Filosofi untuk tetap bangga sebagai bangsa yang bermartabat, senantiasa menjaga konsistensi, dan karakter untuk rakyat bagi Maruarar adalah sesuatu hal yang dipelajari. Setidaknya ada empat tokoh penting yang mempengaruhi hidupnya, dan dari masing-masing tokoh itu Maruarar mengambil saripati yang menjadi filosofi dalam hidupnya. Keempat tokoh dimaksud adalah Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, Sabam Sirait yang juga adalah ayah kandung Maruarar, dan Taufik Kiemas. Menurut Maruarar, keempat tokoh tersebut telah membentuk karakter dirinya menjalani hidup menjadi sosok yang ada sekarang ini. Pelajaran kehidupan dari keempat tokoh di atas telah membentuk karakter dan disiplin hidup politiknya. Maruarar menjelaskan bahwa dirinya bisa hidup dalam suasana politik seperti yang sekarang itu tidak terlepas dari internalisasi dirinya terhadap pandangan dan contoh teladan yang diberikan oleh keempat orang di atas tersebut. Termasuk dengan pilihan hidupnya untuk menjadi caleg dari daerah yang bukan basis Kristen dan bukan basis sukunya Batak adalah berkat pemahamannya terkait makna ke-Indonesia-an yang diajarkan oleh Bung Karno.

Hal tersebut makin dikuatkan oleh Maruarar dengan mengulangi prinsipnya yang harus konsisten dan ikhlas ketika ditanyakan apa yang dia lakukan secara politik kepada masyarakat luas sehingga para pemilih di dapilnya tetap berpihak ke dirinya. Maruarar sangat meyakini bahwa sikap

politiknya yang konsisten dan menepati apa yang disampaikan dengan perlakuan politik yang kemudian dipraktekkan, akan sangat efektif dan dibutuhkan oleh para warga masyarakat. Maruarar menjelaskan bagaimana awalnya dirinya bisa masuk di tengah warga terutama Pileg 2009 yang mengandalkan perolehan suara. Bila mengandalkan suku atau agamanya, tentu saja Maruarar sudah pasti kalah dan tidak akan diterima di lingkungan Subang, Sukabumi, dan Majalengka.

Maka ketika Anne Philips menegaskan perlunya perlakuan khusus kepada kelompok minoritas supaya mereka dapat memperjuangkan dirinya sendiri, pandangan tersebut menjadi tidak tepat dengan yang dilakukan Maruarar dan caleg-caleg Kristen lain di PDI Perjuangan. Artinya, dalam konteks Indonesia, orang-orang Kristen justru tidak perlu membela kepentingan dirinya sendiri, tetapi orang-orang Kristen justru membela apa yang menjadi cita-cita kehidupan bersama dalam sebuah bangsa dan negara Indonesia yang melintasi suku, agama, dan antar golongan. Kesetaraan sebagai sesama Indonesia adalah prinsip yang dibela oleh para anggota DPR RI beragama Kristen, bukan kepentingan primordial kalangan Kristen belaka. Maruarar menjelaskan,<sup>167</sup>

“Kita harus menepati apa yang kita omongkan. Kita jangan hanya baik-baik di saat kampanye. Saya sudah dua periode DPR dari sana (Jawa Barat IX, red), Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Kalau kita tidak konsisten dengan apa yang kita omongkan pada saat

---

<sup>167</sup>Wawancara dengan Sirait.

kampanye, saya kira susah akan mencari orang untuk memilih kita. Satu pun tidak ada marga Sirait yang mendukung saya. Saya tidak punya keluarga. Jadi keluarga saya semua orang-orang penduduk di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, semua di daerah pemilihan saya. Saya datang ke rumah ibadah teman-teman beragama Islam. Itu biasa, nyaman aja, *gitu lho*.

Kita juga harus menghargai, Islam yang saya temui Islam yang sangat bersahabat, yang mencintai perdamaian. Saya sering ketemu tokoh-tokoh agama, saya bergaul baik dengan tokoh-tokoh agama Islam. Dari NU berkawan baik dengan Gus Dur, dengan Hasyim Muzadi, dengan Pak Said Aqil. Di Muhammadiyah, saya bergaul baik dengan Pak Din Syamsuddin, saling menghormati dan sering berkomunikasi dengan Pak Din Syamsudin. Buya dan juga Pak Amin Rais, kita berkomunikasi dengan baik. Buat saya kita harus menjadi pionir-pionir dari pada Pancasila. Jangan hanya setiap orang merasa nyaman di komunitasnya. Mungkin hanya saya yang beragama Kristen di tengah ratusan ribu yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda suku dan budaya. Tapi saya merasa aman. Saya merasa tidak ada suatu ketakutan. Saya sayang sama mereka semua.”

Maruarar menceritakan pengalamannya pertama kali terjun menjadi caleg pada Pileg 2004 karena pada Pileg 1999 dirinya masih belum berminat walaupun dirinya sudah menjadi pengurus PDI Perjuangan di DPD Provinsi Jawa Barat. Sebagai pemula, Maruarar belum bisa membuktikan bahwa dirinya sudah sangat berjasa dan berbuat baik bagi daerah pemilihannya. Maruarar belum berbuat banyak ke daerah pemilihannya menjelang Pileg 2004 yang diakuinya memang lebih diuntungkan oleh sistem Pemilu yang menggunakan nomor urut oleh sistem pemilih proporsional daftar tertutup. Pada sosialisasi dirinya menjelang Pileg 2004, Maruarar hanya bisa berjanji bila kelak terpilih akan memberi yang lebih baik. Tetapi setelah terpilih menjadi anggota DPR RI 2004, maka pada Pileg 2009 tidak ada kesulitan lagi bagi Maruarar untuk meyakinkan pemilih bahwa dirinya menepati janjinya. Semua orang sudah melihat bahwa dia konsisten dengan janjinya dan bahwa dia tidak ragu-ragu dengan prinsip politiknya, yang dia pegang sampai sekarang.

Maruarar menjelaskan pengalamannya sejak menjelang Pileg 2004 itu hingga situasinya setelah terpilih,<sup>168</sup>

“Pemilu 2004 mungkin saya bagaimana supaya bisa menjadi anggota DPR waktu itu, karena saya belum menjadi DPR. Saya mungkin ceritera saat itu apa yang akan saya lakukan. Di 2009, semua sudah tahu apa yang sudah saya lakukan, apalagi 2014, mereka sudah tahu, tidak usah ceritera lagi. Yang susah kalau sudah di DPR tapi kita tidak bikin apa-

---

<sup>168</sup>Wawancara dengan Sirait.

apa. Iya kan? Susah juga! Kampanye yang berkualitas itu kan *ngomong* yang benar apa yang kita kerjakan. Selama 5 tahun dipercaya rakyat, apa yang kita kerjakan? Kalau kita tidak pernah kerja apa-apa juga, ya susah juga ngomong kalau kita berbuat, rakyat itu adil *kog!* Dia tahu berterimakasih, dia tidak *mem-vote* sembarang ke semua orang, akhirnya menjadi indah, bisa diterima di tempat lain, mudah-mudahan bisa diterima, bisa makan di rumahnya, bisa didoakan.”

Penjelasan Maruarar di atas menggarisbawahi bahwa ada sebuah keyakinan politik dalam diri Maruarar bahwa perbuatan baik yang dia lakukan itu tidak akan pernah percuma dan sia-sia. Perbuatan baik itu akan menjadi pegangan yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihannya ketika Pemilu. Karena itu Maruarar tidak pernah merasa rugi untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat luas dan sikap-sikap politiknya yang konsisten dan ikhlas tersebut. Karena itu ada rasa bangga yang dimiliki Maruarar ketika dirinya diterima dengan sangat baik di daerah pilihannya dan membangun kedekatan dengan para pemilih, yang oleh Maruarar akan terus dipertahankannya. Bahkan dalam sejumlah kegiatan yang berciri personal pun seperti perayaan ulang tahun dalam keluarganya, Maruarar tidak segan-segan melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat dalam nuansa budaya lokal Sunda untuk turut menikmati kebahagiaan bersama dirinya.

Maruarar menjelaskan salah satu kegiatannya yang baru-baru ini dilakukan bersama warga masyarakat di daerah Subang demikian,<sup>169</sup>

“Saya baru merayakan ulang tahun kesembilan anak saya Amaris artinya Janji Tuhan, anak saya yang kedua, perempuan. Daripada bikin acara di hotel, saya bikin acara di Subang sana. Dia bikin acara lomba menggambar dengan anak-anak SD di Subang. Anak-anak SD menggambar Sesingaan. Sesingaan itu lambang singa, budaya Subang. Saya kasih hadiah buat anak-anaknya, kita kasih tas, kasih alat-alat tulis, kasih sepeda. Habis itu kita undang budaya-budaya daerah, ada angklung, ada permainan daerah seperti Yoyo, ada music-musik dari daerah kita undang. Terus saya main bola dengan masyarakat, di situ main bola kaki. Kita makan, ibu-ibu di desa saya minta untuk masak nasi liwet, ratusan orang makan sama-sama di lapangan bola sesudah acara ulang tahun, sesudah main bola.”

Apa yang dilakukan Maruarar merupakan upaya pendekatan yang dilakukannya ke tengah-tengah pemilihnya untuk terus menjaga silaturahmi dan ikatan kedekatan itu dengan para warga di daerah pemilihannya. Pemahaman Maruarar terkait ikatan primordialisme yang sangat kental dipegang oleh masyarakat justru digunakan oleh Maruarar

---

<sup>169</sup>Wawancara dengan Maruarar.



sebagai pintu masuk mendekatkan dirinya dengan para pemilihnya. Sebagaimana memang dikatakan oleh Maswadi Rauf bahwa ikatan primordialisme yakni suku dan agama adalah dua ikatan primordialisme yang memunculkan ikatan emosional yang sangat dalam diantara sesama yang memiliki ikatan primordialisme tersebut.

Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun, sebaliknya mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain di luar kelompok primordial. Bahkan, demikian penjelasan Maswadi Rauf, bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda maupun nyawa dapat saja terjadi. Itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan sebagai dampak dari sedemikian kentalnya ikatan emosional yang ditimbulkan oleh ikatan primordialisme. Maruarar memanfaatkan ikatan primordialisme sebagaimana dimaksudkan oleh Maswadi Rauf di atas tersebut dengan menggunakan simbol atau lambang dan isu-isu pendekatan agama sebagai pintu masuk untuk mendekatkan diri kepada warga pemilihnya. Maruarar sangat meyakini bahwa sikap seperti itu akan melanggengkan upayanya untuk terus memelihara ikatan emosional dengan para pemilih di daerahnya. Maruarar sangat yakin bahwa ketika dirinya menghargai agama dan budaya yang berlaku di

warga, maka warga juga akan tahu menghargainya juga, suatu budaya berterima kasih yang timbal balik.

Dengan mengacu pada pandangan Bung Karno, Maruarar yakin bahwa perbuatannya itu tidak hanya berguna untuk merawat sejarah pluralisme di Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Maruarar mengajak generasi muda untuk berusaha tidak sekedar menghormati sejarah tetapi harus bisa juga menciptakan sejarah. Maruarar menegaskan bahwa pendekatan terhadap aspek budaya dan aspek agama menjadi sangat penting untuk keterpilihan seorang calon. Dalam konteks ini, aspek agama dari seorang caleg menjadi tidak terlalu penting karena menggunakan pendekatan nasionalisme sebagai acuan bertindak.

#### **b. Theodorus J. Koekerits di Jawa Timur**

Pengalaman Maruarar di Jawa Barat ternyata berpengaruh signifikan dengan pengalaman Theodorus di Jawa Timur. Theodorus Jacob Koekerits adalah anggota DPR RI dari PDI Perjuangan hasil Pileg 2004 dan pileg 2009. Theodorus menjadi caleg dari Dapil Jatim VI yang terdiri dari Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Tulung Agung. Sebagai seorang Kristen Katolik, Theodorus sangat menyadari identitas dirinya sehingga harus mampu menarik simpati dari pemilihnya yang didominasi oleh masyarakat beragama Muslim. Bila dalam Pileg 2004 Theodorus menang menjadi anggota DPR lebih karena diuntungkan oleh sistem Pemilu karena mendapat nomor urut ke-3, maka dalam Pileg 2009 Theodorus benar-benar berhasil meyakinkan pemilihnya dengan jumlah suara yang sangat signifikan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Arend Lijhpart bahwa dalam sistem Pemilu proporsional, besaran daerah pemilihan dan formula alokasi kursi mempunyai kaitan erat dengan tingkat kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Semakin kecil besaran daerah pemilihan, semakin tinggi tingkat persaingan; dan sebaliknya, semakin besar/luas besaran daerah pemilihan maka semakin rendah tingkat persaingan. Persaingan sangat tinggi menjadi tidak terelakkan karena lima kabupaten dan kota di atas terlalu kecil diperebutkan oleh ratusan caleg untuk memperebutkan sembilan kursi yang tersedia, dan Theodorus salah satu diantaranya yang terpilih menjadi anggota DPR RI.

Sangat mengherankan kemenangan Theodorus sebagai seorang Kristen Katolik karena dia dalam dua kali Pileg 2004 dan Pileg 2009 justru menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan di basis Islam, yakni Jawa Timur. Padahal merunut tentang kelahiran, pendidikan, dan pekerjaannya, Theodorus tidak memiliki kaitan langsung dengan Jawa timur. Dari data yang terkumpul, Theodorus justru dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikannya pun baik mulai dari SD hingga SMA semuanya dilaluinya di Makassar. Setelah itu, Theodorus pun menjadi mahasiswa dan lulus sebagai seorang isinyur dari Institut Teknologi Bandung. Pekerjaannya pun dilaluinya di Jakarta dengan bergabung dengan perusahaan Kelompok Kompas dan Gramedia (KKG) sejak lulus dari bangku kuliah hingga menjelang Pileg 2004. Theodorus kemudian menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pada Pileg 2004 dengan Nomor anggota A-373; dan pada Pileg 2009 menjadi anggota DPR RI dengan nomor A-385.

**Tabel 5. 4 Caleg Terpilih Dapil Jatim VI Pemilu 2004  
Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar,  
Tulungagung  
BPP 250.624 suara**

<b>Partai Politik</b>	<b>No</b>	<b>Nama Caleg Terpilih</b>	<b>No. Urut Caleg</b>	<b>Suara</b>	<b>Keterangan</b>
PDI Perjuangan (3 orang)	1	Guruh Sukarnoputra	1	168.763	Caleg No urut 4 mendapat 23.293 suara lebih tinggi dari Theodorus
	2	Eko Waluyo	2	26.669	
	3	Theodorus Koekerits	3	15.237	
PKB (3 orang)	4	Ali Masyukur Musa	1	156.194	Caleg no urut 3 lebih tinggi suaranya dibanding caleg no urut 2
	5	Imam Anshori Saleh	2	39.646	
	6	Imam Nahrowi	3	53.022	
Partai Demokrat	7	Ahmad Fauzie	1	34.833	
Partai Golkar	8	M. Irsyad Sudiro	1	30.922	
PAN	9	Achmad Affandi	1	15.761	

Sumber: Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009

Informasi terkait keterpilihan Theodorus menjadi anggota DPR RI sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 bisa dirunut demikian: Theodorus mencalonkan diri pada Pemilu

Tahun 2004<sup>170</sup> dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kab Kediri, Kediri Kota, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Tulung Agung). Jumlah Kursi yang diperebutkan di dapil VI ini adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi. Kursi otomatis sesuai dengan sistem Pemilu yang berlaku saat itu akan diperoleh bila seorang calon telah mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dengan jumlah minimal 250.624 suara. Maka jika tidak mencapai jumlah tersebut, maka akan di total jumlah perolehan suara partai di Dapil tersebut dengan membagi kursi perolehan tersebut dengan mengikuti nomor urut calon yang bersangkutan di nomor urut pencalonan.

Theodorus menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2004 dengan pencalonan di nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara sebesar 15.237 suara. Perolehan Theodorus ini tergolong besar karena perolehan suara terbesar di dapil tersebut hanyalah 23.293 suara. Theodorus mendapatkan suara terbesar nomor 4 (empat) dari seluruh calon DPR RI yang bertarung di dapil VI tersebut. Secara umum bisa dijelaskan bahwa total kursi yang diperebutkan di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2004 adalah 86 kursi yang dibagi dalam 10 dapil. Sementara total jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur adalah sebesar 36.206.060 jiwa penduduk.

Sementara hasil Pileg 2009 menempatkan Theodorus menjadi anggota DPR RI.<sup>171</sup> Persis sama dengan Pileg 2004, dalam Pileg 2009 pun Theodorus menjadi calon DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI: Kab Tulung Agung, Kota

---

<sup>170</sup> Data diolah dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2005), 389.

<sup>171</sup> Data diolah dari *Almanak Anggota Parlemen RI 2009-2014* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2010), 451.

Kediri, Kota Blitar, Kab Kediri, Kab Blitar. Saat itu BPP yang dibutuhkan adalah 177.374 suara. Walaupun Theodorus menjadi calon di nomor urut calon 2 (dua) yang diusung oleh PDI Perjuangan, namun dengan sistem Pemilu yang digunakan yakni sistem proporsional daftar calon terbuka, maka Theodorus otomatis menjadi terpilih.

Keterpilihan otomatis ini karena Theodorus menjadi calon yang mendapatkan nomor dua terbesar di PDI Perjuangan di Dapil VI setelah Pramono Anung dengan total perolehan suaranya sebesar 58.031 suara atau setara dengan 32,72% dari BPP. Jumlah perolehan suara tersebut otomatis menghantarkan Theodorus menjadi anggota DPR RI. Memang perolehan suara PDI Perjuangan di daerah Pemilihan VI Jawa Timur dalam Pemilu 2009 sangat besar dan menjadi pemenang terbesar dari seluruh caleg PDI Perjuangan di dapil tersebut. Di Jatim VI ini, PDI Perjuangan meraih dukungan pemilih sebesar 469.160 suara, sementara Partai Demokrat meraih suara yang hampir berimbang yakni: 417.529 suara, kemudian disusul oleh PKB sebesar 176.234 suara.

Theodorus sangat sadar bahwa mengandalkan identitas dan sejarah dirinya sebagai seorang beragama Katolik tentu sama sekali justru sangat tidak menguntungkan. Tapi Theodorus membuktikan bahwa dirinya bisa melakukannya di daerah pemilihannya Jawa Timur dan menang menjadi anggota DPR RI, padahal Theodorus lahir di Makassar, kuliah di Bandung, bekerja di Jakarta, tidak ada keterkaitan dengan daerah pemilihannya. Tapi ada sebuah keyakinan dalam diri Theodorus bahwa daerah pemilihannya Jawa Timur adalah sebuah kota yang sudah maju, tidak lagi daerah yang tertinggal yang menutup akses pada isu-isu

pluralism. Daerah pemilihan sudah bisa menerima karakter pluralis dengan sangat baik. Tentu saja daerah pemilihannya sangat berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih sangat sulit menerima penduduk dari agama atau suku yang berbeda.

Theodorus sangat yakin, daerah pemilihannya sudah sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan memahami secara benar akan perlunya menerima penduduk dari suku atau agama yang berbeda suatu karakter daerah pemilihan yang Theodorus banggakan itu.<sup>172</sup> Keyakinan Theodorus untuk masuk dan diterima oleh masyarakat pemilihnya dibuktikan dalam lima tahun dirinya sebagai anggota DPR RI. Sebab mengingat pada awalnya yakni pada Pileg 2004, Theodorus mengakui bahwa kemenangannya menjadi anggota DPR itu diuntungkan oleh penggunaan nomor urut. Tetapi sesudah masa Pileg 2004 dan kemudian terpilih, Theodorus meyakini bahwa tidak ada pilihan selain memperkenalkan dirinya lebih jauh dan masuk ke dalam kehidupan konkrit masyarakat pemilihnya, baik dari segi agama maupun dari segi budaya kehidupan sehari-hari mereka. Dan hasilnya pada Pileg 2009, Theodorus mendapatkan perolehan suara sangat signifikan naik 300% dari perolehan suara di masa Pileg 2004.

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Theodorus Jakob Koekerits, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan hasil Pileg 2004 dan Pileg 2009 dari Dapil Jatim VI (Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Tulung Agung) di Lt. 713 Gedung DPR RI – Senayan Jakarta, Rabu, 4 April 2012 Pukul 16.45wib.

Terkait dengan perolehan suara yang signifikan sebagai buah dari kedekatan dirinya dengan rakyat pemilihnya di Jawa Timur dijelaskan oleh Theodorus demikian,<sup>173</sup>

“Dan ketika periode pertama 2004 itu, pemilihannya pemilihan partai. Waktu pemilihan partai 2004, saya kira orang yang nyoblos saya itu salah nomor, salah nyoblos. Waktu pemilihan yang nomor urut 2004 itu, karena saya nomor urut tiga dimana partai mendapatkan tiga kursi maka saya terpilih. Dan saya tidak lebih mendapatkan 6000 suara. Dan periode kedua 2009, saya terpilih dengan suara yang signifikan. Saya hanya di bawah Anas Urbaningrum dan Pramono Anung. Itupun dari beberapa catatan KPU, suara saya ini banyak yang dicuri dan banyak juga yang salah. Kebanyakan salah. Kalau itu semua bisa dijumlahkan secara baik, menurut bupati-bupati di sana, bisa-bisa saya mengalahkan Anas Urbaningrum dan Pramono Anung. Saya nomor urut tiga.”

Bila penjelasan Theodorus di atas dikaitkan dengan pandangan politik Affan Gaffar yang mengkritik upaya partai-partai yang karena sistem tertutup cenderung mencalonkan kader yang tidak sesuai harapan warga dan/atau tidak mampu memperjuangkan aspirasi warga dalam sidang-sidang di DPR RI, terlihat bahwa harapan Affan semakin

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan Koekerits.



terjawab. Affan Gaffar menunjukkan implikasi yang jelas dari proses rekrutmen yang tertutup yang dilakukan oleh partai-partai, yakni pertama membentuk anggota DPR yang sangat akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya; kedua, mengorbankan kualitas dan mengutamakan patronage sehingga akan membawa akibat negative bagi penampilan anggota DPR di Jakarta ketika mereka memasuki dunia politik Jakarta yang sangat rumit. Tidak jarang pula pimpinan partai politik merekrut orang-orang yang memang mempunyai basis kekuasaan yang kuat pada tingkat lokal tetapi tidak memiliki latar belakang dan kecakapan yang cukup untuk menjadikannya seorang legisatif yang baik dan tangguh.

Kritik Affan Gaffar tersebut di atas setidaknya dalam konteks keterpilihan caleg-caleg Kristen termasuk Theodorus ini telah menjawabnya. Caleg-caleg Kristen bisa terpilih bukan karena mereka merupakan tokoh lokal dan bukan menjadi caleg yang tidak mampu membawa kepentingan warga di tingkat nasional. Justru sebaliknya, walaupun tidak tokoh lokal, ketika terpilih menjadi anggota DPR sejak tahun 2004, para anggota DPR RI Kristen tersebut justru terpilih kembali karena kualitas mereka sebagai anggota DPR RI yang dalam bahasa Affan Gaffar sebagai “seorang legisatif yang baik dan tangguh”.

**Tabel 5. 5 Caleg Terpilih Dapil Jatim VI Pemilu 2009  
Kab. Tulungagung, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab  
Blitar, Kota Blitar  
BPP: 177.374 suara**

<b>Partai Politik</b>	<b>No</b>	<b>Nama Caleg Terpilih</b>	<b>No. Urut Caleg</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>
PDI Perjuangan (3 orang)	1	Pramono Anung W	1	164.265	Total 469.160 suara
	2	Theodorus J. Koekerits	2	58.031	
	3	Eva Kusuma Sundari	3	34.380	
Partai Demokrat (2 orang)	4	Anas Urbaningrum	1	178.381	Total 417.529 suara
	5	Venna Melinda	3	30.650	
PAN	6	Ahmad Rizky Sadia	1	105.872	Total 105.872 suara
Partai Golkar	7	Zainuddin Amali	4	31.086	Total 175.020 suara
Partai Gerindra	8	Noura Dian Hartorony	1	23.106	Total 76.465 suara
PKB	9	Fadil Muzakki Syah	1	21.693	Total 176.234 suara

Sumber: diolah Penulis dari "Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009" dalam [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id).

Theodorus sangat meyakini bahwa masyarakat pemilihnya sudah berpikiran maju dan mau menerima perubahan. Maka dirinya tidak khawatir bahwa walaupun dia

beragama Katolik dan tidak pernah tinggal di daerah tersebut, bahkan lahir justru di daerah Makassar, Theodorus sangat meyakini bahwa masyarakat akan mau menerima dirinya bila dirinya mensosialisasikan diri, mendekatkan diri, dan membantu apa yang berguna bagi kehidupan mereka.<sup>174</sup> Masyarakat pemilih akhirnya tidak akan melihat diri Theodorus sebagai seorang beragama Katolik, tetapi sebagai seorang anggota DPR RI yang ada bersama mereka, dan yang serius membantu kesulitan hidup mereka. Sosialisasi diri itu dilakukannya dengan sangat baik dan intens. Buah dari usaha keras itu diraih dengan hasil menakjubkan dimana putra-putra daerah itu sendiri pun yang turut mencalonkan diri pada Pileg 2009 dapat dia kalahkan perolehan suaranya. Terkait dengan pemahannya tentang masyarakat pemilihnya yang sudah cukup maju tersebut dan terkait dengan sukses yang diraihnya pada Pileg 2009.

Upaya lain yang dilakukan Theodorus untuk meyakinkan pemilih bahwa dirinya pantas untuk dipilih adalah bergaul dengan kehidupan sehari-hari warga, berdiskusi tentang masalah mereka, ikut dalam pesta rakyat, dan mencoba turut membantu warga untuk memecahkan persoalannya. Itu dilakukannya secara intens sepanjang lima tahun yang lalu sebelum Pileg 2009 sampai sekarang. Tidak selalu persoalan itu selesai dan tuntas terselesaikan, tetapi kehadiran Theodorus telah membuat warga merasa bahwa ada anggota DPR RI yang berpihak dengan persoalan konkrit mereka. Bahkan Theodorus tidak pernah berjanji akan menuntaskan persoalan itu, tetapi dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin membantu setiap masalah walaupun

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan Koekerits.

masalah itu mungkin akan gagal atau mereka di pihak yang kalah. Terkait keterlibatannya terhadap kehidupan keseharian warga ini, Theodorus menjelaskan,<sup>175</sup>

“Sejak 2004 saya sudah anggota dewan. Hampir tiga kali sebulan itu saya datang, dan kalau ada acara rakyat, di situ saya datang. Dan kalau bukan cara rakyat saya tidak mau datang. Mereka dalam kesulitan pupuk, saya coba saya cari jalan keluar karena pupuk sangat penting dan sangat berarti bagi mereka sebagai petani. Saya bilang saya tidak janji tapi saya coba, dan selalu ada jalan keluar. Setiap dua kali dalam setahun mereka mengusahakan sawah untuk padi, mereka tentu saja sangat membutuhkan pupuk yang sering tidak bisa dipenuhi pemerintah dengan sangat baik.”

Dalam menjalankan misi untuk melakukan sosialisasi diri kepada para warga, Theodorus tidak memaksakan dirinya harus dipilih dan menjadi anggota DPR RI. Bahasa yang disampaikannya adalah bahwa warga hendaknya memilih PDI Perjuangan, dan kalau dirinya dianggap tepat, maka pilihlah dirinya, kalau tidak sekurang-kurangnya supaya mereka memilih PDI Perjuangan saja, bukan partai yang lain. Karena itu dalam kampanyenya, Theodorus bahkan juga mensosialisasikan nama teman-temannya dari PDI Perjuangan yang menjadi caleg di dapil tersebut untuk turut menjadi pertimbangan yang dipilih. Yang jelas, harapannya bahwa para pemilih tersebut memilih PDI Perjuangan atau

---

<sup>175</sup>Wawancara dengan Koekerits.

caleg dari PDI Perjuangan entah siapa pun itu. Yang diharapkan dengan pendekatan yang dilakukannya itu adalah supaya sebanyak mungkin kursi PDI Perjuangan menang di daerah pemilihan tersebut. Karena itu, Theodorus tidak pernah mengatakan kepada warga supaya memilihnya, tetapi hanya memberikan peluang kepada mereka bila dirinya dianggap tepat untuk dipilih.

Pendekatan yang dilakukan oleh Theodorus itu ternyata sukses dan efektif, dimana akhirnya mendongkrak perolehan suaranya hampir 300% dari Pileg 2004 ke Pileg 2009. Pemaknaan akan pentingnya mengedepankan kualitas keterwakilan politik sesuai dengan sistem Pemilu yang digagas oleh Arend Lijhpart menjadi tepat pada Pileg 2009 dengan memilih secara langsung sosok dari caleg yang bersangkutan. Padahal Theodorus sebagaimana disebutkan di awal setidaknya memiliki empat beban yang harus ditanggungnya, yakni: bukan suku dari Jawa Timur, bukan beragama Islam, bukan putera daerah yang lahir di dapilnya, dan bukan bertempat tinggal di dapil tersebut. Kualitas keterwakilan itu menjadi sangat tepat karena anggota DPR RI beragama Kristen itu benar-benar terpilih sesuai dengan representase suara yang mereka raih di dapilnya masing-masing. Perolehan suara itu telah menempatkan secara otomatis Theodorus menjadi anggota DPR RI karena dirinya mendapatkan suara yang terbesar dari seluruh calon PDI Perjuangan di daerah pemilihan tersebut. Theodorus menegaskan,<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Koekerits.

“Perolehan suara saya di Pileg 2004 itu hanya 6000 (enam ribu) suara. Di Pileg 2009 kemudian “sangat besar”. Yang diakui 10 kali lipat (disbanding Pileg 2004). Yang diakui sama KPU dalam Pileg 2009 ya 60.000 (enam puluh ribu) sekian. Itu yang diakui sama KPU. Tapi kalau yang tercatat di daerah bisa sampai 140.000an (seratus empat puluh ribuan) lebih suara.”

Bila melihat teori dari Arend Lijphart tentang sistem Pemilu, bisa dijelaskan bahwa kualitas keterwakilan sesungguhnya bisa diperoleh lewat *open list* karena murni pilihan rakyat pada 2009, dan kualitas keterwakilan yang sama menjadi tidak signifikan dengan sistem yang digunakan dalam Pileg 2004. Hal ini terlihat dari Pileg 2004 dimana cara memberi suara yang benar adalah mencoblos tanda gambar dan nama orang dalam daftar yang tersedia. Namun dalam aturan dapat disahkan pada tanda gambar saja sehingga makna *proporsional open-list system* yang mengedepankan rasionalitas berbelok menjadi *proportional closed-list sistem* yang meminimalkan rasionalitas pemilih seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Bila dalam Pileg 2004 Ribka Tjiptaning dan Theodorus Koekerits dimenangkan oleh nomor urut mereka di DCT, maka dalam Pileg 2009 mereka terpilih menjadi anggota DPR RI karena memang mereka benar-benar mendapatkan dukungan sangat besar dari pemilih. Bahkan Maruarar Sirait membuktikannya dengan perolehan suara terbesar di seluruh Provinsi Jawa Barat dari seluruh caleg DPR RI pada Pileg 2009.

Lalu bagaimana upaya dan usaha yang dilakukan oleh Theodorus untuk memelihara hubungan dengan pemilih tersebut? Menurut Theodorus, yang selalu dilakukannya adalah tidak pernah memberi janji, dan mengakui bahwa kemampuannya tentu sangat terbatas. Tetapi Theodorus memberi harapan bahwa bila kelak terpilih lagi sebagai anggota DPR RI, dirinya tentu akan bisa memberi lebih banyak dari pada yang bisa dia berikan sekarang terkait bantuan atas pemecahan masalah dari yang sedang dialami warga. Ketika pendekatan agama dan budaya ini dikonfirmasi kepada Ganjar anggota DPR RI beragama Islam dan pengurus DPP PDI Perjuangan pada 2005-2010, Ganjar mengakui bahwa para politisi Kristen di PDI Perjuangan bisa menjadi anggota DPR RI justru karena konsistensi dan pendekatan yang mereka lakukan. Menurut Ganjar, sikap politik dan pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Maruarar Sirait dan Ribka Tjiptaning justru akan sangat memikat para pemilih, dan rakyat tidak peduli apakah mereka itu beragama Kristen atau tidak. Ganjar mencontohkan sosialisasi dirinya kepada pemilih yang kemudian dikaitkannya dengan sikap politik yang diambil oleh para politisi Kristen seperti Maruarar. Ganjar menjelaskan,<sup>177</sup>

“Semua bergantung pada pendekatan. Ara (Maruarar Sirait, **red**) luar biasa. Orang pilih Ara bukan karena dia Kristen dan dia Batak. Orang

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Ganjar Pranowo, DPP PDI Perjuangan 2005-2010, Anggota DPR RI PDI Perjuangan hasil Pileg 2004 dan Pileg 2009, Rabu, 4 April 2012, di ruang 711 Gedung DPR Senayan, Jakarta, Pukul 14.45wib

pilih Ara karena, “Oh.. Ara vocal. Oh... oh... kelihatan waktu berjuang, konsistensinya ada!” Maka *voters* pilih dia! Itu contoh-contoh sikap!”

Sikap politik lain yang digunakan oleh para politisi Kristen di PDI Perjuangan adalah memanfaatkan sebesar mungkin kemampuan mereka untuk menggunakan peranan tokoh lokal seperti bupati atau tokoh-tokoh agama. Menurut Ganjar, sikap politik demikian menjadi sangat tepat, karena ketika politisi Kristen hanya bergaul dengan tokoh beragama Kristen, itu namanya bukan nasionalis, tapi primordialis. Menurut Ganjar, bahwa bisa saja para politisi Kristen membonceng pada nama PDI Perjuangan untuk menjadi bahan sosialisasi kepada warga masyarakat yang basis PDI Perjuangan, tetapi mengusung nama itu hanyalah sebahagian dari upaya caleg untuk meyakinkan pemilih. Karena pada akhirnya yang terpenting bagi pemilih adalah apakah sosok dari caleg bersangkutan member manfaat konkrit bagi kepentingan langsung warga masyarakat. Ganjar menegaskan bahwa ketika seorang tokoh politik menyatakan dirinya seorang nasionalis, maka dirinya harus melintasi batas-batas agamanya, bahkan bergaul dengan tokoh-tokoh berbeda agama. Ketika disampaikan pertanyaan terkait kemungkinan caleg-caleg Kristen juga memanfaatkan basis PDI Perjuangan di dapilnya, Ganjar menjelaskan,<sup>178</sup>

“Anda betul. Memang di beberapa kantong PDI Perjuangan itu ceritanya, bukan soal Anda Kristen atau tidak. Tapi apakah Anda nasionalis atau tidak! Anda berjuang untuk kebhinnekaan

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Pranowo.



atau tidak. Walaupun saya Kristen kemudian mengaku nasionalis, tapi kalau hanya mengurus Gereja saja, oh.. tidak... pasti bohong kamu. Anda muslim, mengaku nasionalis, tapi hanya mengurus masjid saja, ya tidak akan dipilih.”

Ganjar menceritakan pengalamannya sebagai seorang Muslim di daerah pemilihannya ketika dirinya mendukung upaya orang-orang beragama Kristiani untuk melakukan Perayaan Natal di tingkat Kabupaten Purbalingga pada Desember 2011. Menurutnya, memang masih selalu muncul kekhawatiran-kekhawatiran bagi sejumlah kalangan ketika orang-orang Islam turut mendukung dan menghadiri perayaan-perayaan keagamaan orang-orang Kristen seperti Natal.

Namun bagi dirinya, sikap seperti itu harus terus dibangun dan dikembangkan sebagai bagian dan pembangunan karakter pluralism yang menjadi ciri sebagai bangsa Indonesia. Ganjar menceritakan pengalaman tersebut demikian,<sup>179</sup>

“Saya ini muslim, tapi datang di Perayaan Natal di kampung kami di Kabupaten Purbalingga 25 Desember kemarin. Bupatinya saja bingung, “Pak Ganjar, baru pertama kali ini pak diadakan Natal nasional Kristen (Protestan) dan Katolik bersama, mengundang seluruh pejabat di situ dan Pak Ganjar mau hadir di Pendopo pertama. Wakil bupatinya waktu mau membaca saja gemetar, gemetar nya karena takut. Lalu saya

---

<sup>179</sup> Wawancara dengan Pranowo.

katakan, “Bapak ini kita dukung dari PDIP, kenapa Bapak ini takut? Kenapa?” Bupati bilang, “Bukan pak! Masyarakat di sini bilang, katanya kami menampung orang Kristen!” Saya bilang, “Itulah yang anda salah.” Saya berperan, saya bertemu di pinggir jalan dengan panitianya, jadi ngundangnya bukan jauh-jauh hari tapi hari itu juga, “Apakah Pak Ganjar bisa datang nanti malam?” Saya bilang, “saya pasti datang! Saya datang nanti malam.” Maka akhirnya saya datang sebagai warga yang biasa saya anggap sebagai saudara saya. Saya datang sebagai sebuah penghormatan. Kehadiran saya menimbulkan *image* luar biasa masyarakat Kristen minoritas yang ada di situ. Itu dahsyat. Bupati bilang, “Baru Bapak yang pernah datang!” Padahal buat saya itu biasa karena saya sekolah di Yogya, sudah terbiasa pertemuan dengan sejumlah suku dan agama.”

Penjelasan Ganjar di atas menunjukkan bahwa memang di kalangan sejumlah pihak masih terdapat sejumlah kesulitan yang mampu menerima semua kalangan tanpa harus membedakan agama masing-masing dalam sebuah perayaan keagamaan tertentu. Sikap penolakan demikian juga akan membuat kalangan Kristen menjadi sering ragu-ragu untuk memulainya karena khawatir akan menimbulkan pemahaman yang salah bagi sejumlah warga. Namun menurut Ganjar, pola-pola politik untuk membangun dan menguatkan karakter pluralisme sudah harus dikembangkan terus menerus. Sikap politik Ganjar tersebut adalah salah satu contoh yang juga

dilakukan oleh para politisi Kristen terhadap masyarakat beragama muslim di daerah pemilihan masing-masing. Menurut Ganjar, bahkan tentu saja perjuangan orang Kristen di basis Muslim untuk masuk ke kalangan beragama Islam seperti di Jawa Barat misalnya akan jauh lebih sulit dibandingkan perjuangan orang Muslim di basis Muslim terhadap orang-orang Kristen seperti yang dilakukannya sendiri.

Pengalaman caleg-caleg Kristen tersebut di atas menjadi tepat dengan pandangan Arend Lijhpart tentang makna keterwakilan melalui sistem Pemilu, dimana yang paling utama adalah bagaimana seorang anggota legislatif terpilih benar-benar merupakan hasil pilihan dari rakyat. Keterwakilan politik dengan Sistem Proporsional Tertutup pada Pileg 2004 menunjukkan bahwa keterpilihan Maruarar dan kawan-kawan lebih karena diuntungkan oleh sistem Pemilu, tetapi kualitas keterpilihan Maruarar pada Pileg 2009 sudah menunjukkan kualitas keterpilihan itu karena murni berasal dari pilihan bebas warga secara langsung untuk memilih diri caleg Kristen itu sendiri.

### **3. Pendekatan Caleg Kristen dari Partai Golkar**

Pengalaman kedekatan dan “menyatu” dengan budaya dan lingkungan masyarakat Jawa Barat yang dialami oleh anggota DPR RI beragama Kristen di PDI Perjuangan tidak jauh berbeda dengan anggota DPR RI beragama Kristen dari Partai Golkar. Perbedaannya bahwa caleg Kristen dari partai Golkar yang menjadi bahan penelitian ini justru lahir dan besar di daerah pemilihannya, walaupun berbasis Islam. Enggartiasto Lukito anggota DPR RI beragama Kristen

Protestan dari Partai Golkar yang menjadi penelitian dalam penelitian ini adalah asli kelahiran dari Cirebon yang menjadi daerah pemilihannya. Enggar berbeda dengan Maruarar Sirait dan Ribka Tjiptaning yang justru lahir dan menikmati masa kecilnya di luar dapilnya di Jawa Barat, pun juga dengan Theodorus yang tidak berasal dari dapilnya di Jawa Timur.

Strategi meraih dukungan pemilih yang digunakan oleh caleg-caleg Golkar tidak berbeda dengan strategi caleg Kristen di PDI Perjuangan, yakni melakukan pendekatan secara konkrit kepada pemilih. Maka bila mengikuti pandangan dari Alan Ware tentang partai yang ideologis yang terwujud dalam program partai dan program individu, Partai Golkar menunjukkan bahwa peranan partai menjadi tidak sangat ideologis, partai menjadi *it does not matter* karena yang diusung adalah program partai dan program individu itu sendiri secara konkrit. Program partai dan program individu lebih penting dari sekedar menjual ideology. Keterpilihan caleg-caleg termasuk caleg beragama Kristen menjadi DPR RI lebih karena kehebatan dan nama besar partai untuk mendapatkan dukungan pemilih. Keterpilihan anggota DPR RI tersebut merupakan buah dari “kebaikan hati partai” karena partai mendapatkan jumlah suara tertentu yang kemudian dikonversi menjadi kursi legislatif sesuai nomor urut di DCT.

Program individu menjadi lebih penting sehingga tidak tepat lagi sebagaimana diungkapkan Alan Ware adanya reaksi partai yang demikian ini sangat berbeda dengan spektrum kiri dan kanan. Fakta politik caleg-caleg Kristen ini terkait dimensi sayap kiri dan sayap kanan yang dimaksudkan oleh Alan Ware yang bahkan dalam konteks kajian ini dianalogikan dengan dimensi Kristen-Islam dimana orang

Kristen menjadi anggota legislatif terpilih justru di basis Islam yang kuat sebagaimana ditunjukkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

**Tabel 5. 6 Caleg Terpilih Dapil Jabar VII Pemilu 2004  
Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon BPP: 232.688  
suara**

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara	Keterangan
PDI Perjuangan (3 orang)	1	Sudarto Danustubroto	1	29.097	
	2	Suryana	2	37.775	
	3	Yoseph Umar Hadi	3	31.745	
Partai Golkar (2 orang)	4	Enggartiasto Lukito	1	43.378	Caleg No urut 3 mendapat 51.913 suara
	5	Yuddi Chrisnandi	2	30.549	
PKB	6	Muhammad Hikam	1	52.165	Caleg No urut 2 mendapat 56.245 suara
Partai Demokrat	7	Nurul Qomar	1	33.745	
PKS	8	Mahfud Siddig	1	27.311	
PPP	9	Ma'mur Noor	1	17.129	

Sumber: Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009

Enggartiasto lahir dan besar hingga masa remaja di daerah Cirebon. Karena itu, dirinya tidak bisa melupakan karakter pergaulan masa kecilnya di Cirebon, logat dan intonasi dalam pergaulan sehari-hari, termasuk ke jenis

makanan yang bisa dinikmati semenjak masa kecil. Pengalaman menyatu dengan budaya dan masyarakat Cirebon dimana dirinya di usia dewasa membina terus menerus hubungan itu dalam pergaulannya sebagai politisi Partai Golkar, membuat Enggartiasto sulit untuk keluar dari daerah pemilihan tersebut. Dan sebagai Ketua DPP Partai Golkar 2004-2009, Enggartiasto selalu mengusahakan bagaimana anggota-anggota DPR RI yang berada di Korwilnya Bali, NTB dan NTT untuk menjalin relasi seerat mungkin dengan daerah pemilihannya. Enggartiasto menjelaskan kedekatan dirinya secara emosional dengan daerah pemilihannya,<sup>180</sup>

“Sebagai anggota DPR dari dapil Jawa Barat 8, saya selalu hadir. Tidak pernah saya tidak hadir. Dan saya selalu mengatakan mengapa di Cirebon sini, karena saya juga selalu ada bernostalia di situ, banyak teman, makan makanannya tradisional sana. Belum lagi dari segi bahasa, bahasa daerah bahasa yang sama yang sejak kecil kita ucapkan, bahasa ibu. Enak kita dengan maki-maki pake bahasa Cirebon dengan sesama teman, sesuatu yang saya tak mau hilang. Saya enak di sana.”

Tidak hanya menikmati masa kecilnya di kota Cirebon, Enggartiasto juga mampu memahami tata hidup beragama di lingkungannya yang didominasi Islam. Misalnya,

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Enggartiasto Lukito, Anggota DPR RI dari Partai Golkar Pileg 2004 dan Pileg 2009 di Jl. Hang Tuah IX No 35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Mei 2012, sekitar pukul 14.47wib. Enggartiasto adalah anggota DPR RI periode 2000-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 dari Dapil VIII Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon Kabupaten Indramayu).

dalam jam-jam tertentu ketika azan dari masjid, semua aktifitas bersama yang sedang dilaksanakan entah dimanapun akan diminta oleh Enggartiasto untuk berhenti. Sehingga kerap banyak peserta yang hadir dalam sebuah pertemuan akan heran dan takjub dengan sikap toleran yang ditunjukkan oleh Enggartiaso tersebut.

Sikap toleran yang ditunjukkannya membuat Enggartiasto bisa diterima di kalangan Islam sejak dari mahasiswa di IKIP Bandung dahulu. Enggartiasto menjelaskannya begini,<sup>181</sup>

“Untuk itu saya tidak mau berbeda. Pada waktu azan, saya berhenti pidato. Orang heran, “Ini Islam atau Kristen?” Orang yang mau bicara saya bilang, “Berhenti dulu, ini Azan.” Waduh... isinya tepuk tangan itu. Saya saja menghormati, buat saya kalau kita mau dihormati, kita hormati orang. Kalau orang tidak mau menghormati, biadap dia. Itu saja. Saya Pengurus Pusat GMKI merangkap *caretaker*, mantan Ketua GMKI cabang Bandung. Saya Dewan Mahasiswa di IKIP Bandung yang pertama sekali non HMI membawa dua dosa: dosa asal karena agama dan dosa keturunan suku China menjadi mahasiswa. Sampai sekarang, saya Ketua Umum Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang isinya semua itu HMI, semua IMM. PMII itu jatahnya sedikit,

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Lukito.

pada waktu saya menembus itu saya membawa PMII karena dulu dominasi HMI.”

Pengakuan Enggartiasto di atas menunjukkan betapa dirinya sangat menikmati pergaulan dengan masyarakat dan budaya di Cirebon yang menjadi kota kelahirannya. Dalam tugasnya sebagai politisi di Partai Golkar, sudah sejak lama dirinya membangun hubungan kedekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk pergaulannya dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di sana. Sedemikian dekatnya Enggartiasto dengan masyarakat tersebut sehingga kepadanya bahkan diberikan sebutan Haji Enggar. Kunjungan ke seluruh daerah pemilihannya difokuskannya terutama dimasa-masa menjelang Pemilu untuk memberikan pemahaman terkait cara mencoblos atau mencontreng yang tepat sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Terkait dengan upayanya menjalin relasi dengan penduduk di daerah pemilihannya tersebut, dijelaskan Enggartiasto demikian,<sup>182</sup>

“Saya selalu keliling ke kampung. Bukan di kota saja, datang di kampung, berdialog, datang mengirim bantuan, dan berbagai hal yang lain. Jadi tidak bisa itu untuk kemudian ujug-ujug seperti itu. Diterima tidak? Awalnya tidak mudah, dan orang kaya di kampung itu adalah haji, di panggil pula Haji Enggar. Saya tidak bisa bantah, orang yang mengangkat saya jadi haji, bukan saya yang minta saya jadi haji. Kampanye Pemilu 2009 dimana menggunakan

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Lukito.



suara terbanyak, tiga bulan saya tidak beranjak dari Cirebon. Saya *long stay* di hotel, saya turun, dari pagi sampai malam sampai jam 01.00 wib. Saya hanya tiga kali ke Jakarta, dua hari-dua hari ke Jakarta. Istri saya yang bolak-balik dari Jakarta ke sana. Dan 75% dari seluruh desa saya datang. Kenapa 75% karena hampir 100 pada waktu simulasi, tingkat kesalahan 100 persen, karena seperti kertas koran itu milihnya. Saya balik lagi saja.”

Bagi Enggartiasto, pengalaman kedekatan dan persahabatan dengan berbagai kalangan berbeda agama dan suku membuatnya tiba pada sebuah kesadaran untuk menolak kelompok-kelompok yang berbasis primordialisme agama, termasuk di kalangan orang Kristen sendiri. Menurutnya, kehadiran kelompok-kelompok Kristen di kalangan awam seperti partai maupun organisasi cendekia yang lain secara nasional justru tidak menguntungkan bagi orang Kristen itu sendiri bahkan justru akan mengungkung masyarakat Kristen itu sendiri dalam pergaulan secara nasional. Enggartiasto mengemukakan pandangannya terkait masyarakat China yang berpolitik dan terkait organisasi berbasis Kristen demikian,<sup>183</sup>

“Selalu saya katakan kepada kawan-kawan, yang keturunan China ini kan kalau bukan Budha ya Kristenlah, Katolik, “Saya suka kalian, tapi jangan eksklusif. Jangan hanya suka untuk kemenangan dan kepentingan

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Lukito.

dirinya”. Maka saya tidak setuju partai berlandaskan agama. Termasuk di dalamnya agama Kristen dan segala macam. Saya tidak setuju lahirnya PIKI, dihidupkannya kembali PIKI, saya setuju dengan Pak Siswono yang protes kepada Pak Radius Prawiro, kenapa lagi ini PIKI dihidupkan. Karena dengan lahirnya PIKI lahirlah itu ICMI. Itu! Jadi kita nasionalis, kalau kita tidak mau, kenapa kita mesti minder. Saya sebagai orang yang cukup dikenal, dianggap sebagai tokoh, mereka tahu kog latar belakang saya. Saya tidak ada takutnya. Saya bisa hidup sekarang *alamhamdulillah*, kalau tidak, sudah diculik juga zaman dulu. Kongres GMKI zaman dulu kan keras itu, saya zamannya Natigor Siagian dan almarhum Sirato Syafei.”

Pengalaman politik Enggartiasto di atas memberi catatan kritis terhadap pandangan Clifford Geertz yang menegaskan bahwa ikatan primordialisme sangat berbahaya ketika masuk ke dalam politik karena di sana tercampur ikatan emosional yang sangat erat dan sulit terpisahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Maswadi Rauf bahwa untuk konteks Indonesia ada dua ikatan primordialisme terpenting yakni primordialisme suku dan primordialisme agama, maka untuk konteks daerah pemilihan dimana Enggartiasto mencalonkan diri, dua ikatan primordialisme tersebut sangat erat dan kental yakni primordialisme sebagai suku Sunda dan primordialisme agama Islam.

Kedua ikatan primordialisme itu sangat kuat masuk secara politik di daerah yang sangat kuat basis Islamnya di dapil Enggartiasto. Tetapi Enggartiasto justru bisa menembus batas dua primordialisme tersebut dalam politik yang dilakukannya. Walaupun bukan beragama Muslim dan bukan suku Sunda, Enggartiasto justru bisa terpilih, sehingga pandangan Geertz menjadi tidak mutlak berlaku. Ikatan primordialisme justru bisa ditembus oleh Enggartiasto lewat pendekatan konkritnya ke warga di dapilnya.

## **5.2. Pendekatan Tokoh Lokal Dan Sarana Kebutuhan Umum**

Caleg beragama Kristen selalu mencari strategi-strategi sebagai solusi alternative yang tepat sasaran untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan legislatif terutama ketika caleg yang bersangkutan ditempatkan di basis Islam yang kuat. Selain strategi pendekatan kultural budaya lokal dan pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh para caleg Kristen yang diuraikan dalam bab sebelumnya, setidaknya ada tiga pendekatan lain yang dilakukan para caleg Kristen untuk memenangkan dirinya terpilih dalam Pemilu Legislatif. Pendekatan kepada tokoh-tokoh lokal setempat yang memberi pengaruh sangat besar adalah isu pendekatan utama lain yang dilakukan, selain dua karya social yang lain.

### **1. Strategi Pendekatan Tokoh Lokal**

Satu lagi strategi yang dilakukan oleh para politisi beragama Kristen untuk mendapatkan dukungan pemilih yang seluas-luasnya adalah memanfaatkan pengaruh tokoh-tokoh lokal (*royal cults*), baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ketokohan-ketokohan yang lain.

Menurut pengakuan para politisi Kristen baik yang di PDI Perjuangan maupun di Partai Golkar, pendekatan demikian cukup efektif untuk mendapatkan dukungan dan keyakinan masyarakat luas terhadap mereka sendiri. Dukungan yang didapatkan oleh para caleg Kristen tersebut dari tokoh-tokoh lokal telah membuat sosialisasi diri mereka sendiri terhadap masyarakat di daerah pemilihannya menjadi lebih mudah. Ada yang menggunakan pengaruh tokoh lokal dari kalangan Keraton seperti Enggartiasto dari Partai Golkar, ada yang menggunakan pengaruh tokoh lokal dari kalangan pejabat pemerintahan setingkat bupati/walikota seperti dimanfaatkan oleh Theodorus dari PDI Perjuangan, dan ada yang menggunakan pengaruh tokoh agama seperti yang dimanfaatkan oleh Markus dan Enggartiasto dari Partai Golkar.

**a. Enggartiasto Lukito di Jawa Barat**

Enggartiasto misalnya, memanfaatkan kedekatannya dengan kalangan keraton untuk mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat pemilihnya, terutama yang berada di seputaran keraton. Alasan bahwa Cirebon sebagai kota kelahiran Enggartiasto tentu saja memudahkannya untuk bergaul dengan semua kalangan di daerah pemilihannya. Enggar tidak hanya bergaul dengan kalangan agama dan masyarakat luas, tetapi juga mampu menjalin relasi yang akrab dengan keluarga Keraton Cirebon. Bahkan kemampuannya berkomunikasi dengan kalangan elit di Keraton Cirebon membuatnya menjadi dikenal oleh para patih dan keluarga di sekitar Keraton. Patih Keraton bahkan menjadi juru kampanye yang efektif baginya terhadap para keluarga Keraton dan masyarakat yang tinggal di sekitar

Keraton. Terkait hubungannya yang dekat dengan Keraton Cirebon, dijelaskan oleh Enggartiasto demikian,<sup>184</sup>

“Saya dekat juga dengan Keraton Cirebon, Keraton Kanoman sampai sekarang. Patih Keraton dengan intinya keraton, dia kampanye untuk saya, tidak kampanye di lapangan, tidak ada gunanya kampanye di lapangan. Abdi dalem kumpul, dikenalkan saya dalam bahasa Keraton, “Ini keluarga Keraton. Dia anggota DPR. Dia selama ini membantu Keraton. Jadi jelas *enggeh!*” Yang hadir jawab, “*Enggeh....*”. Patih yang bantu untuk itu! Putus itu barang itu! Ke Sunan Gunung Jati di daerah sana saya datang. Setiap kegiatan dulu dan setiap kegiatan panjang jimat, saya hadir.”

Apa yang disampaikan oleh Enggartisto di atas sangat sesuai dengan teori patron-klien sebagaimana diungkapkan James Scott dimana Enggartiasto menggunakan kewenangan patron yakni Patih Keraton terhadap klien yakni warga di lingkungan keraton. Warga Keraton tentu saja menuruti apa yang diperintahkan Patih Keraton sebagai patron utama di lingkungan kekeratonan. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Enggartiasto, sehingga teori politik James Scott terkait patron klien berlaku dengan sangat sempurna dimana Enggartiasto memanfaatkan kewenangan pihak lain, yakni Patih Keraton.

---

<sup>184</sup>Wawancara dengan Lukito.

**Tabel 5. 7 Caleg Terpilih Dapil Jabar VIII Pemilu 2009  
Kab Cirebon, Kota Cirebon, dan Kab Indramayu BPP:  
170.232 suara**

<b>Partai Politik</b>	<b>No</b>	<b>Nama Caleg Terpilih</b>	<b>No. Urut Caleg</b>	<b>Suara</b>	<b>Suara Partai</b>
Partai Golkar (2 orang)	1	Enggartiasto Lukito	1	109.527	Total 408.802 suara
	2	Tetty Kadi Bawono	2	35.882	
PDI Perjuangan (2 orang)	3	Sidarto Danusobroto	1	54.102	Total 358.492 suara
	4	Yoseph Umar Hadi	2	53.757	
Partai Demokrat (2 orang)	5	Nurul Qomar	1	101.170	Total 263.111 suara
	6	Herman Khaerun	2	19.765	
PKS	7	Mahfud Siddig	1	36.583	Total 134.525 suara
PKB	8	Dedi Wahidi	1	31.236	Total 107.128 suara
Partai Hanura	9	Miryam S. Haryani	1	28.749	Total 93.697 suara

Sumber: diolah Penulis dari "Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009" dalam [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id).

Kedekatannya dengan Keraton di Cirebon dan seluruh daerah pemilihannya dimanfaatkan oleh Enggartiasto semaksimal mungkin untuk keterpilihannya ketika masa kampanye pada Pileg 2009 yang lalu. Kedekatan tersebut membuatnya mampu menghadirkan sejumlah tokoh dari luar Cirebon, yakni menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono

X dari Yogyakarta. Dalam kesempatan kampanye itu Enggartiasto menggagas sebuah seminar nasional yang disiarkan secara langsung oleh sebuah televisi swasta dari kota Cirebon yang kecil. Dalam seminar nasional tersebut, Enggar juga mengundang tokoh-tokoh nasional yang lain dari Jakarta ke Cirebon dalam pertemuan yang sama, yakni Ciputra, Hermawan Kertajaya, dan Surya Paloh. Dampak yang ditimbulkan dari seminar nasional tersebut tentu mengemparkan seluruh Kota Cirebon, karena dari sebuah kota kecil hadir sebuah diskusi berskala nasional yang disiarkan secara langsung ke seluruh Indonesia yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh nasional.

Sedemikian dekatnya hubungan Enggartiasto dengan para pemuka agama di daerah pemilihannya, maka dirinya tidak akan pernah melupakan salah pengalaman politik ketika ditolak oleh orang-orang dari Kabupaten Cianjur yang anggota DPR nya dia gantikan pada tahun 2000 silam. Menghadapi para pendemo tersebut, Enggartiasto justru mendapat dukungan yang besar dari kalangan Islam, bukan dari kalangan Kristen. Kehadiran tokoh-tokoh Islam yang menghadapi para pendemo tersebut akhirnya membuatnya tetap nyaman sebagai anggota DPR RI. Enggartiasto menjelaskan pengalaman itu demikian,<sup>185</sup>

“Ketika di demo oleh orang Cianjur, saya dibantu Sofyan Mile, karena dengan jaringannya walaupun dia orang Luwu Banggai (Gorontalo) tetapi dia punya akses ke Cianjur (Jawa Barat). Mungkin kalau saya

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Lukito.

didemo tentang hal yang lain, dia tidak akan semarah itu. Tetapi karena saya di demo karena saya China dan Kristen, maka dia semarah itu. Dia hubungi tokoh DI/TII yang ada di Cianjur untuk membela saya. Cianjur basis DI/TII. Yang menentang saya adalah tokoh DI. Hubungan saya dengan Sofyan Mile sangat akrab, dia datang aja ke sini, dia mau makan dia pesan saja, sesudah selesai makan dia pergi saja. Jadi kita tidak ada yang membedakan, bebas-bebas saja.”

Karena itu bagi Enggartiasto, tidak ada sebuah kesuksesan yang ujug-ujug diperoleh, termasuk keterpilihan dirinya menjadi anggota DPR RI. Semua merupakan buah dari sebuah pekerjaan yang keras. Upaya ini menurut Enggartiasto harus dilakukan karena memang jumlah orang Kristen di Partai Golkar itu sedikit, jumlah yang tentu saja sangat berbeda dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Bila orang Kristen tidak bekerja keras, apalagi bila ditempatkan di daerah pemilihan yang tidak sama agama dan sukunya, maka perjuangan caleg yang bersangkutan membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi, dan itulah yang dilakukan oleh Enggartiasto.

Enggartiasto menjelaskan bagaimana jumlah orang Kristen yang menjadi pengurus di DPP Partai Golkar bukan Kristen dan bagaimana keyakinannya bahwa perolehan suaranya itu justru mayoritas karena dukungan dari pemilih beragama Muslim. Enggartiasto sangat yakin bahwa dirinya cukup diterima di kalangan beragama Muslim di daerah pemilihannya. Terbukti dari penjelasannya di atas bahwa



suara yang diperolehnya sebesar 109.000 an tentu saja tidak hanya dari pemilih beragama Kristen, tetapi justru didominasi oleh pemilih beragama Islam.

#### **b. Theodorus Koekerits di Jawa Timur**

Pendekatan terhadap tokoh-tokoh di daerah pemilihan yang dilakukan oleh Enggartiasto juga dilakukan oleh Theodorus untuk mendapatkan dukungan pemilih. Theodorus tidak memungkiri bahwa keterpilihannya menjadi anggota DPR RI di basis Islam yang kuat tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh lokal yang berhasil dipengaruhinya. Dengan dukungan para tokoh lokal seperti bupati, walikota, tokoh-tokoh agama juga menjadi bahagian yang memberikan dukungan kepada kemenangan.

Bahkan walaupun Theodorus tidak hadir di sebuah pertemuan, para tokoh itu mengkampanyekan dirinya untuk dipilih oleh rakyat. Terkait peran tokoh lokal itu, Theodorus menjelaskan,<sup>186</sup>

“Saya dikampanyekan oleh siapa saja: para pastor/imam (Katolik) berkampanye untuk saya. Pimpinan umat Protestan berkampanye untuk saya. Tokoh spiritual termasuk dukun yang tak jelas juga berkampanye buat saya. Tokoh Hindu juga berkampanye buat saya. Saya tidak bilang berapa harganya dua ribu suara itu. Tidak! Itu saja. Memang tokoh lokal mendukung saya. Saya tidak pernah bikin acara apel besar-besaran itu. Karena saya tidak

---

<sup>186</sup> Wawancara Koekerits.

punya uang! Tetapi ketika saya kumpulkan kader-kader, saya menggunakan uang saya.”

Penjelasan dari Theodorus ini sekali lagi memastikan bahwa sejumlah politisi Kristen menggunakan pendekatan ke kalangan tokoh-tokoh lokal untuk mendapatkan dukungannya. Tokoh-tokoh dimaksud seperti diungkapkan Theodorus di atas adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh di pemerintahan, tokoh agama, bahkan dukun sekalipun yang cukup berpengaruh di daerah pemilihannya. Padahal sebagaimana diketahui, bahwa tokoh-tokoh tersebut hampir kebanyakan bukan beragama Kristen tetapi justru beragama Islam. Tentu saja itu berarti bahwa setidaknya tokoh-tokoh agama Islam tidak menghalanginya untuk melakukan pendekatan kepada tokoh yang berbeda agama. Bahkan Theodorus bisa masuk dan diterima di kalangan tokoh-tokoh yang berbeda agama dengan caleg yang bersangkutan sebagai seorang Katolik, seperti tokoh agama Protestan dan tokoh agama Hindu.

### **c. Markus Nari di Sulawesi Selatan**

Pengaruh tokoh lokal juga dimanfaatkan oleh Markus Nari seorang caleg Kristen Protestan di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan III yang meliputi Kabupaten Sidenrangrapang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Pinrang, dan Palopo. Semboyan yang dipegang oleh Markus adalah bagaimana membawakan dirinya sebagai garam dan terang ke tengah seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Kehadirannya sebagai garam dan terang adalah kunci dirinya bisa diterima baik di kalangan Kristen baik Protestan maupun kalangan Katolik yang menjadi basis

utama sosialisasi dirinya tetapi juga kepada kalangan beragama non Kristen. Dalam sosialisasinya, Markus tidak pernah menonjolkan bahwa dia seorang Kristen atau tidak, tetapi yang dia maksimalkan adalah bagaimana dirinya hadir semampunya di tengah-tengah mereka dan berusaha membantu mereka atas persoalan yang mereka hadapi. Ketika kepada Markus disampaikan bagaimana keterpilihannya di Pileg 2009 dari daerah pemilihan di Sulawesi Selatan di basis Islam yang kuat padahal Markus itu seorang Kristen.<sup>187</sup>

Berpikir dan berkarakter sebagai garam dan terang adalah sama dengan memperjuangkan dan menonjolkan sikap pluralism terhadap masyarakat yang berbeda agama. Berpegang pada prinsip pluralisme tersebut, Markus bahkan dipercaya sebagai satu-satunya dalam sejarah politik di Kota Makassar Kristen menjadi Ketua DPRD Kota Makassar pada periode 1999-2004. Tentu saja melihat latar belakang agama Markus yang sangat minoritas hal itu tidak dimungkinkan di Kota Makassar yang sangat didominasi oleh masyarakat beragama Islam dan terkenal fanatic. Tetapi Markus mampu meraihnya yang tentu saja karena anggota DPRD yang lain di Kota Makassar tidak memandangnya sebagai seorang Kristen, tetapi memandangnya sebagai sosok yang mampu memimpin dan diterima oleh semua kalangan.

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Markus Nari, Anggota DPR RI Partai Golkar Periode 2009-2014 Jumat, 20 April 2012, pukul 11.35 wib, Di kantor Bebek Bali Kompleks Taman Ria, Senayan Jakarta. Markus terpilih pada Pileg 2009 berasal dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III (Sidenrangrapang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Pinrang, Palopo), Periode 2004-2009 Anggota DPRD Provinsi Sulaewsi Selatan dari Dapil Kota Makassar, Periode 1999-2004: Ketua DPRD Kota Makassar.

Terkait pengalaman bahwa orang Kristen bisa diterima di semua kalangan tersebut dijelaskan oleh Markus demikian,<sup>188</sup>

“Saya selalu melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di Kota Makassar misalnya, Makassar itu kota mayoritas Muslimnya besar sekali, sembilan puluh persen, kami Kristen itu hanya sepuluh persen. Tapi kenapa saya bisa menjadi Ketua DPRD Kota Makassar saat itu? Dulu saya Ketua DPRD Kota Makassar 1999-2004, lalu ke DPRD Provinsi 2004-2009, dan ke DPR RI sejak 2009. Dalam perjalanan di DPRD Kota Makassar itu, saya satu satunya orang Kristen yang bisa menjadi Ketua DPRD di Makassar. Keyakinan saya itu, sepanjang kita bisa berbuat untuk kepentingan misi kita itu, cita-cita itu, ya kita lakukan. Misi kekristenan kita itu harus bisa menjadi garam dan terang, harus bisa menjadi alat mereka untuk bertanya, hikmat dan kebijaksanaan.”

Tentu saja ada yang dilakukan oleh Markus sehingga masyarakat pemilih memberikan pilihannya kepada Markus yang seorang Kristen tersebut. Kepada Markus dikonfirmasi tentang apa yang dilakukannya ke tengah masyarakat sehingga warga mau memilihnya di Pileg 2009 itu dan terkait kemungkinan bahwa Markus mungkin juga sudah ditanamkan sejak dulu ke tengah masyarakat tersebut. Terkait dengan

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Markus Nari.

pertanyaan tersebut. Tentu saja Markus tidak mungkin berbicara omong kosong untuk meyakinkan pemilihnya. Menurut Markus perbuatan-perbuatan konkrit dia lakukan ke tengah-tengah masyarakat pemilih sebelumnya sehingga yang Muslim pun memilih dirinya. Bagi Markus, apa yang diperbuatnya itu tentu akan menjadi berita ke tengah keluarga-keluarga dan info tersebut beranak-pinak ke tengah-tengah keluarga yang didekatinya. Penjelasan Markus di atas mengisyaratkan bahwa Markus ketika Pileg 2009 pertamanya lebih mendahulukan pendekatan ke kalangan pemilih Kristen. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya sebagai seorang Kristen memungkinkannya untuk masuk lebih mudah dan lebih jauh ke tengah-tengah penduduk beragama Kristen. Walaupun tentu saja pendekatan tersebut tidak hanya dilakukan kepada orang-orang Kristen saja, tetapi juga kepada semua warga, termasuk yang beragama Muslim. Markus menjelaskan pendekatan tersebut dengan upaya-upaya yang konkrit yang dilakukannya ke masyarakat itu apa sehingga warga pemilih melihat Markus layak untuk dipilih.

Penjelasan Markus di atas menunjukkan bahwa pendekatannya kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti bupati, gubernur dimanfaatkannya untuk menghadapi persoalan-persoalan Gereja yang dialami oleh orang-orang Kristen di daerah pemilihannya. Hubungan kedekatan dengan para tokoh agama tersebut memungkinkan persoalan terkait mendirikan ijin Gereja menjadi lebih mudah didapatkannya. Bahkan sebagaimana dijelaskan di atas, pernah dalam sebuah pengurusan ijin dia mendapatkan sekaligus sejumlah 48 ijin IMB untuk mendirikan gereja. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Markus ini tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai

praktek politik patron klien sebagaimana dimaksudkan oleh James Scott. Sebab walaupun Markus berjuang mendapatkan 48 IMB tersebut, tidak ada keharusan bagi warga pemilih untuk memilih Markus, karena posisi Markus dengan warga gereja itu bukan antara posisi patron dan klien.

Mungkin posisi Markus dengan para tokoh gereja tersebut lebih pada perbuatan baik konkrit yang dilakukan oleh Markus dan sangat mungkin hal itu akan membuat para tokoh gereja mendorong para warga untuk memilih dirinya. Artinya kembali kepada figur dari Markus yang paling utama untuk ditonjolkan sebagaimana faktor figur yang dimaksudkan oleh Alan Ware dimana oleh perbuatan-perbuatan konkrit Markus yang diharapkan menggugah hati para pemilihnya yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik. Di daerah pemilihannya yang juga merupakan daerah yang mayoritas Islam, Markus pun melakukan pendekatan dan sosialisasi dirinya kepada masyarakat beragama Islam. Lalu apa dan bagaimana kedekatan Markus dengan pemilih beragama Islam? Markus menjelaskan apa yang dia lakukan kepada penduduk beragama Islam tersebut,<sup>189</sup>

“Iya saya orang Kristen, tapi saya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan Muslim. Saya turut membina HMI di Makassar. Saya bisa menjadi pembina mereka di luar struktur dan mereka bisa menerima saya. Itu sudah saya bina jauh-jauh sebelumnya. Sebelum saya menjadi anggota DPR di Makassar, saya itu

---

<sup>189</sup> Wawancara dengan Nari.

sudah bina kedekatan dengan HMI. Dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata Pak Markus ini seorang Kristen, “Kog dia lebih Islam daripada orang Islam?” Contohnya begitu, “Padahal dia orang Kristen.” Contohnya yang paling konkrit kemarin, ketika ada kongres HMI di sini (Jakarta), saya yang mengeluarkan biaya untuk mereka, saya mengongkosi mereka, saya membiayai mereka. Mereka kaget, “Lho kog yang Muslim ini mana. Kog?” Kenapa saya lakukan itu? Untuk kepentingan kita. Contohnya, ribut-ribut di Makassar, kalau ada ribut-ribut, dengan HMI saya sudah pasti ada di situ. Kalau ribut dengan gereja, saya hadir di situ dengan mereka. Pada saat gereja saya mau dibakar pada saat yang lalu, tahu yang jaga itu adek-adek HMI. Gereja tidak jadi dibakar oleh masyarakat.”

**Tabel 5. 8 Caleg Terpilih Dapil Sulsel III Pemilu 2009  
Kab. Sidenrang Rapang, Kab Enrekang, Kab Luwu, Kab  
Tana Toraja, Kab Luwu Utara, Kab Luwu Timur, Kab  
Pinrang, Kota Palopo  
BPP: 102.903 suara**

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara Caleg	Suara Partai
Partai Golkar (2 orang)	1	Idrus Marham	1	62.575	216.623 suara
	2	Markus Nari	4	29.436	
Partai Demokrat	3	Bahrum Daido	1	60.050	179.713 suara

<b>Partai Politik</b>	<b>No</b>	<b>Nama Caleg Terpilih</b>	<b>No. Urut Caleg</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>
(2 orang)	4	Timo Pangerang	2	30.470	
PAN	5	Amran	1	64.403	107.564 suara
PKS	6	Andi Rahmat	1	30.355	55.862 suara
Partai Hanura	7	Muchtar Amma	1	25.712	60.079 suara

Sumber: diolah dari “Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009” dalam [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id).

Sejarah politik Markus dimulai dari Ketua DPRD di kota Makassar 1999-2004, kemudian menjadi anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2004-2009, maka sangat jelas bahwa sesungguhnya Markus memiliki basis di sekitar Kota Makassar. Dan penjelasan dari Markus di atas menunjukkan bahwa dirinya justru dekat dengan kelompok mahasiswa Islam ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) justru yang berbasis di kota Makassar. Hubungan kedekatan yang dibangunnya dengan HMI yang sedemikian lama tentu akan berbeda ketika keterpilihannya menjadi anggota DPR RI yang sama sekali tidak masuk sebagai kota yang menjadi bahagian dari Daerah Pemilihannya di Sulawesi Selatan III.

Rupanya relasi Markus dengan terhadap kalangan basis Islam di Kota Makassar dengan keterpilihannya sebagai anggota DPR RI pada Pileg 2009 memiliki kaitan. Menyimak penjelasan Markus maka dapat dijelaskan bahwa pemilih dari Markus tersebut terdiri dari dua kelompok besar yakni kelompok beragama Kristen dan kelompok yang bukan



beragama Kristen, termasuk diantaranya kalangan beragama Islam. Pendekatannya ke kalangan Kristen seperti diuraikannya di atas dengan upaya mendapatkan ijin-ijin pendirian Gereja tentu saja menjadi sosialisasi dirinya kepada para pemilih beragama Kristen lewat tokoh-tokoh Gereja. Sementara kedekatan emosionalnya dengan kalangan individu dan organisasi beragama Islam sejak di Kota Makassar tentu saja menjadi sosialisasi dirinya ke tengah-tengah penduduk beragama Islam sebagaimana disampaikannya di atas.

Markus meyakini bahwa basis pemilihnya tidak bisa dikatakan apakah Islam saja atau orang Kristen saja, tetapi pemilih yang merupakan gabungan dari keduanya, baik pemilih beragama Islam maupun beragama Kristen. Markus menjelaskannya demikian,<sup>190</sup>

“Gabungan keduanya, tapi mayoritas Kristen karena saya menyatukan mereka. Ada Hindu Bali di sana di Luwu Timur. Itu harus ada strategi kita untuk kita bisa terima kita, sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai anak. Sehingga semboyan saya: “*ya mote anak mi, ya mote siuluk mi, ya mote ampo mi* (artinya saya ini adalah anak, saya ini adalah saudaramu, saya ini adalah cucumu, saya ini sebagai orang tuamu.) Terimalah saya sebagai keluarga besar di situ. Itu yang saya lakukan. Itulah satrategi yang saya lakukan.”

Pengakuan Markus di atas menunjukkan bahwa pendekatan yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan juga dari

---

<sup>190</sup>Wawancara dengan Nari.

pendekatan terhadap budaya lokal yang berada di sekitarnya, yakni bagaimana dirinya bisa diterima sebagai saudara, sebagai orang tua, dan sebagai seorang anak. Pendekatan terhadap tokoh lokal yang digunakan oleh Markus di atas, walaupun dalam format dan isi yang berbeda dengan para politisi Kristen yang lain menunjukkan bahwa memang politisi Kristen merasa efektif dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh lokal. Setidaknya Markus, Enggartiasto, dan Theodorus adalah contoh politisi Kristen yang melakukan pendekatan kepada tokoh lokal, dan benar pendekatan itu efektif menghantarkan mereka menjadi anggota DPR RI terutama ketika menghadapi sistem Pemilu proporsional terbuka pada Pileg 2009 yang mengandalkan kemampuan sosialisasi diri pribadi dari caleg yang bersangkutan untuk dikenal oleh masyarakat pemilih.

## **2. Konsistensi Bakti Sosial Pengobatan Gratis**

Strategi lain yang digunakan oleh para caleg beragama Kristen untuk meraih simpati para pemilih beragama Islam adalah melakukan pendekatan dengan melakukan bakti social di daerah pemilihannya. Pelaksanaan baksos ini misalnya dilakukan oleh Ribka Tjiptaning seorang caleg beragama Kristen Protestan. Pada Pileg 2009, Ribka melakukan baksos di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, (dan Kabupaten Cianjur pada Pileg 2004). Pendekatan dengan sesering mungkin melakukan bakti social ke tengah masyarakat akhirnya membuat kelompok masyarakat yakin bahwa caleg tersebut adalah bahagian yang penting dalam kehidupan mereka. Kesadaran akan pentingnya bakti social ini dilakukan untuk meyakinkan pemilih bahwa kehadiran caleg beragama Kristen tidak semata-mata untuk meraih suara di saat

pemilihan umum, tetapi juga untuk meyakinkan mereka bahwa kehadiran politisi justru untuk membantu kehidupan masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan ini menjadi bukti dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, sebagaimana ditegaskan oleh Anne Philips tentang tanggung jawab dari wakil rakyat. Anne Philips menegaskan pentingnya patokan bahwa pencerminan atau keterwakilan deskriptif sebagai penegasan akan pentingnya mempertanyakan apa yang perwakilan sudah lakukan untuk pemilihnya, lebih dari sekedar mengetahui siapa yang terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut Philips, keterwakilan sesungguhnya justru pada level tanggungjawab terhadap pemilih, sesuatu yang tidak dapat dispesifikasi. Kualitas keterwakilan ditentukan oleh seberapa kuat mekanisme akuntabilitas mengikat para politisi sungguh dekat dengan opini yang mereka sampaikan terhadap pemilih, dan seberapa kuat opini tersebut menyentuh kepentingan langsung warga pemilih.

Menurut Ribka, dirinya merasa penting melakukan baksos ke tengah masyarakat karena dia sendiri menyadari bahwa baksos menjadi sarana bagi dirinya untuk bisa menyapa dan bertemu dengan para warga di daerah pemilihannya. Tidak peduli apakah warga itu kelak akan memilihnya atau tidak. Pendekatan seperti ini menjadi sangat penting karena Ribka menyadari bahwa dirinya mengalami empat tantangan sekaligus ketika harus mendaftarkan diri, tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan para

pesaingnya. Terkait empat tantangan tersebut, Ribka menjelaskan,<sup>191</sup>

“Aku bukan Sunda, aku Jawa; aku bukan Islam, aku Kristen; aku perempuan, nggak bisa nomor satu; anaknya PKI dianggapnya. Sukabumi Itu kan basisnya Masyumi. Tapi, saya orasi dimana-mana, tidak ada yang bilang supaya saya turun karena saya Kristen. Tidak ada orang Kristen lain yang berani menggantikan posisiku di Sukabumi. Ketika aku jadi terpilih, Mas Taufik Kiemas bilang, “Gila juga Ning ini!”

Tentu menjadi kebijakan partai untuk menempatkan Ribka di basis yang menurut kaca mata orang banyak Ribka tidak akan sanggup meraih kursi DPR dari dapil tersebut. Di sini telah terjadi kebijakan partai di luar dari pemikiran umum orang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Ware, terkait penentuan kandidat yang akan diusung, maka partai melakukan seleksi yang tersentral yakni mengikuti hukum umum sebagaimana diatur oleh partai secara detail. Dalam hal ini partai memiliki kebijakan tertentu untuk menempatkan seseorang calon di basis tertentu dengan pertimbangan dan pemikiran yang sudah sangat matang. Namun terkait pencalonan di luar kebiasaan umum atas seorang caleg, Alan Ware juga memberikan pandangan bahwa selain hukum yang

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Ribka Tjiptaning, Anggota DPR RI PDI Perjuangan Pileg 2004 dan Pileg 2009 dari Dapil Jabar IV: Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, (dan Kabupaten Cianjur Pileg 2004), Selasa, 10 April 2012, Pukul 12.55 wib di Ruang Rapat Pimpinan Komisi 9 DPR RI Lt. 1.

sudah umum, ada juga seleksi yang tidak tersentral yang merupakan kebijakan dari partai yang tidak tersurat secara jelas. Terkait dengan hal ini, Alan Ware menjelaskan kemungkinan adanya peluang bagi calon-calon yang diunggulkan atau calon-calon yang maju tidak mengikuti hukum yang umum tetapi merupakan pertimbangan saja dari pengambil kebijakan untuk penentuan calon tersebut.

Tantangan yang tidak ringan yang harus dihadapi oleh Ribka tersebut membuatnya harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan para caleg lain yang tidak memiliki tantangan sebesar dirinya. Dan menurut penjelasan di atas, pendekatan yang dilakukannya sangat efektif dan berhasil. Empat tantangan yang disebutkan di atas yakni suku, agama, tempat tinggal, dan garis PKI yang melekat dalam dirinya menjadi tantangan yang tidak ringan baginya. Karena itu upaya yang harus dilakukannya adalah meyakinkan para pemilih bahwa dirinya memang layak untuk diterima di daerah pemilihannya di kabupaten dan kota Sukabumi, Jawa Barat.

**Tabel 5. 9 Caleg Terpilih Dapil Jabar III Pemilu 2004  
Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur BPP:  
215.060 suara**

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara	Keterangan
Partai Golkar (4 kursi)	1	Tonny Apriliani	1	69.926	Suara Caleg nomor 1 hanya di urutan ke- 3 terbesar dari 4 caleg Partai Golkar terpilih
	2	Deding Ishak	2	86.762	
	3	Dewi Asmara	3	87.568	

	4	Adiwarnito Adinegoro	4	43.312	
PDI Perjuangan (2 orang)	5	Amris Fuad Hasaan	1	36.691	
	6	Ribka Tjiptaning	2	28.490	
PPP (2 kursi)	7	Chairul Anwar Lubis	1	43.025	Suara no urut 2 lebih tinggi dari no urut 1
	8	Lukman Hakim	2	46.242	
PKS	9	Djalaluddin Asyasyatibi	1	43.386	
Partai Demokrat	10	Syarif Hasan	1	20.646	
PAN	11	Sayuthi Asyathri	1	10.395	Caleg No urut 3 mendapat 15.017 suara

Sumber: Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009

Penerimaan atas dirinya itu bisa langsung dirasakan oleh Ribka dari keakraban dan sapaan yang diterimanya dari warga. Dengan menampilkan dirinya sebagai dokter yang melayani masyarakat, Ribka bisa dengan santai dan bebasnya memberikan bakti social kepada masyarakat luas di daerah pemilihannya. Ribka menceritakan salah satu perannya dalam melaksanakan bakti social sebagai seorang dokter. Dengan penerimaan yang cukup tinggi terhadap dirinya, Ribka sangat yakin bahwa warga yang selama ini dilayaninya akan memilih dirinya dalam Pileg 2009 tersebut. Karena itu, ketika pemungutan suara pada Pileg 2009, Ribka sangat yakin bahwa dirinya bakal terpilih. Karena itu Ribka tidak perlu mengawal secara melekat perolehan suaranya di daerah pemilihannya

ketika sudah maju dari TPS ke PPK, dari PPK ke Kabupaten/Kota, dan selanjutnya ke Provinsi dan rekapitulasi terakhir di tingkat nasional di Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keyakinan diri Ribka bahwa dirinya akan terpilih menjadi Anggota DPR RI tidak terlepas dari upaya melakukan pendekatan lewat jalur bakti social di bidang kesehatan kepada masyarakat warga. Padahal bila dibandingkan dengan para pesaingnya, Ribka justru tidak mengeluarkan uang banyak pada hari-hari menjelang pemungutan suara, situasi yang berbeda tentu saja dengan para caleg-caleg lain yang bahkan bermain uang untuk meyakinkan pemilihnya. Tetapi walaupun demikian, melihat kedekatan Ribka dengan para pemilih yang menurutnya sudah terjalin hubungan emosional yang kuat di antara dirinya dengan para masyarakat warga, Ribka sangat yakin upaya melakukan baksos lewat pengobatan gratis akan tetap efektif dan tepat guna. Karena itu dirinya jika diizinkan untuk memilih, maka akan tetap memilih untuk tetap menjadi caleg dari daerah pemilihan tersebut di Pemilu-Pemilu berikutnya. Ribka menjelaskan semuanya itu demikian,<sup>192</sup>

“Kemarin 2009 itu kan bertarung dengan suara terbanyak, kalau kita tidak menanam di basis dengan akar yang kuat dari awal, atau harus kuat duit sebagai jalan terakhir main di tikungan. Tinggal dua: yang menang yang benar-benar jadi, kalau dia akarnya tidak kuat, ya memang duit kuat. Kalau aku disuruh

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Tjiptaning.

memilih lagi, saya tetap pilih di dapilku yang sekarang karena di dapilku saya sudah punya rumah sakit tanpa kelas. Aku bikin rumah sakit, namanya Pelita Rakyat. Bagaimana membuat kita supaya tidak fanatik dengan agama kita. Bagaimana supaya orang Muslim berpikir tidak fanatic Islam di daerah muslim, dan orang Kristen tidak fanatic Kristen di daerah Manado misalnya. Sehingga di Manado misalnya, mereka tidak hanya bicara Injil.”

Penjelasan Ribka menjadi jawaban dari keyakinannya bahwa memang sejak awal setiap politisi yang ingin menang sudah harus memiliki akar yang kuat di pemilihnya. Ribka juga setidaknya memberikan pemahaman bahwa garis keturunan dari suku, agama, tempat tinggal, dan keturunan PKI sebagai yang berbeda dari daerah pemilihannya tidak menjadi halangan bagi siapapun politisi untuk merebut simpati rakyat. Bahkan upaya yang ditunjukkan oleh Ribka tidak hanya mendekati para pemilihnya di saat menjelang Pemilu saja, tetapi menjaga dan merawatnya secara terus menerus. Ribka membuktikan bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang adalah perbuatan yang konkrit menguntungkan mereka. Ikatan suku, agama, jenis kelamin, masalah tempat tinggal yang berbeda bisa diatasi dengan perbuatan konkrit dan terus menerus kepada masyarakat pemilih.

Ribka sudah merasa sangat pas dan kerasan menjadi caleg dari daerah pemilihan Sukabumi yang sekarang. Ribka menceritakan pengalamannya ketika Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menawarkannya untuk



pindah ke daerah pemilihan lain, tetapi kemudian ditolak olehnya. Alasannya sangat jelas yakni Ribka sudah merasa diterima di dapilnya yang sekarang dan akan terus merawatnya, sesuatu yang belum tentu akan tepat penerimaan terhadap dirinya bila hal itu dilakukan di daerah lain seperti Tangerang, misalnya.

Penjelasan Ribka di atas menjelaskan sisi lain dari keberadaannya di dapilnya selain hanya sekedar baksos, yakni sisi pluralsime. Bagi Ribka, keberadaannya dapat diterima di daerah pemilihannya adalah bukti pluralism, karena empat beban seperti yang dijelaskan di atas dan ditegaskan oleh Taufik Kiemas suami dari Megawati Soekarnoputri yang menjadi beban yang harus dipikul oleh Ribka. Sisi plural itu dijelaskan di atas dimana keberadaan dirinya yang seorang Jawa dan Kristen tentu tidak akan bisa senantiasa berlaku di dapil tersebut bila dirinya sampai meninggalkan daerah pemilihan itu. Maka akan kembali kepada prinsip primordialisme yang lama, yakni harus Sunda dan harus Islam, dua paham yang bisa diruntuhkan oleh Ribkia. Termasuk bila dirinya menjadi caleg dari Banten, yang belum tentu juga penerimaan yang dialaminya di dapilnya daerah Sukabumi akan sama dengan penerimaan terhadap dirinya di daerah Banten.

Salah satu bukti dari upayanya untuk menjaga dan merawat terus menerus hubungannya dengan konstituen tersebut adalah membuka sebuah rumah sakit yang terbuka untuk umum di daerah Sukabumi. Ribka menamai rumah sakit yang disiapkan untuk siapa saja masyarakat itu dengan nama Rumah Sakit Pelita Rakyat bertempat Jl.Pelabuhan II no. 262 Kel. Situmekar, Kec. Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa

Barat. Ribka setiap hari membuka rumah sakitnya yang terbuka untuk siapa saja, tidak hanya untuk masyarakat pemilihnya atau masyarakat PDI Perjuangan, tetapi untuk siapapun rumah sakit itu terbuka. Sebagaimana disampaikan oleh Suster Mila, salah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut,<sup>193</sup> Ribka menyediakan di sana satu orang dokter, dan dua orang suster perawat yang setiap hari bertugas di sana. Ribka sendiri berkunjung ke rumah sakit tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dan setiap hari puluhan bahkan ratusan warga yang datang selalu ke rumah sakit tersebut untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat.

Apa yang dilakukan Ribka tersebut di daerah berbasis Islam yang kuat bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan Clifford Geertz yang mengedepankan aspek primordialisisme dalam politik. Ribka menunjukkan bahwa primordialisisme politik bisa diimbangi bahkan diatasi lewat karya-karya karitatif yang konkrit menyentuh kehidupan masyarakat luas. Teori Geertz untuk penelitian ini menjadi tidak terlalu tepat ketika masyarakat pemilih yang menganut aspek agama Islam sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari justru menerima caleg non Islam karena karya karitatif konkritnya kepada masyarakat luas. Setidaknya apa yang dilakukan Ribka itu, dalam keyakinan Ribka akan mampu merebut simpati dari masyarakat pemilihnya selain juga memiliki makna sosialnya untuk kepentingan masyarakat

---

<sup>193</sup> Penjelasan disampaikan oleh Suster Mila, perawat di Rumah Sakit Pelita Rakyat bertempat Jl.Pelabuhan II no. 262 Kel. Situmekar, Kec. Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.melalui telepon pada hariu Kamis, 26 April 2012 sekitar pukul 14.35wib.

luas. Selain melakukan pengobatan gratis, Ribka juga mengunjungi sejumlah kelompok kategorial. Terhadap para kelompok kategorial tersebut, Ribka melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan mereka, selain tentu saja membawa misi yang menjadi keahliannya sebagai seorang dokter yakni pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Namun sangat disayangkan oleh Ribka bahwa keberadaan dan kehadiran dirinya sebagai seorang Kristen belum bisa meyakinkan para pengurus partainya di tingkatan lebih rendah untuk menerima orang-orang Kristen yang lain sebagai pengurus partai. Ribka masih terus merasa bahwa sesungguhnya di tingkat akar rumput itu, keberadaan dan kehadiran orang-orang yang karena agamanya Kristen masih belum bisa diterima baik. Bahkan Ribka mengakui bahwa tidak ada satu pun pengurus PDI Perjuangan di tingkat kabupaten atau kecamatan yang masuk menjadi pengurus partainya. Padahal jumlah dan keberadaan masyarakat Kristen di daerah pemilihannya tersebut tidak sedikit. Terkait pendekatannya dengan kelompok kategorial lain dan keberadaan jumlah orang Kristen yang sesungguhnya tidak sedikit di daerah pemilihannya dijelaskan oleh Ribka demikian,<sup>194</sup>

“Hari Nelayan 5 April kemarin, sehari sebelumnya aku kumpulkan pendeta-pendeta. Ada 35 sekte gereja. Gereja Pasundan itu umurnya sudah 100 tahun lebih, Gereja Katoliknya besar. Tapi Islamnya tidak bisa menerima mereka di struktur kepengurusan.

---

<sup>194</sup> Wawancara Tjiptaning.

Tapi ketika aku yang muncul, struktural partai tidak ada yang berani tolak, karena aku terus ke bawah. Aku masuk ke daerah-daerahnya. Orang-orang tidak lihat apakah Ning ini Kristen atau tidak, tapi karyanya. Jadi jangan ketika mau mulai Pemilu baru turun, tapi sudah harus dirawat terus.”

Apa yang dilakukan oleh Ribka dan polistis Kristen lain seperti Maruarar yang bisa diterima secara luas di tengah masyarakat Sunda yang sangat kuat pengaruh agama Islam harus menjadi contoh bagi orang-orang Kristen yang lain. Ribka melihat bahwa tidak sulit untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat walaupun berbeda suku dan agama. Yang terpokok adalah berbuat secara konkrit ke tengah-tengah mereka. Buktinya Ribka bersama Maruarar yang juga menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini dapat diterima secara luas di tengah masyarakat tersebut. Terkait dengan pandangan tersebut, Ribka menjelaskan,<sup>195</sup>

“Jadi kalau bicara keterwakilan Kristen itu sendiri karena memang orang seperti Maruarar itu turun terus kepada masyarakat di Subang. Sampai Eep Bupati Subang mau datang perayaan Natal, mau nyanyi Malam Kudus dan menyalakan lilin. Orang Kristen itu harus begitu seperti Maruarar. Tapi kalau gaya orang Kristen *petentang-petenteng*, dia tidak menjadi

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Tjiptaning.

garam. Aku masuk ke pesantren-pesantren, ke NU-NU.”

Selain masuk ke kalangan masyarakat luas dengan pelayanan kesehatan yang menjadi sektor utama bidang Ribka, tidak sungkan bagi Ribka juga untuk masuk ke tengah kalangan-kalangan tokoh agama Islam. Bahkan dirinya masuk ke pesantren-pesantren dan diterima di sana. Bagaimana Ribka bisa diterima sungguh-sungguh, apakah mereka tidak tahu Ribka Kristen? Ribka menjelaskan bahwa tentu saja mereka tahu tentang identitasnya seluruhnya. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena kehadirannya justru untuk membantu kesehatan masyarakat luas. Ribka menjelaskan,<sup>196</sup>

“Mereka tahu saya Kristen. Sukabumi itu bukan basis PDIP tapi Masyumi. Empat bebanku yang diawal itu tadi harus kupikul. Begitu terpilih di DPR ini, malah sekarang saya di DPR ini bisa dua periode sebagai ketua komisi . Yang kulakukan ke masyarakat cuma pelayanan kesehatan, turun aja ke tengah mereka, nggak perlu bayar-bayar. Teman-teman sering tidak merawat konstituen. Waktu mau pileg, baru turun. Sekarang saya punya Posko Rumah Sakit tanpa kelas, anakku direktornya di sana. Pokoknya rumah sakit ibu Mega gratis! Sekarang saya tinggal memoles saja!”

---

<sup>196</sup> Wawancara dengan Tjiptaning.

Begitu melekatnya kehadiran Ribka kepada masyarakat di daerah pemilihannya, sehingga masyarakat tidak menginginkannya pindah ke daerah pemilihan lain kelak. Selain merawat hubungannya dengan pemilih, Ribka juga menjaga relasinya yang dekat dengan para pengurus partainya di tingkat kabupaten kota dan kecamatan yang masuk ke dalam dapilnya. Bahkan para pengurus partai di tingkat lebih rendah seperti di kabupaten dan kecamatan juga masih mengharapkannya untuk terus menjadi caleg dari daerah pemilihan Sukabumi.

Ribka menceritakan bagaimana para pengurus partai tersebut memintanya untuk selalu bersama mereka bila menjadi caleg kelak. Penjelasan Ribka di atas sedikit banyaknya menunjukkan bahwa Ribka mengedepankan jiwa nasionalisme sebagaimana dimaksudkan oleh George McTurner Kahin terkait pentingnya jiwa nasionalisme terus menerus dipertahankan dan dipelihara sebagai perekat kesatuan berbangsa di atas kepentingan primordial. Terkait dengan penguatan jiwa nasionalisme Kahin tersebut oleh partai politik sebagaimana ditegaskan oleh Burhan Djibir Magenda, maka partai politik memiliki peranan penting untuk memperkuat basis nasionalisme tersebut. Perilaku konkrit dari Ribka Tjiptaning tentulah justru bukti dari nasionalisme yang dianut oleh Ribka dan PDI Perjuangan karena tidak melihat warga yang dilayaninya dari sudut pandang primordialisme agama dan primordialisme suku. Ribka Tjiptaning membuktikan jiwa nasionalisme itu dengan membuka pelayanan kesehatannya kepada siapapun warga tanpa kecuali, bukti penguatan nasionalisme sebagaimana dimaksudkan oleh Kahin dan Magenda di atas.

Jiwa nasionalisme Ribka itu ditunjukkan juga bahwa selain sudah memiliki rumah sakit gratis, Ribka juga mengunjungi daerah-daerah pemilihannya secara kontinu. Dengan sangat intens dan terus menerus, Ribka mengunjungi daerah pemilihannya. Ribka menjaga dan merawat secara teratur dengan pengobatan gratis yang menjadi bisnis utama politik. Jika menghitung berapa kali Ribka melakukan kunjungan ke seluruh kecamatan di daerah pemilihannya, maka bisa dihitung bahwa dalam setiap sebulan Ribka harus mengunjungi delapan titik/kecamatan. Kunjungan itu dilakukannya secara intens kepada seluruh PAC di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Betapa intensnya kunjungan tersebut dilakukan oleh Ribka, dijelaskannya demikian,

“Jadi jangan menunggu saja menjelang Pemilu! Tiap sebulan itu saya agendakan turun ke 8 titik PAC karena ada 54 PAC. Dari mulai dilantik sampai sekarang, begitu terus lalu mutar lagi. Sejak 2004, lalu mutar lagi. Dulu 2004 sebelum kita kehilangan Cianjur, ada 85 PAC, sekarang tinggal 54. Kuncinya ada di kitanya juga. Kalau kita menjadi caleg, kita tinggal memoles aja kan. Nggak bingung harus bikin baliho. Turun aja lagi, sesudah itu tanamannya sudah jadi. Itu yang kulakukan! Pada 2009, saya hanya bikin 100 baliho. Jadi setiap kecamatan itu tidak sampai 2, karena ada 54 PAC. Tapi Pak Sukmaja orang PKS itu bilang, “Ohhh, Mbak Ning memang nggak ada gambarnya, tapi lihat saja nanti hasilnya.”

Pengalaman Ribka mengobati pasien-pasiennya secara gratis dimanfaatkan oleh Ribka dan timnya untuk juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya. Ribka menceritakan bagaimana pengalaman mereka dalam mengobati pasien-pasiennya secara gratis tersebut sambil memasukkan pendidikan politik itu demikian,<sup>197</sup>

“Waktu baksos, beberapa orang bapak-bapak dan ibu-ibu bilang, “Ibu saya di tolak di rumah sakit.” Lalu sambil melayani baksos, anakku ngomong, “Negara masih gagal merawat rakyatnya, makanya bapak-bapak harus jaga kesehatan”. Begitu, sambil ngomong sambil merawat pasien sekaligus memberi pendidikan politik bagi rakyat.”

Pengalaman lain dalam mengobati pasien terkait posisinya sebagai seorang dokter dirasakan Ribka sebagai pengalaman kedekatannya dengan pasien. Walaupun pasien mendapat obat yang sama yang dibagikan oleh caleg yang lain, namun karena posisinya sebagai seorang dokter menguntungkannya untuk lebih meyakinkan kepada penduduk terkait pengobatan yang dilakukannya.

Selain merawat hubungannya dengan warga di daerah pemilihannya, Ribka juga memelihara relasinya dengan para pengurus partainya di tingkatan yang lebih rendah, entah di kabupaten kota maupun di kecamatan. Baginya, pengurus di tingkat paling rendah termasuk pengurus di tingkat ranting atau kecamatan tidak bisa disepelekan. Mereka harus diperlakukan

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Tjiptaning.



sama dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota karena sejujurnya mereka yang bekerja di tingkat ranting atau kecamatan itu yang bekerja secara konkrit untuk rakyat. Pemikiran itu disampaikan oleh Ribka terkait bagaimana dirinya menjaga dan memelihara hubungannya dengan para pengurus ranting. Ketegasan Ribka terkait kebijakannya di atas menunjukkan bahwa Ribka merasa sangat berharga dan penting untuk memperlakukan para pengurus partainya di tingkat yang paling rendah. Keterpilihannya ke tengah-tengah pemilihnya di daerah pemilihannya adalah buah dari upaya yang juga diusahakan oleh para pengurus ranting di tingkat terbawah tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Ribka dengan berbasis pada pengobatan gratis ke tengah masyarakat sampai sekarang masih dilakukannya. Pengobatan gratis itu menjadi sarana bagi dirinya untuk menyapa, memperkenalkan diri, dan melakukan tindakan kemanusiaan bagi masyarakat luas. Ribka sangat yakin bahwa di Pemilu 2014 nanti dirinya tidak akan susah untuk meyakinkan pemilih bahwa dirinya masih layak untuk dipilih menjadi anggota DPR RI periode berikutnya.

### **3. Pembangunan Fisik Sarana Umum**

Pendekatan lain yang dilakukan oleh politisi Kristen sehingga terpilih menjadi anggota DPR RI di basis Islam yang kuat adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara konkrit oleh rakyat banyak. Pembangunan itu menjadi kesempatan dan sarana untuk memperkenalkan diri mereka sebagai caleg yang layak untuk dipilih. Tujuannya untuk merebut simpati rakyat supaya memilih dirinya sendiri. Sarana dan prasarana tersebut menyangkut jalan raya, air minum, pembangunan masjid dan ruang ibadah lainnya.

Dalam pandangan para anggota DPR beragama Kristen tersebut, upaya itu sangat efektif dan membuat mereka menjadi lebih dekat dengan masyarakat luas.

Enggartiasto anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu misalnya, sangat memperhatikan urusan sarana dan prasarana untuk daerah pemilihannya. Padahal dia tentu tidak bisa menutupi identitasnya sebagai seorang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen Protestan. Memang menurut Enggartiasto, mungkin saja warga tidak pernah bertanya kepada dirinya apakah dia seorang Kristen atau tidak, tetapi dari segi postur wajah dan tampilan fisiknya yang seorang keturunan China, Enggartiasto tidak mungkin menyembunyikan identitasnya. Namun walaupun demikian, Enggartiasto tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, bahkan termasuk membangun sarana dan prasarana yang terkait dengan urusan rumah ibadah seperti masjid.

Maka ketika ditanyakan kepada Enggartiasto apakah masyarakat di daerah pemilihannya tahu bahwa dirinya adalah seorang Kristen dan mengapa mereka bisa menerima, Enggartiasto menjawab,<sup>198</sup>

“Iya, bagaimana muka saya tidak kayak orang Arab, *kog!* Orang bertanya, “Ini China?” Ya, ini China. China memang! Saya tidak pernah bilang, “Bukan, saya keturunan Jawa, keturunan Arab.” Tidak mungkin saya bilang begitu. Cuman mereka rupanya jadi segan

---

<sup>198</sup> Wawancara dengan Lukito.

juga, tidak berani pula tanya kepada saya. Ada kelompok tarekat yang menyebut saya Haji Enggar. Iya doanya itu, saya terima kasih saja ada orang mendoakan. Tetapi saya mengatakan bahwa saya membangun musholla dan masjid lebih banyak daripada dia. Saya mau mengatakan, itulah saya. Tetapi apakah berdosa saya menyumbang itu? Saya juga sumbang kegiatan Gereja. Karena realistis saja, daerah sana itu paling banyak tempat ibadah. Mereka juga berpikir-pikir, ini apa ini? Nggak apa-apa. Habis proposalnya begitu banyak, masak kita nggak bantu.”

Daerah pemilihannya yang terdiri dari 3 kabupaten/kota (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) termasuk luas yang terdiri dari sekitar 600 desa dan 69 kecamatan. Walaupun demikian, semua daerah pemilihannya itu dia kunjungi secara rutin. Pembangunan fisik jalan atau kebutuhan konkrit yang lain sejauh mungkin diupayakannya. Usaha yang dilakukan Enggar itu dijelaskannya demikian,<sup>199</sup>

“Di sana semua total kecamatan saja ada 69 kecamatan, desa itu ratusan, hampir 600 desa, dan saya keliling. Saya berbicara dan saya menyatakan, saya menuntut Bupati yang juga Ketua Golkar Indramayu, “Eh, dulu saya bantu ini semua dan *not a single sen* saya terima, tidak terima penghargaan, tidak terima *fee*.”

---

<sup>199</sup> Wawancara dengan Lukito.

Bahkan saya datang nyumbang Golkar, setiap ada acara Golkar saya hadir, selalu nyumbang. Satu saja permintaan saya, *you* cerita apa adanya dan cerita tentang saya.” Ya sudah, dia melakukan dan kampanye untuk saya, “Jalan ini dibikin karena Enggar anggota DPR RI Golkar”, lalu dengan bahasa daerah, “kalau tidak ada Enggar, tidak ada jalan ini.” Lalu dipilih. Saya berbicara dengan hal-hal yang riil di sana, itu yang kita lakukan, dan saya tidak mau membedakan.”

Pengakuan Enggartiasto di atas sejalan dengan pengakuan Anne Philips dimana yang terpenting bagi pemilih adalah apa yang sudah dilakukan oleh wakil terhadap rakyat yang diwakilinya sebagai hal yang terpokok, bukan terkait siapa atau pada tokoh bagaimana yang sudah terpilih duduk di kursi legislatif. Menurut Philips, perilaku konkrit dari si wakil jauh lebih penting daripada mengetahui siapa-siapa yang terpilih. Enggartiasto membuktikannya dengan pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak serta merta hanya pada saat menjelang Pemilu saja, tetap menjadi kegiatan yang berlangsung rutin sepanjang tahun. Bagi Enggartiasto, hal itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut tetap dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat luas. Salah satu diantaranya adalah memastikan jalan raya Pantura di daerah pemilihannya harus selalu mulus terutama menjelang lebaran. Enggartiasto memberi perhatian sangat serius terkait dengan jalan raya di Pantura tersebut yang menurutnya menjadi sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sangat luas, baik beragama

Muslim maupun non Muslim yang juga menikmati masa Lebaran tersebut.

Terkait dengan perhatiannya yang sangat serius ke wilayah Pantura, Enggartiasto menjelaskan,<sup>200</sup>

“Untuk itu saya kerja keras dan kerja keras bukan hanya pada waktu Pemilu. Selama saya jadi DPR di komisi lima, Pantura itu saya tidak mau pada waktu Lebaran Pantura berlobang. Saya tidak mau di daerah saya Cirebon dan Indramayu itu jalan tidak beres. Saya dorong semua anggaran masuk ke situ. Terjadi berita sedikit di surat kabar mengenai makan nasi aking, saya turun. Jadi tidak ujug-ujug di situ. Saya datang. Bukan hanya karena nomor urut 1 tapi juga karena suara terbanyak.”

Selain memperhatikan jalan raya di wilayah Pantura, satu contoh lain yang dilakukan oleh Enggaritasto adalah melakukan pembangunan sarana pompa air yang menjadi bahan pendamai bagi dua desa yang selalu berseteru selama puluhan tahun. Menurut Enggaritasto, terdapat dua desa yang sejak dahulu sudah sering ribut dan bunuh-bunuhan hanya karena tidak memiliki sarana air, terutama di kala musim kemarau tiba. Tetapi ketika dirinya menggagas pembangunan sarana berupa pompa air, tidak pernah terjadi lagi pertikaian itu sampai saat ini.

Maka atas gagasan dan usahanya tersebut, semua penduduk desa dirasakannya mengingat perbuatan baik

---

<sup>200</sup>Wawancara dengan Lukito.

Enggartiasto itu terus menerus dan mengucapkan terima kasih kepadanya, yang terbukti dari perolehan suaranya di daerah tersebut ketika Pileg 2004 dan Pileg 2009 lalu. Terkait dengan upaya pembangunan sarana pompa air tersebut, Enggartiasto menjelaskan,<sup>201</sup>

“Dua desa dari waktu ke waktu saling bunuh karena urusan air di masa kemarau. Apa yang harus saya lakukan. Dalam kapasitas saya sebagai Komisi V di panitia anggaran, saya membujuk dirjen PU untuk membantu pompa air. Saya tidak menyerahkan, saya memfasilitasi, setelah itu dirjen menyerahkan kepada Bupati. Bupati menyerahkan kepada masyarakat di sana sesuai dengan mekanisme dan ada tanda terima. Saya tidak korup. Tetapi saya cuman bisik-bisik bahwa tolong disampikanlah bahwa saya yang mengurus. Kampanye mereka untuk saya, bukan waktunya kampanye, “Pompa ini adalah permintaan dari anggota DPR Golkar Pak Enggar.” Mulai dari bupati, dirjen semua kampanye untuk saya. Rakyat itu cium tangan saya, karena berhentilah sejak saat itu saling bunuh, karena musim itu kemarau. Jadi begitu kemarau, polisi turun karena tawuran dan bunuh-bunuhan. Saya pikir, bagaimana solusi saya harus kasih?”

---

<sup>201</sup> Wawancara dengan Lukito.

Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Enggariasto tersebut tentu saja akan tetap diingat oleh masyarakat dan tentu saja akan membuat dirinya tetap diterima di kalangan masyarakat pemilihnya yang mayoritas mutlak beragama Islam. Maka bila dilihat dalam teori politik James Scott terkait patron klien, terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh Enggariasto tersebut bisa dikatakan sebagai perilaku dari patron yakni Enggariasto terhadap para warga sebagai klien yang sudah selama bertahun-tahun bertikai bahkan bunuh-bunuhan. Bila saja Enggariasto sebagai patron tidak senantiasa memelihara pompa air itu terus menerus untuk warga maka tentu saja warga tidak selalu memilih Enggariasto, dan sebaliknya bila saja warga tidak memilih Enggariasto maka pompa air itu belum tentu akan terpelihara terus menerus. Artinya sangat kuat diduga bahwa faktor patron-klien dari James Scott berjalan dalam proses keterpilihan Enggariasto tersebut.

Enggariasto memang mengalami bukti-bukti dari dukungan tersebut dirasakannya dari simpati warga yang diterimanya dalam saat-saat menjelang Pemilu. Salah satu diantaranya adalah dukungan dari kalangan organisasi Muslim ketika dirinya mengalami upaya-upaya dari kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengannya di masa menjelang Pemilu. Enggar menjelaskan,<sup>202</sup>

*“Diehard* relawan saya lebih dari 1000 orang. Gambar saya dicopot dan itu karena di situ bukan fitnah, tapi pembusukan, China Kristen dan itu segala macam. Dan yang memburu ini

---

<sup>202</sup> Wawancara dengan Lukito.

anak anak Ansor, anak-anak HMI. Itu orang dikejar lalu saya ditelepon. Kegiatannya mahasiswa KAMMI itu saya jadi pembicara, saya fasilitasi. PMII bikin dialog, mereka minta saya sebagai pembicara, mereka datang. Saya selalu bilang, tolong kumpulkan Cipayung. Di Cirebon Kelompok Cipayung tidak ada GMKI dan GMNI, PMKRI pun tidak ada. Yang ada cuma HMI dan PMII, ya sudah kita adakan saja. Tidak ada soal. Ke Pemuda Gereja juga saya bicara, ke kelompok gereja saya bicara. Begitu! Jadi kita tidak mau berbeda dengan yang lain. Itulah Negara kesatuan.”

Sikap politik yang ditunjukkan oleh Enggartiasto tersebut sekaligus menolak pandangan Clifford Geertz bahwa ikatan primordialisme sangat kuat dalam politik dan akan sangat sulit untuk dipisahkan. Di daerah pemilihan enggartiasto tidak bisa dipungkiri bagaimana kuatnya peran agama dan budaya termasuk dalam urusan politik. Tetapi Enggartiasto dapat mematahkan pandangan Clifford Geerta tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang konkrit dan konsisten dilakukannya kepada para pemilihnya. Aspek primordialisme dalam politik bisa ditolak dengan senantiasa memelihara ikatan emosional dengan pemilih lewat perbuatan konkrit ke tengah pemilih dan itu dilaksanakan secara konsisten.

Pendekatan dari aspek pembangunan sarana dan prasarana juga dialami oleh Theodorus dari daerah pemilihan di Jawa timur yakni Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota



Blitar, Kab Tulung Agung. Theodorus mengakui bahwa keberhasilannya menjadi anggota DPR RI tidak terlepas dari upaya pendekatan secara fisik yang dilakukannya kepada masyarakat luas di daerah pemilihannya lewat. Theodorus menjelaskan,<sup>203</sup>

“Saya menggunakan basis partai sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Saya menggunakan basis PKB yang hancur. Ada dua Kyai yang membantu saya. Kedua Kyai itu adalah PKB. Tadinya NU ya.” Saya dikenal di Tulung Agung meskipun seorang Katolik tetapi kerjanya membantu Madrasah. Saya membangun gereja, ya saya membangun dua gereja Katolik di sana, bukan uang saya, tapi uang Negara. Tetapi mereka bilang yang membangun itu saya. Lewat tangan saja saya membangun madrasah-madrasah itu, daripada uangnya dikorup. Memang tidak banyak!”

Theodorus menjelaskan bahwa pembangunan fisik yang digagasnya di tingkat warga menurutnya tidak banyak, tetapi setidaknya dia sudah menunjukkan bahwa dirinya ada bersama warga. Theodorus menjelaskannya demikian,<sup>204</sup>

“Walaupun saya Katolik tetapi ada sejumlah madrasah yang saya gagasi untuk dibangun. Madrasah itu kan sangat penting untuk warga, pendidikan menjadi sangat perlu. Di Tulung Agung itu saya memperjuangkan

---

<sup>203</sup> Wawancara Koekerits.

<sup>204</sup> Wawancara Koekerits.

pembangunan sekolah madrasah di tingkat dasar dan tingkat menengah. Dinas Pendidikan di sana memfasilitasi, tetapi warga tahu bahwa itu upaya saya ke pemerintah setempat. Dan berita itu tersebar ke tengah warga, ‘Itu dari Pak Ondos, Lurah di sana juga sampaikan bahwa itu dari Pak Ondos.’”

Penjelasan Theodorus di atas walaupun sangat singkat tetapi tetap menunjukkan bahwa dirinya juga mengupayakan bagaimana pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sementara Maruarar Sirait lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan fisik dengan membantu pendirian mesjid dan mushalla-mushalla yang dibutuhkan secara konkrit oleh umat. Selain itu Maruarar juga membantu pembiayaan untuk pertemuan-pertemuan keagamaan berupa sembahyangan. Maruarar menjelaskan,<sup>205</sup>

“Tidak banyak yang saya bantu, tetapi konsistensi saya untuk selalu hadir di tengah mereka membuat mereka senang. Sejumlah saja saya bantu membangun mesjid dan mushalla di perkampungan-perkampungan yang memang sangat dibutuhkan warga di kampung. Tidak banyak. Ya... pertemuan-pertemuan keagamaan juga saya bantu, tidak banyak, tetapi rutin. Sangat sedikit memang, tetapi itu sudah sangat berharga karena warga membutuhkan. Saya juga hadir, berdiskusi

---

<sup>205</sup> Wawancara Sirait.

dengan mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Konsistensi itu harus kita jaga terus.”

Perbuatan-perbuatan konkrit yang dilakukan oleh para politisi Kristen ke tengah-tengah penduduk beragama Muslim di basis Islam yang kuat tersebut dibenarkan oleh Ganjar salah seorang pengurus DPP PDI Perjuangan 2005-2010. Terkait Theodorus misalnya, Ganjar membenarkan sikap-sikapnya yang bisa mendekatkan diri ke masyarakat luas tersebut demikian,<sup>206</sup>

“ Saya kasih contoh: Ondos (Theodorus J. Koekerits, **red**). Ondos itu diterima di sana (Dapil Jatim VI: Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Tulung Agung, **red**) karena Ondos datang ke mesjid, Ondos datang ke gereja, Ondos datang ke masyarakat. Ia membantu secara luar biasa, dan dia selalu katakan kepada masyarakat bagaimana filosofi berbangsa dan bernegara. Tetapi urusan duniawinya apa? *Wong voters* itu berbicara soal urusan dunia, *kog!* Artinya, ketika orang dari personnya ini bisa menjelaskan, menyampaikan kepada public, mereka akan dipilih.”

Apa yang disampaikan oleh Ganjar di atas merupakan bukti bahwa memang orang-orang Kristen yang menjadi anggota DPR RI di basis Islam yang kuat dapat meraih sukses karena kerja keras lewat perbuatan-perbuatan konkrit yang

---

<sup>206</sup> Wawancara Pranowo.

bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali lagi ini menjadi bukti bahwa primordialisme agama bagi para politisi beragama Kristen di basis Islam yang kuat dalam penelitian ini tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk keterpilihan. Karena walaupun mereka beragama Kristen namun mereka justru diterima di basis Islam yang kuat tersebut dan malah menang dengan sangat signifikan.

Fakta bahwa orang-orang Kristen melakukan strategi di basis Islam yang kuat aspek primordialnya dimana agama menjadi bagian yang teramat penting dan sangat menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dengan budaya setempat, sekaligus juga memberikan catatan pada teori Clifford Geertz akan ketakutan politik primordialisme. Praktek konkrit yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di daerah yang kuat ikatan primordialismenya lewat karya akan kebutuhan konkrit masyarakat warga mematahkan sekat-sekat primordialisme tersebut. Artinya, keterpilihan orang-orang Kristen di daerah berbasis Islam yang kuat mematahkan bahwa tidak ada ikatan primordialisme dalam politik yang dialami langsung oleh caleg-caleg beragama Kristen pada Pileg 2004 dan Pileg 2009.

Kebutuhan riil warga yang secara terus menerus dan kontinu diberikan oleh para caleg Kristen untuk memelihara pemilihnya telah membuat warga memilih caleg beragama Kristen yang tidak selalu berasal dari suku yang sama dengan warga. Kekhawatiran Geertz bahwa primordialisme dalam politik akan sangat berbahaya tidak sepenuhnya benar, ketika caleg-caleg Kristen di basis Islam yang kuat justru malah mendulang suara pemilih yang sangat besar. Bahkan Maruarar Sirait menjadi caleg yang meraih perolehan suara terbesar dari

seluruh calon di seluruh Provinsi Jawa Barat pada pileg 2009. Tentu ada alasan mengapa para pemilih bisa menentukan pilihan mereka terhadap para politisi beragama Kristen tersebut, termasuk pertimbangan aspek agama ketika menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu legislatif kepada caleg-caleg beragama Kristen tersebut.

Seluruh uraian di atas merupakan pengakuan dari para caleg Kristen yang diwawancarai terkait strategi yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil menang di basis Islam yang kuat. Pertanyaannya apakah sesungguhnya strategi tersebut yang membuat para caleg Kristen menang atau adakah argumentasi lain dari pemilih sehingga mereka memberikan dukungan kepada caleg Kristen? Untuk melengkapi penjelasan keterpilihan caleg Kristen sejak mereka ditempatkan di DCS/DCT hingga strategi yang mereka lakukan, Bab berikutnya akan memaparkan hasil wawancara dengan sejumlah pemilih Islam untuk mencari tahu alasan pemilih memberikan dukungan bahkan menggalang dukungan bagi caleg Kristen

## **BAB VI**

### **ALASAN PEMILIH MUSLIM BAGI KETERPILIHAN CALEG KRISTEN**

Ada dua alasan yang dikemukakan oleh pemilih muslim mengapa mereka memilih kandidat politik yang berasal dari agama yang berbeda. Alasan pertama adalah perilaku santun dalam tata karma dan budaya lokal, alasan kedua karena Sesama Korban Orde Baru Dan Konsistensi Bantuan Sosial. Bagian ini akan membahas argumentasi dari sejumlah pemilih beragama Muslim yang diwawancarai secara mendalam terkait faktor keterpilihan caleg-caleg Kristen. Bab ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi dan argumentasi atas keterpilihan caleg-caleg Kristen yang sudah dibahas dengan sangat mendalam pada bagian sebelumnya yang mengemukakan strategi dari caleg Kristen untuk memenangkan dirinya menjadi anggota DPR RI. Karena fokus dari penelitian ini terkait keterpilihan caleg-caleg Kristen maka wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tiga orang pemilih beragama Muslim untuk mencari tahu sekilas walaupun tidak seluruhnya terkait apakah argumentasi yang disampaikan oleh caleg-caleg Kristen yang diwawancarai di bab sebelumnya apakah sesuai dengan alasan dari pemilih memberikan pilihan kepada caleg Kristen tersebut.

## **6.1. Sikap Santun Dalam Tata Krama Agama Dan Budaya Lokal**

Ada tiga orang pemilih beragama Muslim yang diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan argumentasi dari pemilih mengapa menentukan pilihan bahkan menggalang dukungan untuk memilih caleg-caleg beragama Kristen tersebut. Tiga orang pemilih yang diwawancarai dengan sangat mendalam sengaja dipilih dari basis Islam yang kuat yang penduduknya mayoritas Muslim.<sup>207</sup> Wawancara pertama dilakukan kepada Haji Didi Supriadi seorang pendukung Maruarar penduduk RT 03/RW 06 No 37 di perkampungan Muliarsi, Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusakanegara, Pamanukan-Subang, Jawa Barat. Haji Didi adalah tokoh masyarakat, wiraswasta peternakan ayam dan pertanian di Kelurahan Mundusari, Kecamatan Pusakanegara yang menjadi pengusaha kelas nasional hasil binaan dan dukungan dari Maruarar.

Wawancara kedua dilakukan kepada pendukung Ribka yakni Abah Abidin (69 tahun) seorang tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kampung Cicolawing, Desa Pawenang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, sekitar 35 kilometer dari terminal Sukabumi ke arah perkampungan. Abah Abidin adalah seorang tahanan politik selama 12 Tahun (1966-1978) karena terlibat G30/S PKI. Abah Abidin mengalami penahanan di Pulau Buru, Amboina, Maluku. Abah Abidin adalah Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban

---

<sup>207</sup> Wawancara mendalam kepada pemilih menjadi sangat penting untuk melihat sekilas argumentasi pemilih beragama Islam memberikan pilihan bahkan menggalang dukungan untuk memilih caleg-caleg beragama Kristen. Wawancara ini kami adakan langsung ke warga di tempat tinggal pemilih yang bersangkutan.

Orde Baru) se-Kabupaten Sukabumi, namun dia tetap tinggal di kampung yang sangat jauh dari kota dengan situasi desa dengan sarana dan prasarana yang masih belum bagus. Jarak tempuh hampir 90 menit dari pusat kota ke lokasi membuktikan bahwa sarana transportasi menuju lokasi masih belum bagus. Haji Didi dan Abah Abidin adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di daerah masing-masing dan tinggal di pelosok yang jauh dari ibu kota kabupaten yang jaraknya antara 25 kilometer hingga 35 kilometer. Mereka tinggal di perkampungan dan bekerja seperti halnya pekerjaan orang-orang di kampung tersebut.

Wawancara ketiga dilakukan kepada Ojang Suhandi (34 tahun), Bupati Subang Jawa Barat di Kantor Bupati Subang Jl. Dewi Sartika, Subang Jawa Barat, Senin, 6 Agustus 2012 Pukul 11.53 wib yang menjadi pendukung utama Maruarar Sirait. Ojang sebelumnya adalah Wakil Bupati kemudian sejak Agustus 2012 diangkat menjadi Bupati menggantikan bupati sebelumnya Eep Hidayat yang tersangkut kasus hukum. Selain itu Ojang Suhandi juga adalah mahasiswa S-3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung Jawa Barat.

Dari tiga wawancara mendalam yang dilakukan terlihat bahwa ada alasan sangat mendasar mengapa pemilih beragama Islam di basis Islam yang kuat itu memilih caleg-caleg beragama Kristen. Selain itu akan dianalisa bagaimana keterkaitan antara strategi caleg Kristen dan alasan pemilih tersebut dengan teori politik yang digunakan dalam disertasi ini. Setidaknya dua hal akan dianalisa dalam bab ini, yakni strategi caleg Kristen dan alasan mengapa pemilih Islam memilih caleg Kristen. Strategi tersebut menjadi lebih kuat



ketika caleg Kristen tersebut secara terus menerus rutin melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, entah sebelum terpilih maupun sesudah terpilih. Kunjungan tersebut dilakukan justru tidak ketika sedang masa kampanye, tetapi justru ketika sedang masa biasa ketika tidak ada tahapan Pemilu apapun.

Dampak yang ditimbulkannya adalah bahwa para politisi Kristen tersebut tidak perlu menghabiskan anggaran besar ketika masa kampanye Pemilu nasional tiba. Dampak lain bahwa tentu saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para politisi Kristen tersebut memberi keyakinan kepada para pemilih akan keseriusan dan perhatian yang sungguh dan tulus. Para pemilih yang hampir seluruhnya beragama Islam tersebut menjadi sangat yakin untuk memilih para caleg-caleg tersebut walaupun mereka beragama Islam. Ini menjadi alasan bagi pemilih untuk secara pasti dan meyakinkan menentukan pilihannya kepada para caleg beragama Kristen tersebut. Yang jelas, strategi-strategi yang dilakukan oleh para politisi orang Kristen telah menghasilkan cukup banyak kursi DPR RI dari sejumlah daerah pemilihan berbasis Islam yang kuat. Karena itu pandangan dan argumentasi dari pemilih terhadap akan diketahui dengan mendengarkan alasan dan pandangan mereka secara langsung.

Alasan dari para pemilih ini tepat seperti yang diungkapkan oleh Alan Ware bahwa ketika potensi individu layak jual ke tengah pemilih dan dianggap mampu menaikkan suara partai politik ditempatkan sebagai prioritas, maka peranan partai tidak lagi menjadi dominan. Memang tetap perlu bagi partai mensosialisasikan dirinya, tetapi yang paling utama calon yang bersangkutan mampu memperkenalkan

dirinya ke masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih. Kandidat tersebut sudah mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat dan partai bisa melihat sebesar apa tingkat penerimaan masyarakat itu terhadap diri seorang calon. Alan Ware menegaskan, selama tidak ada riak-riak penolakan entah melalui media atau ada kelompok masyarakat yang berusaha menolak calon dimaksud, maka calon tersebut tetap dimajukan oleh partai dan orang bersangkutan tidak terlalu direpotkan oleh kendala-kendala. Alasan partai politik menempatkan calon-calon di daerah pemilihan tertentu didasarkan oleh pertimbangan bahwa partai sudah sangat yakin kandidatnya dikenal dan mampu meraih dukungan pemilih secara maksimal.

Kemenangan sangat signifikan caleg Kristen di daerah pemilihan berbasis Islam yang kuat tentu saja cukup mengherankan. Karena alasan dari caleg yang bersangkutan sebagaimana sudah dibahas di atas sudah dibahas, maka menjadi sangat penting untuk mencari tahu terhadap sejumlah pemilih beragama Islam untuk memastikan apa alasan pemilih Islam bersangkutan menggalang dukungan dalam kemenangan caleg-caleg Kristen tersebut. Dari ketiga wawancara tersebut ditemukan lima alasan mengapa para pemilih beragama Islam menggalang dukungan untuk caleg-caleg Kristen yang mereka dukung. Setidaknya argumentasi dari pemilih yang sempat diteliti dalam disertasi ini bisa dikategorikan ke dalam lima alasan, yakni: *pertama*, kemampuan caleg bersangkutan bersikap santun dan mampu mengambil hati warga dalam nuansa tata krama agama dan budaya setempat, *kedua*, karena caleg yang bersangkutan adalah bagian dari korban Orde Baru karena terkait dengan

PKI sehingga menggalang dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), *ketiga*, kerelaan caleg Kristen untuk memberikan pengobatan gratis terbuka kepada seluruh warga yang kontinu setiap bulan, *keempat*, pendekatan lewat pembangunan fisik sarana umum seperti mesjid, air minum, jalan raya, *kelima*, kemampuan melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh lokal khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan gerbong partai.

Tentu saja teori yang dibangun oleh Affan Gaffar bahwa politik aliran masih sangat kuat sebagai preferensi pilihan bila melihat argumentasi yang menjadi dasar pilihan pemilih dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak seluruhnya menjadi dasar bagi pemilih untuk memilih. Dari analisis penelitiannya di daerah Brobanti, Yogyakarta, Affan Gaffar memperkuat teori bahwa ada hubungan yang sangat dekat diantara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Yang penting adalah bahwa agaknya sejumlah dari mereka juga dipilih untuk Golkar. Namun demikian variable lain juga diambil kegunaannya, seperti pola kepemimpinan dan pola kelas social.

Untuk konteks penelitian ini tampak perbedaan bahwa selain tetap membawa isu dan lambang agama, pemilih justru melihat sisi lain yakni kepentingan pragmatis berjangka pendek yang konkrit dirasakan oleh pemilih. Uraian selanjutnya tentang hal ini akan menggambarkan kepentingan agama/lambang agama dan kepentingan pragmatis tersebut. Pemilih dari basis Maruarar melihat alasan terpokok adalah alasan faktor pendekatan dari Maruarar dalam sopan santun secara budaya dan agama yang tepat terhadap para konstituen baik masyarakat biasa maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat. Keseriusan dan konsistensi Maruarar memperhatikan kepentingan penduduk setempat menjadi alasan utama mengapa para penduduk yang beragama Islam memilih Maruarar. Sementara alasan dari pemilih Ribka adalah karena hubungan emosional sebagai sesama korban Orde Baru. Alasan terpokok bagi pemilih di basis Ribka adalah karena mereka orang-orang yang terlibat PKI bangga melihat Ribka yang keturunan seorang PKI bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Rasa bangga dan senasib mendorong tokoh masyarakat tersebut menggalang dukungan dari seluruh keturunan yang terlibat PKI untuk memilih Ribka. Alasan kedua walaupun sangat sedikit disinggung oleh pemilih yang diwawancarai adalah karena alasan baksos-baksos pengobatan kesehatan yang dilakukan Ribka kepada pemilih.

## **6.2. Sikap Santun dalam Tata Krama Agama dan Budaya Lokal**

Satu sikap yang sangat menonjol dari Maruarar Sirait menurut pemilihnya baik Haji Didi Supriadi maupun oleh Ojang Suhandi adalah upaya yang dilakukan oleh Maruarar

melalui pendekatan budaya dan agama terhadap para konstituen. Kemampuan mengikuti tata krama baik agama maupun budaya setempat yang dilakukan oleh caleg beragama Kristen juga telah membuat pemilih beragama Islam di basis Islam yang kuat menaruh simpatik kepada caleg Kristen.

### **Haji Didi Supriadi**

Hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Ojang Suhandi, pemilih lain yang diwawancarai yakni Haji Didi Supriadi juga mengungkapkan pengakuan yang sama. Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Maruarar dalam penjelasannya di awal, Haji Didi melihat bahwa Maruarar diterima dengan sangat baik di daerah pemilihannya khususnya di Kelurahan Mundusari justru karena pendekatan yang dilakukan oleh Maruarar kepada para pemilih konsisten dan terus menerus. Dengan tidak mengenal sekat-sekat oleh perbedaan agama dan suku, Maruarar dengan sangat berani dan jujur melakukan pendekatan kepada warga pemilihnya, termasuk ke tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat. Dia mau belajar tentang adat sopan santun sesuai agama dan budaya yang berlaku di lingkungan daerah pemilihannya yakni Islam dan Sunda, dan sikap itu dilakukan secara terus menerus. Karena sikap dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Maruararitu membuat dirinya menang mutlak di daerah pemilihannya termasuk di Kelurahan Mundusari tempat Haji Didi tinggal.

Menurut Haji Didi, masyarakat akhirnya tidak melihat Maruarar sebagai seorang Batak dan sebagai seorang Kristen, tetap sebagai anggota DPR RI yang mau belajar, yang mau bersahabat dengan warga, dan mau memperhatikan kesulitan

dan persoalan hidup mereka. Terkait dengan sikap Maruarar yang bisa diterima oleh berbagai kalangan tersebut, Haji Didi menjelaskan,<sup>208</sup>

“Kalau ke tokoh-tokoh agama di sana diterima, ke kyai-kyai beliau juga mau belajar. Misalnya, menyebut salam *Assalaamu’alaikum itu Wr.Wb*, beliau itu fasih sekali. Kalau pertama misalnya salamnya bagaimana, beliau sudah tahu, di akhir beliau juga fasih. Kadang-kadang orang jadi curiga, “Beliau ini benar Kristen atau jangan-jangan Islam sih, sangking fasihnya. Orang-orang kampung sini saking *nggak* nyangka kalau dia itu benar-benar Kristen. Lawan-lawan politiknya juga dia dihantam itu dengan isu SARA. Sempat dulu Abang Ara itu dihantam dengan isu SARA, tetapi masyarakat *nggak* peduli dengan hantaman itu, “Orang yang baik mewakili saya, aspirasi saya, itu yang saya pilih.”

Penjelasan Haji Didi di atas menunjukkan kemauan Maruarar untuk belajar tentang sopan santun yang berlaku di lokal daerah pemilihannya yang membuat dirinya menjadi orang yang sangat dekat dengan warga. Bahkan Maruarar kerap diduga beragama Islam. Itu juga menjadi kekuatan

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan Haji Didi Supriadi, penduduk RT 03 RW 06 No 37 Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan-Subang, Jawa Barat Sabtu, 21 April 2012 sekitar pukul 11.15wib. Haji Didi adalah Tokoh masyarakat, wiraswasta peternakan ayam dan pertanian di Kelurahan Mundusari, Kecamatan Pusakanagara.

Maruarar ketika isu SARA dilemparkan ke dirinya, sehingga warga berketetapan hati untuk memilihnya karena Maruarar dibenak mereka adalah orang terbaik yang dekat dan aspirasi mereka ditampung sehingga mereka memilihnya.

Haji Didi menjelaskan bahwa Maruarar tidak melakukan pendekatan istimewa terhadap salah seorang atau sejumlah tokoh agama tertentu yang spesifik. Maruarar justru berbaur dengan semua warga, tidak membuat pengelompokan-pengelompokan tertentu yang menjadi kotak-kotak pemisah. Walaupun tentu saja untuk masuk ke kalangan pesantren itu bagi kalangan yang bukan Islam tentu tidak begitu gampang, tetapi Maruarar mampu melakukannya. Kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat Maruarar masuk dan mendekatkan dirinya. Maka ketika kepada Haji Didi disampaikan terkait siapa tokoh agama paling berpengaruh yang Maruarar pegang, Haji Didi menjawab,<sup>209</sup>

“Beliau itu, tokoh yang di pesantren itu secara spesifik tidak ada, cuma semua beliau kunjungi, dan beliau-beliau tokoh pesantren itu mau menerima. Jadi tidak ada satu orang yang dipegang itu. Tidak ada. Semua juga elemen tokoh agama itu beliau dekat, tidak ada satu spesifik misalnya kyai siapa. Dan itu kan susah masuknya ke pesantren itu awalnya, tapi Abang Ara bisa.”

Kesuksesan Maruarar mengusung mandat partai atas pencalonan dirinya untuk bisa terpilih di daerah yang berbeda suku dan agama dengan dirinya tepat seperti dimaksudkan

---

<sup>209</sup> Wawancara dengan Supriadi.

oleh pemikiran politik Alan Ware dimana bahwa meskipun dalam partai sendiri ada peran langsung dan terpusat dalam menyeleksi kandidat yang penting, pihak pengurus pusat (*centre*) bisa juga menetapkan peraturan atau prosedur secara tidak langsung tetapi sangat penting dalam memutuskan kandidat seperti apa yang harus dipilih. Alasannya tentu saja karena bagaimanapun partai akan sangat berkepentingan menempatkan orang yang satu etnik dengan pemilih, yang satu agama dengan pemilih. Namun menurut Alan Ware mungkin ada peraturan di internal partai bahwa hal itu tidak menjadi pilihan baku sepanjang seseorang itu bisa diterima, bisa mewakili partai, dan tingkat penerimaan pemilih terhadap yang bersangkutan bisa menjadi cukup besar.

Menurut Haji Didi, kapasitas Maruarar yang bicara dan tampil di pentas politik nasional turut mempengaruhi upaya Maruarar menjadi mudah diterima di kalangan pemilihnya. Figurnya yang sering muncul di media-media baik elektronik maupun cetak memudahkannya untuk diterima secara luas termasuk di daerah pemilihannya. Figur Maruarar dilihat sebagai sosok yang konsisten, matang, dan benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat sebagaimana terlihat seringnya Maruarar tampil di media-media yang membawakan pandangan dari PDI Perjuangan. Haji Didi menjelaskan bagaimana cara masuknya Maruarar ke para tokoh agama melalui sikap konsistensi yang secara nasional ditunjukkan dan kemudian menjadi konkrit ke tengah para pemilihnya. Haji Didi menjelaskan, “Beliau masih 42 tahun, tapi kapasitasnya sudah begitu ya! Kita kagum, kita bangga, kita senang. Dan itu setiap partai ada gesekan ada persaingan,



tetapi beliau sudah sepuluh tahun tetap kuat. Tapi memang karena kapasitasnya begitu.”<sup>210</sup>

Perkenalan Haji Didi dengan Maruarar dimulai ketika Maruarar sudah menjadi anggota DPR RI di periode pertama hasil Pileg 2004, persisnya dua tahun sebelum Pileg 2009. Menurutnya, perjumpaan dengan Maruarar sejak saat itu sampai sekarang tidak menyurutkan kekagumannya terhadap konsistensi dan pendekatan yang dilakukan Maruarar terhadap warga. Haji Didi menjelaskan demikian,<sup>211</sup>

“Saya mengenal Bang Ara sejak sebelum Pilkada, saat persiapan Pilpres itu, sekitar tahun 2007an lah mulai kenal beliau. Moga-moga saja wakil-wakil kita itu seperti Bang Ara, perhatian dan bermasyarakat. Yang beliau lakukan mendengar. Pertama kan orang sudah mendengar dulu bahwa Bang Ara itu tokoh. Beliau mendengar, datang, kunjungi. Bang Ara itu datang bukan karena ada perlu saja. Kemarin itu kegiatan seribuan orang yang ikut: kegiatan jalan santai, sepeda santai, terus kegiatan-kegiatan keagamaan Islam tingkat kabupaten dia buat. Dan yang terkesan lagi ada tokoh yang berprestasi dalam pendidikan, dalam olahraga, beliau berangkatkan. Kemana coba? Disuruh umro Dan berangkat. Supirnya sendiri kan mau diberangkatkan juga haji, suami istri itu,

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Supriadi.

<sup>211</sup> Wawancara dengan Supriadi.

berdua beliau mau berangkatkan. Bayangkan aja!”

Penjelasan Haji Didi menegaskan bahwa memang Maruarar tidak melihat faktor agama sebagai basis untuk mendapatkan dukungan, tetapi faktor kemanusiaan dengan pendekatan keagamaan dan kebudayaan. Maruarar tahu bagaimana harus bersikap secara santun kepada warga lewat pendekatan budaya dan keagamaan. Haji Didi mengatakan bahwa Maruarar merawat para pemilihnya dengan sangat baik, bahkan Maruarar tampaknya sangat memahami betul tatakrama di daerah pemilihannya yang berbasis Islam yang kuat, sehingga aspek pembangunan agama sangat ditonjolkan Maruarar ke pemilih. Misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan secara Islami dia lakukan, orang-orang yang berprestasi tidak diberi uang tetapi disuruh umroh ke Tanah Suci, Mekkah. Sikap-sikap seperti ini rupanya sangat menarik dan memikat bagi warga pemilihnya yang berpegang sangat kuat pada aspek religius. Haji Didi juga menjelaskan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kerap dilakukan oleh Maruarar ke tengah masyarakat demikian,<sup>212</sup>

“Kegiatan keagamaan di Islam di dapilnya Jawa Barat misalnya pengajian. Dia hadir walaupun hanya duduk. Kan tidak ada larangan, Bang. Semuanya juga boleh hadir dan duduk. Di komunitas Kristennya juga luar biasa beliau itu. Beliau hadir di gereja-gereja.”

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan Supriadi.

Pendekatan berupa silaturahmi yang dilakukan Maruarar itu sudah dilakukannya sejak dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pileg 2004. Bahkan karena pendekatan itu, Maruarar bisa diterima oleh berbagai kalangan, termasuk pada tokoh-tokoh dari kalangan Islam garis keras. Dukungan yang luas tersebut membuatnya mampu mengalahkan caleg-caleg yang berasal dari penduduk setempat dan malah merupakan tokoh-tokoh di pesantren tertentu. Terkait dengan pendekatan ini, Haji Didi menjelaskan bagaimana dan kapan Maruarar mulai membangun silaturahmi itu ke tengah masyarakat di daerah pemilihannya,<sup>213</sup>

“Silaturahmi itu sudah Bang Ara bangun sejak 2004 sejak terpilih menjadi DPR. Tiga-tiganya Bang Ara kan bukan: bukan muslim, bukan Sunda, bukan tinggal di sini. Kalau *nggak* kuat ikut Bang Ara akan mental. Komitmennya, loyalitasnya diuji benar-benar, ketabahan nya juga. Kalau Abang turun ke lapangan, bukan abangnya yang nyari masyarakat, masyarakat yang *nguber-uber*. Contohnya saja, kalau ada orang sakit Bang Ara yang pertama menengok, orang berduka Abang paling disempatin. Kalau di kampung kan ada namanya resepsi, hajatan itu, Abang selalu hadir, dengan kesibukannya beliau yang sebegitunya. Teleponnya kan 24 jam itu aktif dan tidak pernah ganti. Sampai sekarang itu, kayaknya

---

<sup>213</sup> Wawancara dengan Supriadi.

sudah lebih puluhan tahun nomor HP itu. Jadi aspirasi rakyat itu nyampe.”

Penjelasan Haji Didi di atas membuktikan bahwa memang Maruarar benar-benar bisa masuk ke tengah penduduk secara tepat dan berhasil menarik simpati warga pemilihnya. Karena setidaknya Maruarar memiliki tiga kelemahan yang bisa jadi dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya, yakni Maruarar bukan Sunda, bukan Islam, dan bukan bertempat tinggal di daerah pemilihannya. Tiga kelemahan ini tentu saja hanya bisa diatasi oleh pendekatan yang luar biasa dan kedekatan yang sangat erat dengan pemilih untuk meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah wakil rakyat yang sangat peduli dengan persoalan konkrit warga di daerah pemilihannya. Tanpa sikap konsistensi dan kedekatan yang demikian kuat, maka mustahil Maruarar dapat meyakinkan pemilihnya dan mendapatkan dukungan suara yang sangat signifikan, perolehan suara yang sangat jauh melampaui angka BPP di daerah pemilihannya.

Tetapi mengingat Kabupaten Subang dan dua kabupaten lain, Sumedang dan Majalengka, yang menjadi daerah pemilihan Maruarar adalah daerah basis Islam, maka tentu mengherankan bahwa agama tidak menjadi pertimbangan pemilih. Kepada Haji Didi ditanyakan bagaimana bisa orang Kristen diterima di Subang, khususnya di tempat Haji Didi yang hampir seluruhnya beragama Muslim. Jawaban Haji Didi adalah bahwa warga tidak lagi kaku dan terkotak-kotak dalam perdebatan soal agama yang dianut oleh caleg, tetapi lebih melihat aspek kehadiran caleg bersangkutan yang intens di tengah warga, dan ketika hal-hal

yang detail terkait persoalan warga menjadi perhatian caleg yang bersangkutan. Haji Didi menjelaskan,<sup>214</sup>

“Rakyat sudah semakin pintar.. Siapa yang bisa mewakili kami ini, itulah yang kita dukung. Dan terutama Bang Ara (Maruarar, red) itu, beliau itu perhatian *banget* sama daerah pemilihannya. Kunjungan beliau itu bukan hanya waktu reses saja, hal-hal sepele beliau *perhatiin*, hal-hal sangat strategis itu. Sebetulnya itu kan Bang Ara mengambil dapil ada tiga: Majalengka, Subang, Sumedang. Semua itu basis Islam semua. Malah yang terjadi selama ini, kantong-kantong PKB di situ, suaranya malah Bang Ara yang dapat banyak. Padahal kan ada pesantren-pesantren. Di Kecamatan Compreg, satu kecamatan itu basis NU di situ, malah perolehan suaranya Bang Ara yang dapat di situ. Padahal calon di situ kan ada PKS, PKBnya juga di situ. Sebetulnya *sih* ketokohnya menurut saya, begitu ya masyarakat itu.”

Karena penerimaan warga terhadap Maruarar yang sedemikian baik dan sedemikian mendalam, maka pemilih merasa akan sangat rugi bila Maruarar kelak pindah ke daerah pemilihan lain dalam Pileg berikut. Haji Didi menjelaskan bagaimana dirinya menolak ketika Maruarar memberi kemungkinan bahwa dirinya akan pindah daerah pemilihan

---

<sup>214</sup> Wawancara dengan Supriadi.

karena keputusan atas penentuan daerah pemilihannya ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Penolakan itu dikaitkan dengan harapan dan keinginan warga supaya Maruarar tidak meninggalkan pemilih yang sudah demikian besar dan luas sebagai pendukung Maruarar. Penolakan warga terhadap rencana kepindahan Maruarar yang berkemungkinan untuk pindah daerah pemilihan dari Subang disampaikan Haji Didi demikian,<sup>215</sup>

“Karena kalau misalnya Bang Ara harus pindah daerah pemilihan, kasihan. Ibaratnya kantong suara yang besar ditinggal. Bang Ara mendapat suara yang terbesar se Jawa Barat. Bayangkan saja Bang Ara mengalahkan partai-partai yang menang sekarang. Beliau itu, mohon maaf saja, non muslim, bukan asli kelahiran sini, tapi bisa mengalahkan orang asli sini. Biasanya kan orang asli di sini banyak keluarga besarnya, nggak anehlah kalau mereka menang, begitu kan! Tapi kalau Ara ini lebih-lebih malah. Kalau Bang Ara ke sini, masyarakat itu sudah kayak mengelu-elukan lebih-lebih dari artis, semua berebut, pengen salaman, pengen difoto bersama.”

Pengenalan Haji Didi yang sedemikian mendalam tentang Maruarar tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi tentu karena dirinya ikut dan terlibat secara langsung dengan proses kegiatan Maruarar. Itu juga berarti bahwa Haji Didi sangat

---

<sup>215</sup> Wawancara dengan Supriadi.

dekat dengan Maruarar. Maka ketika kepada Haji Didi ditanyakan dimana mulai mengenal Maruarar, dia menjelaskan,<sup>216</sup>

“Tahun 2007 itu, Abang yang datang silaturahmi, lalu dikenalkan sama Pak Eep Bupati Subang ke warga. Dikenalkan beliau, kata saya, “Kog orang Kristen bisa baik begini, ya!” Mau juga datang silaturahmi ke kita. Kalau anggota dewan lain hanya pas lagi perlunya saja. Kalau Bang Ara itu orangnya tidak pragmatis, membina silaturahmi. Kalau Abang Ara datang, itu bukan karena orang ada kepentingan atau tujuan ada keinginan. Kalau Bang Ara, silaturahmi dulu dibina, pendekatan. Kayak sekarang, beliau Ketua Umum Taruna Merah Putih, kadernya cukup banyak, kegiatan-kegiatannya tidak pernah berhenti. Misalnya jalan santai, kegiatan-kegiatan partai, kunjungi ke petani, nelayan.”

Tentu ada argumentasi sangat menonjol mengapa Haji Didi mengagumi Maruarar tanpa mempertimbangkan aspek agama, aspek suku, dan aspek tempat tinggal dari Maruarar. Maka kepada Haji Didi ditanyakan apa yang paling menonjol dari Maruarar sehingga bisa diterima masyarakat, dan apakah masyarakat tahu bahwa dia seorang Kristen. Menurut Haji Didi, sikap dan perilaku Maruarar yang sangat santun, bergaul dengan semua kalangan, dan perhatian terhadap hal-hal detail

---

<sup>216</sup> Wawancara dengan Supriadi.

terkait kepentingan warga telah menarik simpati besar dari warga. Terkait dengan simpati warga beragama Muslim kepada Maruarar yang seorang Kristen dijelaskan oleh Haji Didi demikian,<sup>217</sup>

“Masyarakat tahu semua dia Kristen! Tapi beliau mau turun ke bawah, mau menyapa rakyat, terus perhatian. Hal-hal kecil saja bisa diperhatikan abang itu. Misalnya kalau ada orang sakit, asal beliau tahu pasti ditengok beliau, jam berapa aja. Pernah saya diajak beliau menengok salah satu orang sakit setengah satu malam karena hari itu abang padat sekali acaranya, jadi baru bisa jam 11 malam. Pada hari itu setengah satu (01.30wib) beliau ke rumah sakit. Kata saya, “Bang, apa-apaan tengok orang sakit malam-malam?” Kata Abang, “Kapan lagi, Pak Haji? Coba bayangin, saya saja belum pernah menengok orang setengah satu malam, tapi Bang Ara menengok orang sakit. Dengan padatnya acara beliau tapi pengen juga menengok orang sakit dan datang setengah satu malam ke rumah sakit. Itu kemudian jadi berita kemana-mana.

Pengakuan Haji Didi di atas setidaknya bisa menjawab keraguan dan kecemasan dari Affan Gaffar akan kecenderungan para anggota legislatif yang hanya melayani partai dan pimpinannya tetapi melupakan pengabdian kepada

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Supriadi.



warga dan pemilihnya. Affan Gaffar menyoroti pentingnya memilih anggota DPR yang lebih berkualitas, lebih berwibawa dan mempunyai kecenderungan untuk independen dari partai dan lebih berorientasi pada masyarakat pemilih atau *constituency* mereka. Gaffar melihat bahwa perilaku anggota DPR sangat ditentukan oleh kebijaksanaan fraksi, sementara kebijaksanaan fraksi ditentukan oleh kebijaksanaan partai. Apa yang dilakukan oleh Maruarar sebagaimana diungkapkan oleh Haji Didi justru menunjukkan bagaimana upaya Maruarar untuk membantu dan melayani kepentingan warga pemilihnya.

Maka pandangan Affan Gaffar bahwa agama dan budaya yang sudah mendarah daging itu akan sangat menentukan pilihan politik seseorang, khusus untuk penelitian tentang kesuksesan caleg-caleg Kristen ini tidak terlalu tepat. Affan Gaffar menjelaskan penelitiannya di daerah Brobanti, Yogyakarta bahwa keyakinan *socio religio cultural* merupakan prinsip determinan dalam menjelaskan perilaku pemilih. Keyakinan religio cultural sudah mendarah daging dan diwariskan turun temurun melalui proses sosialisasi politik yang kemudian memperkuat identifikasi individu dengan partai politik dan organisasi social tertentu. Orang-orang Santri akan mengidentifikasi diri dengan sebuah partai politik yang mempromosikan nilai-nilai dan norma Islam, sementara Abangan akan mengidentifikasi diri dengan partai secular atau partai non Islam. Tetapi penelitian disertai ini justru menunjukkan hal lain yang agak berbeda dari pandangan Affan Gaffar, dimana seorang suku Batak yang beragama Kristen justru bisa masuk ke daerah suku Sunda yang berbasis Islam dan menang menjadi anggota DPR RI.

Tentu saja harus dikatakan bahwa agama dan budaya tetap menjadi sangat penting karena caleg-caleg Kristen justru menggunakan lambang-lambang agama dan budaya lokal setempat untuk mengambil simpati warga. namun harus dikatakan juga bahwa selain aspek agama dan budaya, ada aspek lain yang juga penting untuk warga yakni perilaku konkrit yang dibutuhkan warga pada saat itu juga yang dilakukan oleh caleg-caleg beragama Kristen.

Bukti dari besarnya dukungan yang diperoleh oleh Maruarar dalam Pileg 2009 secara konkrit dijelaskan oleh Haji Didi, dimana TPS di kelurahan Haji Didi, Maruarar memperoleh suara yang tertinggi dari seluruh caleg yang lain di seluruh partai. Haji Didi menjelaskan sekilas tentang perolehan suara mutlak yang diperoleh Maruarar di TPS tempat tinggalnya demikian,<sup>218</sup>

“Seingat saya rata-rata sekitar 360 an pemilih di satu TPS. Bang Ara itu bisa dapat suara lebih dari 200 pemilih. Mutlak semua TPS di sini dia dapat, merinding ini dengarnya... (*menegaskan*)! Mutlak, mutlak semua! Paling satu dua partailah yang beliau nggak mutlak. Seratus ribu lebih suaranya, sejumlah 135 ribu suara, sedangkan untuk jadi anggota dewan di Subang kurang lebih empat puluh lima ribu atau berapa untuk satu kursi. Tiga orang itu harusnya dapatnya (kursi sejumlah suara itu)... Itu disumbangkan ke teman-temannya caleg lain

---

<sup>218</sup> Wawancara dengan Supriadi.

di dapil itu, akhirnya *nggangkat* caleg PDI Perjuangan yang lain.”

Satu lagi kekaguman Haji Didi kepada Maruarar adalah kemampuan fisiknya yang sangat kuat dan tahan untuk berbaur dengan warga walaupun sampai larut malam. Bahkan dalam berkeliling untuk bertemu warga masyarakat, Maruarar tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah menolak untuk bertemu warga. Kekuatan fisik menjadi salah satu yang membuat Maruarar bisa berdiskusi lebih lama dengan warga dan tidak mengenal waktu, termasuk sampai larut malam dengan warga-warga yang tinggal di kampung-kampung atau pelosok yang terpencil. Haji Didi menjelaskan tentang fisik dan kemauan Maruarar yang kuat untuk berbaur dengan warga-warga kampung.

Haji Didi berharap, kelak dirinya bisa mencontoh praktek yang dilakukan Maruarar bila suatu saat dirinya memutuskan terjun ke politik. Terkait dengan latar belakangnya, Haji Didi menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap Maruarar membuatnya banyak belajar dengan sikap hidup dan konsistensi yang sangat teguh dipegang oleh Maruarar. Mungkin suatu saat dirinya akan terjun ke politik dengan berperilaku seperti yang dibuat oleh Maruarar. Bila mampu mengikuti sikap Maruarar, maka dirinya juga akan mau terjun ke politik sepuluh tahun lagi, yakni Pileg 2019 nanti. Baginya Maruarar adalah contoh yang luar biasa dalam mempraktekkan konsistensi dan pergaulannya yang luas dengan berbagai kalangan tanpa ada sekat keagamaan dan kesukuan. Beliau menjadi milik semua warga di kelurahan Mundusari dimana Maruarar menang mutlak.

## **Alasan Ojang Suhandi**

Wawancara yang dilakukan kepada Ojang Suhandi, Bupati Subang, Jawa Barat yang menjadi pendukung utama Maruarar Sirait menegaskan hal itu. Menurut Ojang, kemampuan Maruarar menempatkan dirinya dalam tata krama budaya dan agama di Subang telah memunculkan simpatik yang besar di kalangan masyarakat. Padahal sesungguhnya Maruarar tidak ada ikatan darah atau garis keturunan apapun dengan Subang, termasuk dari segi agama Maruarar Sirait adalah beragama Kristen Protestan. Namun kemampuan Maruarar meletakkan dirinya dalam lingkaran tata krama masyarakat Subang yang sangat kental dan kuat berpegang pada budaya dan agama setempat, yakni budaya Sunda dan agama Islam. Penempatan diri Maruarar yang tepat tersebut membuatnya menjadi sedemikian diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Subang. Ojang menjelaskannya demikian,<sup>219</sup>

“Polanya Bang Ara, ternyata beliau ini bisa memosisikan diri beliau sebagai orang Subang. Misalnya di Subang ini ada budaya pakai kampret dengan ikat kepala itu. Beliau dalam publikasinya entah itu baliho atau pun yang lainnya, beliau memakaikan seragam seperti itu. Karena itu masyarakat walaupun tidak kenal bilang, “Wah orang ini Subang banget,” begitu. Akhirnya masyarakat juga jatuh cinta, karena dia orangnya luwes,

---

<sup>219</sup> Wawancara dengan Ojang Suhandi (34 Thn), Bupati Subang Jawa Barat di Kantor Bupati Subang Jl. Dewi Sartika, Subang Jawa Barat, Senin, 6 Agustus 2012 Pukul 11.53 wib.

perilakunya juga santun, turun ke lapangan juga dia mau.”

Penjelasan Ojang di atas menunjukkan kemampuan Maruarar untuk mengambil simpatik warga Subang sekalipun warga Subang memiliki kesempatan yang setara dan bebas untuk menentukan siapa calon legislatif dari daerah pemilihannya, tidak lagi terpaku pada sekedar pada isu agama dan isu suku, tetapi ada isu lain yang sama menariknya bagi warga Subang yakni, pendekatan tata krama yang santun dari Maruarar. Tepat seperti yang diungkapkan oleh Anne Philips dimana kesetaraan memiliki makna yang tidak spesifik pada salah satu jenis pilihan saja. Menurut Philips, semua warga Negara harus memiliki kesetaraan kekuasaan atas hasil (*outcomes*) yang diharapkannya sehingga semua preferensi politik, baik preferensi agama, budaya, maupun preferensi sosok caleg bersangkutan seperti Maruarar harus dianggap memiliki beban yang setara. Artinya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama menentukan pilihan untuk kandidat yang menang yang salah satu diantaranya adalah keterpilihan Maruarar.

Penjelasan Ojang di atas menunjukkan bahwa Maruarar bahkan sudah dianggap sebagai orang Subang itu sendiri. Bahkan Maruarar sudah dianggap sebagai bahagian dari masyarakat dan warga yang berasal dari Subang. Dan sedemikian mendalamnya Maruarar bisa masuk ke kalangan budaya dan masyarakat Sunda membuat Ojang pun sering dianggap identik dengan Maruarar, dan sebaliknya Maruarar identik dengan Ojang. Maka tidak heran kalau Maruarar pun meraih suara terbesar dari seluruh caleg di Subang, dan

perolehan terbesar Maruarar di seluruh Provinsi Jawa Barat justru diperolehnya dari Kabupaten Subang. Menurut Ojang, perilaku yang ditunjukkan oleh Maruarar itu tampaknya sangat berbeda dengan perilaku yang kerap ditunjukkan oleh para pejabat Negara pada umumnya, entah seorang gubernur atau seorang anggota DPR RI yang berkunjung ke Subang, yang justru sering tidak bisa mengambil hati rakyat Subang. Maruarar tidak menampilkan karakter itu. Maka ketika ditanyakan perihal segi budaya dan agama, bagaimana Maruarar bisa masuk, Ojang menjelaskan,<sup>220</sup>

“Subang ini ada kebiasaan memakai baju khas Subang yang seperti itu, baju hitam-hitam pakai ikat kepala. Nah Bang Ara itu mau turun ke Subang dia pake pakaian itu, kemudian juga masuk ke sawah ada kan fotonya di sawah, Bang Ara itu pakai baju kampret dan ikat kepala itu. Itu kan masyarakat mencirikan bahwa Bang Ara ini: “Sudah Subang *banget*,” kan begitu! Walaupun mungkin itu hanya sebagai strategi untuk penarikan simpatik, tapi orang sudah sangat salut dibandingkan dengan anggota DPR RI yang lain yang ke Subang datang pakai jas, pakai baju-baju dengan label-label partainya. Kalau Bang Ara kan tidak, dia datang pake kampret, pake baju hitam-hitam itu, menyesuaikan dengan budaya yang di Subang, akhirnya beliau diterima.”

---

<sup>220</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Kemampuan Maruarar untuk memasukkan dirinya dalam tampilan fisik bernuansa budaya lokal Suang membuat dirinya mendapat tempat di hati masyarakat Subang. Padahal sebagaimana masyarakat Jawa Barat lainnya, agama dan budaya itu adalah dua hal yang sama sekali tidak terpisahkan dari kultur budaya dan agama Subang. Sementara Maruarar beragama Kristen dan bersuku Batak tersebut, namun dirinya bisa masuk ke kalangan penduduk Subang. Padahal jika ditilik dari segi agama, penduduk Kabupaten Subang itu lebih dari 90% beragama Islam, dan peran agama sangat kuat dan ketat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda di Subang. Ojang menuturkan peran agama yang sedemikian kuat itu demikian,<sup>221</sup>

“Kemudian dari segi agama, mungkin Subang ini 90% lebih beragama Islam, dan sangat kuat masalah keagamaan itu di Subang ini. Tapi Bang Ara tadi dia memposisikan diri sebagai negarawan sejati, dia membantu itu bukan hanya ke Nasrani saja yang ada di Subang, tetapi ke masyarakat Islam kegiatan-kegiatan keagamaan ke masjidnya, semuanya dia bantu itu dari uang pribadi, itu yang saya tahu. Jadi masyarakat menganggap Bang Ara itu tidak sebagai Nasrani, dan tidak sebagai Batak, tetapi melihat Bang Ara itu sebagai sosok negarawan. Bang Ara memposisikan diri seperti itu. Tapi kalau dia pilih-pilih member perhatian atau bantuan hanya ke orang Nasrani saja atau hanya ke orang Batak saja, saya yakin

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Bang Ara akan diposisikan sebagai pertama di Batak, kemudian Nasrani. Tapi Bang Ara mampu memposisikan diri sebagai negarawan dengan kalimat, “Walaupun saya Nasrani, walaupun saya Batak, tetapi saya mencintai Subang, dan inilah bantuan saya kepada masyarakat.” Itu sepiantas yang saya tahu.”

Dua pendekatan yang dilakukan Maruarar yakni pendekatan agama dan pendekatan kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh Ojang Suhandi di atas adalah pendekatan yang sangat terkait dengan ikatan primordialisme sebagaimana dimaksudkan oleh Maswadi Rauf. Menurut Maswadi, untuk konteks Indonesia, ikatan primordialisme itu untuk konteks Indonesia terkait dengan dua hal, yakni: suku dan agama. Maswadi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang disebabkan keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu. Maka menurut Maswadi Rauf, ikatan primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Sebuah kelompok yang keanggotaannya didasarkan atas persamaan ras/suku dan/atau agama dapat dikategorikan sebagai kelompok primordial.



**Tabel 6. 1 Caleg Terpilih Dapil Jabar IX Pemilu 2009**  
Kab Subang, Kab Sumedang, dan Kab Majalengka BPP: 199.356 suara

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara Caleg	Suara Partai
PDI Perjuangan	1	Maruarar Sirait	1	128.850	Total 408.657 suara
	2	TB Hasanuddin	2	46.856	
Partai Demokrat	3	H. Yusyus Kuswardana	1	56.940	Total 283.817 suara
	4	Linda Megawati	3	25,258	
Partai Golkar	7	Eldie Suwandie	4	45.638	Total 237.886 suara
PAN	6	Primus Yustisio	7	60.684	Total 191.144 suara
PKS	8	Nurhasan Zaidi	1	33.223	Total 138.582 suara
PPP	5	Endang Sukandar	2	61.319	Total 114.627 suara

Sumber: diolah Penulis dari "Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009" dalam [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id).

Maruarar tentu saja tidak seorang keturunan dari suku Sunda dan tidak beragama Islam sebagaimana ikatan primordialisme yang dimaksudkan oleh Maswadi Rauf. Tetapi justru dua ikatan primordialisme yang sangat kuat bagi masyarakat di daerah Subang tersebut dimanfaatkan oleh Maruarar dalam merebut simpati warga dengan penggunaan symbol-simbol agama dan budaya lokal. Maruarar pastilah karena tahu betul bahwa aspek agama dan budaya merupakan dua hal yang sangat lekat dengan warga Subang, dan untuk menghargai warga pemilihnya, Maruarar menggunakan

lambang-lambang dan/atau simbol-simbol budaya dan agama untuk menunjukkan bahwa dirinya ada bersama dengan masyarakat Subang, dan pendekatan itu berhasil dengan sangat baik dan diterima oleh masyarakat Subang. Artinya, pandangan Maswadi Rauf terkait ikatan primordialisme justru dimanfaatkan oleh Maruarar dengan maksimal untuk melakukan pendekatan dengan warga Subang.

Selain masuk dengan simbol-simbol budaya Sunda lewat bentuk pakaian dan karakter yang tidak menonjolkan suku dan agama, Maruarar menunjukkan kecintaannya kepada Subang itu dengan kemampuannya berbahasa Sunda. Walaupun tidak fasih atau lancar berbahasa Sunda, tetapi Maruarar berusaha keras untuk menggunakan bahasa Sunda tersebut dalam menyapa warga. Pengakuan itu disampaikan Ojang Suhandi ketika ditanyakan perihal apakah Maruarar bisa berbahasa Sunda. Ojang menjelaskannya demikian,<sup>222</sup>

“Dia belajar sedikit-sedikit, dia juga sering berbicara peribahasa-peribahasa yang mungkin dia sering mengatakan, dan yang paling dia tahu ini istilah *lauk na beunang caik na herang*. Pasti dia selalu katakan itu filosofi itu, dan itu memang filsosofi yang sangat luar biasa. Artinya bahwa *lauk na beunang caik na herang* dimana dia posisi sebagai Batak sebagai Nasrani tapi mampu masuk ke wilayah yang bukan Batak bukan mayoritas Nasrani. Nah itu yang disebut *lauk na beunang caik na herang*. Visi misinya dia tercapai, dia meraih

---

<sup>222</sup> Wawancara dengan Suhandi.

simpati masyarakat tanpa mengorbankan nilai akidahnya dia, artinya kepercayaannya dia. Dia masuk ke dalam, masuk kemana-mana, tetap dia Nasrani tapi bisa diterima semua pihak. Itu artinya peribahasa itu, *lauk na beunang caik na herang*, pasti dia selalu mengatakan itu. Jadi dia sudah diterimalah sosoknya Bang Ara ini.”

Filosofi Sunda yang sangat bermakna tersebut di atas rupanya senantiasa dikatakan oleh Maruarar. Dan tentu saja itu merupakan penampilan empati yang ditunjukkan Maruarar yang memunculkan simpati yang besar terhadapnya. Sikap itu, menurut Ojang sangat dibutuhkan oleh warga, sebab bagi warga tidak terlalu penting apakah orang itu kaya atau pintar kalau tidak bisa mendekatkan diri dengan warga. Ojang menjelaskannya demikian,<sup>223</sup>

“Karena masyarakat sekarang itu siapa yang pernah berjasa, siapa yang dekat dengan masyarakat, tidak melihat latar belakangnya dari mana-mana, kemudian tidak melihat dia pintar atau bodoh, terus visi misinya jelek atau bagus tidak dilihat masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat itu sudah bersalaman, sudah bersentuhan tanganlah, sudah bertatap muka minimal. Maksimalnya sudah salaman, itu sudah diterima masyarakat. Dan Bang Ara melakukan itu. Artinya Bang Ara mau turunlah, sering turun.”

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Tetapi apakah sesungguhnya Maruarar senantiasa menggunakan bahasa Sunda dalam bertemu dengan warga? Menurut Ojang, bertemu dengan masyarakat itu, Maruarar menggunakan bahasa daerah yang diselang-selingi dengan bahasa Indonesia. Warga di Subang memang tidak selalu menggunakan bahasa daerah tetapi juga sudah sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia, sehingga pembicaraan selanjutnya kerap menggunakan bahasa Subang dan bahasa Indonesia bergantian sesuai kebutuhan. Ojang menjelaskan kemampuan Maruarar menggunakan bahasa daerah tersebut,

224

“Ada yang pakai bahasa daerah, ada pakai bahasa Indonesia karena Subang ini kan ada suku Jawa, ada Sunda. Berbahasa Jawa kan Bang Ara kurang bisa, tapi kalau pakai bahasa Sunda beliau sudah bisalah. *Kumaha damang*, beliau sudah mengertilah hal-hal yang sedikit-sedikit. Walaupun ke sananya tetap bahasa Indonesia karena masyarakat kita juga ngobrol pakai bahasa Indonesia. Hanya ada kelucuan dan rasa kagum, ini kalau misalnya ada sosok pejabat tinggi seperti Bang Ara yang turun ke desa pakai bahasa daerahnya walaupun dia bukan asli Subang, itu kan menjadi sebuah simpati masyarakat walaupun ujung-ujungnya diketawakan, ya diketawai masyarakat karena lucunya itu. Tapi justru itulah ke sananya menjadi kebanggaan masyarakat Subang kalau misalnya ditanya *kumaha damang*. Itu kan

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Bang Ara lakukan itu, sosoknya seperti itu, kan! Sebenarnya tidak adalah ilmiah-ilmiah yang dilakukan oleh Bang Ara itu.”

Uraian di atas menjelaskan bahwa kekaguman sebuah masyarakat terhadap pejabat Negara yang tidak satu suku dan tidak satu agama dengan warga setempat menjadi salah satu modal besar dari Maruarar yang dengan tidak merasa malu walaupun ditertawai oleh warga karena logatnya yang tidak sesuai dengan bahasa Sunda. Dan hasilnya warga merasakan tiga dampak sekaligus atas kehadiran Maruarar, yakni kehadirannya yang *karasa*, *katara*, *karampa*. Tentang ketiga istilah ini dijelaskan Ojang demikian,<sup>225</sup>

“Yang pasti dilakukan oleh Bang Ara, kalau bahasa saya itu kata Sundanya *karasa*, *katara*, *karampa*. Kalau dibahasa Indonesiakan, *karasa* itu terasa, terasa bantuannya dari Bang Ara, terasa perhatiannya, *katara* kelihatan, jadi bukan hanya orang itu membantu itu tapi orangnya ada di Jakarta lalu nyuruh orang di sini, kalau misalnya ada bencana alam bukan Bang Ara bilang, “Ya sudah saya bantu”, tapi dianya di Jakarta. Tidak, tapi dia langsung turun! Bang Ara langsung turun ke desa. *Karasa* itu terasa, *katara* itu kelihatan, terus *karampa* ada wujud ada bukti. Misalnya ada bantuan masjid dari Bang Ara, ada bantuan kantor desa dari Bang Ara. Jadi ada tiga, *karasa* terasa oleh masyarakat, *katara*

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan Suhandi.

kelihatan oleh masyarakat, dan *karampa* itu ada wujudnya. Tiga hal ini yang dilakukan oleh Bang Ara, terasa oleh masyarakat, kelihatan oleh masyarakat dan ada wujudnya, artinya kepegang.”

Diterimanya Maruarar di kalangan masyarakat Subang juga menggambarkan bagaimana Maruarar memahami dua ikatan primordialisme yakni agama dan budaya sebagai pintu masuk untuk mengambil simpati warga pemilihnya. Dua ikatan primordialisme itu disampaikan oleh Maswadi Rauf yakni kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan ras atau suku akan menghasilkan persamaan cultural lain seperti persamaan bahasa, adat istiadat, dan kedaerahan. Sehingga orang-orang yang berasal dari suku tertentu mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama. Primordialisme agama dan suku adalah dua hal terpokok yang pertama sekali menyentuh kehidupan manusia. Maswadi Rauf menjelaskan lebih lanjut bahwa kedua ikatan primordial tersebut akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat diantara sesama anggota kelompok. Solidaritas primordial dalam kelompok ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama.

Persamaan-persamaan ini membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Pemahaman akan dua ikatan primordial sebagaimana dimaksudkan oleh Maswadi Rauf tersebut digunakan

Maruarar untuk merebut simpati pemilihnya. Dengan dua ikatan primordialisme di atas, sikap yang ditampilkan Maruarar hadir langsung ke tengah warga memberikan langsung apa yang bisa diberikan tanpa diwakilkan, dan bahwa Maruarar tidak sekedar menjanjikan tetapi memberi bukti adalah tiga hal yang ditunjukkan oleh Maruarar kepada pemilih sehingga tiga istilah Sunda yakni *karasa*, *katara*, *karampa*. Padahal selama masa Orde Baru Kabupaten Subang itu merupakan basisnya Golkar setelah sebelumnya merupakan basisnya PKI. Tetapi sejarah bahwa Bung Karno pernah hadir dan berpidato di lapangan alun-alun Subang telah membuat ikatan emosionalitas warga dengan PDI Perjuangan menjadi lebih mudah dan dekat, dan itu juga tentu saja dimanfaatkan oleh Maruarar dengan sangat baik.

Namun satu hal yang selalu menjadi ingatan seluruh warga sehingga memenangkan PDI Perjuangan di Subang adalah ingatan bahwa Bapak Proklamator Kemerdekaan RI yakni Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Subang dan malah melakukan pidato kenegaraan di Subang. Ingatan itu selalu menjadi alasan yang disampaikan kepada warga untuk memilih PDI Perjuangan yang disosialisasikan sebagai kelanjutan dari pemikiran politik Presiden Soekarno dan karena ketua Umum PDI Perjuangan adalah puteri Presiden Soekarno, yakni Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan alasan bahwa Soekarno pernah ke Subang tersebut dan bagaimana isu tersebut disosialisasikan kepada warga. Sejarah politik yang terdapat di Kabupaten Subang sebagaimana dijelaskan oleh Ojang di atas tentu saja menunjukkan bahwa sebenarnya sosok Presiden Soekarno yang pernah berpidato di lapangan alun-alun Subang sangat memberi pengaruh untuk

masyarakat dalam menerima PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mereka pilih. Dan sosok PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang melanjutkan semangat Bung Karno kemudian dilaksanakan secara konkrit oleh Maruarar dalam menyapa masyarakat dan mendekati diri dengan mereka. Padahal, Kabupaten Subang yang adalah basisnya Partai Golkar selama 30 tahun lebih Orde Baru bisa berubah sejak Era Reformasi.

Dari seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Ojang di atas terlihat bahwa salah satu pendekatan yang dilakukan Maruarar yang membuat warga di Sukabumi bersimpatik ke Maruarar adalah kemauan Maruarar untuk memahami budaya dan agama lokal yang ada di Subang. Dan kemudian dengan tata krama termasuk menggunakan symbol-simbol agama dan budaya Sunda, Maruarar mampu merebut simpati warga yang memang dengan sangat konsisten, disiplin dan tegas kepada dirinya sendiri. Sikap disiplin dan konsistensi itu dibuktikannya dengan tidak menunda-nunda untuk turun langsung ke lokasi setiap kali ada kejadian seperti bencana alam, termasuk konsistensi untuk memberikan sumbangan tidak hanya ketika dimasa menjelang Pemilu, tetapi sepanjang tahun walaupun tidak ada Pemilu. Tentu saja juga sosok dari PDI Perjuangan yang mendapat simpati dari warga dimana sejak Pileg 1999, 2004, hingga 2009 partai ini selalu menjadi pemenang di Kabupaten Subang juga dimanfaatkan oleh Maruarar. Walaupun kemudian dalam praktek selanjutnya Maruarar membuktikan dirinya sebagai caleg yang tepat untuk dipilih yakni dengan senantiasa datang dan dekat dengan warga walaupun tidak sedang menjelang Pemilu dan



datang dengan tampilan pakaian khas Subang yakni kampret dan baju hitam.

Seluruh penuturan yang disampaikan oleh Ojang Suhandi (Bupati Subang) di atas menunjukkan bagaimana Maruarar Sirait dengan sangat baik mempraktekkan jiwa nasionalisme sebagaimana dimaksudkan oleh George McTurner Kahin yang mendapat penegasan dari muridnya Burhan Djibir Magenda tentang peran partai politik dalam penguatan jiwa nasionalisme tersebut. Dari penuturan Ojang Suhandi tersebut terlihat keinginan yang sangat kuat dalam diri Maruarar untuk benar-benar diterima, membaaur dengan seluruh warga di daerah pemilihannya tanpa dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme baik suku maupun primordialisme agama. Artinya, Maruarar mempraktekkan benar jiwa nasionalisme yang dimaksudkan Kahin sebagai perekat dirinya dengan warga pemilihnya. Dalam hal ini juga pandangan Burhan tentang peran penting dari partai untuk terus menerus meneguhkan semangat nasionalisme tersebut tampak jelas dalam PDI Perjuangan dimana Maruarar menjadi caleg dan menjadi anggota DPR RI.

### **6.3. Sesama Korban Orde Baru Dan Konsistensi Bantuan Sosial**

Keterpilihan para caleg beragama Kristen di basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat tentulah sesuatu yang patut untuk ditelusuri. Apalagi jika para caleg Kristen tersebut justru meraih suara sangat signifikan di daerah pemilihan yang diikutinya. Sebagaimana diketahui, Jawa Barat adalah salah satu basis Islam yang sangat kuat dan tingkat primordial agamanya cukup terlihat, sebagaimana misalnya bisa kita lihat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

dan Tahun 2019. Sepanjang dua masa periode pemilihan presiden tersebut, kemenangan signifikan diraih oleh Prabowo Subianto mengalahkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Alasan mendasar kemenangan signifikan Prabowo Subianto di Jawa Barat karena calon presiden tersebut didukung oleh para tokoh-tokoh agama yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Maka menjadi sangat menarik jika melihat keterpilihan para caleg beragama Kristen dari Jawa Barat, setidaknya jika dilihat dari alasan mengapa para pemilih di basis Islam yang kuat tersebut justru memilih para caleg Kristen.

Selain argumentasi yang sudah disebut dalam Bab sebelumnya, setidaknya dalam Bab ini akan disampaikan dua argumentasi penting yakni karena senasib dan sepenanggungan sebagai sama-sama merupakan korban dari pemerintahan otoritarian Orde Baru. Alasan lain dari pemilih adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk pengobatan gratis dan bantuan sosial lain sepanjang minggu dan sepanjang bulan tanpa mengenal masa-masa pemilu. Kedua argumentasi ini akan digali dalam Bab berikut ini.

### **Sesama Korban Orde Baru**

Faktor lain yang memenangkan caleg Kristen di basis Islam yang kuat adalah faktor perasaan senasib sebagai sesama korban dari Orde Baru. Faktor ini diakui langsung oleh salah satu tokoh yang menggalang sangat banyak dukungan untuk kemenangan Ribka, yakni Abah Abidin (usia 69). Pengalamannya selama 12 Tahun (1966-1978) sebagai

tahanan Politik G-30/S PKI membuatnya memiliki ikatan emosional yang besar ketika salah seorang dari anak korban pemerintah Orde Baru muncul menjadi caleg DPR RI, yakni Ribka. Walaupun Abah Abidin sempat ditahan di Pulau Buru, namun sosoknya masih tetap sangat dihormati di Kampung Cicolawing dan di Kecamatan Nagrak sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat. Setiap kali ada pertemuan warga atau upacara berkaitan dengan adat, Abah Abidin selalu dilibatkan dan menjadi sosok orang tua yang didengar pandangannya. Ikatan emosionalitas yang sangat tepat seperti digambarkan oleh Clifford Geertz bahwa aspek politik ketika sudah berbaur dengan aspek primordialisme menjadi sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. Gambaran pengalaman Abah Abidin yang tidak mampu lagi melihat kemungkinan lain selain Ribka Tjiptaning karena sudah terikat secara primordial dengan sangat kuat dalam menentukan keputusan politiknya untuk mendukung sehabis-habisnya keterpilihan Ribka, persis seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz.

Terkait dengan keadaan kampung Cicolawing dan seluruh desa Pawenang, Abah Abidin menjelaskan sekilas situasi penduduk sesuai dengan agamanya dan bagaimana kehidupan keagamaan di desa itu dilakukan. Jumlah penduduk beragama Islam yang sangat mayoritas hampir seluruhnya beragama Islam itu bisa terlihat dari penjelasan Abah Abidin terkait penduduk dan rumah ibadat di kampung tersebut,<sup>226</sup>

---

<sup>226</sup> Wawancara dengan Abah Abidin (usia 69) Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Sabtu, 28 April 2012, pukul 15.43wib RT 02/RW01 no 23, Kampung Cicolawing, Desa Pawenang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat. Abah Abidin Tahanan Politik G30/S PKI di Pulau Buru, Amboina, Maluku Selama 12 Tahun (1966-

“Di desa ini jumlah semua total penduduk 6000an dewasa tapi yang KK itu sekitar 3000an. Muslimnya yah mungkin 99,99%. Jumlah masjid dan musholla nya, masjid yang besar-besar ada 15 buah mesjid besar. Kalau ditotal rata-rata satu kampung ini masing masing RT ada tiga buah, di sini ada 32 RT, jadi sekitar seratusanlah, ada juga tiga pesantren. Yang jelas sekarang di kampung ini kalau Jumatan malah sampai di emperan.”

Abah Abidin mengenal Ribka setelah membaca buku tulisan Ribka terkait kebanggaan dirinya sebagai anak PKI. Buku berjudul, “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, itu sudah dibaca oleh Abah Abidin sejak tahun 1998, ketika Era Reformasi baru bergulir. Tetapi perkenalannya secara fisik baru dialaminya ketika Ribka menjadi caleg pada Pileg 2004 yang lalu. Abah Abidin menjelaskan,<sup>227</sup>

“Saya ini orang yang pernah ditahan selama 12 tahun, iya masalah politik. Waktu itu saya cenderung ingin ketemu dengan Ibu Ribka waktu tahun 1998 akhir. Ribka pernah menulis “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, sudah terbit dulu itu. Itu tahun 1998 sebelum dekat-dekat reformasilah. Karena saya memang eks PKI, saya di situ timbul pikiran begini, “Ini terlalu gegabah ini orang.” Sebab

---

1978). Abah Abidin adalah Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi.

<sup>227</sup> Wawancara Abidin.

ini banyak dampaknya. Sebab waktu tahun-tahun di zaman Suharto sebelum Reformasi, yang namanya eks PKI itu adalah atheis, iblis, tukang judi, pemberontak. Tapi kenapa Tjiptaning menulis “Aku Bangga Jadi Anak PKI?”

Penjelasan Abah Abidin itu menunjukkan bahwa pengenalan Abah Abidin terhadap Ribka sudah sejak lama, bahkan sejak awal Era Reformasi bergulir. Maka muncul perasaan senasib dan sepenenderitaan diantara dirinya dengan Ribka, yang juga adalah seorang anak PKI. Hubungan emosional sebagai sesama korban dari pemerintahan Orde Baru menjadi sangat kental dalam diri Abah Abidin, sehingga dirinya melakukan penggalangan sangat serius ke banyak pihak untuk memilih Ribka sehingga bisa kelak menjadi anggota DPR RI. Bagi Abah Abidin, sosok Ribka adalah sosok politisi yang sangat berani, karena sejak masih bergulirnya Era Reformasi dirinya sudah berani mengakui sebagai keturunan dari yang terlibat PKI. Resiko itu tentu sangat berbahaya di masa awal Orde Baru karena masih sangat melekat permusuhan Orde Baru dengan kelompok-kelompok yang dituduh sebagai PKI.

Kekaguman Abah Abidin kepada Ribka membuatnya tidak ada pilihan selain menggalang massa seluas-luasnya khususnya dari para keturunan korban-korban Orde Baru yang dituduh sebagai PKI untuk memenangkan Ribka menjadi anggota DPR RI. Kekaguman itu disampaikan Abah Abidin demikian,<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> Wawancara Abidin.

“Lama-lama terjadi Reformasi. Ternyata setelah Reformasi di situ akhirnya jadi negara yang demokratis. Suharto lengser, terus Gus Dur naik, dicabutlah (Tap) MPRS No 25 itu. Makanya saya bangga dengan Tjiptaning. Saya anggap dia pahlawan saya. Waktu dia datang ke tempat Abah ini tahun menjelang pileg itu, dia buka Posko di Cibolang. Saya berangkat ke sana, saya perkenalkan diri, “Saya Koordinator orang Pakorba”. “Apa itu Pakorba?” katanya. Saya jawab, “Paguyuban Korban Orde Baru. Saya yang pernah dikorbankan orang Orde Baru.” Makanya Tjiptaning semakin dekatnya dengan saya bilang begini, “Abah, tolong bantu saya.”

Ketika mengetahui bahwa Ribka adalah anak PKI, maka didorong oleh emosionalitas sebagai sesama yang bergaris PKI, maka Abah Abidin menjadi pendukung utama kemenangan Ribka. Abah Abidin tidak mau dimasukkan sebagai tim sukses, dan dirinya tidak mau mendaftarkan diri sebagai tim sukses Ribka. Tetapi didorong oleh kerinduan untuk melihat anak seorang PKI menjadi anggota DPR dan karena kebanggaannya akan pencalegan Ribka, maka Abah Abidin bekerja keras tanpa diperintah oleh Ribka untuk memenangkannya. Bahkan pengalamannya bertengkar dengan pemilih/penduduk lainnya di Kecamatan Nagrak sesama eks PKI yang tidak mau mendukung pencalegan Ribka membuktikan bahwa Abah Abidin bukan didorong oleh uang atau jabatan sehingga mendukung Ribka. Karena itu pula

maka Abah Abidin berani memanggil Ribka dengan nama kecilnya yakni Tjiptaning karena Abah Abidin merasa Ribka itu sebagai anaknya sendiri. Terkait dengan pengalaman tersebut, Abah Abidin menjelaskan,<sup>229</sup>

“Abah bukan tim sukses dan saya tidak mau jadi tim sukses yang tercatat itu, tapi karena merasa terpanggil bahwa ini adalah anak saya Tjiptaning itu, Saya bekerja siang malam itu demi menggolkan suara Tjiptaning, sampai Tjiptaning untuk daerah Kabupaten Sukabumi melebihi kuota. Itu makanya Tjiptaning tahu sendiri. Saya pernah bertengkar dengan salah satu teman yang sama-sama eks. Bertengkar, perang mulut saya. Karena saya tetap ingin menggolkan Tjiptaning waktu itu, ternyata berhasil.

Karena Tjiptaning tahu saya habis-habisan memperjuangkan dia di daerah sini untuk berhasil menjadi dewan. Saya juga bangganya, beraninya dia membuka pintu itu. Itu saja kalau dengan Tjiptaning.”

Menelusuri populasi penduduk di Kecamatan Nagrak yang terlibat PKI, Abah Abidin menjelaskan bahwa memang kampung tempat tinggalnya adalah basis dari pengikut PKI. Maka ketika Orde Baru melakukan pembersihan terhadap pengikut-pengikut atau eks-eks PKI, Kecamatan Nagrak itu menjadi sorotan utama pemerintahan Orde Baru. Dan ketika

---

<sup>229</sup> Wawancara Abidin.

pemilihan umum, penduduk yang mayoritas adalah pengikut PKI tersebut menjatuhkan pilihan ke PDI Perjuangan. Para pemilih itu juga yang mendukung kemenangan Ribka ketika Pileg 2004 dan Pileg 2009. Abah Abidin menjelaskan terkait pertanyaan seberapa banyak eks korban Orde Baru di daerah tersebut demikian,<sup>230</sup>

“Untuk Kabupaten Sukabumi itu dulu ada 1200 orang, yang dikirim ke Pulau Burunya sekitar 50an orang. Kalau di Kecamatan Nagrak ini atau di desa Pawenang kita ini hampir habis, karena semuanya eks PKI. Karena di sini basis makanya begitu reformasi, untuk Kecamatan Nagrak PDI unggul. Eks korban Orde Baru di sini banyak, untuk Pawenang itu ada 600 an orang untuk satu desa. Satu kecamatan, *bayangin saja* 10 desa kali 600 orang sudah 6000 orang *hee..heee*. Memang daerah ini basis, makanya untuk wilayah Kecamatan Nagrak itu di Sukabumi ini yang paling disorot waktu zaman Orde Baru. Begitu terus kita beritahu teman-teman tentang Ribka.”

Abah Abidin membaca secara detail isi dari buku Ribka tersebut. Buku itu seolah menjadi pemantik bagi hubungan emosional antara dirinya terhadap Ribka. Menurut Abah Abidin, buku itu bukan buku politik, bukan buku tentang partai, tetapi tentang riwayat hidup Ribka sendiri yang mengalami diri sebagai anak PKI diperlakukan tidak adil baik

---

<sup>230</sup> Wawancara Abidin.



oleh pemerintah, oleh lingkungannya maupun oleh komunitas masyarakat secara luas. Abah Abidin juga menceritakan bagaimana susah dan sulitnya kehidupan yang dirasakan oleh keturunan-keturunan yang dicap pemerintah Orde Baru sebagai PKI. Bahkan untuk bersekolah pun mengalami hambatan, termasuk mendapatkan jabatan entah sebagai Ketua RT sekalipun tidak diijinkan. Terkait perlakuan tidak adil perlakuan masyarakat luas dan oleh Negara yang dialami oleh orang-orang dan anak-anak yang terlibat PKI itu menjadi basis dari isi buku yang ditulis oleh Ribka. Dan semua yang ditulis oleh Ribka itu persis seperti yang dialami oleh seluruh orang-orang yang terlibat atau yang dituduh terlibat sebagai PKI. Pengalaman pahit di atas memperkuat alasan Abah Abidin bersemangat emosional mendukung sebesar-besarnya supaya Ribka berhasil menjadi anggota DPR RI dimana pengalaman sangat pahit yang dialami oleh eks-eks dan keturunan PKI diperlakukan tidak adil. Pengalaman itu rupanya membuat luka yang mendalam pada diri Abah Abidin, sehingga dia dengan sangat bersemangat menggalang dukungan untuk memenangkan Ribka. Penerimaan masyarakat terhadap Ribka mematahkan teori Clifford Geertz terhadap bahaya pencampuran aspek primordial dengan aspek politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dapil Ribka, aspek agama dan suku menjadi sangat kuat termasuk untuk urusan politik. Tetapi teori Geerts itu menjadi tidak benar ketika sekat-sekat itu justru bisa dipatahkan oleh Ribka dengan perbuatan karya yang konkrit ke tengah masyarakat pemilih. Bahkan untuk Ribka Tjiptaning, ikatan primordialisme itu sama sekali tidak dilandaskan oleh beberapa hal sebagaimana disebutkan Clifford Geertz tetapi justru oleh hal lain yang berciri politik yakni sama-sama sebagai korban Orde Baru

karena garis keturunan PKI. Ini jenis dukungan yang sama sekali tidak didapatkan oleh caleg Kristen lain kecuali oleh Ribka. Perkenalan Abah Abidin sehingga bisa dekat dengan Ribka justru dilandasi sebagai sesama garis PKI yang menjadi korban Orde Baru, bagaimana Abah Abidin bisa ketemu Ribka dan menjadi sangat dekat.

Tetapi masyarakat tidak akan memilih Ribka begitu saja bila tidak melihat perbuatan konkrit yang juga dilakukan oleh Ribka sendiri ke tengah masyarakat. Kepala Abah Abidin disampaikan pertanyaan terkait apa yang dibuat oleh Ribka ke tengah-tengah warga sehingga warga merasa Ribka itu perlu didukung. Bagi Abah Abidin, alasannya sangat tunggal, tidak ada dua atau tiga. Alasan dukungannya murni karena keterkaitan dengan garis PKI tersebut saja. Dia ingin membuat dan menunjukkan bahwa eks-eks dan keturunan PKI itu harus bersih dan dapat diterima secara luas dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Harapan Abah Abidin, semua eks dan keturunan PKI tersebut harus sudah mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan masyarakat lain. Karena itu Abah Abidin tidak mempertimbangkan aspek materi atau aspek jabatan di tim kampanye Ribka. Yang terutama adalah bagaimana supaya Ribka terpilih, dan itu sudah menjadi kebanggaan besar bagi Abah Abidin. Karena Abah Abidin sangat yakin bahwa dengan terpilihnya Ribka akan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi seluruh keturunan dari eks PKI untuk berkarya dan mendapat perlakuan yang sama dan setara dalam segala hal seperti anak-anak bangsa yang lain.

**Tabel 6. 2 Caleg Terpilih Dapil Jabar IV Pemilu 2009  
Kab Sukabumi dan Kota Sukabumi, BPP: 164.791 suara**

Partai Politik	No	Nama Caleg Terpilih	No. Urut Caleg	Suara Caleg	Suara Partai
Partai Demokrat (2 kursi)	1	Pasha Ismaya Sukardi	1	76.064	Total: 311.424 suara
	2	Ingrid Palupi Kansil	3	33.418	
Partai Golkar	3	Dewi Asmara	2	51.242	Total 165.552 suara
PDI Perjuangan	4	Ribka Tjiptaning	1	33.442	Total 136.730 suara
PKS	5	Yudi Widiana Adia	1	37.114	Total 109.489 suara
PPP	6	Reni Marlinawati	1	26.469	Total 84.528 suara

*Sumber: diolah Penulis dari "Catatan CETRO dari Rapat Pleno KPU 24 Mei 2009" dalam [www.cetro.co.id](http://www.cetro.co.id).*

Maka untuk memastikan apakah hanya alasan tunggal tersebut yang membuat Abah Abidin dengan sekuat tenaga mendukung Ribka atau ada alasan lain, maka kepada Abah Abidin diulangi lagi pertanyaan perihal dari pihak Ribka, apa yang dia lakukan untuk menarik simpati warga. Atas pertanyaan tersebut, Abah Abidin tetap mempertahankan pendapatnya bahwa yang membuatnya sungguh membela dan

mendukung pencalegan Ribka adalah karena garis PKI tersebut.

Melihat besarnya jumlah penduduk yang menjadi eks PKI di Kabupaten Subang, terutama di Kecamatan Nagrak, tentu saja ada orang yang mengorganisir mereka untuk memilih Ribka. Terkait dengan siapa yang mengorganisir tersebut, Abah Abidin menjelaskan bahwa dirinya langsung menjadi koordinator atas warga yang eks PKI untuk memberikan dukungannya kepada Ribka. Abah Abidin menjelaskan terkait pertanyaan siapa yang mengorganisir teman-teman eks PKI itu di sini untuk memilih Ribka itu. Abah Abidin menjelaskan bagaimana pengorganisasian itu dia lakukan,<sup>231</sup>

“Saya pergi kemana-kemana, ke sepuluh kecamatan di seluruh Sukabumi ini. Semacam kampanye lah Abah Tjiptaning! Tanpa diberi uang transport sama Tjiptaning saya itu. Karena dari istilahnya Abah itu *door to door*. Misalnya, kita masuk kampung ini yang didatangi teman Abah dulu. Itu kan dari satu orang punya mantu tiga, cucu empat, satu keluarga itu sudah 10 masuk, kali 6000 sudah berapa. Sampai batas ke daerah Pelabuhan, Pejampar Tengah dan Secager Anteng. Ya banyak kecamatan, mungkin di Dapil 5 saja ada 10 kecamatan. Abah jalanin karena Abah di dapil 5 ada 10 kecamatan, itu Abah yang koordinir yang orang-orang tua. Misalnya: 10 kecamatan itu: Nagrak,

---

<sup>231</sup> Wawancara Abidin.

Caringin, Cikemar, Cibadak, Parung Kuda, Ciambar, Cikidaeng, Ciantanyan, ada dua lalgi kecamatan aku lupa. Iya 10 kecamatan Abah jalanin.”

Penjelasan dari Abah Abidin menunjukkan bahwa pengorganisasian atas penggalangan dukungan terhadap Ribka tidak berada dalam sebuah tim yang resmi atau terorganisir. Penggalangan dukungan terhadap pencalegan Ribka dilakukan seorang diri oleh Abah Abidin. Seorang diri Abah Abidin menemui setiap pemilih dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dan memesankan kepada setiap orang keturunan dan keluarga eks PKI entah dimana pun berada yang dia jumpai dan kemudian menitipkan pesan tersebut. Artinya penggalangan dukungan dari pihak eks-eks PKI terhadap pencalegan Ribka dilakukan sendirian oleh Abah Abidin secara bebas seturut kemampuan dirinya untuk menemui warga dimaksud.

Karena penggalangan dukungan ini tidak terkoordinir dengan baik tetapi hanya dilandasi oleh semangat dan hubungan emosional yang sangat kuat, maka tentu saja perlu dipertanyakan juga apakah yang didekati oleh Abah Abidin itu hanya para korban Orde Baru atau yang lain juga. Karena itu kepada Abah Abidin disampaikan pertanyaan terkait warga yang digalang oleh Abah Abidin apakah hanya eks korban Orde Baru saja atau semua warga lain yang bukan eks Orde Baru tapi pendukung Ribka. Terkait dengan pertanyaan ini, Abah Abidin menegaskan bahwa dirinya hanya focus ke para korban Orde Baru tersebut dengan bobot bahwa mereka adalah korban yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

dan sekarang ingin bangkit untuk menjadi setara dengan warga yang lain. Abah Abidin menjelaskan,<sup>232</sup>

“Ya memang Abah lakukan hanya itu. Ya akhirnya Abah sering terjun ke desa-desa waktu itu. Dan penduduk menerima penjelasan Abah itu. Mereka terima! Yang Abah sampaikan, kita orang kecil. Kalau untuk eks (PKI) itu acaranya itu sangat mantap karena merasa senasib, terpanggil itu, merasa sepenenderitaan, merasa ditekan, merasa tertindas, “Sekarang matahari sudah bersinar, cobalah kita jalan. Diantaranya, anak rekan kita mau jadi caleg supaya didukung.”

Namun demikian, perolehan suara Ribka justru kalah di Desa Pawenang dimana yang unggul justru caleg-caleg dari Partai Golkar walaupun perolehan suaranya tidak berbeda jauh. Namun bila melihat per kecamatan, memang perolehan suara Ribka terbesar ada di Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Pelabuhan Ratu dimana rumah sakit Ribka berlokasi. Untuk Kecamatan Nagrak basis perolehan suaranya terutama terdapat di Desa Cihanyawar. Menurut Abah Abidin, ada tiga desa yang menjadi basisnya Ribka di Kecamatan Nagrak, yang bila diurutkan adalah Desa Cihanyawar, Desa Nagrak Utara, dan yang ketiga adalah Desa Pawenang itu sendiri.

Menurut Abah Abidin, sosialisasinya kepada warga untuk memilih caleg Ribka tidak hanya terdapat di Desa

---

<sup>232</sup> Wawancara Abidin.

Pawenang saja, tetapi sampai melintasi sejumlah desa dan kecamatan. Termasuk kemenangan di Desa Cihanyar tidak terlepas dari upaya sosialisasi dari Abah Abidin. Sebagaimana diakui oleh Abah Abidin, Desa Cihanyar adalah salah satu basis dari para eks korban Orde Baru yakni eks PKI juga. Maka ketika Pemilu Legislatif berlangsung pada 5 April 2009 lalu, Abah Abidin sekuat fisiknya memantau langsung perolehan suara Ribka di basis-basis yang dikunjunginya untuk membuktikan apakah sosialisasi yang dilakukannya itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Dan menurut Abah Abidin, basis-basis yang selama ini dia lakukan sosialisasi seorang diri memang menjadi TPS yang menjadi basis kemenangan Ribka secara keseluruhan. Terkait dengan upaya pemantauan terhadap perolehan suara Ribka pada hari “H” Pileg 2009 itu, Abah Abidin menjelaskan,<sup>233</sup>

“Waktu pemilihan itu, Abah keliling ke tiap daerah itu. Ini saya punya daftar sampai sekarang perolehan suara Ribka itu yang sempat saya jalanin semuanya, di sejumlah Kecamatan ini (*lalu dia bacakan*): Kecamatan Jampang 7196 suara, Kecamatan Sukarsaja 6950 suara, Kecamatan Cicurug 6132 suara, Kecamatan Pelabuan 5374 suara, Kecamatan Nagrak 5355 suara, Kecamatan Surade 3404 suara. Itu kalau per Kecamatan. Kalau menurut per desa yang sempat saya catat, Ribka mendapat suara di Nagrak Utara 533 suara, Cihanyawar 271 suara, Kalepa Rea 117 suara, Pawenang 145 suara, Cisarua

---

<sup>233</sup> Wawancara Abidin.

119 suara, Giri Jaya 179 suara, Nagrak Selatan 118 suara, Talekabang 103 suara, Panajang 226 suara, dan Derma Raya 80 suara. Itu desa beda-beda kecamatan, yang saya bisa jangkau cepat dan terdekat.”

Pengalamannya yang pahit sebagai tahanan politik Pemerintahan Orde Baru juga diceritakan Abah Abidin walaupun sudah berlalu hampir 50 tahun yang lalu, tetapi masih terus dikenangnya. Pengalaman yang membuat Abah Abidin memiliki keterikatan emosional yang sangat mendalam dengan Ribka,<sup>234</sup>

“Abah di Pulau Buru, keluar tahun 1979, dari 1965 sampai tahun 1978 akhir. Di pulau Buru sembilan tahun, tiga tahun tahanan daerah dari mulai ditangkap, dari desa dikirim ke koramil tingkat kecamatan. Dari koramil masuk kabupaten tingkat kodim, di kodim tiga tahun. Dibawa ke Pulau Buru Amboina sembilan tahun, jadi semuanya dua belas tahun. Itu kan memang undang-undang subversif, kan undang-undangnya dua belas tahun, itu kan masih berlaku subversif zamannya Soeharto.”

Namun apakah dukungan yang diberikan oleh Abah Abidin yang seorang Islam tidak mempertimbangkan agama yang dianut Ribka yang Kristen? Dan bagaimana warga yang 99,99% memeluk agama Islam di daerah Abah Abidin itu

---

<sup>234</sup> Wawancara Abidin.



tetap konsisten memberikan suara ke Ribka? Terkait dengan itu, Abah Abidin menjawab bahwa tentu saja warga ada yang tahu dan mungkin juga ada yang tidak tahu terkait agama Kristen yang dianut oleh Ribka. Tetapi bagi mereka tidak merasa perlu untuk mempersoalkan agama yang dianut oleh Ribka, karena bagi mereka agama itu urusan masing-masing, dan tidak berkaitan dengan politik terkait pilihan mereka ke Ribka. Mereka tidak mau tahu apakah Ribka seorang islam atau seorang Kristen, yang mereka lihat adalah bahwa Ribka itu keturunan PKI dan karena itu mereka menjadi terikat secara emosional terhadap Ribka.

Perihal agama yang dianut Ribka dan pilihan politik warga kepada Ribka dijelaskan Abah Abidin demikian,<sup>235</sup>

“Orang semua tahu Ribka itu Kristen. Pandangan orang tentang dia itu, memang Ribka orang Kristen. Iya semua orang tahu. Kalau ditanya fanatic, pasti ada, apalagi di sini mayoritas Islam. Itu kita memandang bukan soal agama. Orang memilih Tjiptaning itu karena nasionalistis negara, agama silahkan agama saja, agama apa saja. Orang memilih itu nasionalis bukan agama yang dilihatnya itu.”

Untuk melihat apakah ada persoalan agama di kalangan pemilih terkait agama Kristen yang dianut oleh Ribka ketika berhadapan dengan warga yang 99,99% beragama islam, maka perlu dilihat apakah ada penolakan terkait agama yang dialami oleh Ribka. Menurut Abah Abidin,

---

<sup>235</sup> Wawancara Abidin.

sepanjang dia melakukan sosialisasi tentang Ribka, tidak ada satu orang pun yang mempertanyakan perihal agama Kristen yang dianut oleh Ribka. Dari seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Abah Abidin di atas sangat jelas bahwa argumentasi untuk mendukung Ribka supaya terpilih menjadi anggota DPR RI secara tunggal dilandasi oleh keterikatan emosional sebagai sesama korban Orde Baru karena terkait dengan PKI. Maka Abah Abidin menggalang dukungan semaksimal dia mampu untuk memilih Ribka tanpa peduli tentang agama Kristen yang dianut oleh Ribka dan tidak menuntut apapun dari Ribka, entah jabatan atau pekerjaan maupun dari segi uang atau materi maupun janji lewat proposal bantuan apapun.

#### **6.4. Konsistensi Pengobatan Gratis untuk semua Warga**

Alasan lain dari pemilih beragama Islam di basis Islam yang kuat memilih caleg-caleg beragama Kristen karena pendekatan caleg-caleg Kristen yang bernuansa ekonomis. Pendekatan bernuansa ekonomis tersebut lewat pengobatan gratis yang dilakukan oleh Ribka. Abah Abidin pemilih yang diwawancarai terkait alasan mengapa dirinya memberikan dukungan sangat maksimal kepada Ribka, memang tidak terlalu melihat aspek ekonomis yang dilakukan Ribka tetapi memilih karena garis korban Orde Baru sebagai PKI. Tetapi Abah Abidin juga tidak menolak bahwa aspek ekonomis lewat pengobatan gratis yang dilakukan Ribka menjadi salah satu aspek yang memenangkan Ribka, dari dua aspek lain yang mendukung kemenangan Ribka yakni garis korban Orde Baru sebagai PKI dan basis partai lewat PDI Perjuangan. Terkait dengan aspek pengobatan gratis ini, Abah Abidin meyakini

bahwa selain garis sebagai sesama PKI, Ribka juga mendapat simpati dari rakyat banyak karena pengobatan berupa baksos yang dia lakukan dan atas pendirian secara tetap sebuah Rumah Sakit Pelita Rakyat di Jl.Pelabuhan II no. 262 Kel. Situmekar, Kec. Lembur Situ, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Abah menjelaskan tentang pengobatan gratis yang dilakukan oleh Ribka itu demikian,<sup>236</sup>

“Itu desa sebelah, Desa Cihanyawar basis pendukung dia terbesar. Di situ dia lakukan Baksos pengobatan gratis dua kali sebelum terpilih. Dia lakukan itu pengobatan gratis. Sekarang pengobatan gratisnya mau terus setahun sekali atau dua kali setahun. Sekarang karena di bikin rumah sakit. Ya, dia bikin rumah sakit di Sukabumi. Sekarang pengobatan gratis dialihkan ke situ semua.”

Alasan pilihan pemilih yang diungkapkan oleh Abah Abidin ini bila melihat pandangan dari hasil penelitian Affan Gaffar di Brobanti Yogyakarta yang menemukan bahwa aspek aliran agama lebih utama dari aspek lain, menjadi sedikit berbeda. Khusus untuk konteks penelitian ini tampak sekali bahwa kebutuhan pragmatis yang riil konkrit dialami langsung oleh warga rupanya menjadi salah satu pertimbangan pokok bagi warga selain tentu saja kita masih harus mengatakan bahwa aspek agama masih sangat penting karena Ribka justru menjalin relasi yang kuat dan mendalam dengan para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat di lokasi pemilihnya. Hasil penelitian Affan Gaffar

---

<sup>236</sup> Wawancara Abidin.

menunjukkan bahwa studinya tersebut juga berkontribusi untuk melanjutkan debat diantara ilmuwan (khususnya Indonesia) entah kelas atau budaya memiliki kekuatan penjelasan yang lebih besar dalam memberikan sebuah kegunaan bagi politik Jawa dan Indonesia. Studi tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa kelas tidak memiliki apapun terkait perilaku pemilih di desa-desa Jawa, sekurang-kurangnya ketika mereka menjatuhkan pilihan rahasia dalam Pemilu.

Pembukaan rumah sakit yang dilakukan oleh Ribka tersebut sangat terbuka untuk siapa saja dan dari golongan mana saja, tidak pernah memperdebatkan apakah seorang warga berasal dari suku atau agama tertentu, atau berasal dari partai tertentu atau dari daerah tertentu, atau dari golongan ekonomi tertentu. Rumah sakit tersebut terbuka untuk siapa saja yang mau datang untuk berobat setiap saat. Pemahaman itu diperoleh dari penjelasan Abah Abidin demikian,<sup>237</sup>

“Siapa yang mau berobat gratis, silahkan datang ke rumah sakit Pelita Rakyat di Jalan Lembur Situ Sukabumi bawa Askes, bawa Jamkesmas, bawa Askeskin, bawa Jamkesda, bawa KTP saja. Tidak punya KTP juga bisa semua akan diobati. Itu Tjiptaning itu. Itu ada rumah sakitnya, mungkin Tjiptaning juga cerita. KTP saja jalan tanpa Jamkesda, Jamkesmas. Dari orang-orang sini sudah banyak yang berobat ke sana, misalnya ada empat lima orang dibawa pake mobil ke sana dan diobati

---

<sup>237</sup>Wawancara Abidin.

dengan baik. Biasa dibawa kesana untuk berobat termasuk dari kampung ini.”

Dari penjelasan Abah Abidin ditemukan bahwa debat sebagaimana dimaksudkan Affan Gaffar terkait faktor kelas tampaknya memang masih akan terus berlanjut terkait pertanyaan apakah faktor kelas sosial memberi pengaruh pada pilihan warga. Penelitian ini menemukan bahwa bukan di faktor budaya, faktor agama, dan faktor kelas yang mempengaruhi pilihan pemilih, tetapi yang setara dengan itu adalah kebutuhan konkrit yang menyentuh langsung kehidupan warga dalam jangka pendek, yakni pengobatan gratis atau baksos tersebut. Penjelasan Abah Abidin di atas menunjukkan bagaimana pengobatan gratis tersebut dilakukan oleh Ribka kepada semua kalangan tanpa ada sekat-sekat apapun, entah sekat agama, sekat suku, dan sekat politik karena tidak menjadi pemilih Ribka. Bahkan kemudahan pun bagi warga dibuka seluas-luasnya supaya bisa berobat dengan lebih mudah tanpa harus dibebani dengan persyaratan yang rumit.

Sebagaimana dijelaskan Abah Abidin di atas termuat bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Ribka ditempuh dengan dua jalur, yakni lewat rumah sakit dan lewat baksos ke kampong-kampung, entah sekali atau dua kali dalam setahun secara berkeliling. Dan bagaimana pengenalan dan kedekatan Abah Abidin dengan Ribka juga menjalar ke para petugas di rumah sakit atau pengobatan yang dimiliki Ribka dalam menerima kehadiran Abah Abidin. Penjelasan Abah Abidin terkait pengobatan gratis yang dilakukan oleh Ribka itu tidak terlalu mendalam, kecuali dia tahu bahwa itu adalah salah satu upaya dari Ribka untuk menarik simpati dari rakyat pemilih di

daerah pemilihannya. Diakui oleh Abah Abidin bahwa pengobatan gratis entah melalui baksos atau ke rumah sakit yang didirikan Ribka mendapat sambutan dari rakyat banyak. Terbukti bahwa sangat sering dari kampungnya yang di pelosok itu diantar ke rumah sakit Ribka yang diperkirakan jaraknya sekitar 45 kilometer tersebut. Untuk mengatasinya, Ribka melakukan pengobatan gratis melakukan baksos entah satu atau dua kali setahun ke daerah Cicolawing tersebut.

Bagaimana dengan upaya baksos-baksos yang dilakukan Ribka, apakah itu mampu menarik simpatik warga juga? Menurut Abah Abidin, tentu saja salah satu dari tiga upaya menarik simpati pemilih yang digunakan oleh Ribka adalah melakukan baksos. Bagi pemilih seperti dirinya, baksos ini cukup efektif karena tidak membatasi siapapun warga masyarakat untuk datang berobat. Bagaimanapun pengobatan gratis ini akan menanamkan simpati di hati pemilih terkait dengan kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Ribka ke tengah warga. Terkait dengan upaya baksos yang dilakukan oleh Ribka dalam menarik simpati warga. Penjelasan Abah Abidin menunjukkan bahwa tentu saja tidak semua warga yang berobat ke Ribka akan memilih dirinya, tetapi itu tidak menjadi soal bagi Ribka. Pengobatan itu dibuka dan diberikan untuk semua warga tanpa ada sekat-sekat apapun. Ribka ingin membuka seluas-luasnya bagi warga untuk berobat, karena pengobatan itu memang dibuat bukan hanya bagi warga yang potensial menjadi pemilihnya tetapi juga kepada warga yang mungkin tidak memilihnya. Hasilnya terbukti bahwa suara yang diraih oleh Ribka itu cukup besar. Salah satunya adalah dari baksos tersebut. Tetapi baksos bukan yang terbesar, sebagaimana diyakini oleh Abah Abidin,

tetapi dari tiga lini itu secara merata. Penjelasan Abah Abidin di atas setidaknya menunjukkan bahwa aspek ekonomis yang dilakukan oleh Ribka lewat pengobatan gratis diyakini turut memberikan sumbangsih bagi perolehan suaranya dalam pileg.

### **6.5. Bantuan Sosial Sepanjang Waktu**

Pendekatan lain yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen, misalnya Maruarar adalah memberikan bantuan-bantuan dana baik untuk pembangunan sarana fisik seperti bantuan untuk bencana, pembangunan masjid atau mushalla maupun untuk urusan-urusan keagamaan dan kesejahteraan seperti pemberian THR, hewan kurban, pertemuan-pertemuan keagamaan seperti pengajian, Natalan, terkait yang terkait dengan perayaan-perayaan ulang tahun berdirinya sebuah kecamatan atau desa tertentu. Artinya bantuan tersebut tidak hanya diberikan oleh Maruarar kepada masyarakat Kristen di Sukabumi, tetapi oleh Maruarar diberikan secara sama dan merata kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa harus melihat suku atau agamanya. Maruarar memberikan bantuan tersebut baik kepada kalangan Kristen maupun kalangan beragama Islam, tergantung dari siapa yang membutuhkannya. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Ojang demikian,<sup>238</sup>

“Biasanya Bang Ara menyumbang itu bukan hanya ke pihak minoritas yang ada di Subang ini, tapi ke mesjid, termasuk THR, termasuk hewan kurban, beliau itu sering membantu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan misalnya

---

<sup>238</sup> Wawancara dengan Suhandi.

pengajian beliau langsung datang. Karena sentuhan-sentuhan itulah yang dia lakukan. Nah beliau juga kalau kita ada hal-hal yang perlu ada bantuan beliau, beliau tidak berpikir dua kali seribu kali, pasti langsung membantu. Dan intinya beliau ini mau berkorban untuk masyarakat Subang ini.”

Penjelasan Ojang di atas menunjukkan bahwa sedemikian banyaknya bantuan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Maruarar dan semua bantuan tersebut diberitahukan dari Maruarar sehingga warga Subang sudah sangat mengenal dan merasakan kebaikan dan perbuatan-perbuatan konkrit dari Maruarar. Atas kebaikan dan sikapnya yang sering turun langsung memberikan bantuan itu ke masyarakat membuat masyarakat Subang menerima kehadiran Maruarar. Ojang menjelaskannya bagaimana secara konkrit Maruarar memberikan bantuan dan perhatian kepada seluruh warga Subang, dan bantuan itu hampir selalu diberikan secara langsung oleh Maruarar dengan turun langsung ke desa atau kecamatan tujuan. Bantuan-bantuan terkait keagamaan, atau ke masjid dan bantuan-bantuan ke desa atau kecamatan yang diberikan Maruarar tersebut seluruhnya diserahkan proses dan pengelolaannya kepada Ojang. Terkait dengan bantuan tersebut, Ojang menjelaskannya demikian,<sup>239</sup>

“Konkrit misalnya dari agama saja, dia sering membantu menyerahkan beberapa ekor sapi untuk dihibahkan sebagai hewan

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Suhandi.



kurban ada yang di DPC, ada yang di masyarakat, begitu beliau. Dia juga sering membantu bangunan-bangunan masjid yang sedang membangun. Misalnya di Wantilan, dia membantu 10 juta buat masjid, banyak lagi yang lain, semuanya itu saya yang tangani langsung. Untuk kadernya, Bang Ara memberikan seperti seragam pakaian batik. Selain sering bantuan ke bidang keagamaan, bantuan ke masyarakat juga dia sering membantu.”

Selain bantuan untuk pembangunan, Maruarar juga sangat konsern untuk pembinaan kesejahteraan warga. Salah satu diantaranya adalah upaya Maruarar untuk mengajak warga Subang terutama yang di internal PDI Perjuangan untuk menjadi pengusaha, setidaknya untuk bisa menembus level Jakarta, tidak hanya sekedar tingkat Subang. Dan bila berhasil, tentu saja dampak dari bantuan tersebut berpengaruh ke segala lini entah keluarga, sahabat maupun karyawan dari yang dibantu. Ojang menjelaskannya demikian,<sup>240</sup>

“Padahal sulit menembus Subang ini, itu karena di sini kuat Nahdlatul Ulama, kelompok Islamnya itu kuat. Pemimpin itu harus sekeyakinan, makanya prestasi Bang Ara itu bukan prestasi kecil karena bisa menembus Subang.”

---

<sup>240</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Hal yang sama terjadi dikala terjadi bencana alam seperti banjir yang pernah terjadi di Subang, Maruarar tidak pernah tidak hadir secara langsung mengunjungi warga. Dalam waktu sekejap selama masih di daerah Jakarta atau sekitarnya, Maruarar langsung menyempatkan diri untuk datang mengunjungi lokasi kejadian. Akibatnya sosok Maruarar menjadi sangat populer di mata warga, yang oleh Ojang menyebutnya lebih populer daripada dirinya yang seorang bupati. Ojang menjelaskannya demikian,<sup>241</sup>

“Banjir di Subang, dia tidak pernah bilang, “Wah nanti dulu saya masih sibuk”, tidak pernah. Kalau saya telepon, pasti sorenya beliau langsung sudah turun. Dan tidak pernah tidak turun dan kalau ada dia punya, semampunya dia juga pasti berikan bantuan kepada masyarakat. Itu yang terasa oleh masyarakat. Jadi selama dua periode pileg 2004 dan 2009 ini beliau sangat kuat di mata masyarakat.”

Pengakuan Ojang di atas yang sampai membandingkan dirinya sebagai seorang bupati yang kalah pamor dibandingkan sosok Maruarar yang seorang pendatang menunjukkan bagaimana Maruarar bisa diterima dengan sangat luas di kalangan masyarakat Subang. Setidaknya pengakuan di atas menunjukkan bahwa Maruarar memang dengan sangat baik mampu menembus lapisan tertinggi dan lapisan terendah masyarakat Subang, mulai dari bupati sampai dengan penduduk yang tinggal di pedesaan.

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan Suhandi.

Sekilas tentang populasi pendudukan dan gambaran geografis wilayah Subang yang menjadi wilayah yang dimasuki oleh Maruarar terlihat bahwa daerah Subang sebagai daerah perkebunan yang bahkan menjadi pemasok lumbung beras nomor empat untuk tingkat nasional menunjukkan bahwa setidaknya penduduk di wilayah Kabupaten Subang mungkin bisa dikategorikan tergolong sejahtera. Terlihat juga bahwa jalan-jalan di sekitar perkampungan daerah Subang tergolong bagus dan dapat dilalui mobil, setidaknya ketika dilakukan wawancara kepada Haji Didi Supriadi di perkampungan Muliasari, Kelurahan Mundusari.

Penjelasan dari Ojang sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bagaimana Maruarar memberikan bantuan kepada semua warga tanpa melihat suku, agama atau tingkat pendidikannya. Maruarar seolah tampak tidak pernah absen dalam situasi konkrit perputaran roda hidup warga di Kabupaten Subang. Bahkan dalam ulang tahun sebuah desa atau sebuah kecamatan, Maruarar selalu terlibat secara fisik dan memberikan bantuan. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi Maruarar juga menghadirkan dirinya secara langsung ke tengah-tengah warga, baik ketika peristiwa bergembira seperti perayaan ulang tahun desa, kecamatan, atau organisasi lain, saat-saat peristiwa keagamaan, maupun dalam peristiwa duka atau sedih seperti bencana alam. Sedemikian besarnya perhatian dan kehadiran Maruarar di tengah warga Subang, membuat Bupati Subang pun memberikan perbandingan bahwa dirinya sebagai Bupati malah kalah pamor di tengah warga Subang dibandingkan dengan Maruarar yang anggota DPR RI yang bermukim di Jakarta.

## 6.6. Dukungan Birokrasi dan Partai

Pendekatan lain yang digunakan oleh caleg Kristen yakni Maruarar adalah mendekati tokoh lokal di daerah Subang, khususnya kepada pemerintah daerah, yang kebetulan pasangan Bupati dan wakil Bupati dan Ketua DPRD adalah kader-kader PDI Perjuangan. Sangat tampak jelas bahwa dominasi PDI Perjuangan yang ada di Subang kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Maruarar. Baik Maruarar maupun pemerintah Kabupaten Subang saling menguntungkan dan saling mendukung. Kepentingan Maruarar dibantu oleh pemerintah kabupaten, sementara pemerintah kabupaten dibantu oleh Maruarar misalnya dalam memperjuangkan DAK dan DAU nya. Sehingga salah satu mesin politik yang dimanfaatkan secara sangat maksimal oleh maruarar adalah jaringan pemimpin lokal yakni bupati dan wakil bupati Subang.

Ojang Suhandi tidak menolak ketika hal itu dikonfirmasi kepadanya. Penelitian Affan Gaffar di Brobanti Yogyakarta yang menemukan bahwa pemimpin lokal memberi pengaruh signifikan pada pilihan pemilih menjadi sangat tepat untuk dengan pengakuan Ojang dalam penelitian ini yang memberi dukungan kepada Maruarar. Temuan data Affan Gaffar di Brobanti, Yogyakarta menunjukkan hampir 40% responden memilih Golkar karena mengikuti jejak pemimpin mereka, yakni lurah, kepala dukuh, dan lain-lain. Mereka ingin mengidentifikasi diri dengan pemimpin mereka. Peran kepala dukuh sangat besar dalam memobilisasi massa, sebab 22% pemilih Golkar mengatakan mereka diminta untuk itu. Golkar juga diuntungkan karena

diasosiasikan dengan Sultan Yogyakarta, yang adalah ketua Golkar Yogyakarta.

Ketika ditanyakan bagaimana perkenalan Ojang dengan Maruarar dan bagaimana Maruarar yang Batak, Kristen dan tidak tinggal atau besar di Subang ini bisa terpilih di Subang ini, Ojang menjelaskan,<sup>242</sup>

“Kalau saya dengan Bang Ara itu, saya kenal Bang Ara itu sejak saya menjadi ajudan Pak Hidayat, Bupati. Dan dua kali saya membantu beliau dalam pemilihan legislatif, DPR RI 2004 dan 2009 khususnya Bang Ara. Kalau saya melihat Bang Ara ini, dia mampu menguasai lapangan, dan dia mampu dekat dengan figur sentral yang ada di daerah-daerah khususnya di dapil sembilan: Subang ada Pak Hidayat, Sumedang Pak Don, dan Majalengka Pak Trisno. Bang Ara ini diterima oleh masyarakat, itu yang saya lihat di Subang.”

Penjelasan Ojang di atas menunjukkan bahwa kemenangan Maruarar dalam Pileg 2009 dengan raihan persentase suara tertinggi dari seluruh caleg di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas juga dari peran dari pemerintah kabupaten di daerah pemilihannya, yakni: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Ketiga kabupaten ini merupakan basis dari kader PDI Perjuangan dimana bupati dari ketiga kabupaten tersebut adalah kader PDI Perjuangan. Tentu saja ini sangat memudahkan Maruarar untuk maju dan melaksanakan misi politiknya mendapatkan

---

<sup>242</sup> Wawancara dengan Suhandi.

simpati dari rakyat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun dukungan pemerintah setempat sudah sangat besar namun tentu saja usaha pertama dan utama tentu ada dalam diri kader itu sendiri, seperti Maruarar. Karena ada banyak kader partai yang menjadi calon gubernur atau legislatif seperti Maruarar, tetapi tidak mendapatkan kepercayaan rakyat seperti yang dialami oleh Maruarar. Tetapi Maruarar adalah yang paling sering memberi perhatian kepada masyarakat Subang sehingga baik Bupati maupun warga bisa menerima dirinya dengan sangat baik di daerah Subang.

Pendekatan yang dilakukan oleh Maruarar kepada pemerintah lokal untuk mendapatkan dukungan dari warga menjadi sangat tepat dan member dampak yang sangat kuat karena memang tipe kepemimpinan yang berlaku di Subang dimana arahan atau perintah dari pemimpin sangat dipatuhi oleh warga. Sejarah politik kepemimpinan yang ada di Kabupaten Subang sejak zaman sebelum kemerdekaan telah membuat tipe kepemimpinan di Kabupaten Subang berpola pada apa kata pimpinan yang akan diikuti oleh warga. Sejarah politik Kabupaten Subang demikian itu dimulai sejak Subang menjadi jajahan Inggris sebagai daerah perkebunan. Tentang hal ini, Ojang menjelaskan,<sup>243</sup>

“Kebetulan keunggulan Kabupaten Subang ini kan, dulu kita dijajahnya oleh Inggris. Sistemnya kan sistem mandor, kita kan perkebunan ini, jadi bagaimana mandor bagaimana pimpinan kalau kata pimpinan A maka masyarakat itu mudah untuk

---

<sup>243</sup> Wawancara dengan Suhandi.

menjalankan, misalnya, kalau kata pimpinan B, dia sangat mudah untuk diarahkan ke B. Tahun sebelum reformasi, Subang ini mungkin 90 % lebih Golkar. Setelah reformasi kemudian pimpinan Subang ini dari pimpinan partai PDI Perjuangan, semuanya hampir jadi PDI. Itu kalau di Subang.”

Sadar atau tidak, tentu saja upaya yang dilakukan oleh Maruarar dengan pendekatan ke kalangan pemimpin lokal yakni Bupati dan wakil Bupati menjadi sangat efektif untuk menarik simpati warga. Tentu saja harus selalu didasari oleh sikap Maruarar sendiri yang harus menghormati dan menghargai pemerintah setempat di daerah. Tentang hal ini Ojang berujar,<sup>244</sup>

“Bang Ara memanfaatkan momen tersebut dengan bersahabat dengan pimpinan daerah, ketua DPRD, wakil bupati, termasuk dengan mesin-mesin partai yang ada di Kabupaten Subang ini, dan hubungan Bang Ara dengan masyarakat Subang dengan partai ini yang ada di Subang dia bisa memosisikan sebagai bapak, sebagai kakak. Tentang Bang Ara, kalau dia kunjungan ke Subang, dia *sowan* dulu minta izin ke pemerintah daerah, bukan karena saya sebagai kader dari PDI Perjuangan dan Pak Eep juga kader dari PDI Perjuangan lalu beliau manfaatkan, sama

---

<sup>244</sup> Wawancara dengan Suhandi.

sekali bukan! Tapi beliau *sowan* kepada birokrasi. Dan kita sambungkan kepada para kepala desa, kepada para camat, dan mereka sangat *enjoy* bersamaan dengan Bang Ara apabila ada reses kunjungan ke Kabupaten Subang. Itulah barangkali simpatik yang ditimbulkan atau yang dimunculkan Bang Ara di mata masyarakat.”

Dalam mendampingi Maruarar sejak 2004 hingga saat ini, Ojang merasakan bahwa dalam membuat sebuah pertemuan atau sebelum turun ke warga, Maruarar selalu sangat memberi pertimbangan sangat matang terkait permasalahan, data, fakta, analisa, dan kemudian aksi. Menurut Ojang kajiannya cukup ilmiah mengapa melakukan sesuatu perencanaan dan apakah perencanaan itu memberi dampak untuk tujuan yang hendak dicapai. Bahkan untuk perayaan keluarga yang sangat terkait dengan warga sekalipun, Maruarar selalu member pertimbangan yang sangat matang sehingga apa yang dilakukannya tidak menjadi tanpa makna.

Dengan memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah Kabupaten Subang sebagai mesin politik, Maruarar memiliki banyak kemudahan untuk masuk lebih dalam ke kalangan masyarakat termasuk ke kalangan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kelurahan. Baik Bupati dan wakil Bupati maupun Ketua DPRD yang adalah PDI Perjuangan memberikan perhatian yang khusus untuk mendukung Maruarar sehingga bantuan atau dukungan dari Maruarar bisa sampai ke seluruh kalangan warga, baik pengurus partai maupun yang bukan pengurus partai. Ikatan emosional yang



dalam itu terlihat bahwa bahkan kalangan pemerintah daerah kerap memberikan sumbangan kepada warga mengatas namakan Maruarar padahal tidak ada perintah apapun dari Maruarar untuk melakukan hal tersebut.

Selain itu, sikap Maruarar yang bisa bersahabat dengan semua orang tanpa memihak kepada salah satu kelompok menjadikan dirinya bisa diterima oleh siapapun termasuk oleh kalangan para pihak yang bertikai atau berselisih. Karakternya adalah merangkul semua orang, bersahabat dengan semua kalangan, dan selalu berusaha bisa mendekati diri dengan semuanya. Itulah yang membuat mesin politik latin, seperti para kader di bawah pun turut mendukung keterpilihannya

Selain itu, Ojang menjelaskan bahwa Maruarar menjadi sangat member perhatian untuk pembangunan Kabupaten Subang termasuk dalam upaya memperjuangkan kenaikan DAU dan DAK Kabupaten Subang semampunya. Dan upaya atau perjuangan yang dilakukan oleh Maruarar itu diwartakan atau disosialisasikan oleh pemerintah kepada seluruh warga bahwa memang kenaikan anggaran untuk pembangunan Kabupaten Subang karena buah keringat juga dari Maruarar Sirait di DPR RI. Tentang usaha Maruarar ini dijelaskan oleh Ojang demikian,<sup>245</sup>

“Sebagai kalau riilnya, terus terang untuk pemerintahan tidak terhitunglah Bang Ara itu membantu kita, menaikkan DAU dan DAK kita. Sebagai anggota DPR RI khususnya dulu di Tim Anggaran, Bang Ara

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Suhandi.

membantu DAU/DAK kita Kab Subang waktu itu. Kemudian juga ada kebutuhan yang sifatnya spesifik, saya mintanya ke Bang Ara. Dan itu semua mampu dan dapat direalisasikan oleh Bang Ara dan kita umumkan kepada masyarakat bahwa ini adalah bantuan dari perantaranyalah Bang Ara. Masyarakat seperti itu kan mulai jatuh hati. Riil-riilnya kan seperti itu. Bang Ara masuk ke internal partai juga sangat pandai, masuk ke eksternal entah itu ke birokrat entah itu masyarakat juga sangat lihai itu.”

Ketika dikonfirmasi ke Ojang sejak kapan Maruarar dekat ke masyarakat sehingga perolehan suaranya cukup besar, dan sebagai bupati dan wakil bupati apakah memang memfokuskan diri memberikan dukungan ke Maruarar dibanding ke caleg lain, Ojang menjelaskan bahwa memang diantara seluruh anggota DPR RI yang paling memberi perhatian untuk pembangunan dan perkembangan di Subang itu adalah Maruarar satu-satunya. Maruarar tidak pernah menolak ketika diminta untuk datang atau ketika diberitahu sedang ada kemalangan atau bencana banjir, dan setiap kali diminta bantuan untuk memperjuangkan DAU atau DAK di DPR, semampunya Maruarar selalu memperjuangkan. Maka tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten untuk tidak memberikan dukungan kepada orang yang paling memberi perhatian pada pembangunan Kabupaten Subang. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran sangat besar dilakukan oleh para petinggi pemerintahan di tingkat lokal yakni Bupati dan Wakil Bupati yang mengarahkan para birokrasi di wilayahnya untuk

memberi dukungan kepada Maruarar. Lebih dalam tentang dukungan dari tokoh lokal seperti Bupati dan jajarannya untuk memilih Maruarar diungkapkan Ojang yang saat Pileg 2009 tersebut sebagai Wakil Bupati Subang demikian,<sup>246</sup>

“Kalau secara pribadi terus terang, saya, Pak Eep Hidayat, dan seluruh jajaran birokrat mungkin ada instruksi-instruksi khususlah walaupun itu tidak semua menjadi sebuah keharusan karena PNS dinyatakan harus netral. Tapi kita instruksikan, kalau layak Bang Ara dijual di Kecamatan A, di Desa A, silahkan jual Bang Ara, tapi kalau tidak layak, ya jangan, kan begitu! Kita memberikan alternative pilihan Bang Ara dan TB Ashanuddin tapi ternyata suara Bang Aralah yang paling dominan. Dan intinya tadi harus sinkron dengan kepala daerah, kalau sudah sinkron dengan kepala daerah itu sudah sangat luar biasa. Memang peraihan suara Bang Ara sangat besar signifikan itu tahun 2009. Bang Ara di Subang ini suara yang terbesar di Subang dibandingkan dengan dua kabupaten tadi yakni Sumedang dan Majalengka.”

Penjelasan Ojang di atas menunjukkan bahwa memang tidak bisa ditutupi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Subang yang semuanya adalah kader PDI Perjuangan turut

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan Suhandi.

membantu mensosialisasikan untuk keterpilihan Maruarar, khususnya dalam Pileg 2009. Bahkan ada arahan-arahan khusus kepada para jajaran birokrat walaupun tidak sangat tegas, tetapi tentu saja juga memberi makna bahwa pemerintah mengharapkan orang seperti Maruarar tetap bisa terpilih menjadi anggota DPR RI karena sumbangan, bantuan, perhatian, pendekatan, dan sosok Maruarar yang bisa menyatu dengan warga Subang.

Bila membandingkannya dengan data penelitian Affan Gaffar dari Brobanti Yogyakarta tampak bahwa faktor kepemimpinan dan perilaku memilih menunjukkan bahwa pemilih lebih terikat pada pejabat desa akan lebih memilih partai pemerintah (Golkar) daripada mereka terikat pada pemimpin agama yang akan mendukung partai Islam (PPP). Bila orientasi sosio-religijs dijadikan faktor kontrol dalam analisis ini, sekitar 86% responden Abangan yang terikat pada pejabat desa memilih Golkar, dan hampir setengah jumlah Santri dari kategori yang sama memilih PPP. Partai pemerintah tidak pernah dapat menembus komunitas Santri di desa ini, karena itu Golkar tidak pernah menang. Di Sukaramai yang pemimpin formal-nya kuat berpengaruh dan mendukung Golkar, partai-partai oposisi selalu kalah. Konteks dukungan Bupati Subang dan jajarannya untuk keterpilihan Maruarar sejajar dengan temuan Affan Gaffar. Tentu ada hubungan emosionalitas yang tidak terjadi begitu saja antara Maruarar dengan Bupati dan Wakil Bupati Subang sehingga dukungan kepada Maruarar tersebut terjadi. Menurut Ojang, hubungan itu sudah terjalin sejak tahun 2003.

Ojang menuturkan bagaimana dirinya sejak 2003 dan menjelang Pileg 2004 mendampingi Maruarar ketika Ojang sendiri masih menjadi ajudannnya Bupati Eep yang bahkan

tidak pulang dalam satu atau dua minggu karena turun ke tengah warga. Dan hubungan kedekatan itulah yang senantiasa terpelihara diantara mereka sebagai pemerintah daerah dengan Maruarar hingga saat ini. Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana Maruarar bekerja sangat keras jauh sebelum Pemilu untuk mendekati diri dengan warga masyarakat pemilihnya, termasuk dengan melibatkan kalangan tokoh lokal yakni Bupati. Selain itu, dalam sistem Pemilu 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyak, muncul kesepakatan tak tertulis diantara para caleg di Jawa Barat untuk saling mensosialisasikan seluruh caleg PDI Perjuangan kepada seluruh warga sesuai dengan nomor urut masing-masing di berbagai tingkatan entah caleg di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Seseorang yang di nomor urutan ketiga akan mensosialisasikan caleg lain di level lain yang berada di nomor urutan ketiga, demikian seterusnya. Menurut Ojang, sistem yang berlaku di PDI Perjuangan daerah Subang ini mempermudah untuk mensosialisasikan Maruarar karena itu berarti setidaknya semua caleg yang berada di nomor urut dua terkait dapil yang terkait akan saling mensosialisasikan termasuk tentang Maruarar

Penjelasan Ojang Suhandi Bupati Sumedang di atas menunjukkan bahwa memang kalangan birokrasi turut membantu keterpilihan Maruarar. Ada alasan sangat kuat bagi pemerintah Kabupaten Subang untuk memenangkan Maruarar yakni selain kemampuan Maruarar yang mampu mengambil simpati warga karena dekat dengan budaya dan agama masyarakat di Subang, Maruarar juga mampu meraih simpati pemerintah Kabupaten Subang dengan turut memperjuangkan pembangunan-pembangunan untuk Subang baik

pembangunan lewat kenaikan anggaran DAU dan DAK di DPR RI maupun sumbangan-sumbangan yang berasal dari uang pribadi Maruarar.

Dari uraian pengakuan tiga orang pemilih yang menjadi pendukung caleg beragama Kristen di atas terlihat jelas bahwa alasan pemilih beragama Muslim menentukan pilihannya kepada caleg beragama Kristen dilandasi oleh sikap dan pendekatan yang dilakukan oleh caleg yang bersangkutan. Apa yang dilakukan oleh para caleg Kristen ke tengah-tengah warga menjadi alasan pemilih yang diwawancarai tersebut menggalang dukungan kepada caleg Kristen tersebut. Sekat-sekat atas nama agama, suku, tempat tinggal dan sekat-sekat yang lain untuk konteks penelitian ini tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan pemilih. Tetapi hal lain yang juga sama pentingnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh para caleg Kristen tersebut sesuai dengan budaya lokal dan tata krama yang hidup di daerah pemilihan caleg bersangkutan, termasuk pemberian kebutuhan-kebutuhan pragmatis berjangka pendek yang dibutuhkan

secara konkrit oleh warga yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya setempat.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN: BANGGA MENJADI INDONESIA**

Bagian penutup dari seluruh rangkaian tulisan ini yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua ini kami sampaikan bahwa rasa bangga menjadi Indonesia semakin bergelora dengan belajar berdemokrasi dari daerah-daerah berbasis Islam yang kuat seperti halnya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten dan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Kebanggaan itu kami ungkapkan dengan sejumlah analisa dan pendapat pribadi terkait keseluruhan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam ketiga buku ini.

#### **1. Belajar Demokrasi dari Basis Islam**

Kesimpulan terkait keterwakilan politik Kristen dalam penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan pokok penelitian, yakni: bagaimana proses penentuan calon legislatif di PDI Perjuangan dan Partai Golkar pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 untuk masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT); dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen untuk keterpilihan ketika mereka dicalonkan di basis-basis Islam yang kuat. Faktanya bahwa persentase jumlah anggota DPR RI beragama Kristen yakni 14,90% pada Pemilu 2004 dan 12,86% pada Pemilu 2009 jauh melampaui persentasi penduduk beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik sebesar 8,7%. Keterpilihan para caleg Kristen tersebut sebahagian besar justru berasal dari basis beragama Islam. Bahkan sejumlah orang Kristen mendominasi perolehan suara di basis Muslim tersebut yakni di Jawa Barat oleh Maruarar



Sirait dari PDI Perjuangan di dapil Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka yang jauh melampaui perolehan suara semua caleg manapun di dapil tersebut bahkan hampir tiga kali lipat lebih besar dari perolehan suara TB Hasanuddin yang asli penduduk dari dapil tersebut, dan perolehan suara Enggartiasto Lukito dari Partai Golkar yang sangat unggul dari seluruh caleg di dapil Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Keterpilihan caleg-caleg Kristen di DPR RI pada Pileg 1999, 2004, dan 2009 sangat terkait dengan proses penyusunan DCS di PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang memiliki persamaan dimana kedua partai menggunakan standar-standar yang sudah diatur dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing partai. Perbedaannya terletak pada kewenangan Ketua Umum. Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki kewenangan istimewa menentukan caleg masuk DCS/DCT atau tidak. Ketua Umum Partai Golkar memiliki kewenangan 10% persen daftar calon di DCS/DCT. Saran dan masukan Ketua Umum Partai Golkar hanya bersifat usulan untuk dipertimbangkan. Dua perbedaan itu bisa dilihat ketika penentuan nomor urut misalnya. Ribka sebagai pengurus di DPD Provinsi Jawa Barat pada Pileg 2004 menurut aturan mestinya menjadi caleg nomor urut satu di DCT, ternyata kesempatan itu diambil oleh caleg lain yang bukan dari DPP. Oleh Ribka, pengalaman ini dampak dari campur tangan dari pihak DPP yang dia sendiri tidak mampu melawan. Berbeda dengan pengalaman Enggartiasto Lukito dari Partai Golkar pada Pileg 2004 dimana dia berhasil melawan rencana kebijakan/keputusan DPP ketika dalam proses penentuan di tingkat DCS dan DCT sempat muncul

usulan di rapat pleno DPP untuk menempatkan bakal caleg lain di urutan satu dan Enggartiasto di urutan dua, atau pilihan lain Enggartiasto pindah ke Dapil Papua di nomor urut satu. Dengan jabatan sebagai pengurus di DPP dan lamanya menjadi anggota partai, maka Enggartiasto harus menjadi caleg di nomor urut satu bila mengikuti aturan partai.

Alasan paling utama dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar untuk penempatan calegnya adalah sejauh mana tingkat penerimaan dari masyarakat pemilih terhadap caleg bersangkutan. Standar-standar yang sudah digariskan oleh kedua partai tersebut menunjukkan bahwa sangat dimungkinkan caleg yang bersangkutan berbeda suku dan agama dengan warga pemilih sepanjang caleg yang bersangkutan diterima secara luas di kalangan pemilih. Dan ini merupakan pintu masuk bagi caleg beragama Kristen dan tidak sama suku dengan pemilih untuk ditempatkan di basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Maka tepat pandangan dari Alan Ware yang melihat bahwa sosok atau figur caleg menjadi penentu utama keterpilihan seseorang termasuk untuk mendapatkan dukungan suara bagi partai bersangkutan. Penempatan figur caleg menjadi yang terpenting bagi Alan Ware mengalahkan ideologi partai di level terendah dan program partai di level sedikit lebih baik dari ideologi partai.

Dari segi strategi terlihat bahwa caleg Kristen memanfaatkan betul tradisi agama dan budaya lokal serta kepentingan praksis berjangka pendek yang dibutuhkan langsung oleh pemilih sebagai pintu masuk. Pandangan Clifford Geertz tentang politik primordialisme menjadi signifikan dalam konteks ini ketika tradisi agama dan budaya

lokal dimanfaatkan caleg Kristen walaupun dalam penelitian ini politik primordialisme tidak menjadi satu-satunya alasan bagi pemilih. Maruarar Sirait selain menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari dengan warga, dia juga fasih memberi salam dalam tradisi agama Islam baik di awal sambutan maupun di penutup sebuah sambutan. Dalam konteks budaya lokal, Maruarar sangat cerdas menempatkan dirinya dengan mengenakan pakaian adat khas budaya setempat, misalnya pakaian khas masyarakat Subang yang mengenakan baju hitam dan kampret sebagai tutup kepala.

Sebahagian dari tradisi agama tersebut dipraktekkan misalnya sebutan “*Assalaamu’alaikum Wr.Wb.*” oleh Maruarar yang mungkin malah lebih fasih dari kebanyakan orang Islam sendiri. Tradisi itu dianggap sebagai alat mendekatkan diri bahwa saya menghormati warga, saya juga ada bersama warga. Dengan pengucapan dan pendekatan tradisi itu, warga menjadi senang. *Assalaamu’alaikum itu Wr.Wb* adalah symbol agama yang dipergunakan untuk politik, untuk kampanye dan warga terkesima dengan itu. Ada dua paham terkait pemilih, yakni *pertama*, pemilih memilih berdasarkan identifikasi partai (*party identification*). Dalam konteks ini pemilih akan memilih caleg-caleg karena melihat partai pengusungnya, tentu sangat berbeda jika Maruarar Sirait dan Enggartiasto misalnya diusung oleh PDS yang tentu saja tidak akan dipilih yang didominasi pemilih beragama Islam. Pemilih memilih berdasarkan pragmatisme dimana pilihan warga didasarkan pada apa pekerjaan orang itu yang berpotensi untuk warga, apa yang dilakukan orang itu yang bermanfaat untuk warga. Partai atau caleg bersangkutan melaksanakan programnya dan warga merasa beruntung

mendapatkan program tersebut sehingga memilih partai atau caleg bersangkutan, sebuah prinsip yang satu memberi dan yang lain menerima dengan memberikan penghargaan kepada si pemberi (*take and give*).

Dari segi pemilih terlihat bahwa ketertarikan pemilih kepada praktek tradisi agama dan budaya lokal yang diperankan oleh caleg Kristen diikuti dengan apa yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen kepada masyarakat dalam jangka pendek yang konkrit dibutuhkan warga. Jadi ada *personal context*, tradisi agama dan budaya lokal yang ketahuan dan terlihat langsung ketika caleg Kristen berhadapan langsung secara fisik dengan warga. Karena belum tentu caleg Kristen lain yang melakukan pendekatan konkrit serupa itu tapi kalau tidak santun, tidak memegang tradisinya. Maruarar sebagai seorang suku Batak terlihat sosok yang halus bertutur dan bisa berbahasa Sunda. Kerap terlihat di pertemuan-pertemuan resmi Maruarar itu berbaju koko seperti orang Sunda.

Pendekatan tradisi agama dan kebudayaan lokal itu juga dipraktikkan oleh Enggartiasto dengan sangat konsisten dengan menghentikan seluruh kegiatan ketika bunyi azan sudah tiba dari musholla atau masjid. Itu adalah penghormatan kepada pemeluk agama Islam sehingga semua peserta yang hadir dalam setiap pertemuan akan bertepuk tangan karena kebijakannya tersebut. Bahkan warga sering menyebutnya sebagai Haji Enggar. Sementara Theodorus Jacob Koekerits dari PDI Perjuangan (dapil Kab Tulung Agung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kab Kediri, Kab Blitar Jawa Timur) berbaur dengan warga dalam pertemuan-pertemuan atau hajatan kampong/desa, misalnya ikut acara *melek'an* berbaur dengan

warga yang acaranya baru mulai dari malam jam 23.00 an sampai pagi dini hari.

Isu lain yang digunakan adalah pendekatan ke tokoh lokal oleh Maruarar, Enggartiasto, Markus Nari, dan Theodorus. Maruarar melakukan pendekatan kepada tokoh agama di daerah pemilihannya. Maruarar diterima dengan sangat baik oleh pemimpin-pemimpin pesantren, dan hampir seluruh pesantren didatangi oleh Maruarar walaupun tidak sedang masa berkampanye. Enggartiasto akrab bergaul dengan kalangan keluarga Keraton Cirebon yang memiliki pengaruh terhadap kalangan warga terutama yang berada di lingkaran keraton. Theodorus di Jawa Timur mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemerintahan di lokal seperti bupati, walikota, sekda. Sementara Markus di Sulawesi Selatan melakukan pendekatan kepada para pastor dan pendeta dengan mendapatkan 48 buah IMB mendirikan Gereja, dan pendekatan ke pemimpin-pemimpin HMI Kota Makassar sehingga pengamanan Malam Natal dan Hari Raya Paskah justru dari generasi muda HMI.

Bakti sosial pengobatan gratis dilakukan oleh Ribka Tjiptaning (dapil Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) yang seorang dokter. Setiap bulan Ribka mendatangi delapan titik di tingkat Kecamatan (tingkat ranting PDI Perjuangan) untuk melakukan pengobatan gratis dari total 52 kecamatan. Ribka juga mendirikan rumah sakit Pelita Rakyat di Lembur Situ, Sukabumi yang terbuka untuk seluruh lapisan dan gratis. Juga pembangunan fisik sarana umum yang dilakukan oleh Enggartiasto di Jawa Barat dan Theodorus di Jawa Timur. Perhatian terbesar Enggartiasto adalah memastikan jalan raya Pantura tetap terawat layak untuk digunakan terutama

menjelang lebaran atau akhir tahun. Selain itu Enggartiasto membangun pompa air untuk dua desa yang selama ini bertikai bahkan korban nyawa ketika musim kemarau panjang tiba. Sementara pembangunan sarana ibadah untuk masjid, musholla, dan gereja, selain dilakukan oleh Enggartiasto juga dilakukan oleh Theodorus termasuk bantuan untuk mendirikan pendidikan seperti madrasah. Theodorus mendapat dukungan yang besar di Tulung Agung dengan menggandeng dua kyai besar dengan tetap memperhatikan kebutuhan madrasah di sana.

Dari pihak pemilih terlihat bahwa pemilih tidak emosional dalam menentukan pilihan atau emosionalnya itu tidak begitu besar, tapi bukan juga *rational choice*. Konkritnya itu adalah perilaku sesuai dengan yang tidak bertentangan dengan Islam, dan kedua kegiatan-kegiatan mereka dalam kampanye yang dekat dengan rakyat, yang membantu rakyat, dengan baksos, pelayanan kesehatan gratis. Dua hal ini menjadi penentu utama mengapa pemilih Islam menjatuhkan pilihan ke caleg Kristen. Selain mempraktekkan tradisi agama dan budaya lokal, ada juga perilaku konkrit lain yang ditunjukkan oleh caleg Kristen yakni kepentingan jangka pendek, pragmatisme sempit yang melihat manfaat bagi mereka dalam jangka pendek, dalam waktu pendek ini apa yang mereka bisa rasakan. Oleh Ojang Suhandi misalnya tentang perilaku sosio kultural yang ditunjukkan Maruarar menyebutnya dalam kategori *katara, karasa, dan karampa*. Ide ini dalam pandangan Clifford Geertz merupakan politik primordial yang mestinya warga yang seagama dan dari satu suku memilih caleg yang seagama dan satu suku. Tetapi dalam penelitian ini justru sebaliknya, isu tradisi agama dan

suku/budaya lokal itu dipakai oleh caleg-caleg Kristen untuk keterpilihannya.

Pemilih beragama Islam mendukung caleg Kristen berdasarkan sikap santun caleg Kristen mengikuti tradisi agama Islam dan budaya lokal, sesama korban Orde Baru, dan kepentingan pragmatis ekonomis berjangka pendek. Silatuhrohmi Maruarar menyentuh nilai-nilai keagamaan yang dijunjung sangat tinggi oleh masyarakat Sunda. Menurut Haji Didi Supriadi, Maruarar mampu bertutur sapa secara fasih baik dalam bahasa agama maupun dalam tutur kata budaya Sunda dalam menyapa warga dan para tokoh yang ada di daerah pemilihan dalam bahasa yang sehari-hari digunakan oleh warga. Pengalaman Haji Didi, Maruarar menyempatkan diri mengunjungi warga yang terbaring di rumah sakit bahkan di luar jam bezuk sekalipun dini hari, misalnya jam 01.00 wib. Maruarar pun ikut dalam resepsi-resepsi, dalam pengajian-pengajian walaupun hanya duduk di belakang. Pemilih juga memilih caleg Kristen berdasarkan perasaan sebagai sesama korban Orde Baru yang diperlakukan selama puluhan tahun diperlakukan tidak adil. Abah Abidin memilih dan malah menggalang dukungan untuk Ribka Tjiptaning karena Ribka adalah sosok yang sangat mengagumkan dimana sebagai korban Orde Baru, Ribka berani memberi pengakuan diri secara terbuka kepada publik bahwa dia adalah korban Orde Baru terutama lewat bukunya "Aku Bangga Jadi Anak PKI" pada awal reformasi 1998.

Perilaku konkrit caleg-caleg Kristen tersebut menghasilkan persentase keterwakilan politik orang Kristen di DPR RI jauh melebihi persentase jumlah penduduk beragama Kristen di Indonesia. Persentase penduduk beragama Kristen

(Katolik dan Protestan) di Indonesia adalah 8,71%; sementara persentase DPR RI beragama Kristen hasil Pileg 1999 adalah 16,48%; pada Pileg 2004 berjumlah 14,90 %, dan pada Pileg 2009 adalah sejumlah 12,86%. Selain itu keterpilihan orang-orang Kristen tersebut justru berasal dari basis-basis Islam yang kuat, seperti: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Dan keterpilihan orang-orang Kristen justru karena diusung oleh partai-partai nasionalis, termasuk oleh sejumlah partai agama Islam, seperti PAN dan PKB. Keterwakilan lewat partai Kristen cenderung tidak signifikan, misalnya Pileg 1999 hanya 1,30% (6 kursi), pada Pileg 2004 menjadi 2,36% (13 kursi), dan Pileg 2009 sama sekali tidak ada (0 %). Pandangan Alan Ware sangat signifikan dalam penelitian ini dimana aspek personal dan figur dari caleg Kristen yang membuat mereka lebih dikenal, lebih diterima dan bahkan mendapat dukungan suara sangat besar untuk terpilih menjadi anggota DPR. Pendekatan seluas-luasnya dan sejauh-jauhnya ke dalam warga masyarakat secara terus menerus secara konsisten yang tidak bertentangan dengan agama dan suku dari pemilih membuat caleg Kristen bisa diterima dengan sangat luas di kalangan pemilih.

## **2. Menuju Demokrasi Indonesia Semakin Matang**

Keterwakilan politik Kristen dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat penerimaan warga pemilih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen. Penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor ketokohan caleg bersangkutan. Faktor ketokohan, keteladanan, dan



pendekatan terus menerus kepada warga pemilih menjadi faktor paling dominan yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen sehingga mereka terpilih di basis Islam yang kuat. Memang benar bahwa di sejumlah daerah seperti daerah pemilihannya Maruarar adalah basis PDI Perjuangan. Tetapi keunggulan perolehan suara caleg atas nama Maruarar Sirait yang jauh melampaui perolehan suara caleg manapun dari dapil tersebut menunjukkan bahwa selain faktor nama besar PDI Perjuangan, ada faktor lain yang sangat menonjol yakni faktor sosok caleg bersangkutan. Ketokohan menjadi faktor kunci dari seluruh caleg yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Penelitian ini melihat bahwa ternyata aspek agama dan suku bukan variabel utama sebagai ukuran, namun masih ada variabel lain yaitu tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Sentiment primordial sebagaimana dimaksudkan oleh Clifford Geertz mendapat limitasi yang sangat jelas dalam penelitian ini, yakni bahwa aspek primordial tidak lagi menjadi satu-satunya penentu misalnya konsep Santri dan Abangan dalam konsep *socio cultural*. Sebagaimana teori yang berkembang yang juga banyak dianut adalah teori aliran dimana politik aliran berpengaruh dalam Pemilu karena terkait dengan apa yang dianut oleh pemilih dalam hal agama dan kultur/budaya. mempengaruhi pilihan pemilih. Konsep politik aliran itu masih tetap berpengaruh sampai sekarang, sebagaimana diuraikan Affan Gaffar, William Liddle, dan Saiful Mujani. Meskipun politik aliran itu berkurang di Indonesia akhir-akhir ini dibandingkan Pemilu tahun 1955, tetapi politik aliran tetap penting dalam menentukan pilihan pemilih.

Sentimen primordial itu tetap ada dan sangat terasa dalam proses keterpilihan caleg-caleg Kristen yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Ribka Tjiptaning dipersoalkan seorang anggota DPP karena memberi nama Pelita Rakyat dengan lambang lilin pada sebuah rumah sakit gratisnya di Sukabumi. Enggartiasto diberikan pilihan di caleg nomor urut dua atau ditempatkan menjadi caleg di dapil Papua. Dua aspek primordial, yakni suku dan agama tetap penting dimana kedua aspek itu melekat dalam diri setiap orang. Kita tidak bisa menyingkirkan nilai-nilai primordial dalam diri kita. Faktor Islam sebagai faktor agama dan faktor suku tetap menjadi penting dalam strategi yang dilakukan oleh caleg-caleg Kristen. Terpilihnya Maruarar bukan karena orang Sunda tidak peduli lagi dengan etnis, dengan agama, tentu saja tidak. Menangnya Maruarar bukan karena orang itu tidak melihat agama, atau Ribka bukan karena sudah melupakan agama, tetapi isu-isu primordial tersebut justru digunakan oleh caleg-caleg Kristen untuk memenangkan dirinya. Tradisi agama dan budaya lokal justru dimanfaatkan oleh para caleg Kristen. Dalam konteks penelitian ini, maka kalau diajukan pertanyaan, faktor apakah dari kedua faktor di atas yang paling menentukan, apakah aspek figur atau sosok dari caleg bersangkutan yang paling dominan dalam aspek keterpilihan caleg Kristen, maka penelitian ini membuktikan bahwa kedua aspek tersebut sama-sama dominan, tetapi yang paling dominan adalah aspek figur atau sosok dari caleg yang bersangkutan.

### **3. Budaya Kekeluargaan: Hormati Kultur Agama dan Budaya Lokal**

Keterwakilan politik Kristen yang menjadi pokok bahasan penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Alan Ware dan teori Clifford Geertz. Pandangan Alan Ware berbicara tentang partai politik dimana peranan partai dalam rekrutmen sosok kandidat yang diusung jauh lebih penting daripada sekedar menjual ideologi partai bahkan lebih penting dari mengandalkan perwujudan program partai politik. Sementara Clifford Geertz berbicara tentang ikatan primordialisme dalam politik yang beberapa pandangannya mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa untuk konteks Indonesia dua ikatan primordialisme terpenting adalah suku dan agama.

Pandangan Alan Ware terkait pengaruh besar ideologi dalam memetakan pengelompokan-pengelompokan pemilih signifikan dalam penelitian ini dimana ideologi partai telah menimbulkan perbedaan yang sangat menyolok sehingga pemilih pun terkotak-kotak oleh ideologi yang menjadi sebuah pembeda seperti Partai Peronist di Argentina. Teori ini signifikan ketika terkait dengan PDI Perjuangan yang memperlihatkan sosoknya sebagai partai yang ideologis dengan mengusung sosok Bung Karno dengan figur kharismatis ketua umum Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang tegas memiliki sikap politik sebagai oposisi dan selalu mengkritisi pemerintah. Karakter ideologis PDI Perjuangan ini membuat partai ini memiliki basis mengakar di kalangan pemilihnya seperti di Dapil 9 Jawa Barat (Subang, Sumedang, Majalengka). Sebaliknya teori ini tidak signifikan untuk Partai Golkar karena partai ini bukan partai ideologis

tetapi justru mengandalkan figur-figur kadernya yang memang sangat kuat dan sudah terdidik sejak sangat lama di masa awal Orde Baru tahun 1971. Masyarakat luas melihat Partai Golkar sebagai partai yang kuat dalam kaderisasi karena memiliki kader-kader tangguh yang sudah sangat mengakar di kalangan warga pemilih. Karena bila sekedar mengandalkan nama besar Partai Golkar, sudah hampir pasti partai ini segera terkubur di masa awal reformasi karena menjadi partai pembela di masa Orde Baru. Namun walaupun PDI Perjuangan merupakan partai ideologis dan Partai Golkar lebih merupakan partai kader, tetapi dalam praktek politiknya kedua partai ini bisa menjadi sama dalam sebuah kebijakan tertentu proses penentuan caleg.

Pandangan lain Alan Ware yang signifikan dengan temuan kajian ini adalah bahwa ideologi sebuah partai bisa tidak tampak, karena populisme dan sifat nasionalisme jauh lebih penting yang diwujudkan dalam program partai. Bukan lagi penonjolan terhadap ideologi antara kiri dan kanan yang terutama. Untuk konteks kajian ini pandangan yang disampaikan ini signifikan dalam Pileg 2004 dimana program partai menjadi lebih tepat karena partai menjadi sangat kuat dan dominan. Tetapi dalam Pileg 2009 teori Alan Ware ini tidak signifikan dalam penelitian ini karena program partai tidak lagi menjadi sangat penting. Sebaliknya program individu jauh lebih penting untuk meraih suara dan dukungan pemilih kepada caleg yang bersangkutan. Sistem Pemilu proporsional terbuka yang digunakan dalam Pileg 2009 mengutamakan sejauh mana calon-calon yang diusung menjadi sosok yang populis dan nasionalis yang bisa diterima oleh pemilih.

Terkait dengan seleksi kandidat dan kepemimpinan, Alan Ware menjelaskan bahwa kepemimpinan di internal partai tidak terlepas dalam proses menentukan salah satu seleksi untuk pencalonan. Namun seleksi tersebut walaupun mengedepankan kepemimpinan seorang calon di tingkat kepengurusan partai tetap harus menimbang sejauh mana calon dimaksud mendapat tingkat penerimaan ketika dijual di tengah pemilih untuk dipilih oleh masyarakat. Ini sejalan dengan temuan, bahwa memang sejumlah anggota DPR RI beragama Kristen yang diwawancarai itu adalah pemimpin di partainya dan dia memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi di tengah masyarakat, sehingga ketika dijual ke tengah masyarakat, caleg Kristen tersebut mendulang suara signifikan untuk keterpilihannya menjadi anggota DPR RI.

Keterpilihan caleg karena faktor sosok/figur caleg dengan tindakan pragmatis yang konkrit dari caleg yang bersangkutan sebagaimana sudah dijelaskan dengan teori Alan Ware di atas, tidak bisa dinafikan juga bahwa keterpilihan caleg yang berbeda suku dan agama dengan warga pemilih menunjukkan sifat nasionalisme sebagaimana dimaksudkan George McTurner Kahin sehingga tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan apakah seseorang itu berasal dari suku atau agama tertentu. Prinsip dasar nasionalisme adalah bagaimana menghadirkan kembali semangat para pendiri bangsa (*founding fathers*) yakni bahwa kemerdekaan dan pembentukan menjadi negara Indonesia tidak berlandaskan kehebatan salah satu suku atau salah satu agama tertentu. Terkait dengan nasionalisme tersebut, Burhan Magenda menegaskan peran penting dari partai dalam mengusung ideologinya untuk menjaga dan merawat terus

jiwa nasionalisme tersebut. PDI Perjuangan dan Partai Golkar mengusung syarat penempatan para calegnya bukan didasarkan terutama pada aspek primordialisme suku dan primordialisme agama, tetapi justru oleh sejauh mana para caleg dimaksud diterima secara luas oleh masyarakat pemilihnya.

Peran ketokohan dari caleg Kristen tersebut bila dikaitkan dengan politik kehadiran (*politics of presence*) dari Anne Philips terlihat bahwa teori ini untuk sebahagian benar yakni bahwa kelompok-kelompok minoritas dan terpinggirkan<sup>247</sup> harus diberi peluang yang setara untuk mendapatkan atau duduk di jabatan-jabatan publik, yang salah satu diantaranya menjadi anggota DPR RI. Kesetaraan itu ditemukan dalam proses penentuan caleg di PDI Perjuangan dan Partai Golkar, dimana orang-orang beragama Kristen memiliki kesempatan yang sama dengan seluruh warga untuk mencalonkan diri. Tetapi untuk sebahagian teori ini tidak tepat ketika Anne Philips menegaskan perlunya kelompok-kelompok minoritas membela sendiri apa yang menjadi kebutuhan politik mereka, untuk konteks orang-orang Kristen Indonesia dalam penelitian ini justru tidak sesuai. Sebagaimana diutarakan oleh Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan bahwa kepentingan Kristen justru cenderung disuarakan dan dibela oleh para politisi beragama Islam seperti dirinya sendiri dan Eva Kusuma Sundari. Hal yang

---

<sup>247</sup> Orang-orang Kristen di masa awal reformasi merasa dirinya sebagai kelompok yang terpinggirkan dan minoritas karena sejumlah hak-hak politiknya tidak dibela oleh Negara, terutama dalam ketenteraman hidup beragama yang tidak dijamin oleh Negara. Inilah alasan terpokok mengapa para politisi Kristen sejak Pileg 1999 hingga saat ini masih terus mengharapkan perlunya dihidupkan partai bernafaskan Kristen.

sama dialami oleh politisi partai Golkar Enggartiasto dan Markus Nari, dimana orang-orang Islam justru menjadi pembela kepentingan ketika kalangan Kristen mengalami persoalan dan kesulitan.

Lalu bagaimana penelitian ini dikaitkan dengan teori utama yang lain yakni pandangan Clifford Geertz tentang ikatan primordial dimana oleh Maswadi Rauf ikatan primordial untuk konteks Indonesia adalah primordialisme agama dan primordialisme suku? Dalam temuan ini, pandangan primordialisme Geertz tersebut tidak berlaku ketika caleg-caleg DPR RI beragama Kristen entah Batak atau Jawa atau China terpilih dari daerah pemilihan Sunda dan yang basis beragama Islam, dua primordialisme sebagaimana dimaksudkan oleh Maswadi Rauf. Wawancara mendalam penelitian ini menemukan bahwa caleg beragama Kristen diterima dengan sangat baik di tengah pemilih beragama yang mayoritas Islam. Pendekatan terus menerus tanpa henti, kebaikan hati lewat tindakan pembangunan fisik konkrit, tutur sapa dan silaturahmi yang dilakukan para caleg Kristen telah menyentuh hati dan perasaan para pemilih. Bahkan untuk Ribka Tjiptaning, ikatan primordialisme itu sama sekali tidak dilandaskan oleh beberapa hal sebagaimana disebutkan Geertz di atas, tetapi justru karena sama-sama sebagai korban Orde Baru. Ini jenis ikatan emosional yang tidak terdapat dari jenis ciri primordialisme Geertz.

Artinya selain aspek agama dan budaya, ada aspek lain yang juga sama pentingnya yakni tindakan pragmatis terkait kebutuhan konkrit warga yang mereka dapatkan dari para caleg beragama Kristen. Upaya dan konsistensi caleg Kristen dalam merawat hubungan dengan pemilihnya lewat

kebutuhan konkrit pemilih baik secara fisik maupun non fisik telah menyentuh secara langsung kepada kehidupan konkrit warga. Dua kebutuhan ini yakni fisik dan non fisik yang kontinu diberikan oleh para caleg Kristen untuk memelihara pemilihnya membuat temuan penelitian ini berbeda dari isu-isu primordial yang disampaikan Geertz. Caleg-caleg Kristen di fokus penelitian ini justru yang menjadi caleg dan terpilih di basis Islam kuat. Bahkan Maruarar Sirait menjadi caleg yang meraih perolehan suara terbesar kedua dan Enggartiasto suara terbesar keempat dari seluruh calon legislatif di seluruh Provinsi Jawa Barat pada pileg 2009.

Namun untuk sebahagian lain, teori Geertz cukup signifikan ketika hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa agama tidak menjadi penting dalam penentuan pilihan politik para pemilih. Tentu saja agama dan budaya lokal setempat tetap menjadi sangat penting. Terlihat dari pendekatan kebudayaan dan pendekatan keagamaan yang justru ditunjukkan oleh caleg-caleg beragama Kristen di dapil mereka. Artinya agama dan budaya masih tetap sangat penting. Bahkan oleh sejumlah pemilih seolah tidak percaya bahwa Maruarar itu bukan beragama Islam karena begitu fasihnya menyampaikan salam dalam kultur sapaan Islam. Padahal isu agama dan suku sempat digunakan oleh lawan politik menjatuhkan caleg-caleg beragama Kristen sebagaimana diakui oleh Haji Didi Supriadi dari Subang namun tidak mempengaruhi pilihan pemilih kepada caleg-caleg beragama Kristen.

Sejalan dengan teori primordialisme yang dikemukakan Geertz, pandangan Affan Gaffar mengatakan bahwa keterpilihan seorang caleg lebih ditentukan oleh dua



hal, yakni: masih melekatnya politik aliran di kalangan pemilih dan seberapa besar orang tua mendukung salah satu partai. Tentu saja teori Affan Gaffar ini tepat untuk sebahagian namun untuk sebahagian besar tidak signifikan dengan hasil penelitian ini. Teori Gaffar tepat untuk konteks Pileg 2004 dimana keterwakilan Kristen di DPR RI karena nomor urut mereka di DCT yang membuat mereka terpilih, bukan karena perolehan suara mereka yang memadai. Misalnya, Theodorus Koekerits pada Pileg 2004 hanya mendapatkan suara sekitar 6.000 an suara, suatu perolehan yang mustahil meloloskannya menjadi anggota DPR karena perolehan suara itu teramat sedikit. Hal ini dialami oleh Maruarar dan Ribka Tjiptaning yang menang dan menjadi anggota DPR karena nomor urut mereka di DCT.

Namun keraguan Affan Gaffar bahwa orang-orang yang bukan berasal dari daerah bersangkutan tidak akan memiliki hati yang penuh untuk memperjuangkan daerah pemilihannya sungguh tidak signifikan dengan hasil penelitian ini. Justru ketika orang-orang Kristen yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan daerah pemilihannya, malah sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan dan kebutuhan daerah pemilihannya darimana dia menjadi anggota DPR. Terbukti bahwa dalam Pileg 2009, para anggota DPR RI yang terpilih itu justru menuai perolehan suara sangat signifikan di dapilnya walaupun sesungguhnya mereka bukan tokoh, bukan putera daerah, bukan tinggal, dan penduduk asli dari daerah pemilihannya sebagaimana raihan suara Maruarar dan Enggartiasto. Selain itu sangat jelas terlihat juga bahwa keterpilihan caleg-caleg Kristen tidak bisa dilepaskan dari dari figur tokoh lokal yang mendukung caleg-

caleg Kristen. Sebagaimana diungkapkan oleh James Scott tentang teori patron-klien, dimana figur patron yang memberikan kemudahan, kebaikan, dan lahan yang tepat untuk para anak buah atau warga di lingkungannya akan selalu didukung oleh warga sebagai klien yang menerima dan menikmati kebaikan patron itu. Selain kebaikan yang langsung diberikan oleh caleg Kristen, figur tokoh lokal seperti bupati, wakil bupati, Ketua DPRD, Patih Keraton, tokoh agama, tokoh adat setempat menjadi sangat berpengaruh terhadap keterpilihan caleg Kristen. Maka sangat tepat teori James Scott dalam penelitian ini dimana warga pemilih menjadi klien dari para figur atau patron dari caleg yang bersangkutan, termasuk figur dari tokoh-tokoh lokal menjadi patron yang diikuti oleh para pemilih sebagai klien

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

## Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan S. "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955-2009: sebuah Kajian Historis-teologis" *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 9 No 2, Oktober 2009.
- Beitz, Charles R. *Political Equality: An Essay in Democratic Theory*. Princeton. 1989.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- DPP PDS. *Buku Panduan Partai Damai Sejahtera: dalam rangka mewujudkan tata Kelola Partai Politik yang baik (good Political Party governance 2010-2015)*. Jakarta: Sekretariat DPP PDS, 2010.
- Feith, Herbert & Lance Castle. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988).
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (terj.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Furnivall, J.S.. *Netherlands India: Study of Plural Economy*. Cambridge: at the Unversity Press, New York: The macmillan company, 1944.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 1999.
- Gaffar, Afan. *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Geertz, Clifford (ed). *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York: The Free Press, 1963.

- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press, 1980.
- “Hj. Meilani Leimena Suharli”. Diakses pada 15 November 2012 dari [www.mpr.go.id/blog/hj-meilani-leimena-suharli](http://www.mpr.go.id/blog/hj-meilani-leimena-suharli).
- Haris, Syamsuddin. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Irsyam, Mahrus & Lili Romli. *Menggugat Partai Politik: seri buku politik*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- James C Scott (2009) “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” dalam *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1, Mar., 1972.
- Jacques Leclerc: “Pengantar,” *Antara Negara dan Revolusi*. Diakses pada 23 Juli 2011 dari <http://members.fortunecity.com/sejarah-indonesia/sjarifuddin.htm>.
- Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952.
- Kahin, George McTurner. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Indonesia*, (alih bahasa Nin Bakdi Soemanto). Jakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1955. Judul asli, George McTurner Kahin, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

- Kasimo. *Dasar Perdjuaan P.K.R.I-A.M.K.R.I: Pengantar Kata*. Jogjakarta: Pertjetakan “ Canisius”, Tahun 1948.
- “Kepustakaan Indonesia,” diakses pada 20 November 2012 dari [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet\\_personnel](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel).
- Klinken, Gerry van. *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, . Yogyakarta: LKiS, Januari 2010.
- Komisi Pemilihan Umum. “Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU”. diakses pada 5 Mei 2004, dari <http://partai.info/Pemilu2004/hasilPemilulegislatif.php>
- “Komisi Pemilihan Umum”. Diakses pada 30 Juli 2011 dari [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&ask=view&id=40](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&ask=view&id=40).
- Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven, 1984.
- LITBANG KOMPAS. *Partai-partai Politik Indonesia: ideologi, strategi dan program*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999.
- Lumbangaol, Hotman Jonathan. “Pejuang Pembebasan Amir Syarifuddin Harahap, Perdana Menteri RI yang Dilupakan”. Diakses pada 15 Desember 2008 dari <http://www.kabarindonesia.com>.
- Magenda, Burhan Djabir. “The Integration in a Complex Indonesia.” *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001.
- Magenda, Burhan. "In Memoriam: Prof George McTurnan Kahin," *Harian KOMPAS*, Rabu, 2 Februari 2000.

- Budiardjo, Miriam. "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik", *Jurnal Ilmu Politik* No.1, 1986.
- Nafsar, Moh.. "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan: kasus Surabaya" dalam *Jurnal Analisis CSIS* tahun ke 26 no II tahun 1997.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- "Partai Kristen Indonesia," diakses pada 27 Juli 2011 dari [http://id.gerejaindonesia/Partai Kristen Indonesia](http://id.gerejaindonesia/Partai_Kristen_Indonesia).
- "Partai Politik di Indonesia." Diakses pada 21 Januari 2011 dari [http://id.gerejaindonesia.org/politik/Partai politik di Indonesia](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Partai_politik_di_Indonesia).
- PDKB Kasih Demi Bangsa. *Panggilan Membangun Bangsa dan Negara. Dasar Pedoman dan Arah Keterlibatan Politik Kristen* (Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009).
- "Pemilu 1999". Diakses pada 1 Februari, 2011 dari <http://www.kbriwina.at/Pemilu/sejarahPemilu/Pemilu1999/index.html>
- "Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955". Diakses pada 29 Juli 2011 dari [http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955](http://id.gerejaindonesia.org/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_Konstituante_Indonesia_1955).
- Philips, Anne. *The Politics Of Presence*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation*. Berkeley, 1967.

- Pusat Reformasi Pemilu Cetro. *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009*. Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2005.
- Pusat Reformasi Pemilu Cetro. *Almanak Anggota Parlemen RI 2009-2014* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2010).
- Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik: sebuah peninjauan teoritis*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2000.
- Rozi, Syafuan (editor) dkk.. *Problematik Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan. Kasus Gerakan Pendukung Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: LIPI Press, 2009) diakses pada Selasa 13 November 2012 dari <http://www.politik.lipi.go.id>.
- Saka, Vincent. *Pesan dan Kesan: untuk mereka yang mau mengikuti Pak Kasimo*. Jakarta: [tanpa penerbit] 1987.
- Sekretariat Negara, *Risalah sidang Badan Penyelidik-Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, Republik Indonesia, 1992.
- “Sejarah Indonesia (1966-1998)”. Diakses pada 21 Januari 2021.  
[http://id.gerejaindonesia.org/politik/Sejarah\\_Indonesia](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Sejarah_Indonesia) .
- Shiraishi, Takashi. *An Age in Motion. Popular Radicalism in Java 1919-1926*. Cornell University Press, 1990.
- Sihoptang, Kasdin (et al). *Politik Katolik Politik Kebajikan Bersama: sejarah dan refleksi Keterlibatan orang-orang Katolik dalam politik Indoensia*. Jakarta: ISKA, PPE Atmajaya dan Penerbit Obor 2008-



- Sudarsono, Juwono (ed). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Sulaeman, "Pemikiran Demokrasi Moh Hatta,". Disertasi, Universitas Indonesia, 2009.
- Steenbrink, Karel. *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, jilid 2. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- "Susunan Kabinet Pembangunan I". Diakses pada 13 Februari 2011 dari [http://id.gerejaindonesia.org/politik/Kabinet\\_Pembangunan\\_I#Susunan\\_Kabinet](http://id.gerejaindonesia.org/politik/Kabinet_Pembangunan_I#Susunan_Kabinet).
- Tim Wartawan Kompas dan Redaksi, *IJ Kasimo: Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- USAID. *Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif*. USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Ware, Alan. *Political Parties and Party Systems*. United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996.
- Zainuddin, A. R.. *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*. Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2004.

## INDEKS

### A

ABRI, xvi, 113, 114, 115  
Agama, vi, viii, 4, 8, 118, 119, 123,  
197, 203  
Alan Ware, xii, 23, 25, 26, 27, 28, 30,  
31, 33, 34, 35, 36, 118, 121, 130,  
152, 153, 168, 174, 200, 206  
AMKRI, xvi  
Anggaran Dasar, xvi  
ART, xvi

### B

Babel, xvi  
Badan Pemenangan Pemilu, xvi  
BAGUNA, xvi  
Bappilu, xvi  
BPUPKI, xvi, 64, 86, 87, 88, 89, 263  
Bung Karno, 108, 127, 128, 129, 131,  
137, 226

### C

Caleg, xvi, 9, 121, 125, 130, 139,  
143, 144, 152, 153, 159, 161, 170,  
175, 176, 220, 236

Calon, viii, xvi  
*Christelijk Ethische Partij*, xvi, 76,  
77, 95  
*Christelijke Studenten Vereeniging*,  
xvi, 86  
Clifford Geertz, xii, 23, 25, 42, 43,  
45, 50, 51, 158, 179, 191, 195,  
229, 235

### D

DAK, xvi, 251, 255, 256, 259  
Dapil, ix, xvi, 19, 122, 130, 137, 139,  
140, 141, 144, 153, 154, 161, 166,  
170, 173, 175, 194, 220, 236, 237  
DAU, xvi, 251, 255, 256, 259  
DCS, viii, xvi, 196  
DCT, viii, x, xii, xvi, 11, 21, 23, 147,  
153, 196  
DKI Jakarta, vi, ix, 2, 19  
DPC, xvi, 248  
DPD, xvi, 9, 133, 264  
DPP, x, xvi, 21, 60, 103, 111, 128,  
148, 154, 163, 194, 211, 260  
DPR RI, iv, vii, viii, ix, x, xi, xii,  
xvii, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
38, 69, 115, 118, 120, 121, 122,  
123, 132, 134, 137, 138, 139, 140,  
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,  
148, 152, 153, 154, 162, 163, 164,  
166, 167, 170, 172, 173, 176, 185,  
186, 188, 192, 194, 197, 200, 203,  
204, 207, 208, 214, 218, 228, 229,  
231, 232, 235, 242, 250, 251, 255,  
256, 257, 258, 259

DPRD, xvii, 9, 12, 67, 166, 170, 250,  
253, 254, 257, 258, 264

## E

Enggartiaso, viii, 19, 152, 153, 154,  
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,  
162, 163, 164, 172, 186, 188, 189,  
190, 191

## F

Figur, xiii, 24, 26, 33, 206

## G

G 30/S, xvii, 198, 230  
GAPI, xvii, 102  
Gereja, 5, 81, 98, 101, 114, 149, 168,  
169, 171, 180, 187, 191  
GMKI, xvii, 86, 155, 158, 191  
Golkar, viii, x, xii, xvii, 1, 2, 3, 9, 11,  
13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 36,

52, 53, 54, 55, 56, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115, 116, 117, 125,  
129, 130, 139, 144, 152, 153, 154,  
156, 159, 161, 163, 166, 170, 175,  
187, 190, 202, 220, 226, 227, 236,  
239, 251, 253, 257

## H

HMI, xvii, 156, 169, 170, 191

HTI, 116

## I

Ideologi, xii, 16, 23, 26, 27, 28, 35,  
264, 1

*Indisch Katholieke Partij*, xvii, 77, 95

Islam, iii, iv, vi, vii, ix, xiii, xvii, 1, 2,  
4, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 42,  
50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 64, 66,  
72, 73, 78, 79, 91, 99, 102, 104,  
106, 107, 109, 110, 112, 113, 115,  
116, 118, 119, 120, 121, 124, 133,  
138, 146, 148, 150, 151, 152, 153,  
155, 158, 159, 162, 163, 164, 165,  
166, 168, 169, 170, 171, 172, 173,  
177, 179, 181, 182, 186, 190, 194,  
195, 196, 198, 199, 200, 201, 203,  
204, 205, 207, 208, 209, 210, 214,  
216, 219, 221, 228, 229, 230, 241,  
242, 247, 257, 264

## **J**

Jabar, xvii, 123, 125, 129, 130, 153,  
161, 173, 175, 220, 236  
Jatim, xvii, 125, 129, 137, 139, 141,  
144, 194

## **K**

Kabupaten, ix, xvi, 20, 23, 122, 133,  
150, 154, 162, 165, 172, 173, 176,  
179, 183, 187, 198, 210, 218, 219,  
226, 227, 230, 233, 234, 237, 243,  
249, 250, 252, 253, 254, 255, 256,  
257, 258  
Ketum, xvii  
Kristen, i, iii, iv, vi, viii, ix, x, xi, xii,  
xiii, xvi, xvii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 38,  
42, 50, 62, 67, 69, 70, 76, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91,  
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,  
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 114, 115, 117, 118,  
119, 120, 121, 122, 123, 124, 131,  
132, 133, 137, 138, 143, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153, 155, 157,  
158, 159, 162, 163, 164, 165, 166,  
167, 168, 169, 171, 172, 173, 177,  
178, 180, 181, 182, 186, 191, 194,  
195, 196, 197, 198, 199, 200, 203,  
204, 210, 212, 213, 214, 216, 219,

228, 229, 235, 241, 242, 246, 250,  
251, 259, 260, 261, 262, 1

KTA, xvii

Kultur, 118

## **L**

Legislatif, iv, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15,  
55, 239  
LIPI, xvii, 77, 95, 116, 127, 128, 263  
Lokal, 118, 159, 197, 203

## **M**

Maruarar Sirait, 122, 148, 152, 193,  
195, 203, 216, 227, 255  
Maswadi Rauf, 19, 23, 25, 43, 47, 49,  
50, 136, 158, 220, 221, 225  
Megawati Soekarnoputri, 131, 178,  
226  
MMI, 116  
Muslim, viii, xii, 18, 23, 55, 78, 81,  
120, 121, 122, 137, 150, 151, 158,  
163, 167, 169, 177, 188, 191, 194,  
197, 210, 213, 259  
Muslimin Indonesia, xvii, 109, 112

## **N**

NU, xvii, 112, 133, 181, 192, 210

## O

Orde Baru, xvii, 4, 25, 50, 67, 108,  
111, 112, 113, 114, 115, 197, 198,  
201, 203, 226, 227, 228, 229, 230,  
231, 232, 233, 234, 238, 239, 240,  
242, 260  
Orde Lama, xvii, 67, 97

## P

PAKORBA, xvii  
PAN, xvii, 10, 11, 13, 15, 16, 115,  
125, 129, 130, 139, 144, 170, 176,  
220  
Parkindo, xvii, 4, 67, 97, 98, 102,  
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111,  
113  
Parpol, xvii  
PDI, viii, ix, x, xi, xii, xvii, 2, 3, 4, 9,  
11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,  
25, 31, 36, 54, 108, 110, 111, 112,  
114, 115, 117, 121, 122, 123, 125,  
128, 129, 130, 131, 132, 133, 137,  
138, 139, 140, 141, 144, 146, 147,  
148, 149, 152, 153, 159, 161, 163,  
173, 175, 178, 179, 180, 183, 194,  
206, 211, 215, 220, 226, 227, 228,  
233, 234, 236, 242, 248, 250, 252,  
253, 254, 257, 258  
PDS, xi, xvii, 9, 10, 11, 12, 18, 21,  
22, 260

Pemilu, iii, iv, viii, x, xiii, xvi, xviii,  
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,  
19, 20, 21, 24, 25, 30, 51, 52, 54,  
55, 60, 67, 87, 97, 99, 100, 103,  
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111,  
113, 115, 119, 120, 123, 124, 130,  
132, 134, 135, 137, 138, 139, 140,  
141, 144, 146, 147, 152, 153, 156,  
157, 159, 161, 170, 172, 175, 177,  
178, 181, 184, 185, 188, 189, 191,  
195, 199, 201, 220, 227, 236, 239,  
244, 258, 261, 263, 1  
Pileg, iv, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xviii,  
3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 50, 120,  
122, 123, 124, 125, 129, 132, 133,  
134, 137, 138, 140, 141, 142, 145,  
146, 147, 148, 152, 154, 162, 165,  
166, 167, 170, 172, 173, 176, 189,  
195, 207, 208, 211, 214, 216, 227,  
230, 233, 240, 252, 256, 257, 258  
PKB, xviii, 11, 13, 15, 16, 115, 125,  
129, 130, 139, 141, 144, 153, 161,  
192, 210  
PKI, xviii, 66, 75, 106, 173, 174, 178,  
198, 201, 203, 226, 229, 230, 231,  
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239,  
241, 242  
PKRI, xviii, 103  
PMKRI, xviii, 191

Politik, iii, iv, vi, xvii, xviii, 4, 5, 16,  
17, 19, 21, 22, 23, 33, 35, 42, 43,  
48, 60, 70, 71, 72, 76, 85, 90, 94,  
97, 98, 102, 104, 105, 108, 109,  
111, 112, 130, 139, 144, 153, 161,  
170, 175, 220, 229, 230, 236, 260,  
261, 262, 263, 264, 1  
PPKD, xviii, 94, 102  
PPKI, xviii, 87, 88, 89, 102, 103, 263  
PPP, xviii, 14, 54, 55, 56, 108, 110,  
111, 112, 113, 125, 129, 130, 154,  
176, 221, 236, 257, 260  
Proporsional, x, 21, 152  
Provinsi, 1, 2, 3, 122, 133, 140, 148,  
166, 167, 170, 176, 195, 218, 252,  
258

## R

Rakerdasus, xviii  
Reformasi, iv, 1, 3, 4, 9, 17, 20, 115,  
139, 140, 227, 230, 231, 232, 263  
Ribka Tjiptaning, viii, ix, 19, 147,  
148, 152, 172, 173, 175, 183, 229,  
235, 236

## S

Santri, 51, 52, 54, 56, 201, 214, 257  
Sekjen, xviii, 111  
Sistem, iii, vi, x, 9, 21, 152, 1  
Soeharto, 108, 113, 241

Soekarno, 54, 64, 66, 75, 84, 86, 87,  
101, 103, 226  
Strategi, 118, 119, 120, 152, 159,  
172, 199  
Sulsel, xviii, 125, 129, 170  
Sumut, xviii, 12  
Sunda, viii, 124, 126, 135, 158, 173,  
179, 181, 204, 209, 214, 216, 218,  
219, 221, 222, 223, 224, 226, 227

## T

Tapol, xviii  
Terpilih, 130, 139, 144, 153, 161,  
170, 175, 220, 236  
Theodorus Yacob Koekerits, 122  
TPS, xviii, 176, 214, 215, 239

## U

UUD, xviii, 88, 89, 113

## V

VOC, xvii

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. OSBIN SAMOSIR, M.Si,** lahir di kampung kecil Onanrunggu di Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba, Sumatera Utara Jumat 4 Mei 1973. Osbin menempuh pendidikan Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Onanrunggu Pulau Samosir (1980-1986) dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Bakti Mulia Onanrunggu Pulau Samosir (1986-1989), dan lulus dari SMA Seminari Menengah *Christus Sacerdos* Pematangsiantar Sumatera Utara tahun 1993.

Osbin meraih Sarjana Filsafat (S-1) dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan pada Juni 1999. Osbin menyelesaikan Magister (S-2) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Salemba Jakarta lulus Februari 2004, dan menyelesaikan Doktor (S-3) dari Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada Januari 2013.

Saat ini Osbin Samosir menjadi dosen di Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta dan telah menghasilkan sejumlah karya yang dimuat di jurnal nasional, internasional maupun buku. Jurnal internasional yang telah terbit: *Indonesian Democracy Comes When the Kingdom System Has Strong Roots: Serious Problems Leading to Simultaneous National Elections in*

2024; *Criticizing Indonesian Initiatives In The Junta Military Coup-D'etat In Myanmar: A Study Of Political Communications; Democracy, Political Identity, and The Fate Of Minority Politics: Reflections Towards Indonesia's National Concurrent Elections In 2024; Looking For The Form of Indonesian Democracy: Study of Pancasila Ideology Towards Concurrent Elections In 2024; Political Communication Of Christian Legislative Candidates In Islamic-Based Voters: A Study Of The Legislative General Election In Indonesia Reformed Era Of 1999-2019.* Sedangkan Jurnal Nasional: *Warga Negara Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024.* Ada pun buku-bukunya yang telah terbit di antaranya: *Partai Politik pada Abad Ke-21: Pengertian, Fungsi dan Praktik di Indonesia (2022); Buku Materi Pembelajaran Sistem Perwakilan Politik; Sistem Perwakilan Politik di Era Modern (2021),* dan sejumlah karya lain..